

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN



RPJPD 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BURU SELATAN

BAPPELITBANG 2024



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
Dan
BUPATI BURU SELATAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan Tata Ruang Wlayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah
11. Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Arah Kebijakan adalah Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud penetapan RPJPD adalah penetapan dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD.
- (1) Tujuan penetapan RPJPD adalah penetapan dokumen rencana Pembangunan daerah untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar-ruang, antar-waktu, serta antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.

dokumen rencana pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

BAB III RPJPD Pasal 4

- (1) Bupati melalui Kepala Bappelitbang Menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I: Pendahuluan.

BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB III: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

BAB IV: Visi dan Misi Daerah

BAB V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

BAB VI: Penutup

- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Bupati melalui Bappelitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
 - c. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
 - d. konsistensi antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043; dan
 - e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 Nomor 48, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI BURU SELATAN,



LA HAMIDI

Diundangkan di Namrole
pada tanggal: 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,



HADI LONGA, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI
MALUKU: 1/43/2025

ATAS
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
Pasal 9
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Buru Selatan dan strategi untuk mencapainya, RPJPD disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Maluku.

Dalam pelaksanaannya, RPJP 2025-2045 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Perangkat Daerah.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari 7 Bab dan 8 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

jelas Pasal 2

Cukup

jelas Pasal 3

Cukup

jelas

Pasal 4

Cukup

jelas Pasal 5

Cukup

jelas Pasal 6

Cukup

jelas Pasal 7

Cukup

jelas Pasal 8

Cukup jelas



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen RPJPD ini merupakan arah kebijakan strategis yang berfungsi sebagai pedoman bagi pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Buru Selatan memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini menggunakan lima pendekatan strategis, yaitu teknokratis, partisipatif, politis, *top-down*, dan *bottom-up*, untuk memastikan proses perumusan yang komprehensif dan inklusif.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan mengusung visi jangka panjang, yaitu "Buru Selatan Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan". Proses penyusunan RPJPD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan agar setiap program dan kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara konsisten dan terarah.

RPJPD ini mengintegrasikan berbagai potensi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Buru Selatan, baik di sektor ekonomi, sosial, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, RPJPD ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJPD ini, baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tenaga ahli maupun masyarakat luas. Kami berharap, dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buru Selatan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, semoga RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 ini dapat membawa manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah ini.

Namrole, 13 Agustus 2025





DAFTAR ISI

Nomor	Judul	Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		vii
DAFTAR LAMPIRAN		ix
BAB 1 PENDAHULUAN		1 - 1
1.1	Latar Belakang	1 - 1
1.2	Dasar Hukum	1 - 3
1.3	Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	1 - 5
1.4	Maksud dan Tujuan	1 - 7
1.4.1	Maksud	1 - 7
1.4.2	Tujuan.....	1 - 7
1.5	Sistematika Penulisan	1 - 7
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		2 - 1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	2 - 1
2.1.1	Geografi	2 - 1
2.1.2	Aspek Demografi	2 - 17
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 - 22
2.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	2 - 32
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	2 - 32
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	2 - 39
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	2 - 39
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi.....	2 - 40
2.4	Aspek Pelayanan Umum	2 - 41
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2009-2029	2 - 44
2.5.1	Capaian Pembangunan	2 - 44
2.5.2	Rekomendasi	2 - 51
2.5.3	Kinerja RTRW dan Rencana Sektor dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda)	2 - 56



2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 2 -	60
2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2 -.....	60
2.6.2. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana 2 -.....	67
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 2 -.....	74
2.7.1 Rencana Kawasan Strategis 2 -.....	76
2.7.2 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Buru Selatan 2 -.....	79
2.7.3 Rencana Kawasan Pariwisata 2 -	84
2.7.4 Rencana Kawasan Industri 2 -	85
 BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	3 - 1
3.1 Permasalahan 3 -	1
3.2 Isu Strategis 3 -.....	19
 BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH	4 - 1
4.1 Visi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 4 -.....	1
4.2 Sasaran Visi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 4 -.....	2
4.3. Misi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 4 -.....	4
 BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	5 - 1
5.1 Arah Kebijakan 5 -.....	1
5.2 Sasaran Pokok 5 -	4
5.2.1. Arah Pembangunan Daerah 5 -.....	6
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah 5 -.....	7
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan 5 -	18
 BAB 6 PENUTUP	6 - 1



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1.	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, 2023.....	2 - 1
2.2.	Kondisi Suhu Udara, Kelembaban Udara, Lama Penyinaran dan Kecepatan Angin di Wilayah Buru Selatan Tahun 2023.....	2 - 6
2.3.	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 (Ha)	2 - 7
2.4.	Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	2 - 10
2.5.	Dasar Pertimbangan Penetapan Fungsi Kota dalam Pusat – Pusat Permukiman di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023.....	2 - 11
2.6.	Indeks Risiko Bencana per ancaman Kabupaten Buru Selatan 2023	2 - 14
2.7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023.....	2 - 17
2.8.	Laju dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023.....	2 - 17
2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023.....	2 - 18
2.10.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku Tahun 2021-2022	2 - 27
2.11.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Maluku Tahun 2019-2020.....	2 - 30
2.12.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Maluku Tahun 2021-2022 .	2 - 31
2.13.	Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	2 - 32
2.14.	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Buru Selatan (ha).....	2 - 33
2.15.	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Buru Selatan (ton)	2 - 33
2.16.	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Buru Selatan (ha).....	2 - 34
2.17.	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Buru Selatan (ton).	2 - 34
2.18.	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran (Kuintal) Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 34
2.19.	Jumlah Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Buru Selatan (ekor)	2 - 35
2.20.	Produksi Hasil Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan (ton) 2022	2 - 36
2.21.	Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023.....	2 - 39



2.22.	Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	2 - 40
2.23.	Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Investasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023	2 - 41
2.24.	Indikator-Indikator Pelayanan Umum Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 41
2.25.	Visi, Misi dan Sasaran Pokok.....	2 - 44
2.26.	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	2 - 48
2.27.	Posisi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Buru Selatan 2022	2 - 49
2.28.	Parameter demografi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045	2 - 61
2.29.	Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025 -2045	2 - 63
2.30.	Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025 -2045 menurut klasifikasi kelompok umur.....	2 - 65
2.31.	Proyeksi sarana pemerintahan dan pelayanan umum berbasis jumlah penduduk.....	2 - 69
2.32.	Proyeksi sarana pendidikan dan pembelajaran berbasis jumlah penduduk	2 - 70
2.33.	Proyeksi sarana kesehatan berbasis jumlah penduduk	2 - 71
2.34.	Proyeksi sarana peribadatan berbasis jumlah penduduk.....	2 - 73
2.35.	Proyeksi sarana perdagangan dan niaga berbasis jumlah penduduk.....	2 - 73
2.36.	Proyeksi sarana kebudayaan dan rekreasi berbasis jumlah penduduk.....	2 - 73
2.37.	Proyeksi sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga berbasis jumlah penduduk	2 - 74
2.38.	Rencana Persebaran Hutan Produksi di Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 80
2.39.	Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah di Kabupaten Buru Selatan	2 - 81
2.40.	Rencana Kawasan Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 81
2.41.	Rencana Peruntukan Lahan KEK Kabupaten Buru Selatan	2 - 86
2.42.	Rencana Kawasan Pengembangan Industri dan Pengembangan Industri Rakyat di Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 86
3.1.	Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal Kab. Buru Selatan Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2045	3 - 36
4.1.	Lima Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2045 Disandingkan dengan Visi Indonesia dan Maluku 2045.....	4 - 3
5.1.	Misi Pembangunan Buru Selatan 2025-2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan.....	5 - 4
5.2.	Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.....	5 - 6
5.3.	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.....	5 - 7
5.4.	Indikator Utama Pembangunan Kesehatan Berkualitas, Merata dan Adaptif	5 - 18



5.5.	Indikator Utama Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Merata dan Mudah diakses	5 - 18
5.6.	Indikator Utama Pembangunan Perlindungan Sosial Yang Inklusif dan Adaptif	5 - 19
5.7.	Indikator Utama Pembangunan Pemanfaatan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	5 - 19
5.8.	Indikator Utama Pembangunan Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau.....	5 - 20
5.9.	Indikator Utama Pembangunan Transformasi Digital	5 - 20
5.10.	Indikator Utama Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5 - 20
5.11.	Indikator Utama Pembangunan Mengembangkan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	5 - 20
5.12.	Indikator Utama Pembangunan Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas, Responsif dan Adaptif	5 - 21
5.13.	Indikator Utama Pembangunan Pembangunan Hukum Berkeadilan, Ketahanan dan Keamanan Daerah Tangguh Serta Demokrasi Substansial	5 - 21
5.14.	Indikator Utama Pembangunan Menciptakan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	5 - 21
5.15.	Indikator Utama Pembangunan Ketangguhan Diplomasi	5 - 21
5.16.	Indikator Utama Pembangunan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	5 - 22
5.17.	Indikator Utama Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender.....	5 - 22
5.18.	Indikator Utama Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas	5 - 22
5.19.	Indikator Utama Pembangunan Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	5 - 22
5.20.	Indikator Utama Pembangunan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	5 - 23



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1.	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	1 - 6
2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023.....	2 - 2
2.2.	Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	2 - 6
2.3.	Peta Tutupan Lahan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023	2 - 8
2.4.	Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043	2 - 9
2.5.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 13
2.6.	Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 14
2.7.	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 15
2.8.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan	2 - 15
2.9.	Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 16
2.10.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 -2023	2 - 22
2.11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku (Persen)	2 - 23
2.12.	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Buru Selatan dan Provinsi Maluku Tahun 2019 -2023.....	2 - 23
2.13.	Perkembangan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2023.....	2 - 24
2.14.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2023.....	2 - 24
2.15.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2023.....	2 - 25
2.16.	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Tahun 2023	2 - 26
2.17.	Cakupan Keluarga Sehat di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 - 2023.....	2 - 27
2.18.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022.....	2 - 28
2.19.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2023	2 - 29
2.20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2023	2 - 29
2.21.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2023	2 - 30
2.22.	Potensi Pertanian dan Perikanan Unggulan di Kabupaten Buru Selatan	2 - 37



2.23.	Potensi Lahan Sawah dan LP2B untuk Ketahanan Pangan Lokal di Kabupaten Buru Selatan	2 - 37
2.24.	Pengembangan Sektor Pertanian Gugus Pulau di Provinsi Maluku.....	2 - 38
2.25.	Sebaran Potensi Mineral Logam dan Batuan di Kabupaten Buru Selatan	2 - 38
2.26.	Capaian Indikator Misi 1 RPJPD 2009-2029 Kabupaten Buru Selatan	2 - 45
2.27.	Capaian Indikator Misi 2 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029	2 - 46
2.28.	Capaian Indikator Misi 3 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029.....	2 - 47
2.29.	Capaian Indikator Misi 4 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029	2 - 47
2.30.	Capaian Indikator Misi 5 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029	2 - 48
2.31.	Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	2 - 56
2.32.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buru Selatan	2 - 57
2.33.	Trend Jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045.....	2 - 60
2.34.	Trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045	2 - 61
2.35.	Piramida penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025-2045	2 - 64
2.36.	Transisi demografi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045	2 - 66
2.37.	Proyeksi kepadatan penduduk (jiwa/ha) 2025-2045.....	2 - 68
2.38.	Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan	2 - 74
2.39.	Peta Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan 2015-2035	2 - 76
2.40.	Peta Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten Buru Selatan 2015-2035	2 - 76
2.41.	Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Buru Selatan	2 - 79
2.42.	Peta Rencana Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Buru Selatan	2 - 80
2.43.	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Buru Selatan.....	2 - 82
2.44.	Peta Areal Pencadangan Kawasan Transmigrasi di Desa Fogi.....	2 - 83
2.45.	Peta Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan 2015- 2035	2 - 84
2.46.	Site Plan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Buru Selatan	2 - 87
3.1.	Model Pendekatan Hexahelix dalam penanganan lingkungan hidup berkelanjutan di Buru Selatan	3 - 16



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Arah Kebijakan Tranformasi Daerah Untuk Masing-Masing Tahapan Pembangunan Buru Selatan 2025-2045	L - 1
2.	Keterkaitan Misi, Arah Pembangunan Daerah, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Tranformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan Buru Selatan 2025-2045	L - 48

BAB 1. PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 4 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan dilakukan utamanya untuk menetapkan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Atas dasar tersebut, maka RPJPD menjadi dokumen yang lebih bersifat visioner dan memuat hal-hal dasar yang bersifat substansial. Kedua substansi ini sangat penting, karena akan memberi jaminan kekeluasaan yang cukup untuk penyusunan dokumen pembangunan lain, utamanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan.

Indonesia akan memasuki dua dekade baru dalam pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2025 – 2045, sehingga telah dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah pendekatan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJPN. Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan melakukan penyelarasan dokumen RPJPD-nya dengan nasional. Visi dari dokumen RPJPN yang diberi nama Visi Indonesia Emas 2045, yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, oleh Provinsi Maluku telah dilakukan penyelarasan, dengan visi Emas Maluku 2045, yaitu “Maluku Maju, Inklusif, Berkelanjutan dan Berbasis Sumber Daya Kelautan”. Penataan kembali berbagai langkah-langkah pembangunan jangka panjang kedepan yang dituangkan dalam dua dokumen tersebut difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, didukung dengan penguatan landasan dan kerangka pembangunan yang menjamin terciptanya kondisi dan iklim implementasi yang kondusif dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 tahun. Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya. Tahapan penyusunan diawali dengan melakukan persiapan, menyiapkan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan PERDA. Tahapan dan perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan daerah, yaitu: 1) Dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan 2) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan daerah dan nasional.

Atas dasar amanat peraturan dan perundang-undangan tersebut serta memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Buru Selatan dan perkembangan dinamika pembangunan global, nasional dan provinsi, maka diperlukan berbagai upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan



berfokus pada bagaimana mewujudkan kemajuan, kesejahteraan masyarakat,



kesinambungan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, RPJPD yang telah tersusun menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) serta menjadi arah bagi kepala daerah terpilih dalam merumuskan visi dan misi 5 (lima) tahunan. RPJPD yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah ini mengikat seluruh komponen masyarakat Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat betapa penting dan strategisnya kedudukan dokumen RPJPD, maka ketiadaannya akan menimbulkan ketidak jelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan di masa 20 tahun mendatang. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD tidak akan ada titik pijakannya serta sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan, lebih-lebih jika pada setiap 5 tahun terjadi pergantian kepala daerah.

Mengacu dari peraturan dan perundang-undangan yang ada serta dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi, maka substansi dari RPJPD Kabupaten Buru Selatan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan. Visi menggambarkan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa misi dan dijabarkan pentahapannya melalui berbagai strategi serta dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan perumusan dan penyusunan RPJPD dilakukan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Titik berat pendekatan teknokratis adalah pada metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini digunakan untuk: 1) Evaluasi kinerja pembangunan daerah periode yang lalu berdasarkan data dan informasi, 2) Melakukan telaah mengenai dokumen RTRW, 3) Melakukan evaluasi mengenai gambaran umum kondisi daerah, 4) Menyusun perumusan permasalahan pembangunan, 5) Menelaah RPJPN, RPJPD Provinsi serta RPJPD Kabupaten/Kota sebelumnya, 6) Analisis isu-isu strategis pembangunan, dan 7) Perumusan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD.

Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipatif dari semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk penjabaran dari pendekatan politis, yang diperkuat melalui penyelarasan dalam forum Musrenbang RPJPD dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- j. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 157);

- r. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

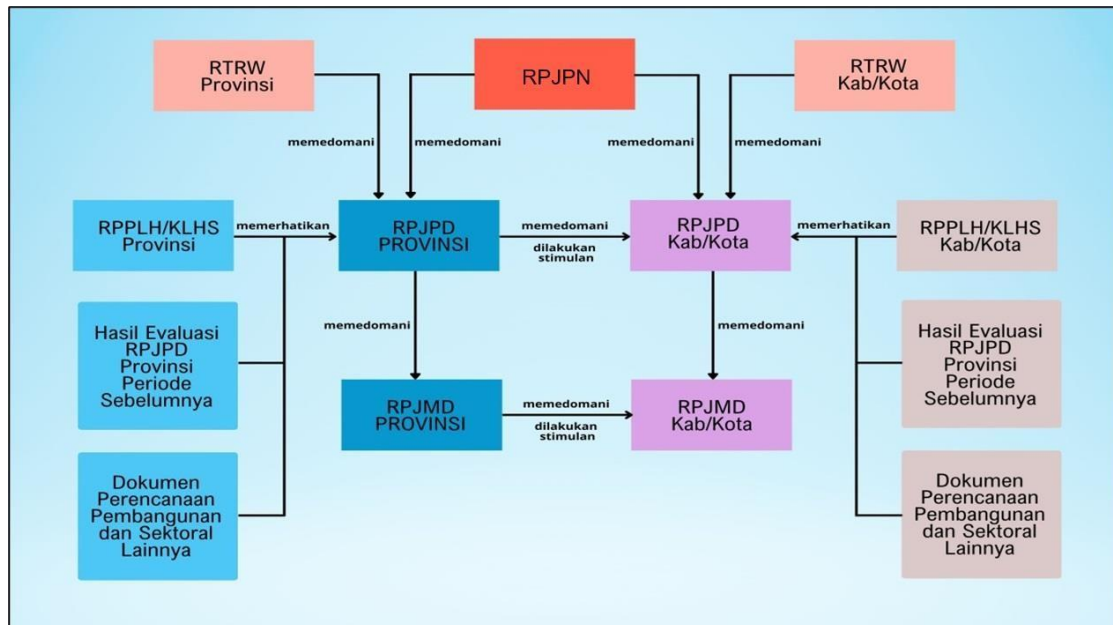
Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Buru Selatan merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPD Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.
- b. RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 dan RPJPD Tahun 2025-2045.
- c. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029 untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045.
- d. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.

- e. Berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW.
- f. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah, dan sebagainya.



Sumber : Inmendagri Nomor 01 Tahun 2024

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan Pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Buru Selatan yang berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan RTRW, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buru Selatan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten; serta sistematika penulisan

Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi:

1. Aspek Geografi dan Demografi;
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3. Aspek Daya Saing;
4. Aspek Pelayanan Umum;
5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025;
6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik;



7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab 3. Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

- 1. Permasalahan**
- 2. Isu strategis daerah**

Bab 4. Visi dan Misi Daerah

Menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai akhir periode serta selaras dengan visi dan misi Provinsi Maluku serta Indonesia 2045

- 1. Visi daerah Tahun 2025-2045**
- 2. Misi daerah Tahun 2025-2045**

Bab 5. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

- 1. Arah kebijakan menjelaskan kerangka kerja pembangunan per 5 (lima) tahun**
- 2. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045**

Bab 6. Penutup

Menjelaskan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Letak dan Kondisi Geografis

Luas wilayah daratan Kabupaten Buru Selatan adalah 3.780,56 km². Jumlah pulau di Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 11 pulau dengan 3 Pulau yang berpenghuni dan 8 Pulau tidak berpenghuni. Sejak terbentuknya, wilayah administrasi kabupaten Buru Selatan terdiri dari lima (5) kecamatan yaitu kecamatan Kepala Madan, Leksula, Namrole, Waesama dan Ambalau. Pada akhir tahun 2013, kabupaten Buru Selatan dimekarkan menjadi enam (6) kecamatan yaitu kecamatan Kepala Madan, Leksula, Fena Fafan, Namrole, Waesama dan Ambalau. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah kecamatan Leksula dan kecamatan Ambalau merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Luas dan sebaran jumlah desa di Kabupaten Buru Selatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, 2023

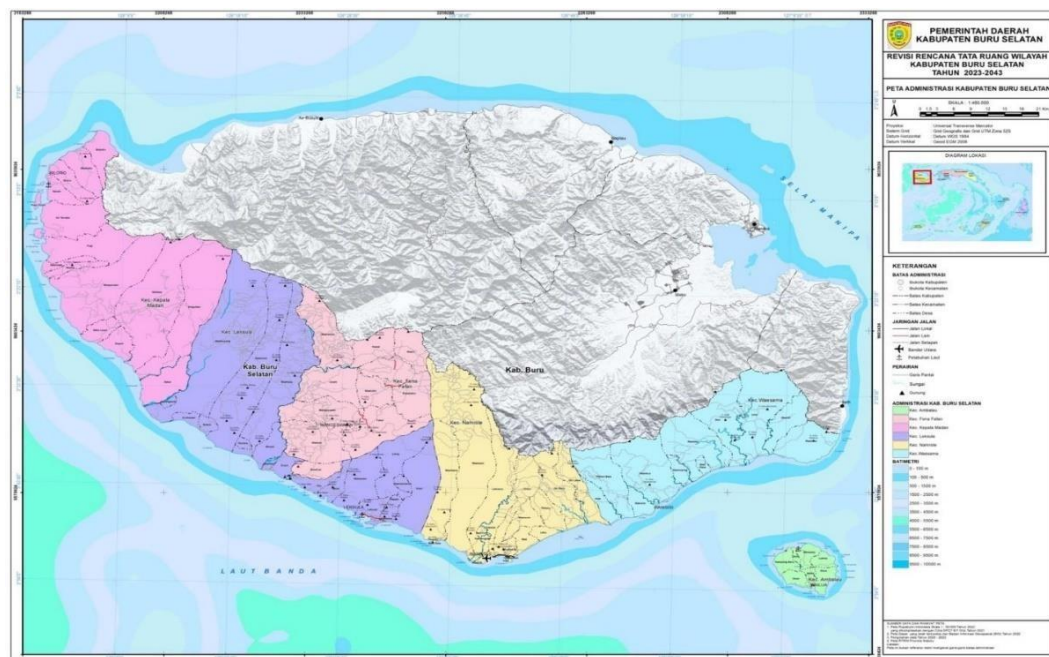
No	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Desa
1	Kepala Madan	Biloro	953,36	25,22	16
2	Leksula	Leksula	1.419,29	37,54	19
3	Fena Fafan	Waekatin	394,78	10,44	11
4	Namrole	Elfule	243,57	6,44	17
5	Waesama	Wamsisi	540,93	14,31	11
6	Ambalau	Siwar	228,63	6,05	7
Buru Selatan		Namrole	3.780,56	100,00	81

Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka (BPS), 2024

Secara geografis Kabupaten Buru Selatan terletak pada posisi 2°30' – 5°50' Lintang Selatan dan antara 125°00' - 127°00' Bujur Timur. Kabupaten Buru Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram di sebelah utara, Laut Banda sebelah Selatan dan Barat, serta Kabupaten Buru dan Selat Manipa di sebelah timur.

Kabupaten Buru Selatan memiliki lima buah dataran dengan luas sekitar 5.750 Ha, meliputi dataran Waekatin seluas 1.500 Ha, dataran Waekanu seluas 1.250 Ha, dataran Waemala seluas 1.250 Ha, dataran lembah Rana seluas 1.250 Ha, dan dataran Waelo seluas 500 Ha. di Kabupaten Buru Selatan terdapat sungai besar yaitu Waemala, Waetina dan Waekuma, dengan 12 (dua belas) anak sungai. Kabupaten Buru Selatan memiliki sebuah gunung yaitu Gunung Kapala Madan yang terletak di

kecamatan Kapala Madan dengan ketinggian mencapai 2.429 meter dari permukaan laut.



Sumber : Laporan Akhir RTRW Kab. Buru Selatan Tahun 2023-2043

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

A. Topografi, Fisiografi dan Geomorfologi

1. Topografi Kabupaten Buru Selatan terbagi menjadi 3 satuan, yaitu pegunungan, perbukitan dan dataran.
 - ♦ Satuan Pegunungan, terbentang dari di bagian tenggara, selatan, barat dan tengah pulau Buru yang menempati sekitar 70% dari luas pulau dengan kemiringan lereng yang relatif curam.
 - ♦ Satuan Perbukitan, tersebar mengelilingi morfologi pegunungan yang membentuk rangkaian perbukitan yang membulat dan berlereng landai sampai agak curam dengan ketinggian sampai 800 meter di atas permukaan laut.
 - ♦ Satuan Dataran, terbagi ke dalam dataran rendah dan dataran antar gunung. Dataran rendah tersebar di daerah utara dan di sepanjang daerah aliran sungai.
2. Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan bumi pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi Kabupaten Buru Selatan dikelompokkan secara makro (makro relief) yang terdiri atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan termasuk di dalamnya Dataran Tinggi (plateau/Piedmont). Fisiografi dataran tersebar pada areal dengan ketinggian 0 - 100 m dari permukaan laut (dpl), fisiografi perbukitan tersebar pada areal dengan ketinggian 100-500 m dpl, sedangkan fisiografi pegunungan tersebar pada areal dengan ketinggian lebih dari 500 m dpl. Pada fisiografi perbukitan terdapat perbukitan rendah dan perbukitan tinggi, demikian juga fisiografi pegunungan terdapat pegunungan rendah dan pegunungan tinggi. Secara mikro (mikro relief) bentuk lahan dan persentase kelereng terdiri atas: Datar (0 - 3 %), Bergelombang (3 - 8 %), Landai (8 - 15 %), Agak Curam (15 - 30 %), Curam (30 - 45 %), Sangat Curam (> 45 %).
3. Geomorfologi, bentang alam di Buru dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentang alam yaitu bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang

membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusinal dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah dan sungai.

Buru Selatan merupakan salah satu kawasan di luar busur Banda (jalur gunung api) dengan formasi geologi bervariasi antara batuan sedimen dan metamorfik. Dalam peta sketsa geologi Pulau Buru dan Seram, diuraikan bahwa secara umum ditemukan 3 (tiga) material utama penyusun Pulau Buru. Tiga Formasi dimaksud berada pada bagian Selatan, Utara dan Formasi deposisi di bagian Timur Laut, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Batuan Sedimen di bagian selatan yang kebanyakan dijumpai pada tempat-tempat dengan permukaan air yang dangkal;
- (2) Batuan metamorfik yang mirip dengan tipe batuan benua yang meliputi filit, batu sabak, sekis, arkose serta greywacke meta yang dominan berada pada bagian Utara Pulau Buru;
- (3) Endapan batuan sedimen berumur Neogen bagian atas ditemukan pada bagian Timur Laut tersusun dari endapan Aluvium dan Kolovium berupa bongkahan, kerikil, lanau, konglomerat, lumpur dan gambur. Di sepanjang pantai Utara terdapat jalur endapan pantai dan Aluvio-kolovium yang diselingi dengan terumbu karang angkatan (*uplifted coral reef*).

B. Jenis Tanah

Jenis tanah yang berada di Kabupaten Buru Selatan yaitu: Regosol (Psamments), Aluvial (Fluvents), Gleisol (Aquepts), Litosol (Orthents), Renzina (Rendolls), Kambisol (Udepts), Molisol (Udepts) dan Podsolik (Udults). Penamaan Jenis-jenis tanah ini menggunakan sistem Klasifikasi Tanah Nasional (Subardja et al., 2014) dan diberikan padanannya menurut sistem Taksonomi Tanah (Soil Survey Staff, 2014).

Sifat-sifat umum dari 8 jenis tanah tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Regosol (Psamments).

Tanah Regosol adalah tanah Regosol gunung yang berkembang dari Formasi Dalam terdiri dari batu pasir, serpih dan batu lanau, mempunyai lapisan-lapisan tanpa perkembangan horizon. Memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur agak kasar hingga kasar dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam hingga netral. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah tegalan (kentang, wortel, hotong, keladi, petatas, buncis, jagung, ubi kayu, kacang tanah, padi ladang, daun bawang, labu, tomat, cabe, kubis, sawi, kacang panjang, kelapa, cengkeh, mangga, alang-alang dan waru). Tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Kambisol (Udepts) dan Litosol (Orthents).

2. Aluvial (Fluvents).

Tanah Aluvial adalah tanah yang berkembang dari bahan alluvium, bongkah, kerikil, pasir lanau dan lumpur yang mempunyai lapisan-lapisan tanpa perkembangan horizon. Memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur sedang hingga agak halus dan drainase agak baik hingga baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah kebun campuran dan tegalan (kelapa, kakao, tanaman buahan, jagung, pisang, ubi kayu, kacang tanah, sawi, bawang merah, bayam, labu). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Gleisols (Aquepts).

3. Gleisol (Aquepts).

Jenis tanah Gleisol memiliki solum tanah dalam, dengan tekstur agak halus hingga halus dan berdrainase agak buruk, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah semak belukar (kayu waru, waringin, gondal, nibong, sagu). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Aluvial (Fluvents).

4. Litosol (*Lithic orthents*).

Tanah Litosol memiliki solum tanah sangat dangkal, dengan tekstur sedang dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) masam. Menyebar pada bentuk wilayah berbukit hingga bergunung yang didominasi dinding batuan dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan, kebun campuran, semak belukar. Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Kambisol (Udepts) dan Rensina (Rendolls) dan Brunizem (Udepts).

5. Rensina (*Rendoll*).

Tanah Rensina memiliki solum tanah sedang, dengan tekstur agak halus hingga halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah berbukit hingga bergunung dengan bahan induk batu gamping. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan, kebun campuran (kayu meranti, matoa, kelapa dan kakao). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Litosol (Orthents), Kambisol (Udepts) dan Brunizem (Udepts).

6. Kambisol (*Udepts*).

Tanah Kambisol memiliki solum tanah sedang hingga dalam, dengan tekstur sedang hingga agak halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah berbukit hingga bergunung. Penggunaan lahan yang umumnya ditemukan pada jenis tanah ini adalah hutan primer, sekunder, kebun campuran, semak belukar (kayu meranti, matoa, kelapa, alang-alang). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Litosol (Orthents), Rensina (Rendolls).

7. Molisol (*Udepts*).

Tanah Molisol adalah termasuk tanah yang sedang berkembang, mempunyai horizon terselubung yang berkembang dari formasi Wakatin (batugamping koral). Memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur agak halus hingga halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah bergunung. Penggunaan lahan yang ditemukan pada jenis tanah ini adalah tegalan (keladi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang tanah, jeruk, kelapa, langsung, durian, mangga, nangka, kakao dan alang-alang). Jenis tanah ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Litosol (Orthents), Rensina (Rendolls).

8. Podsolik (*Udults*).

Tanah Podsolik termasuk tanah yang sudah berkembang, ditemukan pada daerah kajian dengan bentuk wilayah dataran perlembahan. Berkembang dari formasi Hotong. memiliki solum tanah dalam hingga sangat dalam, dengan tekstur agak halus hingga halus dan drainase baik, serta memiliki reaksi tanah (pH) agak masam. Menyebar pada daerah dengan bentuk wilayah bergunung. Penggunaan lahan yang ditemukan pada jenis tanah ini adalah tegalan (kelapa, nangka, sukun, langsung, durian, jambu mete, gojawas, jambu air, keladi, ubi kayu, pisang, kacang tanah, alang-alang). Sungga-sungga, mimosa, paku-paku dan sagu). Jenis tanah

ini ditemukan berasosiasi dengan jenis tanah Kambisol (udepts) dan Litosol (Orthents).

C. Klimatologi

1. Kondisi Iklim.

Iklim Pulau Buru berbeda antara wilayah, yaitu Kabupaten Buru di bagian utara dan Kabupaten Buru Selatan di bagian selatan. Menurut Laimeheriwa (2014), wilayah Kabupaten Buru memiliki pola hujan monson-uni modal dengan curah hujan tahunan relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Buru Selatan yang umumnya memiliki pola hujan lokal-unimodal; kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kapala Madan di bagian utara yang pola hujannya sama dengan pola hujan Pulau Buru bagian utara, yaitu monson-unimodal.

Wilayah Kabupaten Buru Selatan tidak memiliki stasiun iklim lengkap sehingga untuk menggambarkan kondisi iklim daerah ini digunakan data iklim dari stasiun iklim representatif yang datanya tersedia lengkap dengan mempertimbangkan posisi geografis dan pola hujan wilayah. Terkait dengan pertimbangan tersebut, maka penggunaan data iklim dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon dianggap dapat mewakili wilayah Buru Selatan karena letaknya yang relatif berdekatan serta memiliki pola hujan yang sama. Data iklim yang digunakan terdiri dari (i) data curah hujan dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon selama 30 tahun pengamatan; periode 1993 – 2022, (ii) data unsur iklim lainnya dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon selama 15 tahun pengamatan; periode 2008 – 2022, dan (iii) data historis curah hujan; nilai rata-rata dari Stasiun Hujan Tifu.

Gambar 2.2. menyajikan kondisi curah di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya Tabel 2.2 menyajikan kondisi bulanan unsur iklim lainnya, yaitu suhu udara, kelembaban udara, lama penyinaran surya, angin, dan evapotranspirasi.

2. Hujan dan tipe iklim.

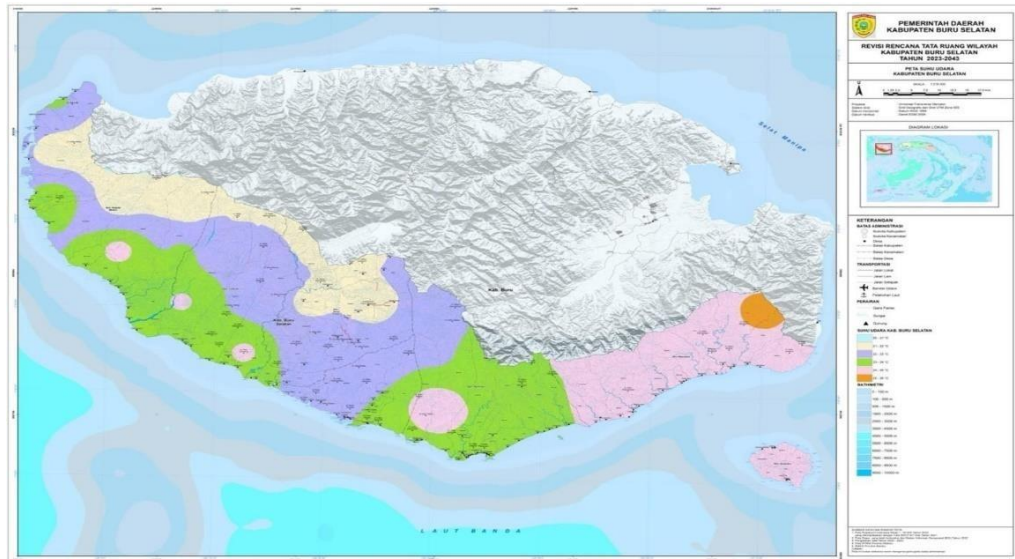
Wilayah Kabupaten Buru Selatan dapat dibagi dalam 4 wilayah/zone hujan dan dinyatakan sebagai wilayah beriklim agak basah (*subhumid tropic*) sampai dengan daerah sangat basah (*perhumid tropic*) dengan kisaran curah hujan rata-rata 1.918 (Waihotong) hingga 3.207 mm/tahun (Pulau Ambalau).

Wilayah Kecamatan Kapala Madan di bagian utara memiliki pola hujan yang mirip dengan wilayah Kabupaten Buru yaitu pola monsun-unimodal dengan puncak curah hujan terjadi dalam bulan Desember/Januari/Februari, sedangkan bulan September dan Oktober merupakan bulan-bulan terkering dalam setahun. Musim hujan umumnya berlangsung dalam periode Desember s/d Mei dan musim kemarau umumnya berlangsung dalam periode Juni s/d November.

Wilayah-wilayah di bagian selatan Kabupaten Buru Selatan memiliki pola hujan lokal- unimodal yang mirip dengan wilayah Pulau Ambon, dengan puncak hujan dalam bulan Juni-Juli dan bulan terkering berlangsung dalam bulan Oktober dan November. Musim hujan umumnya berlangsung dalam periode April s/d September dan musim kemarau umumnya berlangsung dalam periode Oktober s/d Maret.

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Oldeman Wilayah Kabupaten Buru Selatan memiliki tipe iklim D2 dan C2 yang dicirikan oleh jumlah bulan basah (curah hujan > 200 mm) selama 4 - 5 bulan berturut-turut, dan jumlah bulan kering (curah hujan < 100 mm) selama 2 - 3 bulan berturut-turut, serta panjang periode pertumbuhan dalam setahun 9 - 10 bulan. Menurut sistem klasifikasi iklim

Schmidt-Ferguson, wilayah ini mempunyai tipe iklim C dan B; tipe C yaitu daerah agak basah dengan vegetasi hutan rimba dan nilai Q (rasio bulan kering dan bulan basah): 36,3 – 48,2%, sedangkan tipe B merupakan daerah basah dengan vegetasi hutan hujan tropis dan nilai Q: 20,1 – 24,8%.



Sumber : Laporan Akhir RTRW Kab. Buru Selatan Tahun 2023-2043

Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

3. Suhu udara, kelembaban udara, lama penyinaran, dan kecepatan angin.

Rata-rata suhu udara harian di wilayah Buru Selatan berkisar antara yang paling rendah pada bulan Juli (27,0°C) hingga tertinggi pada bulan November (29,9°C). Kelembaban nisbi udara bulanan berkisar antara yang paling rendah 69 persen hingga tertinggi sebesar 85 persen. Lamanya surya bercahaya cerah berkisar dari yang terendah pada bulan Juni-Juli (4,2 – 4,5 jam) ketika curah hujan maksimum hingga tertinggi pada bulan Oktober (8 jam) ketika curah hujan minimum. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 14 knot pada bulan Februari hingga 19 knot pada bulan September (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Kondisi Suhu Udara, Kelembaban Udara, Lama Penyinaran dan Kecepatan Angin di Wilayah Buru Selatan Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Lama Penyinaran (jam)	Kecepatan Angin (knot)
Januari	27,5	84,0	5,8	15
Februari	27,3	85,0	4,9	14
Maret	27,7	82,0	6,0	17
April	27,8	82,0	6,8	15
Mei	28,0	80,0	7,8	17
Juni	27,5	82,0	4,2	16
Juli	27,0	81,0	4,5	19
Agustus	27,9	73,0	5,7	18
September	27,9	71,0	7,2	19
Oktober	29,3	69,0	8,0	18
November	29,9	71,0	7,6	16
Desember	28,9	79,0	5,7	15

Sumber: Kabupaten Buru Selatan dalam Angka, 2024

D. Penggunaan Lahan

Kabupaten Buru Selatan memiliki lima dataran dengan total luas sekitar 5.750 Ha, terdiri dari dataran Waekatin seluas 1.500 Ha, dataran Waekanu seluas 1.250 Ha, dataran Waemala seluas 1.250 Ha, dataran lembah Rana seluas 1.250 Ha, dan dataran Waelo seluas 500 Ha. Terdapat 12 sungai di Kabupaten Buru Selatan yang merupakan anak sungai dari sungai besar yaitu Waemala, Waetina, dan Waekuma. Di kabupaten ini juga terdapat gunung Kapala Madan dengan ketinggian mencapai 2.429 meter dari permukaan laut yang terletak di kecamatan Kapala Madan.

Secara umum, Kabupaten Buru Selatan memiliki dua jenis penggunaan lahan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun meliputi lahan untuk perumahan, perdagangan, jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, dan sarana permukiman lainnya. Sementara itu, lahan tidak terbangun meliputi lahan pertanian, kehutanan, semak/belukar, lahan kosong, dan lahan terbuka lainnya. Luas lahan terbangun di Kabupaten Buru Selatan adalah 1.159,50 Ha, sedangkan lahan tidak terbangun seluas 504.840,50 Ha (total lahan di luar pemukiman dan sarana transportasi udara/bandara).

Tabel. 2.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 (Ha)

Jenis Tutupan Lahan	Kec. Ambalau	Kec. Fena Fafan	Kec. Kepala Madan	Kec. Leksul a	Kec. Namrole	Kec. Waesama
Danau/Situ		0,24	0,89	1,12		
Hutan Rimba	6.744,74	42.287,52	77.095,25	82.558,15	58.974,36	55.152,94
Landas Pacu					1,77	
Padang Rumput			1.134,18	582,25		
Pasir/Bukit Pasir Darat			15,82	18,77		1,67
Pasir/Bukit Pasir Laut			1,62			
Pelabuhan Samudera				0,01		
Perkebunan/Kebun			539,11	39,31	790,59	1.666,18
Permukiman dan Tempat Kegiatan	32,53	34,29	64,74	127,64	87,11	83,08
Semak Belukar	183,11	8.021,69	5.754,32	6.596,97	2.865,35	1.057,47
Sungai	0,70	74,59	211,74	344,12	215,07	243,42
Tegalan/Ladang	55,50	6.924,97	2.268,68	1.863,34	1.742,38	1.788,59

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Gambar 2.3. Peta Tutupan Lahan Di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

a. Rencana Alih Fungsi Lahan,

Rencana alih fungsi hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi areal penggunaan lain seluas kurang lebih 40.700 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir dan alih fungsi hutan produksi dan produksi terbatas menjadi kawasan lindung seluas kurang lebih 10.000 Ha yang terdapat di Kecamatan Namrole.

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

1. Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat; dan
2. Mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota agar mewujudkan hutan kota.

Arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Buru Selatan pada pola ruang diarahkan untuk pemantapan pembangunan dan pengembangan kawasan – kawasan meliputi kawasan peruntukan yang paling besar di Kabupaten Buru Selatan yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yaitu sekitar 95.113,90 Ha.

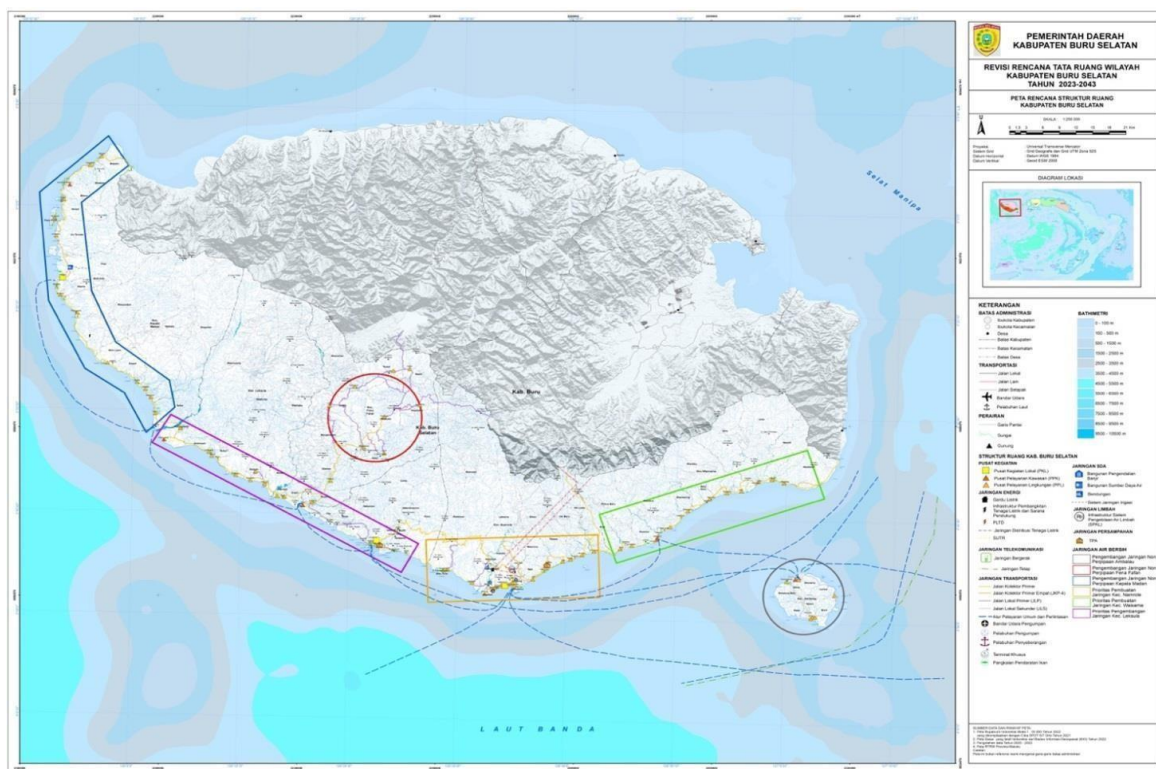
b. Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai RTRW Kabupaten Buru Selatan

Pengembangan wilayah Kabupaten Buru Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan guna membangun Buru Selatan sebagai Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat, potensi pengembangan wilayah dibagi berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing, sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut.

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Gambar 2.4. Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023-2043

- a. **Rencana Sistem Pusat Permukiman**
Pengembangan sistem perkotaan ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang tangguh untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi berbasis pertanian lahan kering. Pengembangan sistem kota-kota juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensinya dan daya tampung lingkungannya; baik itu struktur ruang internal pada Kabupaten Buru Selatan maupun struktur ruang eksternal dalam lingkup Provinsi Maluku.
Mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Buru Selatan adalah sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah pengembangan kabupaten dengan kota-kota atau kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pengembangan hirarki kota di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan pada arahan kebijakan nasional

dan provinsi, disamping itu juga berdasarkan hasil kajian tentang tingkat perkembangan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Buru Selatan. Hirarki sistem pusat-pusat permukiman bagi Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, dan Desa Kamanglale memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi, memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala- Bala, memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di seluruh desa di Kabupaten Buru Selatan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.

**Tabel 2.4. Hirarki Sistem Pusat – Pusat Permukiman
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023**

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023	
Rencana Pusat Permukiman	Fungsi
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Farmite dan Desa Kamanglale;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan skala regional, pusat jasa dan pelayanan masyarakat sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan industri pengolahan hasil sumber daya alam, pusat koleksi dan distribusi, serta perdagangan dan jasa skala yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan;
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala;	Memiliki fungsi utama sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat pengembangan hasil perkebunan dan pertanian, pengembangan pariwisata alam, pusat jasa pelayanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan di beberapa Kecamatan;



Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima;	Memiliki fungsi sebagai pusat produksi perkebunan, pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan beberapa desa dan kecamatan;
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di seluruh Desa;	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa;

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Kawasan perkotaan dalam hal ini adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.5. Dasar Pertimbangan Penetapan Fungsi Kota dalam Pusat – Pusat Permukiman di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2015	RTRW PROVINSI DI KABUPATEN BURU SELATAN	REVISI RTRW KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023
Sistem Pusat Pusat Permukiman		
PKWp Namrole	PKL Namrole	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Namrole di Kecamatan Namrole Desa Labuang, Desa Masnana, Desa Waeono, Desa Elfule, Desa Farmite dan Desa Kamanglale
PKL Leksula	PKL Leksula	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leksula Kecamatan Leksula di Desa Leksula dan Desa Nalbesi
PPL Fogi (Kecamatan Kepala Madan)	PKL Kepala Madan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kepala Madan di Kecamatan Kepala Madan di Desa Fogi dan Desa Bala-Bala



PPK Biloro (Kecamatan Kepala Madan)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Biloro di Kecamatan Kepala Madan Desa Biloro,
PPK Wamsisi (Kecamatan Waesama)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waesama di Desa Wamsisi,
PPL Waemulang (Kecamatan Leksula)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Waemulang di Kecamatan Leksula Desa Waemulang,
PPL Tifu (Kecamatan Leksula)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tifu di Kecamatan Leksula Desa Tifu,
PPL Ulima (Kecamatan Ambalau)	-	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Ambalau di Desa Ulima
PKLp Waekatin (Kecamatan Fena Fafan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Elfule (Kecamatan Namrole)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Lena (Kecamatan Waesama)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Elara (Kecamatan Ambalau)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Nanali (Kecamatan Kepala Madan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Sekat (Kecamatan Kepala Madan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Fakai (Kecamatan Fena Fafan)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Labuang (Kecamatan Namrole)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Wamkana (Kecamatan Namrole)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Waetawa (Kecamatan Waesama)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPL Lumoy (Kecamatan Ambalau)	-	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

b. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Buru Selatan diketahui bahwa kawasan rentan bencana gempa bumi menjadi luas Kabupaten Buru Selatan adalah di Kecamatan Namrole, dan seluruhnya dikategorikan memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi.

Sementara itu, sekeliling pesisir pantai Pulau Buru dan Pulau Ambalau merupakan

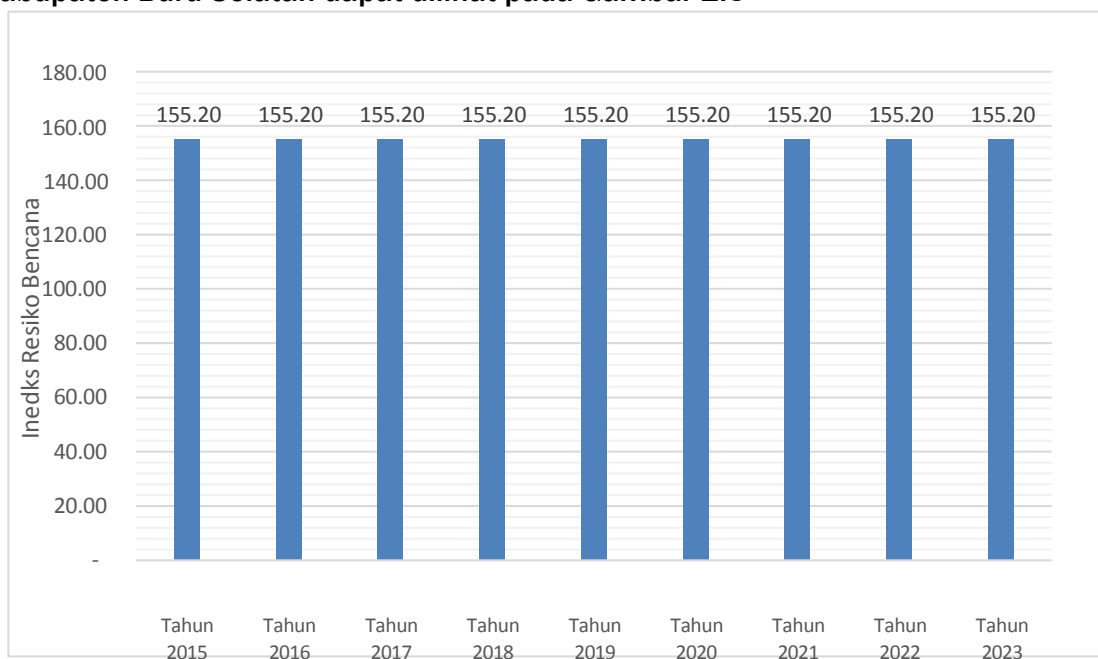
Zonasi Kawasan BeRisiko Bencana Tsunami. Oleh karena itu seluruh wilayah pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan antisipasi dan manajemen penanggulangan bencana tsunami khususnya pada pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan pada sepanjang pantai Kecamatan Namrole, Waesama dan Ambalau. Beberapa desa di sepanjang pesisir pantai ketiga kecamatan tersebut mempunyai Risiko tinggi untuk terkena Namrole, Oki Baru, Pohon batu, Wamsisi, Wailikut, Waeteba, Waemasing dan Wailua.

Berdasarkan analisis dari pengembangan Kawasan Rentan Bencana Banjir di Kabupaten Buru Selatan, maka konsentrasi Risiko bahaya banjir berada di Kecamatan Namrole, Leksula, dan Kecamatan Waisama, khususnya di daerah sekitar muara sungai.

c. Indeks Risiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko terhadap bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. IRB mencakup berbagai faktor seperti kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kemampuan mitigasi dan adaptasi. Dengan menggunakan IRB, pemerintah dan organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap bencana dan merencanakan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak bencana tersebut.

Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah di Indonesia. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 masuk kategori tinggi (155,20) sama dengan beberapa tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.5



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

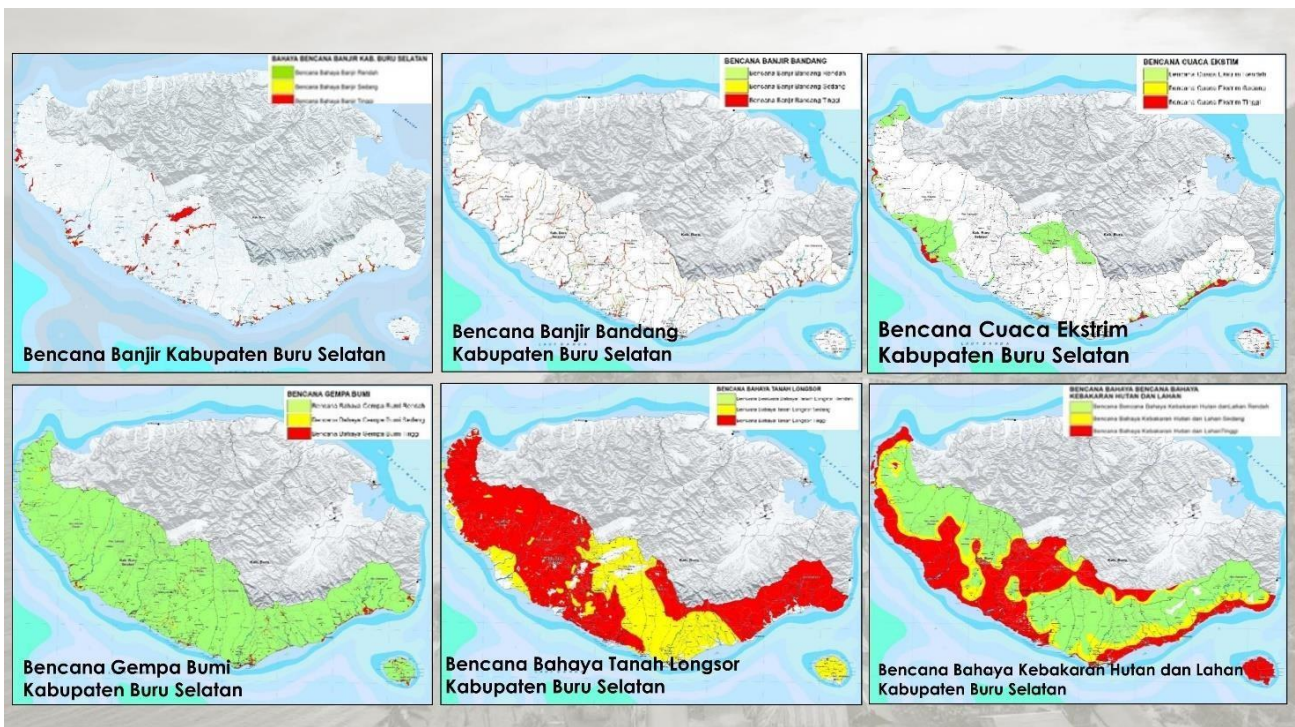


Gambar.2.5. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Buru Selatan

Indeks Risiko Bencana per ancaman untuk Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6. Indeks Risiko Bencana per ancaman Kabupaten Buru Selatan 2023

Komponen	Indeks
Indeks Risiko Bencana Banjir;	11.60 Sedang
Indeks Risiko Bencana Gempabumi;	21.60; Tinggi
Indeks Risiko Bencana Tsunami;	12.80; Tinggi
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan;	36.00; Tinggi
Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor;	24.00; Tinggi
Indeks Risiko Gelombang Ekstrim Dan Abrasi;	26.40; Tinggi
Indeks Risiko Bencana Kekeringan;	16.00; Tinggi
Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim;	6.80; Sedang

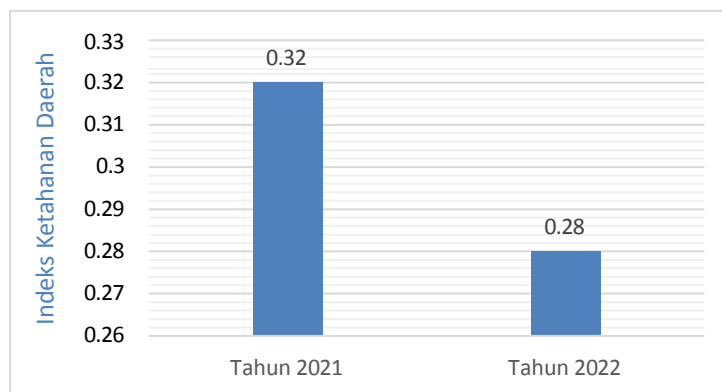


Sumber : Laporan Induk KLHS RTRW Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 – 2043

Gambar. 2.6. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Buru Selatan

d. Indeks Ketahanan Daerah,

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan mengatasi berbagai macam bencana atau ancaman, baik itu bencana alam, sosial, ekonomi, atau lainnya. Indeks ini biasanya mengukur beberapa aspek penting seperti infrastruktur, kemampuan pemerintah daerah, kesiapan masyarakat, serta sistem dan kebijakan penanggulangan bencana.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

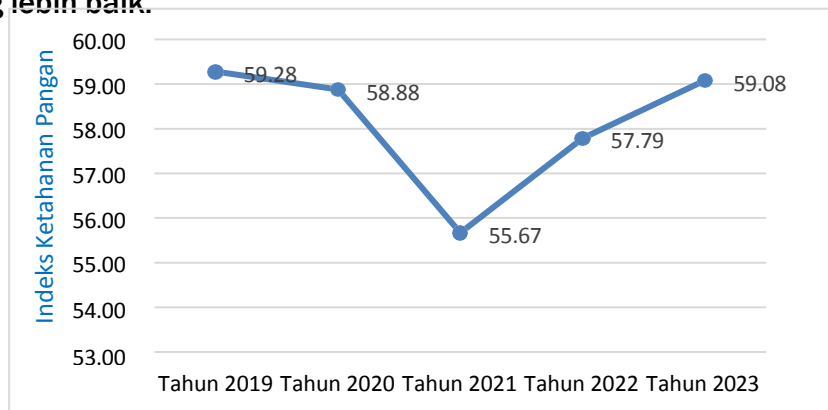
Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Untuk Kabupaten Buru Selatan, penurunan nilai IKD dari 0,32 pada tahun 2021 menjadi 0,28 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat penurunan dalam beberapa aspek ketahanan daerah tersebut.

Penurunan indeks ini adalah sinyal bahwa perlu adanya evaluasi dan peningkatan upaya dalam berbagai aspek yang mempengaruhi ketahanan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan daerah kembali.

e. Indeks Ketahanan Pangan,

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di suatu daerah. IKP biasanya mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Angka yang lebih tinggi pada IKP menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang lebih baik.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Gambar 2.8. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan

Tahun 2019 sebesar 59,28 menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang cukup baik dengan nilai 59,28. Ini berarti secara umum, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di Kabupaten Buru Selatan berada pada tingkat yang relatif stabil.

Tahun 2021 sebesar 55,67 menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dalam ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti gangguan pada rantai pasokan pangan akibat pandemi COVID-19, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pangan. Pada tahun 2022, nilai IKP Buru Selatan 57,79

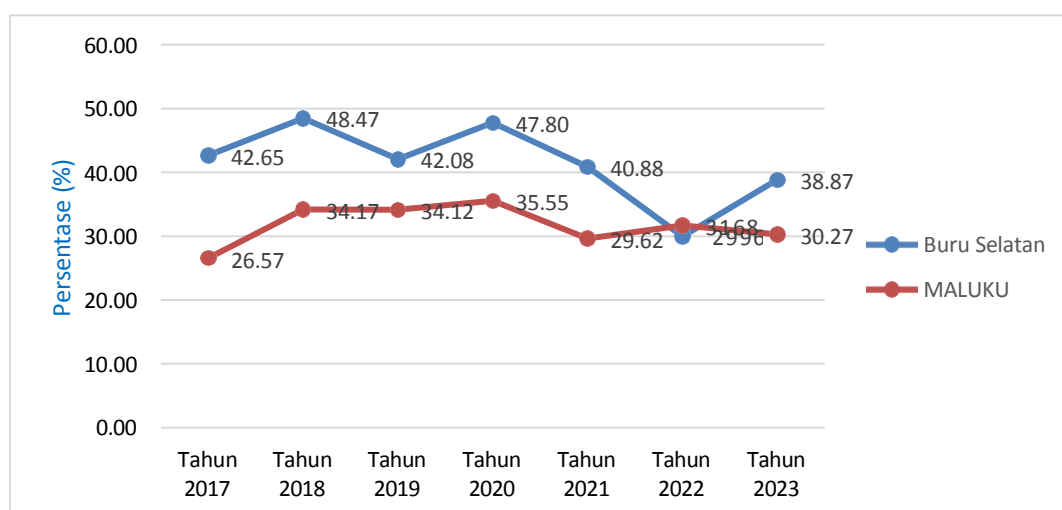
menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021, meskipun belum kembali ke tingkat tahun 2019. Peningkatan ini bisa menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek ketahanan pangan, seperti peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, atau peningkatan akses pangan bagi masyarakat.

Tahun 2023 sebesar 59,08 menunjukkan pemulihan yang hampir mencapai nilai tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan mulai membuahkan hasil, dengan peningkatan dalam aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, nilai IKP menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan setelah mengalami beberapa tantangan, dan hasilnya mulai terlihat positif pada tahun 2022 dan 2023.

f. Prevalensi ketidakcukupan pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan adalah persentase populasi yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang bergizi dan memadai untuk menjalani kehidupan sehat dan aktif. Angka ini merupakan indikator penting untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu daerah.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Gambar. 2.9. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Buru Selatan

Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan prevalensi ketidakcukupan pangan pada beberapa tahun tertinggi tahun 2018 sebesar 48,47%, namun ada juga periode penurunan yang signifikan seperti pada tahun 2022 sebesar 29,96%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh intervensi kebijakan yang efektif atau perbaikan kondisi ekonomi dan distribusi pangan. Secara umum, Kabupaten Buru Selatan memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku, yang menunjukkan bahwa daerah ini mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal ketahanan pangan. Prevalensi ketidakcukupan pangan yang tinggi menunjukkan bahwa banyak orang di Kabupaten Buru Selatan yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang memadai. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya berkelanjutan yang melibatkan peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, dan kebijakan yang mendukung akses pangan bagi semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

2.1.2. Aspek Demografi

A. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan 5 (lima) tahun terakhir meningkat dari jumlah 76.575 jiwa pada tahun 2018 menjadi 79.017 jiwa pada tahun 2023. Ini menunjukkan, bahwa terjadi pertambahan penduduk sebesar 1,108 jiwa dalam waktu lima tahun atau sekitar 1,45%. Berdasar hasil registrasi penduduk pada tahun 2023 seperti disajikan dalam tabel 2.7, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan berdasar jenis kelamin terdiri dari 38,610 laki-laki dan 38,677 perempuan dengan *sex ratio* 105,8. Hal tersebut menunjukkan rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan (rasio jenis kelamin) lebih tinggi. Angka 105 menunjukkan bahwa terdapat 105 kelahiran laki-laki untuk setiap 100 kelahiran perempuan.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
2019	38.856	37.323	76.575	104,25
2020	38.640	38.770	75.410	105,08
2021	39.294	37.421	76.715	105
2022	38.610	38.677	77.287	105,8
2023	39.952	39.065	79.017	102,3

Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka (BPS), 2024

Penyebaran penduduk Kabupaten Buru Selatan masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Namrole dengan tingkat kepadatan penduduk per km² tertinggi pada angka 68,63 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Leksula merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah dengan kepadatan penduduk per km² hanya pada angka 7,51 jiwa/km².

Tabel 2.8. Laju dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Laju dan Kepadatan Penduduk per km ²									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Laju	Kepadatan	Laju	Kepadatan	Laju	Kepadatan	Laju	Kepadatan	Laju	Kepadatan
Kepala Madan	1,75	9,74	-0,02	9,57	0,82	15	0,82	15	0,035	10,18
Leksula	-0,01	7,79	-0,05	7,44	1,68	15	1,68	15	0,002	7,51
Fena Fafan	0,75	7,82	-0,06	7,39	2,20	5	2,20	5	0,033	8,15
Namrole	0,82	61,97	0,03	64,03	0,88	37	0,88	37	0,040	68,63
Waesama	0,58	21,33	-0,02	20,99	1,84	26	1,84	26	0,013	21,90
Ambalau	-1,04	13,50	-0,04	29,92	0,99	139	0,99	139	0,006	30,15

Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka (BPS), 2024

Komposisi penduduk berdasarkan umur untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia produktif sedangkan Komposisi penduduk menurut jenis kelamin digunakan untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	4.254	4.142	8.396
5-9	3.997	3.844	7.841
10-14	3.944	3.677	7.621
15-19	4.297	3.882	8.179
20-24	3.921	3.555	7.476
25-29	3.812	3.548	7.360
30-34	3.424	3.377	6.801
35-39	3.039	3.092	6.131
40-44	2.590	2.573	5.163
45-49	2.138	1.948	4.086
50-54	1.669	1.531	3.200
55-59	1.293	1.269	2.552
60-64	882	854	1.736
65-69	613	612	1.225
70-74	449	439	888
75+	392	408	800

Sumber: Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka (BPS), 2024

B. Keberadaan Masyarakat Adat,

Penduduk yang mendiami Pulau Buru baik di Buru bagian utara maupun Buru bagian selatan, terdiri dari berbagai etnis dan suku. Selain penduduk asli pulau Buru (orang Buru asli), ada juga kaum pendatang seperti orang Maluku Utara, Timor, Buton, Bugis, orang Lease dan Seram (Maluku Tengah), orang-orang dari Maluku Tenggara (kebanyakan orang Kei), etnis Tionghoa, Arab dan Jawa. Mereka semua hidup membaur menjadi satu, terutama di daerah-daerah pesisir pantai dan di ibukota kabupaten/kecamatan. Sementara di daerah-daerah pegunungan 99% penduduknya adalah orang Buru asli.

Salah satu kajian terkait kesejarahan Pulau Buru, menyebutkan bahwa Suku bangsa yang merupakan cikal bakal penduduk asli Pulau Buru adalah suku bangsa Alifuru. Suku bangsa ini merupakan hasil percampuran ras Kaukasoid, Mongoloid dan Papua. Mereka menurunkan keturunan anak-anak suku Alune (berkulit putih) dan suku Waemale (berkulit gelap). Suku Alune diduga berasal dari utara (sekarang Provinsi Sulawesi Utara) yang masuk ke Halmahera dan menyebar ke berbagai daerah di Kepulauan Maluku. Sementara suku Waemale diduga berasal dari timur masuk ke Pulau Seram dan menyebar ke wilayah-wilayah sekitar Pulau Ambon, Kepulauan Lease (Pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut), Pulau Manipa, Pulau Ambalau, dan Pulau Buru. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978).

Sejak zaman kolonial hingga kini masyarakat asli Pulau Buru (Geba Bupolo) disebut sebagai suku terasing, tidak beragama, dan alifuru. Istilah “burro” (yang kemudian menjadi Buru) diberikan kepada pulau ini dan kata ini ditemukan pada peta Indonesia yang dipublikasi tahun 1613 oleh misi dagang Portugis. Kata Burro (bahasa Portugis) mengandung beberapa pengertian, pertama, kata burro untuk menamakan babi rusa (*Babyrousa babyrussa*) dimana untuk pertama kali Portugis melihatnya di pulau ini. Kedua, kata burro dialamatkan kepada masyarakat Bupolo,



karena mereka selalu menolak kehadiran Portugis di setiap kampung (humalolin). Cara menolak adalah semua penduduk meninggalkan kampung dan masuk ke hutan. Setelah periode Portugis, maka berikutnya masa penjajahan Belanda, kata Burro tidak digunakan dan ditulis Boeroe atau Buru dalam Bahasa Indonesia (Pattinama, 2013).

Realitas di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa terbentuknya kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada faktor genealogis juga merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat adat di Buru Selatan, yang pada esensinya masyarakat Buru Selatan menyatakan bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama yang terbagi menurut beberapa marga atau klan. Menurut penuturan tua-tua adat dari masyarakat Kabupaten Buru Selatan bahwa pada dasarnya mereka berasal dari nenek moyang atau leluhur yang sama, yang jika ditelusuri lebih lanjut ternyata keberadaan masyarakat Buru Selatan memiliki cerita yang berbeda-beda menurut versi tiap-tiap marga, hal tersebut dapat dibuktikan dari penuturan 2 (dua) marga tentang keberadaan awal masyarakat di Pulau Buru, yaitu ada cerita dari marga Lesnusa yang menyatakan bahwa Lesnusa adalah marga asli berasal dari Pulau Buru yang dapat dibuktikan dengan adanya gunung mual dan gunung masbait yang merupakan awal tempat bermukim, sehingga menjadi bukti asal usul dari buru. Keberadaan marga Lesnusa juga memiliki keterkaitan dengan marga Solisa. Awalnya, keberadaan marga Solisa berasal dari kedatangan *bokis raja* (perempuan) yang berasal dari Pulau Seram setelah lari dari peperangan Huamual yang kemudian kawin dengan marga Lesnusa yang melahirkan marga Soulisa. Hasil perkawinan tersebut melahirkan 4 anak, yaitu; 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang setelah dewasa meninggalkan tempat mereka berdiam dan menuju selatan sampai di suatu tempat yang disebut dengan *Banulalet*.

Keberadaan marga atau klan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat adat di Pulau Buru termasuk di dalamnya Buru Selatan. Hal tersebut disebabkan karena penguasaan terhadap tanah di pulau Buru berada pada marga, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh tanah yang berada di wilayah Pulau Buru telah dibagi kepada semua marga-marga yang berasal dari pulau Buru. Selain itu, keberadaan adat istiadat di Pulau Buru juga dipelihara di tingkat marga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat di Buru Selatan merupakan masyarakat adat genealogis, yaitu masyarakat yang terbentuk berdasarkan keturunan yang sama, yang berasal dari 1 (satu) keturunan yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah di Pulau Buru, termasuk di wilayah Buru Selatan.

Proses terbentuknya masyarakat hukum adat di Kabupaten Buru Selatan berpengaruh terhadap terbentuknya pemerintahan adat. Kumpulan tiap-tiap *Fena* (marga/faam) ini kemudian menyebar ke wilayah-wilayah di Pulau Buru dan saling bergabung dengan *Fena* (marga/faam) lainnya dalam suatu wilayah tertentu dan berkembang menjadi *Fena* atau Desa. Perkembangan masyarakat hukum adat di Buru Selatan bahwa keberadaan marga yang juga disebut dengan *Fena* memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan adat di Pulau Buru. Dimana, selain terdapat struktur pemerintahan secara teritorial di dalam fena juga terdapat struktur pemerintahan yang merupakan gabungan dari *Fena* marga- marga yang ada di Pulau Buru. Pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang terhimpun di dalam *Fena* (marga-marga) menyatukan diri kemudian mengangkat orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih atau orang yang dianggap tahu segalanya menjadi pemimpin tertinggi yang disebut dengan *Mat Gugul*. Selain itu, juga terdapat panglima perang di tingkat *Fena* (marga-marga) yang disebut dengan *Henolon* dan terdiri dari panglima perang wilayah barat dan panglima perang wilayah timur. Terdapat juga jabatan *Matlea*, *Porwisi*, *Gepuji*, *Geba'rama*, *Tea elen*, *Geb'ha*,

Emmrimu.

Matlea adalah salah satu jabatan tinggi dari *marga* (fena), yang merupakan gabungan dari pemimpin *Huma Lolin* (kepala soa/marga). *Prowisi* dan *Tea elen* memiliki fungsi sebagai pemimpin marga yang mengatur segala sesuatu atau hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan di tingkat persekutuan antara. *Geb'puji* dan *Geba'rama* merupakan pemimpin spritual bagi masyarakat adat yang memiliki fungsi dan peran untuk memimpin pelaksanaan upacara-upacara adat (pelaku ritual adat) untuk berbagai kebutuhan. Fungsi dan peran kedua pejabat adat ini dapat disamakan dengan ulama (imam atau pendeta) yang mendoakan kehidupan umat dengan melaksanakan ritual adat yang disebut dengan *Smaket* yaitu meminta dan meletakkan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seseorang, baik untuk kesembuhan orang yang sakit, untuk menjalani suatu proses perkara, untuk membangun suatu usaha, atau untuk kebutuhan apapun, yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut dengan tua-tua adat yang lainnya. Sedangkan, *Emrimu* berperan sebagai pembawa berita, yang di dalam masyarakat adat daerah lain di Maluku disebut dengan *Marinyo*. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai adat istiadat yang masih dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Buru Selatan.

Masyarakat pedalaman Pulau Buru atau sering disebut “orang gunung” bermukim dan tersebar di sekitar Danau Rana, sebuah Danau yang luas dan terletak di jantung Pulau Buru dengan ketinggian 1000 mdpl. Mereka juga tersebar di sepanjang tepian sungai Waegeren dan Waenibe. Sebagian lagi tersebar di Selvadu, Maheteruanusan, Walingat Baru dan Kaiely. Masyarakat di sekitar Danau Rana bersifat Nomaden, mereka menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam dan berburu binatang liar. Masyarakat Adat Danau Rana dalam kesehariannya menggunakan bahasa Lipa-Liam, sedangkan pada saat upacara-upacara adat mereka lebih sering menggunakan bahasa Liam-Garam. Bahasa tersebut apabila ditelisik lebih mendalam akarnya masih termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.

Gelar adat diberikan oleh Negeri-negeri adat kepada tamu kehormatan dan orang-orang yang dianggap berjasa terhadap masyarakat adat. Contohnya pemberian gelar adat di Petuanan Kaiely yang diberikan pada sebuah upacara dan dihadiri oleh para Pemangku Adat, yaitu Raja, Hinolong, Kaksodin dan para Kepala Soa, gelar adat tersebut antara lain:

- 1) “Gebam Keda” yang berarti dianggap sebagai orang tua dari petuanan tersebut.
- 2) “Gebam Keda Wahidi Taun” yang berarti orang tua dari marga wahidi.
- 3) Dukungan masyarakat adat terhadap pembangunan di Pulau Buru.

Sistem kekerabatan diantara Masyarakat Adat di Pulau Buru menganut sistem Patrilineal. Jalur Ayah (Kakek Moyang) yang digunakan untuk membentuk ikatan persaudaraan dan kekerabatan hingga ke bawah. Gabungan keluarga-keluarga yang patrilineal itu kemudian membentuk lagi kekerabatan berdasarkan satu Kakek Moyang yang sama. Hal ini disebut keluarga luas terbatas (semacam klan). Ini lah yang kemudian biasa disebut dengan Soa. Dalam aspek kepercayaan kepada Tuhan, Masyarakat adat Rana masih banyak menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Sementara masyarakat adat pada pesisir pantai telah banyak memeluk agama Islam (Agama Mayoritas di Buru). Dalam kepercayaan asli masyarakat adat Rana ada kekuatan luar biasa Maha Pencipta dan mengendalikan segala sesuatu yang disebut *Opulastala*, pada setiap upacara adat selalu dipanjatkan doa-doa kepada *Opulastala* yang dipimpin oleh tetua adat untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Soa-nya. Secara umum mekanisme sanksi adat diberikan apabila terjadi persoalan menyangkut soa-soa dibawah penguasaannya. Raja harus turut campur untuk menyelesaikannya, misalnya terjadi kasus pembunuhan, semua

soa terlibat duduk bersama untuk menyelesaikannya dengan dipimpin oleh Raja. Dari pertemuan tersebut akan dibicarakan hukum adat seperti sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada si pembunuh. Biasanya persoalan ini diselesaikan dengan denda sejumlah harta sesuai yang dimintakan keluar korban. Misalnya tebusan 100 ekor babi atau sejumlah alat-alat pertanian. Selanjutnya diikuti pula dengan sumpah adat antar keluarga atau soa tersebut. Hal ini untuk menghindari tindakan balas dendam yang bisa mengarah pada perseteruan soa-soa yang notabene masih satu keluarga besar. Setelah hukum secara adat selesai, pembunuh tetap diproses secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum adat hanyalah upaya untuk tetap memelihara kerukunan antar masyarakat asli yang mendiami Pulau Buru sembari tetap melestarikan adat.

Masyarakat Buru berasal dari suku Alifuru tersebar dalam 4 (empat) wilayah Hukum Adat yaitu Petuanan Kaiely, Lilialy, Tagalisa dan Leisela, tiap petuanan tersebut dipimpin oleh seorang Raja dan membawahi beberapa Soa/Marga, yang bermukim pada dataran pegunungan maupun dataran pesisir pantai Pulau Buru. Salah satu contoh wilayah hukum adat petuanan Kaiely, digambarkan sebagai berikut: Struktur Pemerintahan adat Kaiely terdiri dari Raja, Saniri Negeri, Kepala Soa dan Adat Kampung Pesisir, Kaksodin, Hinolong Baman dan para kepala Soa, Kaksodin Wahidi membawahi 7 (tujuh) Kepala Soa dan Kepala Adat ditambah 3 (tiga) Kepala Soa dan Kepala Adat yang merupakan representatif dari Soa-Soa yang ada di wilayah dataran tinggi, masing-masing:

- 1) Gebhaen (Saleki)
- 2) Giwagit (Bihuku)
- 3) Waelua (Latbual)
- 4) Waetemun (Nurlatu)
- 5) Wahidi (Wael)
- 6) Kakhana (Latuhukom)
- 7) Wagida (Tasane)
- 8) Migodo (Nacikit)
- 9) Mual (Solisa)

Hinolong Bama membawahi 5 (lima) Kepala Soa dan Kepala Adat yang merupakan representatif dari 5 (lima) Soa yang ada di Dataran Rendah masing-masing:

- a) Baman (Besan)
- b) Dafa (Belen)
- c) Fumae (Dawan)
- d) Kofan (Kofan)
- e) Widit (Tihun)

Untuk daerah-daerah pesisir petuanan Kaiely, para kepala soa dan kepala adat bukan merupakan bawahan dari Kaksodin Wahidi maupun Hinolong Baman tetapi langsung dibawah oleh Raja Kaiely. Wilayah kekuasaan telah diatur secara turun temurun oleh para leluhur dan diakui hingga saat ini dengan menempatkan soa-soa penjaga batas pada batas-batas petuanan, batas petuanan Kaiely sebagai berikut:

- 1) Batas-batas terluar wilayah hukum adat Kaiely
- 2) Batas pesisir barat adalah sungai Waebini yaitu antara Petuanan Kaiely dengan Petuanan Lilialy.
- 3) Batas-batas daerah pegunungan yaitu Kaku Futfadi, Kaku Futsiwit, Wae Mamlale, Kaku Dohin Umun, Kaku Fude Roho Biwal, Kaku Goli Folihin, Kaku Fawaga, Kaku Bihulan Taman.
- 4) Gunung Batabual secara keseluruhan masuk dalam wilayah hukum adat Petuanan Kaiely.

- 5) Batas pesisir timur adalah Tanjung Timbang yaitu batas Petuanan Kaiely dengan Petuanan Waisama.
- 6) Bahwa wilayah tanah adat Petuanan Kaiely sesuai hukum adat Petuanan Kaiely atas
- 7) Tanah adat yang telah berubah status menjadi tanah hak milik individual atau keluarga, adalah tanah kebun/lading, tanah sawah, dusun ketel/areal tanaman kayu putih yang telah diolah/diparusah, dusun kepala, dusun cengkeh dan lain-lain, mendapat perlindungan dan pengakuan sesuai hukum adat dari para pemangku adat.
- 8) Tanah adat yang belum diolah oleh masyarakat adat dan masih berstatus hak adat/hak komunal masyarakat adat adalah kewenangan Pemangku Adat dalam pengaturannya.

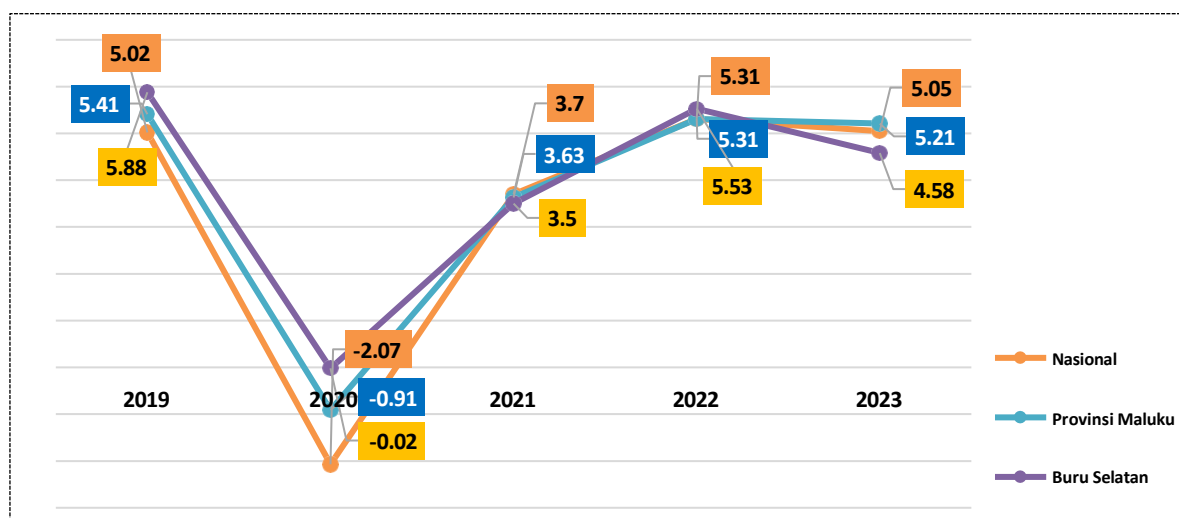
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Aspek Kesejahteraan ekonomi

menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat melalui pengukuran pencapaian beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar berikut menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan dengan provinsi dan nasional tahun 2019 sampai tahun 2023.

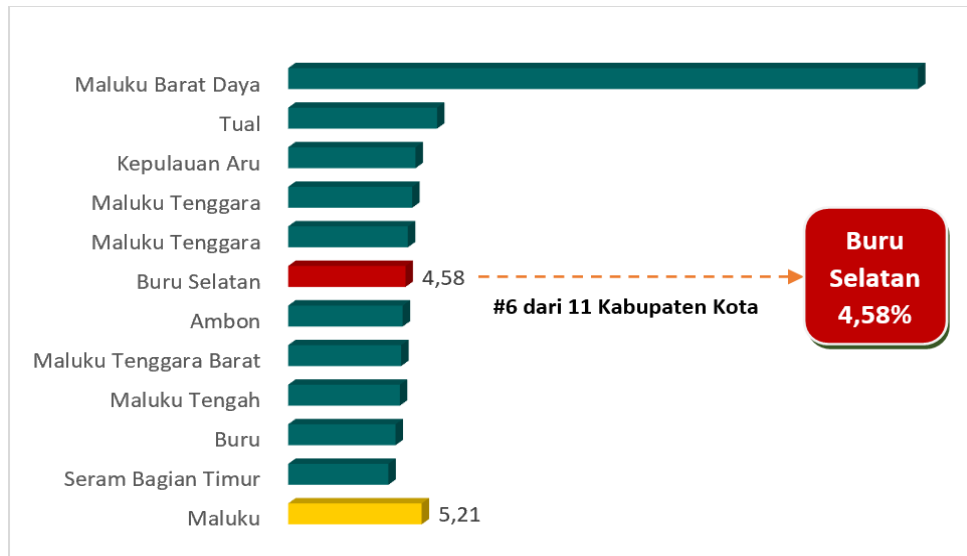


Sumber: BPS Provinsi Maluku(diolah), 2024

Gambar. 2.10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 -2023

Berdasarkan data di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan terendah adalah di tahun 2020 yaitu -0,02 persen penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid 19. Kemudian mengalami pertumbuhan di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 Ekonomi Kabupaten Buru Selatan tumbuh 4.58 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5.53 persen. Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan yaitu

berada di atas provinsi dan nasional pada tahun 2019 dan tahun 2022, sedangkan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan berada di bawah provinsi dan nasional.



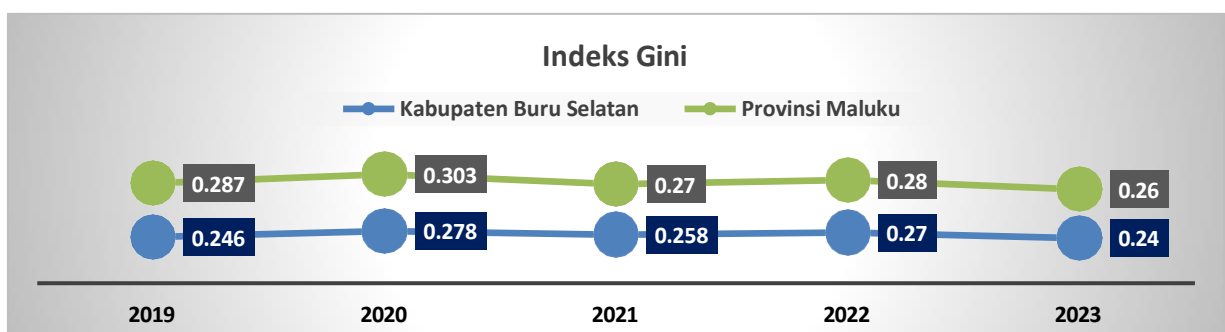
Sumber: BPS Provinsi Maluku(diolah), 2024

Gambar. 2.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku (Persen)

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 berdasarkan Kabupaten Kota, ekonomi Buru Selatan berada di bawah Provinsi di atas Kota Ambon.

2. Indeks Gini

Indeks gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Berikut data indeks gini Kabupaten Buru Selatan dibandingkan dengan Provinsi Maluku periode 2019 – 2023.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah), 2024

Gambar. 2.12. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Buru Selatan dan Provinsi Maluku Tahun 2019 -2023.

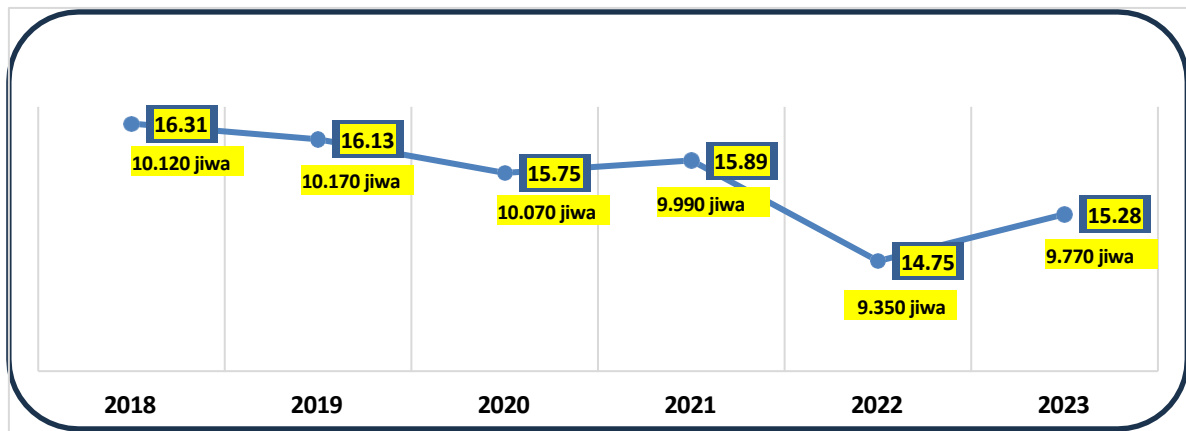
Berdasarkan data di atas, nilai indeks gini Kabupaten Buru Selatan berada di bawah nilai indeks gini provinsi Maluku. Untuk tahun 2023 angka indeks gini Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,24. Nilai koefisien gini yang berada di bawah 0,50 menunjukkan tidak ada ketimpangan distribusi pendapatan



yang serius di Kabupaten Buru Selatan.

3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan ambang batas pendapatan yang dianggap minim untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut ini merupakan kondisi angka kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 – 2023.

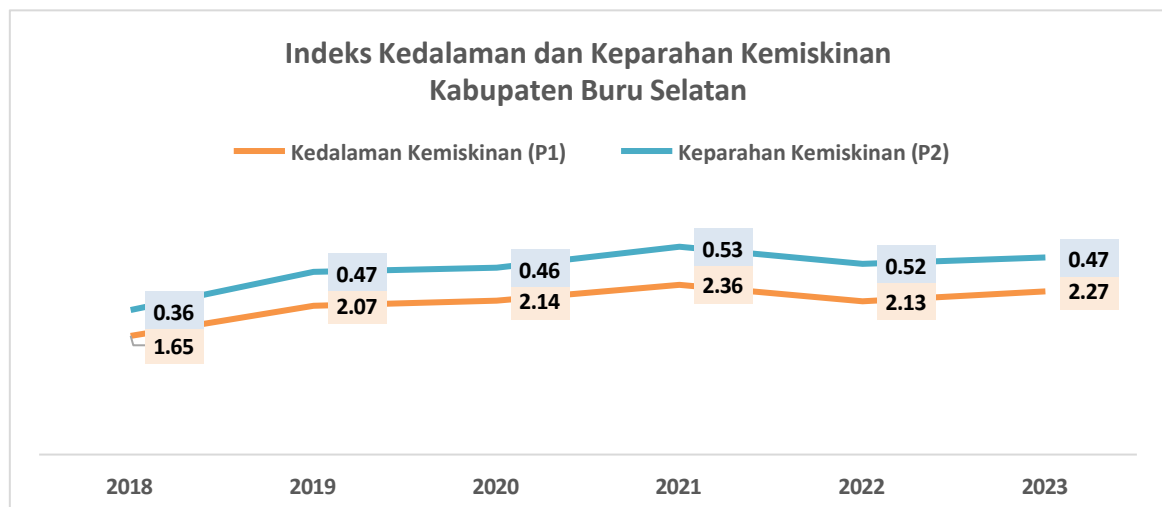


Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah), 2024

Gambar. 2.13. Perkembangan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2023

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa kondisi angka kemiskinan Kabupaten Buru Selatan pada beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang menurun dari tahun 2018 – 2023 dengan pencapaian angka kemiskinan paling rendah di tahun 2022 sebesar 14,75 persen atau sebanyak 9.350 jiwa. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2022 sebesar 0,53 poin atau menjadi 15,28 persen (9.770 jiwa).

Berikut data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2023.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah), 2024

Gambar. 2.14. Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan

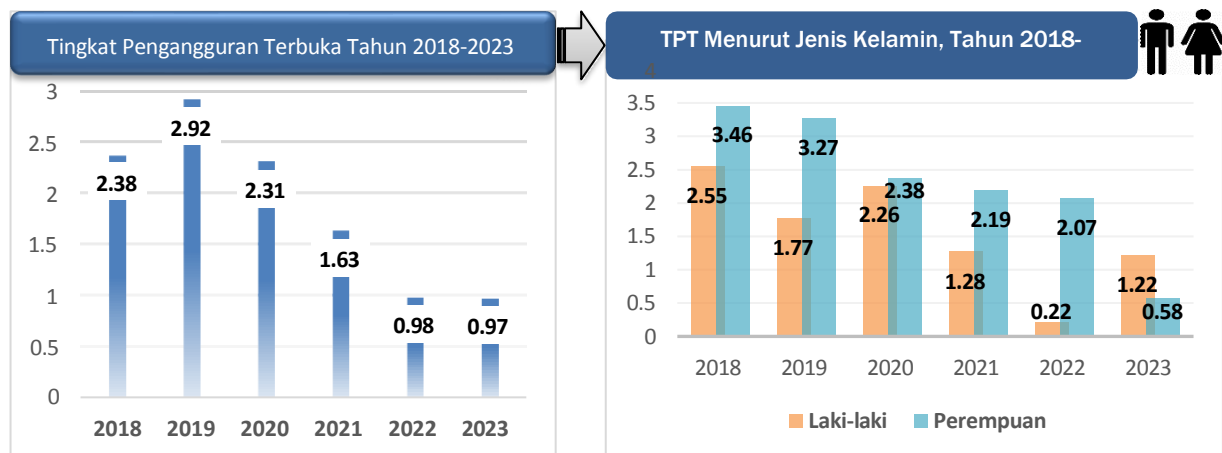


Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2023

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan grafik di atas indeks kedalaman kemiskinan(P1) pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2,27 persen, sementara itu indeks keparahan kemiskinan (P2) kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,47 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berikut data TPT Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2023 secara umum dan berdasarkan jenis kelamin.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah), 2024

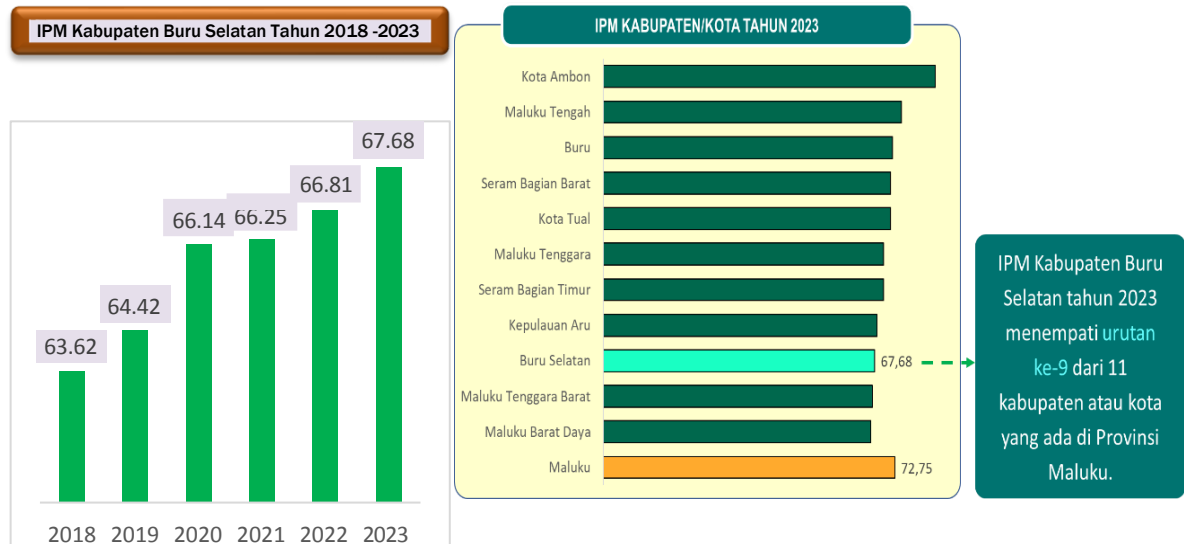
Gambar. 2.15. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 -2023

Berdasarkan gambar di atas, dalam lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Selatan menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang ditunjukkan dengan angka TPT tahun 2023 sebesar 0,97%. Sedangkan berdasarkan data TPT menurut jenis kelamin kecenderungan data menunjukkan bahwa TPT perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki sedangkan pada Tahun 2023, lebih banyak tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dari perempuan yaitu sebesar 1,22 %.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran rata-rata capaian aspek utama pembangunan manusia yang meliputi umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Grafik di bawah ini menggambarkan IPM Kabupaten Buru Selatan dalam rentang waktu 2018 – 2023 meningkat dan mengalami pertumbuhan rata – rata per tahun sebesar 0,812 persen sedangkan pada tahun 2023 IPM Kabupaten Buru Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 persen menjadi 67,68 persen hal ini berarti pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Buru Selatan terus mengalami perbaikan.

Berdasarkan Gambar di Atas Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 menempati posisi kesembilan dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Setelah Kabupaten Kepulauan Aru.



Sumber: BPS Provinsi Maluku (diolah), 2024

Gambar. 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Tahun 2023.

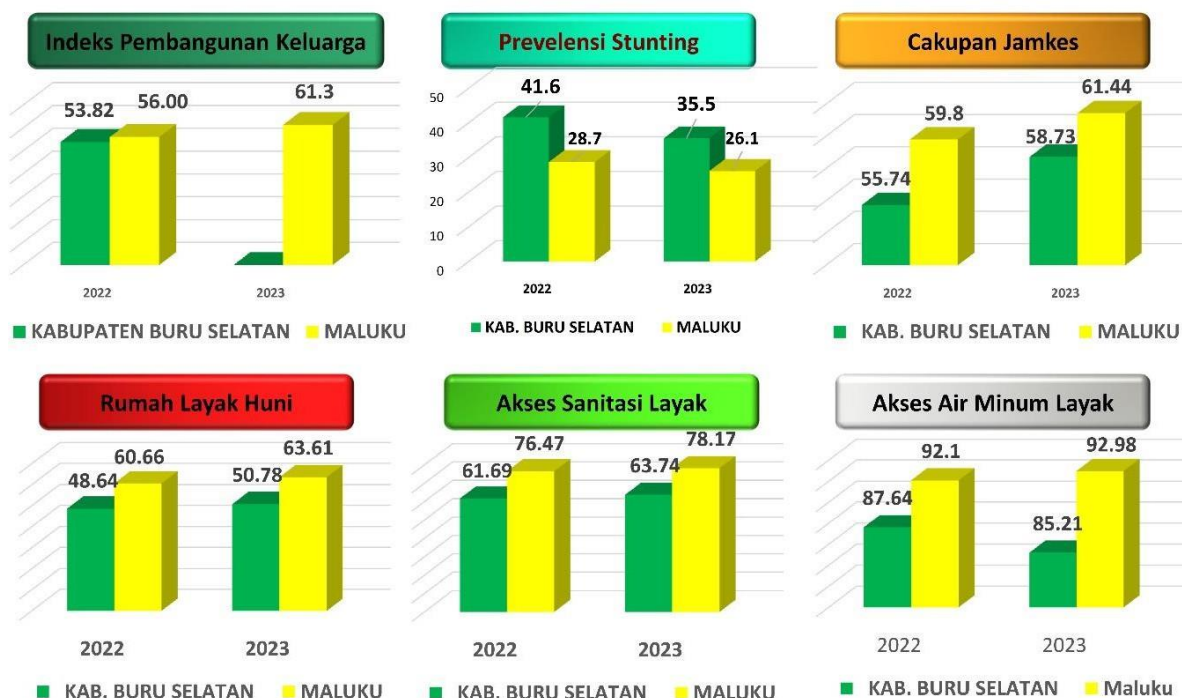
B. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

Aspek Kesejahteraan sosial budaya menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat melalui pengukuran pencapaian beberapa indikator antara indeks keluarga sehat, indeks keluarga sehat, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan pemuda dan indeks pembangunan kebudayaan.

1. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap anggotanya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi dari fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Capaian standar keluarga sehat di Kabupaten Buru Selatan tergambar pada beberapa indikator berupa indeks pembangunan keluarga, prevalensi stunting, cakupan jamkes, rumah layak huni, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak.

- Indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Buru Selatan hingga tahun 2022 tercatat sebesar 53,82 persen berada di bawah provinsi yang mencapai angka 56,00 persen. Prevalensi stunting Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 mencapai 41,60 persen menurun menjadi 35,50 persen pada tahun 2023. Cakupan kepesertaan jaminan, kepemilikan rumah layak huni, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak di Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 dan 2023 berada di bawah angka provinsi. Cakupan kepesertaan jaminan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 tercatat sebesar 58,73 persen, kepemilikan rumah layak huni 50,78 persen, akses sanitasi layak 63.74 persen, dan akses air minum layak 85.21 persen.



Sumber: Siperindu (Sistem Informasi dini pengendalian Penduduk 2024)

Gambar. 2.17. Cakupan Keluarga Sehat di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020 – 2023

3. Indeks Kualitas Keluarga

Tingkat kualitas keluarga diukur menggunakan Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menggambarkan kualitas keluarga yang berkesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB). Penghitungan IKK dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kemen PPPA dengan menggunakan data Susenas.

Kabupaten Buru Selatan turut menyumbang pengukuran capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku yang mencapai angka 74.23 di tahun 2022. Angka tersebut meningkat sebesar 3.94 point dibandingkan tahun sebelumnya. IKK Provinsi Maluku tahun 2022 lebih rendah dibandingkan angka IKK nasional. Nilai IKK Provinsi Maluku tahun 2022 berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan kualitas keluarga pada kategori 'Cukup Responsif Gender dan Hak Anak'. Peningkatan dimensi tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS) yaitu sebesar 8.81 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

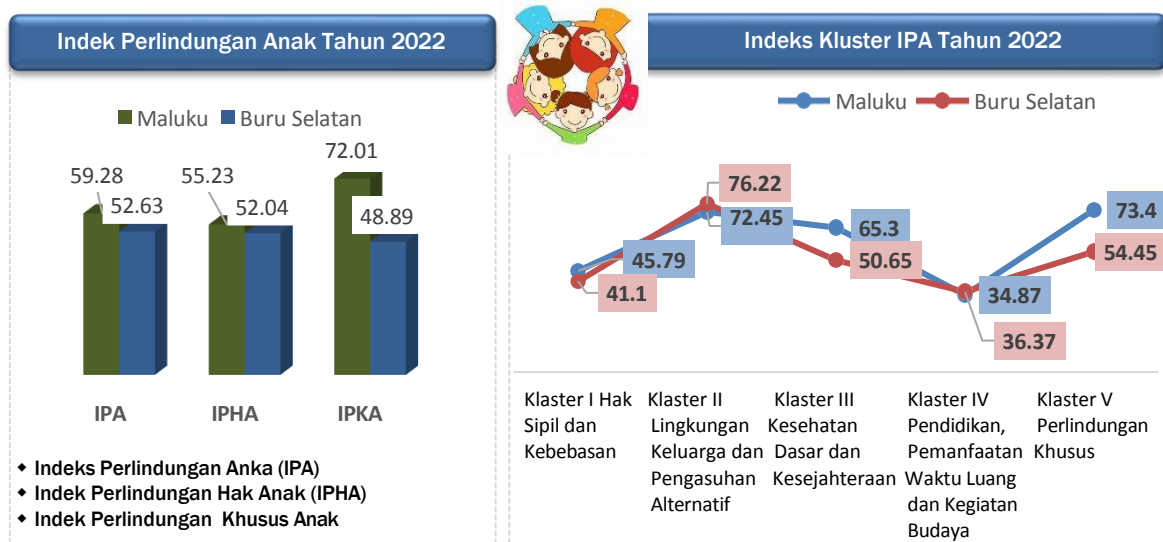
Tabel 2.10. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku Tahun 2021-2022

No.	IKK/Dimensi	Maluku		Perubahan Meningkat	Indonesia (2022)
		2021	2022		
	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	70.29	74.23	3.94	76.53
1	Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)	73.08	81.90	8.81	87.45
2	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)	76.78	78.19	1.41	78.66
3	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	68.01	70.50	2.49	73.08
4	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	61.86	65.46	3.60	70.00
5	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB)	67.05	71.07	4.02	67.17

Sumber: Kementerian Pemberdayaan (Kemen PPPA), 2023

4. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster V: perlindungan khusus. Berikut data indeks perlindungan anak Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

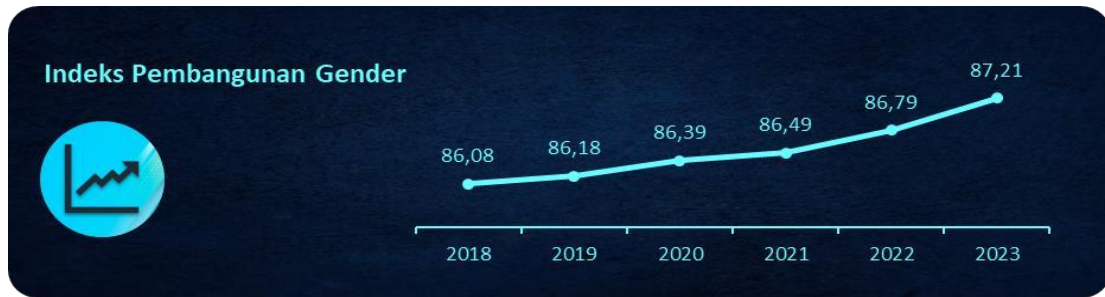
Gambar 2.18. Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Buru Selatan tahun 2022 berada di bawah provinsi, dimana IPA berada pada angka 52.63, IPHA sebesar 52,04 dan IPKA sebesar 48,89.

Untuk angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) secara kluster, angka di atas provinsi adalah kluster I (hak sipil dan kebebasan), kluster III (kesehatan dasar dan kesejahteraan) dan kluster V (perlindungan khusus). Sedangkan angka di atas provinsi adalah kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif) dan IV (pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya).

5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Berikut data IPG Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 - 2023.



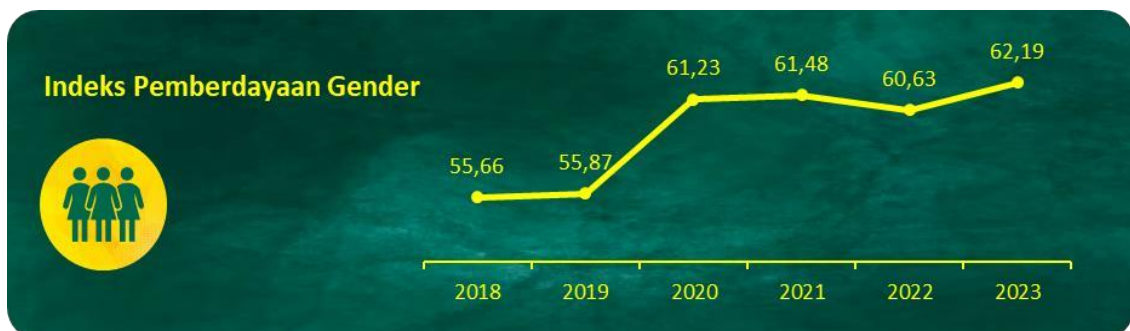
Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Gambar. 2.19. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Buru Selatan mengalami trend kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 indeks pembangunan gender sebesar 87,21 (meningkat dari tahun sebelumnya) yang menunjukkan ketidaksetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Buru Selatan.

6. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Gambar. 2.20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2023

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 – 2021 mengalami kenaikan setiap tahun dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 60,63. Tahun 2023 IDG Kabupaten Buru Selatan sebesar 62,19 persen.

7. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur IKG mencakup proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir; Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun; Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin; Persentase

anggota parlemen menurut jenis kelamin; Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.



Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2024

Gambar.2.21. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2018 – 2023

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Buru Selatan mengalami kenaikan di tahun 2019 dan di tahun 2020 - 2023 mengalami trend penurunan. Tahun 2023 IKG Kabupaten Buru Selatan sebesar 0,598.

8. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pelayanan/pembangunan kepemudaan difokuskan pada upaya penyadaran, pemberdayaan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

Hasil Susenas Maret 2022 menunjukkan persentase pemuda di Kabupaten Buru Selatan 24.79 persen, ini berarti lebih dari seperempat penduduk Kabupaten Buru Selatan berada pada kelompok 16 – 30 tahun. Hasil Susenas Maret 2022 pada seluruh kabupaten/kota di Maluku termasuk Kabupaten Buru Selatan menghasilkan capaian IPP Provinsi Maluku sebesar 52.00 persen, dimana meningkat dua point dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan capaian tersebut didorong oleh peningkatan cukup signifikan dalam capaian domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja. Sedangkan tiga domain lain, yaitu domain pendidikan, domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi.

Tabel. 2.11. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Maluku Tahun 2019-2022

No.	IPP/Domain	Maluku	
		2019	2022
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		50.00	52.00
1	Domain Pendidikan	76.67	76.67
2	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	50.00	55.00
3	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	30.00	35.00
4	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	43.33	43.33
5	Domain Gender dan Diskriminasi	50.00	50.00

Sumber: Profil Pemuda Maluku 2023-BPS Provinsi Maluku, 2023

9. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Pengukuran Indeks Kebudayaan mencakup 7 (tujuh) dimensi, yaitu (1) Dimensi Ekonomi Budaya, (2) Dimensi Pendidikan, (3) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, (4) Dimensi Warisan Budaya, (5) Dimensi Ekspresi Budaya, (6) Dimensi Budaya Literasi, (7) Dimensi Gender.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Buru Selatan diperlukan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan masih terbatas pada hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Maluku. Hasil Riset Kemendikbudristek bersama Kementerian PPN/Bappenas dan BPS mencatat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Maluku tahun 2022 sebesar 55.87 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut berada pada posisi di atas capaian provinsi. Dimensi ketahanan budaya dan dimensi pendidikan berada pada nilai tertinggi dan terendah pada dimensi ekonomi budaya.

**Tabel 2.12. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Maluku
Tahun 2021-2022**

No.	IPK	Maluku		Indonesia	
		2021	2022	2021	2022
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		54.23	55.87	51.90	55.13
1	Dimensi Ekonomi Budaya	14.95	3.81	20.69	26.88
2	Dimensi Pendidikan	65.69	71.77	68.71	72.53
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	78.75	80.70	66.83	69.25
4	Dimensi Warisan Budaya	47.51	48.52	46.63	48.92
5	Dimensi Ekspresi Budaya	39.49	45.09	27.13	31.48
6	Dimensi Budaya Literasi	47.81	51.88	54.29	57.40
7	Dimensi Gender	64.85	63.39	58.55	59.13

Sumber: Riset Kemendikbudristek bersama Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, 2023

9.1. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut seperti Daya Saing Ekonomi Daerah, Daya Saing Sumber Daya Manusi (SDM), Daya saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, Daya Saing Iklim Investasi yang di dalamnya terdapat berbagai indikator pendukung dalam mendorong pembangunan berjalan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9.1.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, seperti Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Indeks Ekonomi Inklusif, Indeks Ekonomi Hijau, Rasio Kewirausahaan, dan beberapa indikator lainnya sesuai konteks daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.13. Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan PDRB (%) ADBHK	5.88	-0.01	3.50	5.53	4.58
2	Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADBHK (Rp)	6.53	-17.42	1.25	3.58	2.72
3	Indeks Ekonomi Inklusif :	4.63	4.60	4.70		
4	Indeks Ekonomi Hijau (%) * Data Maluku	54.55	51.06	71.30	NA	NA
5	Rasio Kewirausahaan * Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (Unit Usaha) * Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	245.00 7.56	255.00 -2.04	265.00 7.38	275.00 5.94	7.98

Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2024 Ket : *Proxy, RKPD Bursel 2021/2022

Laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan produk domestik bruto (PDB) suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah ukuran nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 memiliki nilai yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 sebesar 5,88% turun di tahun 2020 sebesar -0.01 % dan hingga tahun 2023 meningkat menjadi 4.58 % atau mengalami peningkatan sebesar 4,57 %. PDRB dengan sektor basis adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pertanian kehutanan dan perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, real estate serta konstruksi, sedangkan lapangan usaha dengan



kontribusi terbesar tahun 2023 adalah pertanian, administrasi pemerintahan pertanahan

dan jaminan sosial wajib, konstruksi dan perdagangan. Selanjutnya untuk laju pertumbuhan PDRB perkapita (ADBHK) terbesar di tahun 2023 adalah transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial lain, sementara kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2019 mencapai 7.56 persen meningkat menjadi 7.98 di tahun 2023

9.1.2 Potensi Unggulan Daerah

Potensi sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, Kehutanan dan pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Masing-masing sektor ini memiliki karakteristik dan kontribusi yang berbeda, namun secara kolektif mereka dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

a. Pertanian

Potensi sektor pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, sangat besar untuk dikembangkan guna peningkatan ekonomi daerah. Berikut potensi komoditas pertanian di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel. 2.14. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Buru Selatan (Ton).

No	Komoditi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa	7753.80	7.742,00	7.892,00	7963.40	8.090,00
2	Kopi	13.42	14.15	16.02	19.27	14.36
3	Kakao	539.70	554,90	582.40	596.40	612.55
4	Cengkeh	2.278.70	2.278,70	2.246,60	2.339,20	2.277,16
5	Pala	493.00	507.35	515.85	596.40	509.20

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat di gambarkan potensi produk perkebunan Kabupaten Buru Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu ,mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 untuk komoditas kelapa sebesar 7753.80 Ton meningkat menjadi 8.090.00 Ton pada tahun 2023, kemudian untuk produksi kopi tahun 2019 sebesar 13.42 Ton menjadi 14.36 Ton pada tahun 2023. Produksi kakao pada tahun 2019 sebesar 539.70 Ton menjadi 612.55 Ton pada tahun 2023, sementara produksi cengkeh pada tahun 2019 sebesar 2.278.70 Ton menjadi 2.277.16 Ton pada tahun 2023, kemudian produksi pala pada tahun 2019 sebesar 453.00 Ton meningkat menjadi 509.20 Ton pada tahun 2023.

**Tabel. 2.18. Produksi Buah-Buahan dan Sayuran (Kuintal)
Kabupaten Buru Selatan**

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023*
Buah-buahan:				
Alpukat	218	224	252	556
Anggur	-	-	-	-
Apel	-	-	-	-
Belimbing	96	102	108	50
Buah Naga	-	-	-	-
Duku/Langsar/Kokosan	271	289	306	565
Durian	344	357	10.022	1.066
Jambu Air	71	85	90	168
Jambu Biji	92	102	108	272
Jeruk Pamela	164	171	180	97
Jeruk Lemon	-	-	-	-
Jeruk Siam/Keprok	156	160	1.672	427
Lengkeng	-	-	-	-
Mangga	376	389	3.311	694
Manggis	172	187	198	678
Nenas	207	218	220	371
Nangka	381	410	414	570
Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023*
Pepaya	196	202	1.645	359
Pisang	1.279	1.306	2.198	2.31
Rambutan	113	117	119	307
Salak	127	113	1.374	34
Sawo	-	-	-	-
Sirsak	11	11	13	29
Sukun	147	151	158	120
Sayuran:				
Melinjo	-	-	-	-
Petai	39	44	45	303

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka 2024

b. Peternakan

Peternakan merupakan sektor penting yang memiliki berbagai potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Produk dari sektor peternakan memberikan sumber protein hewani: daging sapi, ayam, kambing, dan babi adalah sumber protein hewani utama yang penting untuk gizi masyarakat. Produk Susu Segar dan Produk Olahan Susu. Produk Telur Ayam merupakan sumber protein hewani murah dan mudah diakses.

Tabel. 2.19. Jumlah Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Buru Selatan (ekor) Tahun 2023

Kecamatan	Sapi Bali	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam Kampung	Itik Manila
Kepala Madan	422	203	3.835	122	38.487	1.208
Leksula	842	-	444	2.268	5.245	661
Fena Fafan	451	-	154	1.153	2.626	175
Namrole	616	40	304	193	228.685	1.926
Waesama	545	16	799	91	166.05	3.125
Ambalau	389	-	1.735	-	250.978	1.447
Buru Selatan	3.265	259	7.271	3.827	692.071	8.542

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka 2024

c. Perikanan

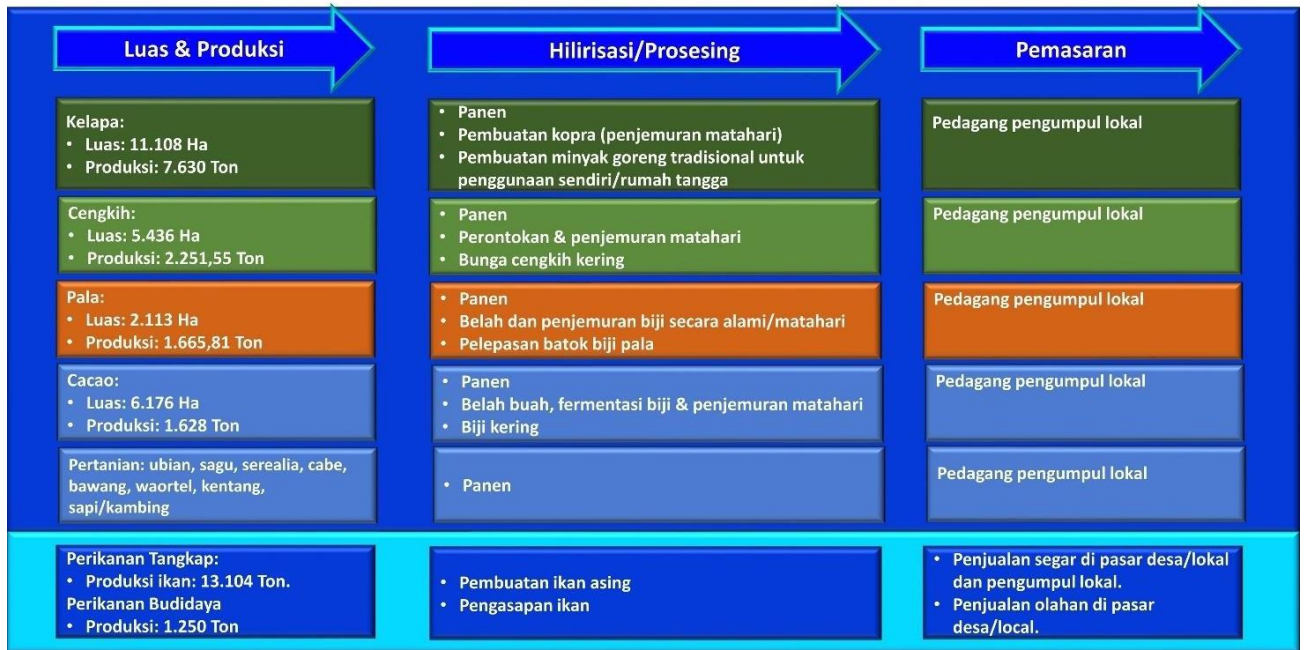
Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi perikanan yang besar yang berasal dari dua sumber utama: perikanan laut dan perikanan darat. Perairan laut di Kabupaten Buru Selatan kaya akan berbagai jenis ikan seperti tuna, cakalang, tongkol, kerapu, dan kakap. Sedangkan perikanan darat berasal dari Budidaya Ikan Air Tawar. Potensi perikanan laut di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 mencapai 14.933.01 Ton, sementara perikanan darat mencapai 3.050 Ton yang terdapat di Kecamatan Leksula dan Namrole.

Tabel. 2.20. Produksi Hasil Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan (Ton) 2022

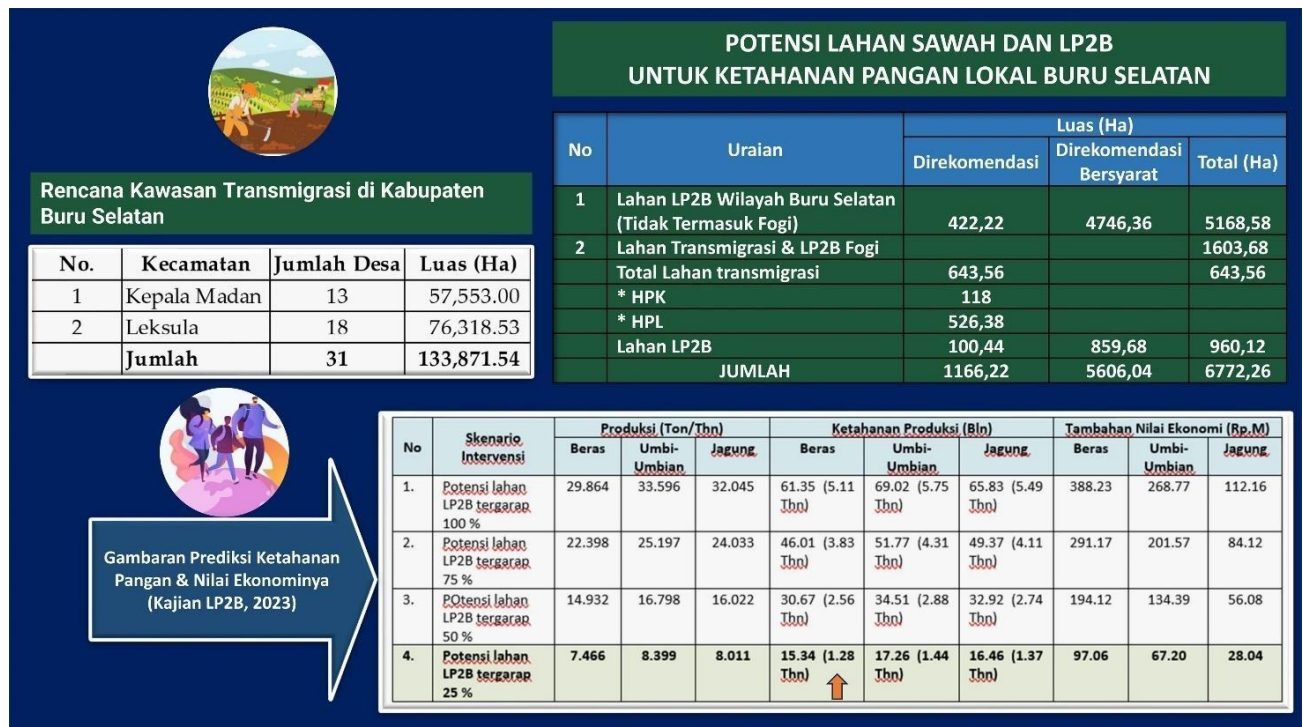
Kecamatan	Produksi (Ton)		
	Ikan Laut	Ikan Darat	Jumlah
Kepala Madan	5.223.87	-	5.223.87
Leksula	2.983.30	1.853	4.836.30
Fena Fafan	-	-	-
Namrole	3.729.10	1.197	4.926.10
Waesama	1.789.98	-	1.789.98
Ambalau	1.206.84	-	1.206.84
Buru Selatan	14.933.01	3.050	17.983.01

Sumber : Kabupaten Buru Selatan dalam Angka 2023

POTENSI PERKEBUNAN & PERIKANAN UNGGULAN BURU SELATAN (PSP LP2B, 2023)



Gambar 2.22. Hilirisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Unggulan di Kabupaten Buru Selatan



Gambar 2.23. Potensi Lahan Sawah dan KP2B untuk Ketahanan Pangan Lokal di Kabupaten Buru Selatan, 2023

Berdasarkan hasil kajian kawasan pangan pertanian berkelanjutan (KP2B) tahun 2023 terdapat penetapan luas KP2B di Kabupaten Buru Selatan sebesar 5.168.58 Ha, sementara rencana pengembangan kawasan transmigrasi desa Fogi Kecamatan Kepala Madan 643.56 Ha.



d. Kehutanan

Luasan kawasan hutan Kabupaten Buru Selatan seluas 342.351.75 Hektar dengan rincian sebagai berikut, hutan lindung seluas 76,263.65 hektar, hutan produksi terbatas seluas 95,113.88 hektar, hutan produksi tetap seluas 86,922.13 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 83,661.14 hektar, Ekosistem Mangrove seluas 138,19 hektar dan Kawasan Hutan adat seluas 52,72 hektar.

Tabel. 2.21. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Buru Selatan (Ton) 2023

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)						Total
		Ambalau	Fena Fafan	Kepala Madan	Leksula	Namrole	Waesama	
1	Hutan Lindung (HL)	2.655,73	6.012,92	19.355,36	25.853,00	5.795,96	16.590,68	76.263,65
2	Hutan Produksi Tetap (HPT)	-	10.699,40	6.716,46	28.666,57	18.212,21	22.627,53	86.922,17
3	Hutan Produksi konversi (HPK)	2.307,83	31.946,24	17.777,19	17.251,87	11.474,82	2.903,19	83.661,14
4	Hutan Produksi terbatas(HPTS)	-	5.107,02	39.083,20	11.461,93	24.727,74	14.733,99	95.113,88
5	Ekosistem Mangrove	-	-	1,11	83,18	8,36	45,54	138,19
6	Kawasan Hutan Adat	-	-	-	-	-	52,72	52,72
Total Kawasan Hutan								342.151,75

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043



9.1.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Beberapa indikator yang dapat dilihat meliputi Indeks Pendidikan, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Tabel 2.21. Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pendidikan :					
	*Harapan Lama Sekolah (Thn)	12.68	12.69	12.70	12.83	12.84
	*Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	7.70	7.94	7.95	8.06	8.23
2	Angka literasi/numerasi :					
	*Angka Melek Huruf *	96.00	96.50	97.00	95.33	95.73
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					48.9600
4	Indeks Literasi Digital					
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73.54	73.99	75.39	74.82	66.72
	- Laki-laki	85.57	84.19	82.76	85.33	81.08
	- Perempuan	61.03	63.29	65.28	63.84	55.7
	Angka Ketergantungan	61.9	60.8	59.8	58.9	58.1

Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2024 *Proxy, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2024

Berdasarkan data Indeks pendidikan, proxy harapan lama sekolah dari tahun 2019 sebesar 12.68 tahun mengalami peningkatan lama sekolah sebesar 12.84 tahun di tahun 2023, dengan rata-rata lama sekolah pada 2019 sebesar 7.70 tahun mengalami peningkatan lama sekolah di tahun 2023 sebesar 8.23 tahun. Sedangkan dari tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2019 sebesar 73.54 % menurun tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 66.72 % di tahun 2023. Perkembangan indikator ini berfluktuatif dalam 5 tahun terakhir yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi regional dan perkembangan politik global sehingga benang merah perbaikan indikator ini dapat ditempuh melalui mendorong sektor-sektor ekonomi baru yang menjadi triger bagi sektor ekonomi lainnya terutama ekonomi lokal.

9.1.4 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi dari segi aksesibilitas daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari berbagai data meliputi Indeks Infrastruktur/Indeks, Kualitas Layanan Infrastruktur dan indikator lainnya sesuai konteks

daerah aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

Tabel 2.22. Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Infrastruktur/Indeks					
	* Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	396.11	417.36	438.61		
	* Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) (Km)	355.91	377.16	398.41	465.95	384.29
2	Kualitas Layanan Infrastruktur Ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, efektifitas pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja, kontribusi pada perekonomian					
3						

Ket. * : Indikator Proxy untuk Indeks Infrastruktur

Sumber : BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2024

Aksesibilitas daerah sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Berdasarkan Data Kabupaten Buru Dalam Angka Tahun 2022, diketahui bahwa Ruas Jalan Kabupaten di Buru Selatan pada tahun 2022 adalah sepanjang 519.80 Km, antara lain meliputi jalan provinsi sepanjang 101.85 Km, dan jalan Kabupaten sepanjang 465.95 Km. Jalan yang telah diaspal mencapai 72.25 Km, dalam bentuk kerikil sepanjang 11.20 Km. Panjang jalan menurut kondisi jalan terdapat 32.65 Km berstatus baik, 2.00 Km berstatus sedang, 6.40 Km berstatus rusak, dan 60.80 Km rusak berat.

9.1.5 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian dan daya saing daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Buru Selatan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Daya Saing Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah

Tabel 2.23. Perkembangan Pertumbuhan Daya Saing Investasi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Demokrasi, Maluku :	68.22	73.22	66.76	73.26	
2	Indeks Rasa Aman : * Rasio Kriminalitas (%) * Angka Kriminalitas (%)	2.45 1.65	2.30 1.30	2.15 0.95	0.02	
3	Indeks Ketentraman dan Ketertiban : * Jumlah demonstrasi (kali)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama					
5	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : *Proxy, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2024

Berdasarkan data di atas untuk indeks demokrasi Indonesia, proxy data Maluku 2019 sebesar 68.22 % meningkat di tahun 2022 menjadi 73.26. IDI memiliki 3 aspek penyusun, yaitu Kebebasan politik, hak sipil, dan lembaga demokrasi. Dalam 5 tahun terakhir indikator penyusun IDI yang mengalami penurunan seperti kebebasan sipil, sedangkan untuk indikator hak politik dan indikator lembaga demokrasi mengalami kenaikan. Selanjutnya indeks rasa aman di kabupaten Buru Selatan, (proxy) angka kriminalitas tahun 2019 sebesar 1.65 mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0.22 %, hal ini dapat menjadi modal dasar dalam mendorong investasi di daerah dari aspek keamanan dan ketertiban.

9.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek pelayanan umum di Kabupaten Buru Selatan diukur dengan indikator seperti terlihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Indikator-Indikator Pelayanan Umum Kabupaten Buru Selatan

Indikator	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		-	
Indeks Tata Kelola Pengadaan ¹	4 (Kurang)	16,1 (Kurang)	22,01 (Kurang)
Indeks Pelayanan Publik (PP) ²	C- (2.08)	C-(2,05)	C-(2,18)
Indeks Inovasi Daerah (ID) ³	7,0 (Kurang Inovatif)	12,90 (Kurang Inovatif)	13,30 (Kurang Inovatif)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ⁴	N/A	1,14 (Kurang)	1,44 (Kurang)
Indeks SAKIP ⁵	C	C	C

Indikator	2021	2022	2023
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ⁶	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber:

- 1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021-2023)
- 2) Keputusan Menteri PAN RB Nomor 86 Tahun 2022; Nomor 1035 Tahun 2022 dan Nomor 795 Tahun 2023
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-115 Tahun 2019; Nomor 100-4672 Tahun 2020; Nomor 002.6-5848 Tahun 2021; Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022; dan Nomor 400.10.11-6287/Tahun 2023.
- 4) Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1503 Tahun 2021; Nomor 108 Tahun 2023 dan Nomor 13 Tahun 2024.
- 5) <https://1data.menpan.go.id>
- 6) <https://elppd.kemendagri.go.id>

1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan umum di Kabupaten Buru Selatan. Indeks RB ini dijelaskan melalui Indikator proxy, yaitu indeks tata kelola pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu pertama indikator pemanfaatan sistem pengadaan yang meliputi SIRUP, e-tendering, e-purchasing, non e-tendering dan non e-purchasing, dan e-kontrak. Kedua indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dan ketiga yaitu indikator tingkat kematangan UKPBJ.

Indeks Tata Kelola Pengadaan di Kabupaten Buru Selatan berada pada kategori "kurang" dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) dengan nilai antara 4 hingga 22.01, ini menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

2. Indeks Pelayanan Publik (PP)

Indeks pelayanan publik dipengaruhi oleh 6 aspek sebagai berikut. pertama aspek kebijakan pelayanan yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat. Kedua aspek profesionalisme SDM yang meliputi kompetensi, responsivitas, kode etik, penghargaan dan sanksi dan budaya pelayanan. Ketiga, aspek sarana dan prasarana pelayanan publik yang meliputi parkir dan ruang tunggu, sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lainnya dan sarana front office. Keempat, aspek sistem informasi pelayanan publik yang meliputi sistem informasi elektronik, sistem informasi non elektronik. Kelima, Aspek konsultasi dan pengaduan yang meliputi konsultasi, pengaduan dan enam Aspek inovasi.

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Buru Selatan berada pada kategori cukup dengan catatan (C-) dengan rentang nilai antara 2,08 hingga 2,18 dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), ini menandakan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi masyarakat. Permasalahan dimaksud adalah Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, Unit belum memperhatikan pengembangan kapasitas SDM, Sarana prasarana belum memadai, dan Media SIPP, konsultasi dan pengaduan serta inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.

3. Indeks Inovasi Daerah (ID)

Indeks inovasi daerah terdiri dari dua persyaratan yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum mencakup pertama, mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Kedua, Memberi manfaat bagi

daerah dan/atau masyarakat. Ketiga, Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kelima, Dapat direplikasi.

Indeks Inovasi Daerah pada tiga tahun terakhir (2021-2023) berada pada kategori "kurang inovatif", hal ini menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang menghambat kemampuan daerah untuk menghasilkan ide-ide baru dan menerapkan inovasi dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain, Kurangnya Budaya Inovasi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi yang Terbatas, Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung, Kurangnya Investasi dalam R&D, dan Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang Rendah.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Pelaksanaan SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Buru Selatan pada dua tahun terakhir (2022-2023) berada pada kategori "kurang", ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat implementasi dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah tersebut, antara lain Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, Kurangnya Investasi dalam Teknologi, Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan SDM, Ketidakpatuhan terhadap Standar Keamanan dan Privasi dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat.

5. Indeks SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi dan penilaian SAKIP pada setiap instansi pemerintah termasuk di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi oleh 4(empat) kriteria, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 berada pada kategori nilai "C". Hal ini menunjukkan terdapat sejumlah permasalahan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD)

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Buru Selatan pada tiga tahun terakhir (2021-2023) berada pada kategori rendah, ini menandakan adanya sejumlah permasalahan yang mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mengelola sumber daya secara optimal, antara lain Keterbatasan Akses dan Kualitas Layanan Publik, Korupsi dan Nepotisme, Ketidaktransparan dan Kurangnya Akuntabilitas dan Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya.

9.4 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2009-2029

9.4.1 Capaian Pembangunan

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buru Selatan periode 2009–2029 adalah “Terwujudnya Buru Selatan sebagai Kabupaten Agrobisnis yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buru Selatan, maka disusunlah 5 (lima) misi dengan sasaran pokok pembangunan (Tabel 2.25).

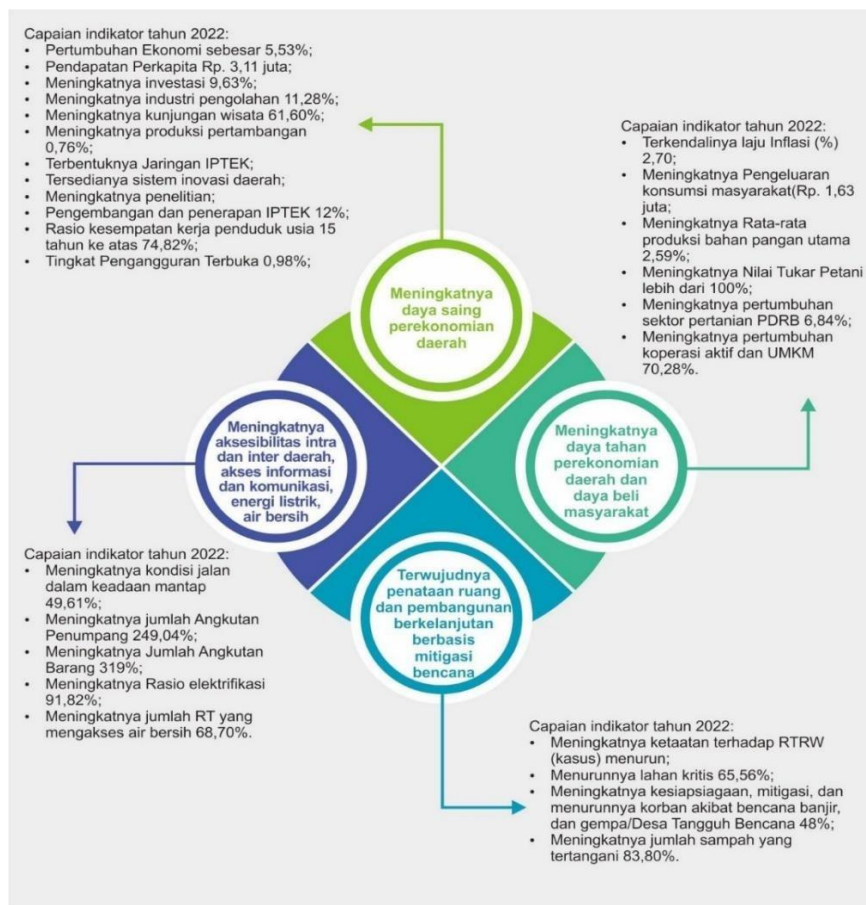
Tabel 2.25. Visi, Misi dan Sasaran Pokok

VISI	MISI	SASARAN POKOK
Terwujudnya Buru Selatan Sebagai Kabupaten Agrobisnis Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan	1. Membangun Kemandirian dan Daya Saing Daerah berbasis potensi unggulan lokal	1. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah; 2. Meningkatnya daya tahan perekonomian daerah dan Meningkatnya daya beli masyarakat; 3. Meningkatnya aksesibilitas intra dan inter daerah, serta akses informasi dan komunikasi, energi listrik, dan air bersih; 4. Terwujudnya penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.
	2. Mewujudkan masyarakat Buru Selatan yang berkualitas, berakhlak mulia, memiliki jati diri dan berbudaya	1. Meningkatnya kualitas masyarakat; 2. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan serta prestasi pemuda di bidang olah raga; 3. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta toleransi antar umat beragama; 4. Makin mantapnya kehidupan masyarakat Buru Selatan Yang berbudaya
	3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang tentram, tertib, dan demokratis	1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang aman, damai, tertib, dan taat hukum; 2. Terwujudnya kelembagaan demokrasi yang kuat dan professional serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat
	4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial; 3. Menurunnya ketimpangan pembangunan; 4. Menurunnya ketimpangan gender; 5. Tercapainya pertumbuhan penduduk yang tumbuh seimbang

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas; 2. Terwujudnya pemerintahan daerah yang professional dan efisien; 3. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih; 4. Meningkatnya kemandirian daerah; 5. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
---	---

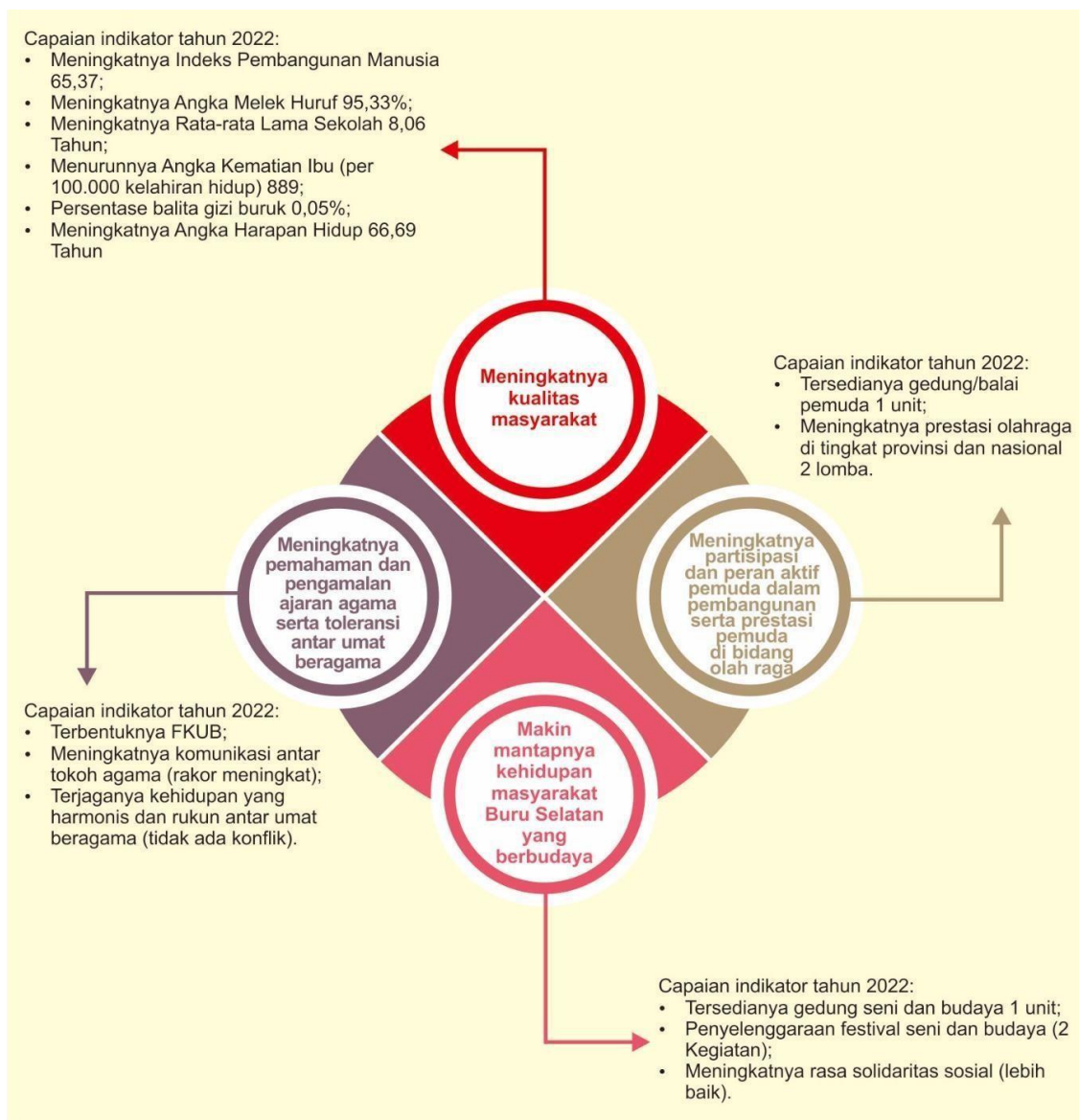
Evaluasi RPJPD 2009-2029 Kabupaten Buru Selatan didasarkan atas capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, pembangunan Kabupaten Buru Selatan telah memasuki periode ketiga dari RPJMD dengan arah kebijakan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang untuk mewujudkan Kabupaten Buru Selatan sebagai Kabupaten Agrobisnis Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan dengan menekankan peningkatan daya saing berbasis agroindustri dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Capaian keberhasilan RPJPD Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 diperlihatkan oleh indikator pembangunan baik secara makro maupun mikro, dimana sebagian besar indikator mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa misi dan sasaran pokok pembangunan mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Buru Selatan ke arah yang lebih baik.

Misi 1: Membangun Kemandirian dan Daya Saing Daerah berbasis potensi unggulan lokal.



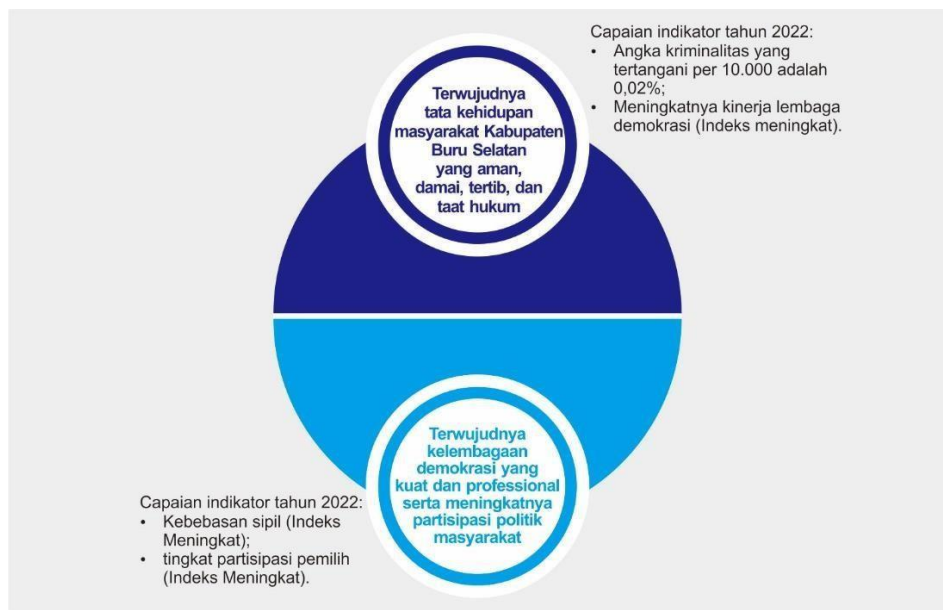
Gambar 2.26. Capaian Indikator Misi 1 RPJPD 2009-2029 Kabupaten Buru Selatan

Misi 2: Mewujudkan masyarakat Buru Selatan yang berkualitas, berakhlak mulia, memiliki jati diri dan berbudaya.



Gambar 2.27. Capaian Indikator Misi 2 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029

Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang tentram, tertib, dan demokratis.



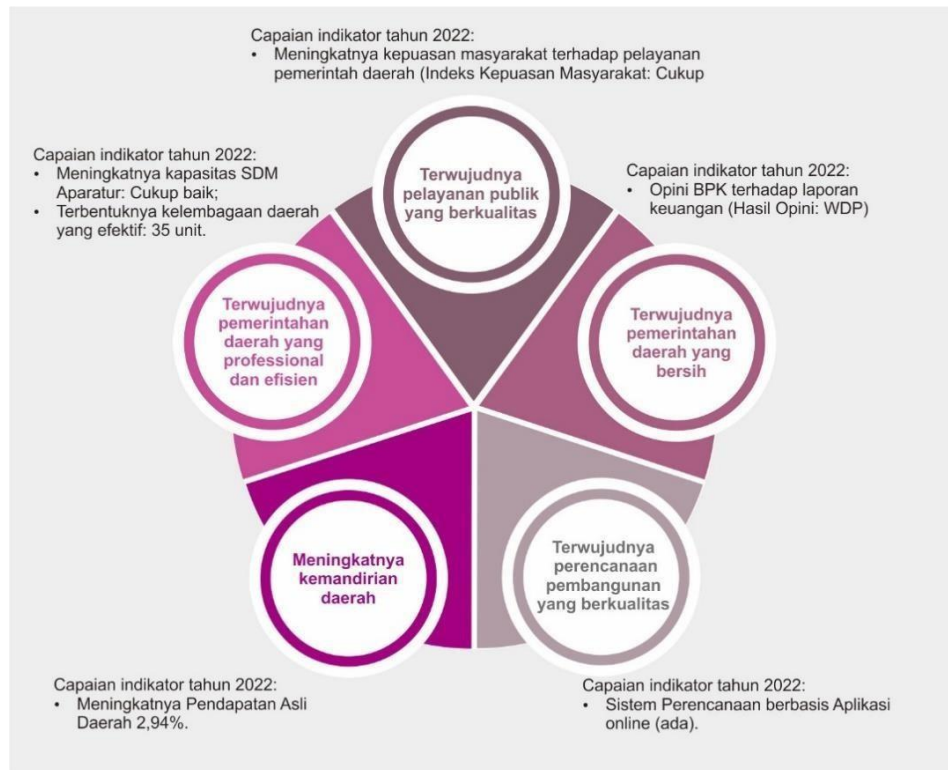
Gambar 2.28. Capaian Indikator Misi 3 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029

Misi 4: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Pembangunan.



Gambar 2.29. Capaian Indikator Misi 4 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



Gambar 2.30. Capaian Indikator Misi 5 RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029

Capaian indikator makro pembangunan pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa pembangunan di Kabuapten Buru Selatan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Semua indikator mengalami peningkatan, kecuali pertumbuhan ekonomi yang turun 16,59% dalam 10 tahun terakhir (Tabel 2.26). Meskipun demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Buru Selatan tergolong stabil pada tahun 2022. Peningkatan capaian indikator makro pada tahun 2022 menjadi modal dasar untuk pembangunan Kabupaten Buru Selatan hingga 20 tahun ke depan.

Tabel 2.26 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal (2011)	Capaian Tahun 2022	Pertumbuhan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	58.91	65.37	10.97	Meningkat
2	Angka Kemiskinan	19.33	14.75	-23.69	Menurun
3	Angka pengangguran (TPT)	6.33	0.98	-84.52	Menurun
4	Pertumbuhan Ekonomi	6.63	5.53	-16.59	stabil
5	Pendapatan Perkapita (ADHB)	607,380.63	1,627,227.44	167.91	Meningkat
6	Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)	-	0.24	0.24	Meningkat
7	PDRB Per Kapita (ADHK)	560,886.95	974,295.57	73.71	Meningkat
8	Pembangunan Desa Mandiri	0	1	100	Meningkat

Sumber: Evaluasi RPJPD 2009-2029 Kabupaten Buru Selatan tahun 2022



**Tabel 2.27 Posisi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
Kabupaten Buru Selatan 2022**

INDIKATOR		NASIONAL	MALUKU	BURU SELATAN
A BIDANG EKONOMI				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,11	5,53
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,57	16,23	14,75
3	Rasio Gini	0,381	0,306	0,24
4	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6	5,63	
B BIDANG SOSIAL				
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	70,22	65,37
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	6,88	0,98
Kondisi Kesehatan				
7	Umur Harapan Hidup (UHH)(Thn)	71,85	68,79	66,50
8	Prevalensi Stunting (%)	21,60	26,10	41,60
9	Jumlah Kab/Kota Belum Tereliminasi Malaria** (Kab/Kota)	196	8	-
Kondisi Pendidikan				
10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Thn)	8,69	10,19	9,54
11	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Thn)	13,10	14,00	12,83
12	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	• SD/Sederajat (%)	97,88	96,90	82,03
	• SMP/Sederajat (%)	80,89	78,37	67,89
	• SMA/Sederajat (%)	61,97	64,57	68,58
Jaminan Sosial				
13	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	86,90	93,0	92,36
14	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)			
	• Pekerja Formal (%)	56,19	55,91	
	• Pekerja Informal (%)	13,06	26,67	
C BIDANG SARANA DAN PRASARANA				
15	Tampungan per Kapita (m ³ /Kap)	57,53	0,03	
16	Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	19,47	22,86	
17	Sanitasi Aman (%)	10,16	5,01	
18	Penanganan Persampahan***(%))	33,27	21,06	74,00**)
19	Rumah Layah Huni (%)	60,66	60,66	62,35**)
20	Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita (kWh)	1.122	315,25	
21	Porsi Kapasitas Pembangkit Listrik Terbarukan (%)	15,47	0,77	
22	Jangkauan 4G di Kawasan Pemukiman (%)	96,97	94,33	39,25
23	Kemantapan Jalan*			
	• Nasional (%)	92,55	92,13	
	• Provinsi (%)	74,46	60,58	
	• Kabupaten (%)	62,26	55,74	76,95**)
D BIDANG TATA KELOLA				
24	Indeks Pelayanan Publik		Baik (3,51 – 4)	-C*) (2,01 – 2,50)
25	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,43	75,61	
26	Indeks Integritas	71,94	60,57	67,41*)
E BIDANG LINGKUNGAN HIDUP & KEBENCANAAN				

Sumber : BPS Buru Selatan, 2022

Potret pembangunan Kabupaten Buru Selatan yang diperlihatkan pada Tabel 2.27 merupakan sebuah gambaran terkait kondisi dan posisi capaian pembangunan terkini Kabupaten Buru Selatan baik itu di tingkat Provinsi maupun Nasional. Pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan cukup baik karena indikator capaiannya lebih dari rata-rata Provinsi Maluku dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan pada periode 2009-2022 masih perlu dibenahi karena belum optimal, dimana persentase penduduk miskin di Kabupaten Buru Selatan masih tergolong tinggi, yakni di atas 10%. Sebagai kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2008, pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan pada periode 2009-2022 mengalami beberapa tantangan yang menghambat pencapaian pembangunan pada periode tersebut, seperti Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu kejadian global yang secara tidak langsung memberikan dampak bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan. Pada masa tersebut terjadi beberapa hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi -0,01%; penurunan PDRB menjadi 17,94 juta Rupiah; penurunan investasi menjadi 2,08%; industri pengolahan turun menjadi -0,95; dan sebagainya.

Pembangunan bidang sosial di Kabupaten Buru Selatan belum optimal, masih terdapat indikator yang berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku dan Nasional. Secara lokal, IPM di Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan hingga tahun 2022, namun peningkatan tersebut belum optimal karena masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku dan Nasional. Layanan kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih menjadi tantangan dalam periode pembangunan 2009-2022. Indikator UHH yang rendah dan prevalensi stunting yang tinggi masih menjadi persoalan utama. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan tenaga medis terutama di wilayah terpencil, sehingga masih ada kelahiran yang tidak ditangani oleh tenaga medis, dan masih menggunakan proses persalinan secara tradisional. Selain itu, persoalan gizi bagi ibu hamil dan balita menjadi ironis mengingat kondisi Kabupaten Buru Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi pangan yang besar. Layanan pendidikan juga masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Buru Selatan. HLS dan APM tingkat SMP/ sederajat yang rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku dan Nasional, harus menjadi perhatian khusus dalam upaya pengembangan SDM di wilayah tersebut. Hal tersebut diakibatkan oleh Angka Putus Sekolah (APS) yang tergolong tinggi di wilayah tersebut. Kemudian, pendataan terkait kemiskinan belum valid karena masih ada keluarga miskin yang tidak masuk dalam *baseline* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, data PMKS, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I belum valid. Kesempatan kerja di Kabupaten Buru Selatan masih rendah karena keterbatasan lapangan kerja formal. Hal ini mengakibatkan rasio ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja.

Pembangunan sarana dan prasarana layanan umum di Kabupaten Buru Selatan masih belum optimal terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Aksesibilitas dan konektivitas masih menjadi persoalan utama karena

terbatas di beberapa wilayah yang mengakibatkan keterisolasian wilayah. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap sentra-sentra ekonomi, akses layanan umum, kerawanan pangan, pengembangan potensi destinasi wisata, dan persoalan sosial lainnya. Kondisi real yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan adalah sebagian besar akses jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan mengalami kerusakan dan bahkan belum ada. Hal tersebut disebabkan oleh kesulitan geografis, keterbatasan anggaran pembangunan jalan dan jembatan, kurangnya dokumen pendukung lainnya, serta bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Hal ini juga berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana angkutan umum dan barang di Kabupaten Buru Selatan yang harganya tergolong mahal. Sarana dan prasarana telekomunikasi masih belum memadai karena jumlah menara Telkomsel (BTS Merah Putih) belum tersebar pada 81 desa secara memadai sehingga akses komunikasi dan internet masih terbatas. Selain itu, pasokan bahan bakar minyak (BBM), barang konsumsi masyarakat melalui Tol Laut belum memenuhi kebutuhan, sehingga butuh tambahan pasokan dari Ambon. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kelangkaan BBM di wilayah tersebut sehingga terciptanya disparitas harga barang dan tingginya harga barang konsumsi. Pasokan listrik dari PT. PLN belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena jaringan listrik belum terdistribusi merata pada 81 desa. Pertumbuhan penduduk yang meningkat tidak sebanding dengan tersedianya air minum. Pengelolaan dan ketersediaan air bersih di Kabupaten Buru Selatan belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana air bersih, jaringan perpipaan sering rusak karena tanah longsor dan banjir.

Inovasi daerah di Kabupaten Buru Selatan masih tergolong rendah karena tidak didukung oleh alokasi anggaran dan hasil riset terkini. Hal tersebut disebabkan oleh jaringan IPTEK daerah yang masih rendah karena belum tersedianya perguruan tinggi, serta belum terbentuknya Badan Riset Daerah (BRIDA) Buru Selatan. Implementasi kelitbangan di Kabupaten Buru Selatan juga masih terbatas akibat dari alokasi dan keterbatasan anggaran. Pengembangan kawasan potensi pertambangan di Kabupaten Buru Selatan belum optimal, karena masih berada pada kawasan adat sehingga perlu izin dan pelepasan hak. Di sisi lain, kewenangan dan izin usaha pertambangan tidak di bawah kendali (di luar kewenangan) Kabupaten Buru Selatan. Dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM), kesiapan SDM Aparatur untuk menciptakan inovasi dan daya saing masih rendah, sehingga berdampak pada tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Kualitas SDM koperasi di Kabupaten Buru Selatan masih terbatas, sehingga masih banyak koperasi yang tidak aktif.

9.4.2 Rekomendasi

Berdasarkan capaian pembangunan 2009-2022, maka terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian, sekaligus sebagai landasan dalam memberikan rekomendasi bagi penyusunan RPJPD 2025-2045. Selain itu, pembangunan Kabupaten Buru Selatan dituntut lebih progresif dalam 20 tahun kedepan karena harus mendukung Visi Indonesia Emas di tahun 2045. Isu-isu terkait evaluasi RPJPD 2009-2029 sebagai berikut:

9.4.2.1 Kabupaten Buru Selatan sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi

penyanggah ekonomi Provinsi Maluku dan wilayah timur Indonesia, maka harus terus meningkatkan capaian indikator makro pembangunan yang terdiri Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku.

- 9.4.2.2** Kabupaten Buru Selatan harus mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki seperti pertanian (termasuk perkebunan dan kehutanan) dan kelautan. Potensi pertanian yang besar di Kabupaten Buru Selatan menjadi modal dasar dalam meningkatkan ketahanan pangan yang bertujuan untuk terwujudnya kedaulatan pangan. Di sisi lain, belum ada komitmen yang kuat oleh berbagai pihak yang mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Buru Selatan. Salah satunya adalah optimalisasi hasil tanaman pangan dan yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Buru Selatan sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Maluku. Demikian juga pada sektor kelautan, perlu adanya komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Potensi hasil perikanan di Kabupaten Buru Selatan menjadi primadona dalam sektor perdagangan Indonesia karena diproyeksikan oleh pemerintah pusat sebagai komoditas unggulan ekspor. Hal tersebut didasarkan atas letak geografis Kabupaten Buru Selatan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Banda (WPP 714), dengan potensi lestari sebesar 788.939 ton per tahun, dimana tingkat produksi perikanan tangkap mencapai 14.935 ton per tahun, dalam mendukung produksi perikanan tangkap Pemerintah Daerah Buru Selatan telah menyediakan 427 unit kapal penangkap ikan, dan masuk dalam Kawasan Strategis Laut Banda (KSN Laban), serta berada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI III).
- 9.4.2.3** Perbaikan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. Mesti ada gebrakan dan berpikir *out of the box* agar Kabupaten Buru Selatan menjadi Kabupaten pelabuhan dalam mengoptimalkan kekayaan laut. Sebagai contoh kapal-kapal perikanan yang berizin harus mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan yang sudah ditentukan. Tujuannya agar pendaratan ikan tidak lagi tersentralisasi di Jawa dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
- 9.4.2.4** Perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi pekerjaan selanjutnya bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagai penggerak utama birokrasi dan pertumbuhan kabupaten. Perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi hal penting untuk dilakukan karena nilai reformasi birokrasi berdampak masih kecil, laporan akuntabilitas kinerja yang masih rendah, manajemen SDM yang perlu ditingkatkan kompetensinya, dan mewujudkan birokrasi yang lincah dan profesional serta berorientasi melayani.
- 9.4.2.5** Pengembangan pariwisata Kabupaten Buru Selatan perlu dioptimalkan karena memiliki keunikan tersendiri dibanding daerah lainnya karena memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Perlu dibuat kajian khusus

dalam rangka meningkatkan daya tarik Kabupaten Buru Selatan sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di wilayah timur Indonesia.

- 9.4.2.6 Adaptasi capaian (ukuran) pembangunan berdasarkan kekhasan wilayah (kearifan lokal). Sebagai daerah yang memiliki ciri khas dan budaya yang kuat, Kabupaten Buru Selatan seharusnya juga perlu menambahkan indikator pembangunan yang sesuai dengan jati diri Kabupaten Buru Selatan sendiri. Berbagai indikator yang saat ini digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan masih menggunakan indikator umum makro yang sangat mungkin tidak mencakup beberapa aspek penting lain yang sebenarnya perlu diperhatikan dan dijadikan indikator pendukung.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2009-2029, maka dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJPD periode selanjutnya. Rekomendasi ini ada yang bersifat langsung pada arahan dalam penyusunan visi pembangunan ke depan dan perihal yang bersifat prosedural dalam menyusun RPJPD 2025-2045. Rekomendasi tersebut diberikan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Definisi Capaian dan Ukuran Pembangunan

Dalam rangka menyusun tujuan, visi, misi, sasaran dan indikator pembangunan perlu ditetapkan terlebih dahulu definisi pembangunan yang dapat diukur dan diharapkan. Pembangunan seringkali diterjemahkan hanya bentuk perubahan fisik atau material. Sediakalanya ukuran pembangunan yang sukses dapat dibagi kedalam beberapa dimensi: (i) Dimensi Material dan Non-Material; (ii) Dimensi Pengembangan Manusia dan Pengembangan Infrastruktur; (iii) Dimensi capaian jangka pendek dan jangka Panjang; dan (iv) Dimensi Mikro dan Makro.

Dimensi Material dan Non-material menegaskan bahwa tujuan pembangunan dari sebuah daerah tidak hanya terkait dengan materi, tetapi juga hal non material lainnya seperti kebahagiaan, kenyamanan hidup, ketentraman dan beberapa indikator kualitatif dan psikologis lainnya. Selain itu pembangunan Kabupaten Buru Selatan juga perlu memperhatikan pusat dari pembangunan, dimana pusat pembangunan bukanlah sesuatu yang terkait infrastruktur semata tetapi juga pengembangan dari manusia atau masyarakatnya sendiri. Kemudian tujuan dari pembangunan juga perlu memperhitungkan kebaikan jangka panjang, bukan hanya sekedar tujuan jangka pendek atau saat ini. Terakhir, dalam rangka memperhatikan dinamika yang ada dalam masyarakat, pembangunan Kabupaten Buru Selatan juga seharusnya dianalisis tidak hanya dalam kacamata makro tetapi juga dalam kacamata mikro.

Pemahaman terhadap dimensi ini akan memberikan perspektif kepada pemerintah bahwa kondisi dan keadaan tertentu yang dialami masyarakat atau lingkup geografis yang lebih kecil membutuhkan solusi spesifik untuk diterapkan. Selain itu, pemahaman terhadap hal ini juga akan berdampak pada ketajaman dalam menurunkan visi, misi, sasaran dan indikator pembangunan yang ingin dicapai. Nah, seringkali indikator pembangunan yang digunakan lebih kepada feasibility approach (menggunakan indikator umum yang tersedia). Hal ini akan berisiko pada biasanya ukuran telah terlaksananya dengan tepat visi, misi dan sasaran sebuah pembangunan.

2. Pemanfaatan dan Optimalisasi Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata.

Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi keunggulan terbaik dalam pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan pemanfaatan potensi Pertanian, Perkebunan dan perikanan dimiliki, maka potensi pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Buru Selatan akan cepat mengalami peningkatan yang kemudian memiliki banyak dampak positif seperti penambahan jumlah angkatan kerja, pengurangan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Penerapan strategi Cultural-Led Development Approach

Kabupaten Buru Selatan harus melakukan perubahan dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih inovatif dan kreatif. Potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Buru Selatan sektor kelautan, pariwisata dan budaya. Dalam pencapaian ini, kedepannya Kabupaten Buru Selatan dapat menggunakan strategi Cultural-Led Development. Dimana pendekatan pembangunan, pelaksanaan, tujuan dan alat ukur pembangunan dimotori oleh kekayaan budaya dan potensi lokal. Dalam konsep ini kekayaan lokal dan budaya bukan hanya untuk dimanfaatkan tetapi sekaligus juga dikembangkan. Budaya dan kekayaan lokal lainnya menjadi pusat dari pembangunan itu sendiri. Hal ini akan sangat perlu bagi Kabupaten Buru Selatan Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kuat pada sektor unggulan seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan pariwisata.

4. Perencanaan Pembangunan Sektor Unggulan Lainnya.

Kabupaten Buru Selatan harus memulai menggerakkan potensi keunggulan lainnya agar agenda pembangunan yang direncanakan dan diimplementasikan dapat bergerak secara dinamis Strategi ini biasanya diterapkan dalam rangka mempercepat sekaligus menggerakkan pembangunan secara sistematis. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk menggerakkan perubahan yang sebelumnya banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam pembangunan. Pendekatan ini membutuhkan berbagai macam intervensi, aksi, pembiayaan, kolaborasi, dukungan kebijakan dan regulasi. Dalam konteks Kabupaten Buru Selatan dengan karakteristik daerah yang memiliki competitive advantage saat ini dari sektor perkebunan dan beberapa keunggulan lainnya memiliki peluang untuk menciptakan program atau agenda potensial yang dapat dijadikan sebagai katalisator untuk menggerakkan pembangunan. Potensi kelautan dan pariwisata di Kabupaten Buru Selatan dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat menarik perhatian publik dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat memberikan dampak positif, juga dengan sektor unggulan saat ini seperti pertanian dan perkebunan. Dengan beberapa potensi keunggulan yang ada dan ditambah dengan potensi keunggulan yang baru maka Kabupaten Buru Selatan akan bergerak arah pembangunannya ke cara yang modern dan memiliki dampak yang luas serta saling berkaitan satu sama lain.

5. Perencanaan Berbasis Ekosistem

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Buru

Selatan periode selanjutnya adalah penyusunan agenda yang lebih berkesinambungan dan terintegrasi. Penetapan tujuan atau sasaran tidak bersifat tunggal tetapi lebih bersifat integrative dimana memperhatikan kepentingan sasaran lain serta juga memiliki dampak untuk pencapaian tujuan lainnya. Dalam bahasa lain tujuan pembangunan jangan hanya bersifat pencapaian program tunggal tetapi lebih kepada proses berkesinambungan untuk menciptakan ekosistem ideal untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yang dicanangkan. Hal ini akan mendorong pelaksanaan proses pembangunan antar waktu (tahunan, 5 tahunan) menjadi lebih terarah dan memiliki langkah yang jelas. Selain itu juga mengurangi Risiko penemuan stagnasi dampak program pada satu titik tertentu. Sebagai contoh misalnya program pertanian, perkebunan dan budidaya hasil laut, jika tidak disiapkan sumber daya manusia dan juga fasilitas serta infrastrukturnya maka perencanaan tersebut tidak akan optimal. Perencanaan pembangunan tersebut harus disiapkan secara simultan dan berkelanjutan dengan menyiapkan ekosistem yang telah dibentuk secara terprosedur baik dalam hal penyusunannya maupun prakteknya.

6. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berdasarkan SWOT

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penurunan dan penyusunan RPJPD 2025- 2045 adalah penyusunan berbasiskan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) dari Kabupaten Buru Selatan. Penerapan pendekatan ini akan memastikan bahwa tujuan pembangunan yang dicapai lebih realistis dan dapat diprediksi dengan lebih tepat. Selain itu pendekatan ini juga memastikan bahwa visi pembangunan yang ingin dicapai juga sudah memperhatikan segala sisi. Sehingga diharapkan penurunan dan pelaksanaan strategi pembangunan kedepannya juga tepat sasaran, berdampak dan memiliki landasan yang kuat.

7. Pelaksanaan Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi

Salah satu tantangan dalam menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan RPJPD adalah memastikan keselarasan visi dan misi RPJPD dalam RPJMD maupun RKPD. Hal ini untuk memastikan bahwa terjadi keselarasan antara proses pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Sangat mungkin sekali terjadi beberapa Visi dan Misi yang disusun dalam RPJMD maupun sasaran dalam RKPD yang melenceng, tidak sejalan atau tidak berdampak terhadap pencapaian RPJPD. Sehingga diperlukan sebuah sistem evaluasi yang komprehensif dan dilakukan secara berkala. Terdapat juga indikasi bahwa penyusunan RPJMD periode tertentu tidak memperhatikan capaian RPJMD sebelumnya yang membuat adanya missing link dalam mencapai kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ini sangat mungkin untuk dijadikan sebagai sebuah sistem legal dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Buru Selatan kedepannya, sehingga menjadi lebih kuat dan mengikat ketika terjadi dinamika politik seperti pergantian kepala daerah.

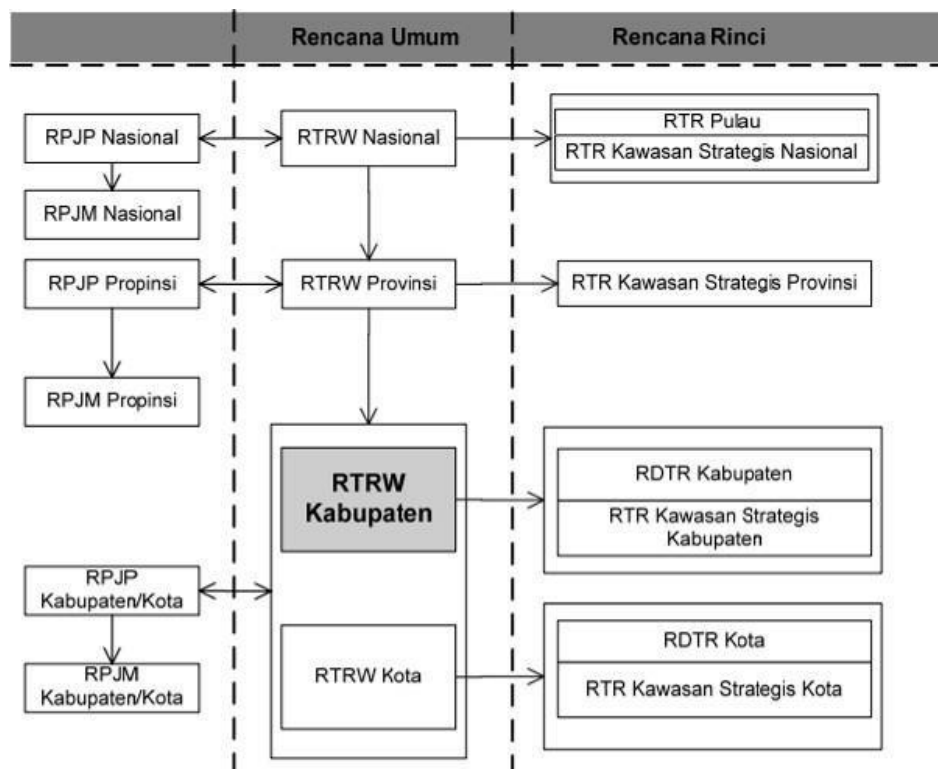
8. Penyusunan Roadmap Pembangunan

Belajar dari berbagai program pembangunan yang telah dijalankan di Kabupaten Buru Selatan, dirasa perlu untuk melengkapi semua agenda pembangunan

dengan *road map* dan *blue print* yang jelas. Agar kesinambungan dan tujuan penciptaan ekosistem seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya dapat dilakukan. Road map dan Blue Print pada sebuah agenda pembangunan tidak hanya memberikan arah normatif tetapi juga menyediakan langkah-langkah yang lebih terukur tidak hanya secara tahapan, tetapi juga waktu, strategi, langkah taktis. Hal ini sangat berguna sebagai pedoman dalam menjalankan proses pembangunan yang terarah. Tanpa adanya road map dan blue print yang jelas akan menimbulkan Risiko penafsiran serta langkah taktis yang dilaksanakan pada periode yang berbeda menjadi berbeda arah sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai menjadi tidak terlaksana, salah arah atau terhambat.

9.4.3 Kinerja RTRW dan Rencana Sektoral dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda)

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan sudah didukung oleh dokumen rencana pembangunan daerah yang baik, seperti dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan dokumen Renstra lainnya. Kedudukan RTRW kabupaten dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional bagi pemangku kepentingan diperlihatkan pada Gambar 2.31.

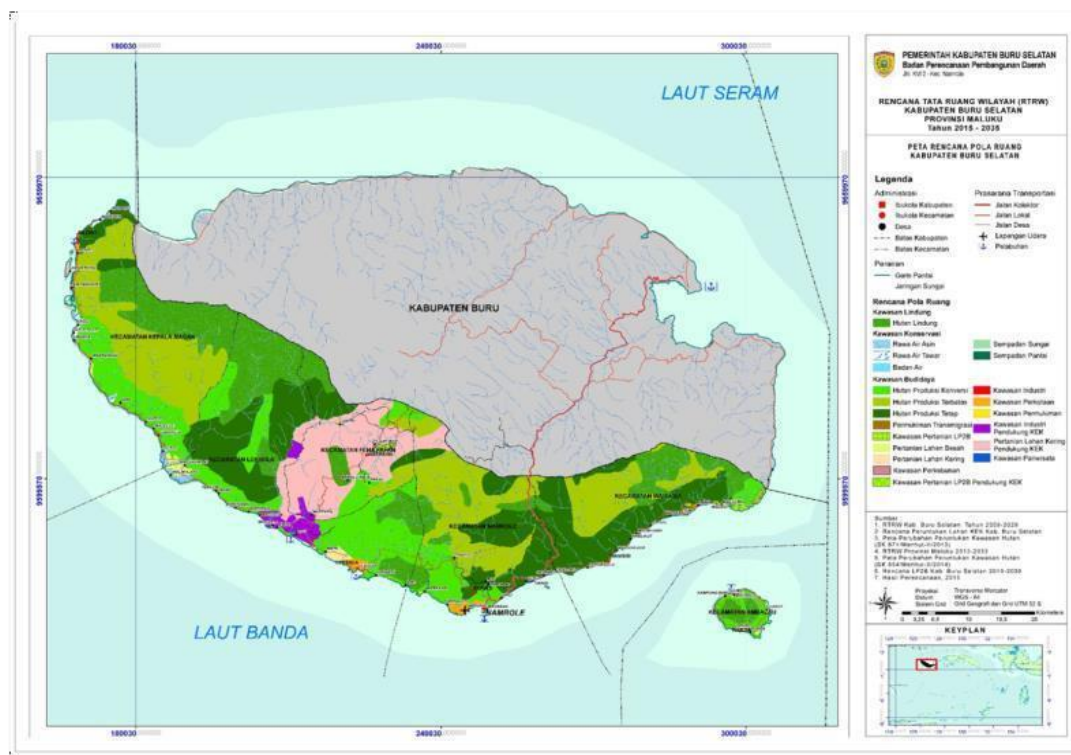


Gambar 2.31 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana

tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Secara umum, dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan memberikan rekomendasi pembangunan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan tata ruang wilayah yang senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Buru Selatan setiap periode terus mengalami penurunan. Rencana pembangunan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan RTRW diperlihatkan oleh Peta Rencana Pola Ruang yang diperlihatkan pada Gambar 2.32.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan, 2023-2043

Gambar 2.32 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buru Selatan

Arah kebijakan umum merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing. Arah kebijakan umum merupakan penjabaran lebih detail dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan dari urusan-urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, maupun program kewilayahan di Kabupaten Buru Selatan. Perencanaan dan penganggaran dalam RPJMD bersifat jangka menengah dan berbasis kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan dalam perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Jangka Menengah yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu; dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan efisiensi alokasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan mengedepankan penentuan prioritas terhadap anggaran guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang diwujudkan dengan mempertegas keterkaitan yang erat antara prioritas, program dan kegiatan pokok dengan penganggarnya. Penentuan prioritas memuat fokus dan kegiatan-kegiatan prioritas yang jelas dan terukur (serta dilengkapi dengan perhitungan biaya yang jelas) sehingga dapat lebih mencerminkan pemecahan masalah terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Buru Selatan yang ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kodefikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Di samping itu, program dan kegiatan dalam dua kerangka tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu prioritas wajib, prioritas utama dan prioritas pendukung.

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dibedakan program dan kegiatan pembangunan atas program generik dan program teknis. Program dan kegiatan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikelompokkan atas program dan kegiatan generik. Sedangkan program dan kegiatan yang bersifat eksternal yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikelompokkan sebagai program dan kegiatan teknis. Program-program pembangunan daerah dalam RPJMD yang tergolong dalam kelompok program generik merupakan program yang dilaksanakan oleh semua OPD atau lintas OPD dan tidak termasuk dalam program-program Urusan Pembangunan Daerah, antara lain meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
4. Program peningkatan disiplin aparatur
5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program-program yang tergolong program teknis, merupakan program prioritas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2016-2021.

Dokumen KP2B memberikan hasil kajian berupa usulan lahan KP2B di Kabupaten Buru Selatan seluas 5.168,56 ha yang terdiri lahan yang direkomendasi seluas 422,13 ha dan direkomendasikan bersyarat seluas 4.746,43 ha. Usulan lahan pengembangan transmigrasi di kawasan Desa Fogi yang didapatkan berdasarkan hasil kajian sebesar 643,56 ha terdiri dari 118,18 ha berada di areal HPK, dan 525,38 ha berada di areal APL. Selanjutnya di wilayah terdapat potensi usulan lahan KP2B seluas 960,12 ha terdiri atas lahan yang direkomendasikan seluas 100,44 ha dan lahan yang direkomendasikan bersyarat seluas 859,68 ha. Lahan pengembangan transmigrasi di areal HPK didapatkan seluas 118, 18 ha, dimana dapat dilakukan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari KLHK RI. Hasil kajian didapatkan ketersebaran kesesuaian lahan pada lahan KP2B berada pada kelas S2, S3 dan N dengan jenis komoditi padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar talas, kacang tanah, kacang hijau. Berdasarkan hasil kajian, potensi lahan KP2B sebesar 6,128.68 ha bila dimanfaatkan secara maksimal akan memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp. 847,68 miliar per tahun. Potensi lahan transmigrasi sebesar 643,56 ha bila dimanfaatkan secara maksimal akan memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp. 76,46 miliar per tahun. Khusus di kawasan transmigrasi desa Fogi, rekayasa sosial yang dapat dilaksanakan adalah model III yaitu transmigrasi campuran lokal dan non lokal.

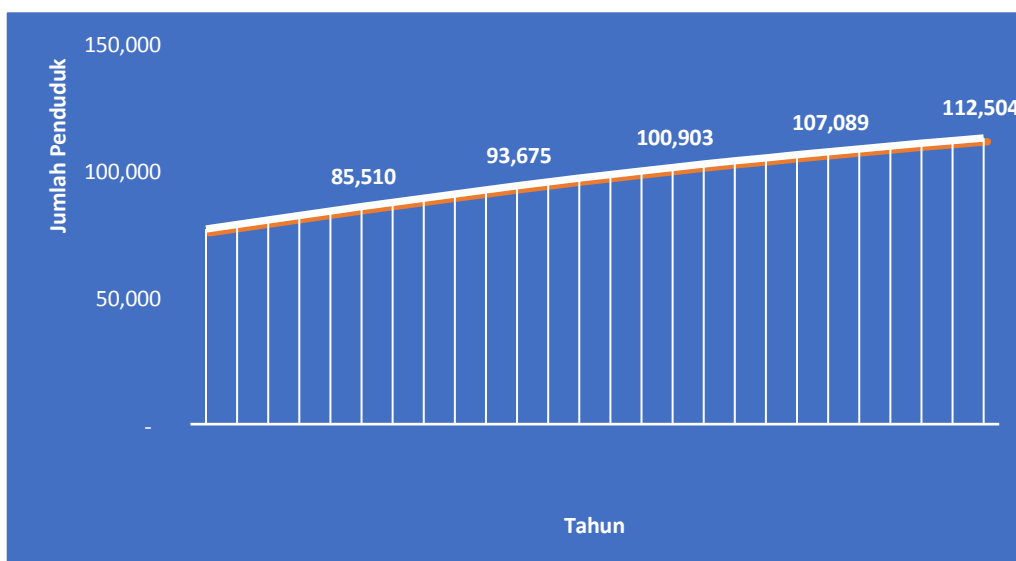
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buru Selatan

Penduduk merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan. Penduduk yang berkualitas merupakan modal dasar yang dapat menggerakkan roda pembangunan lebih cepat dan berkualitas. Oleh sebab itu, pembangunan Kabupaten Buru Selatan harus berorientasi pada penduduk. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keselarasan pembangunan dengan terwujudnya penduduk yang sejahtera dan tidak terjadi kesenjangan. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan matematika untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk di masa depan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mensyaratkan perencanaan pembangunan didasari oleh informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proyeksi penduduk bertujuan untuk mengintegrasikan variabel kependudukan dan perencanaan pembangunan dengan memberikan informasi kondisi penduduk di masa depan. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045 didasarkan atas data Long Form Sensus Penduduk (LFSP) 2020. Proyeksi penduduk merupakan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045 berdasarkan asumsi natalitas dan mortalitas.

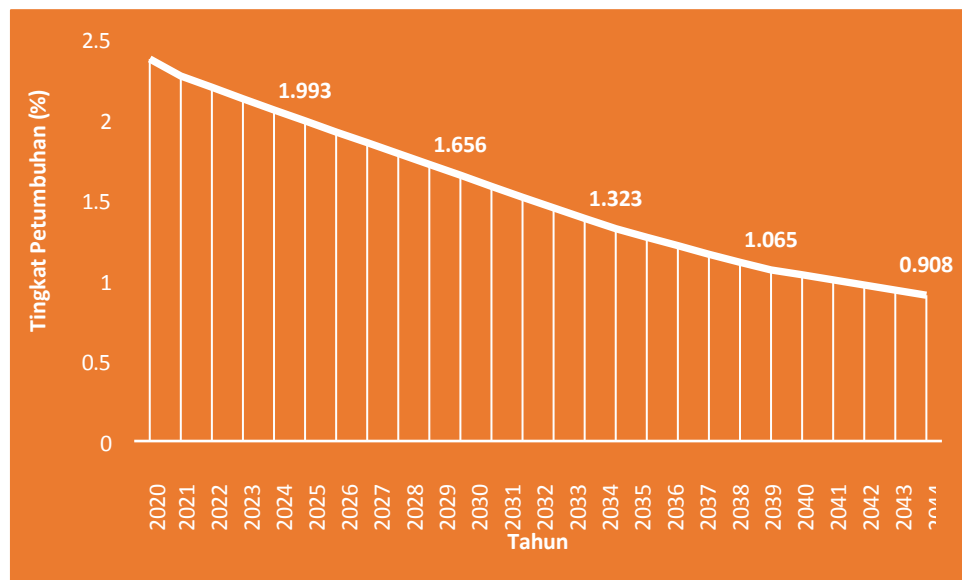
a. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 adalah 78.515 jiwa, sedangkan hasil LFSP 2020 menyatakan bahwa jumlah 76.715 jiwa. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah penduduk. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045 memperlihatkan perkembangan penduduk Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil proyeksi menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 (*baseline*) adalah 85.510 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan tahun 2045 mencapai 112.504 jiwa (Gambar 2.34).



Gambar 2.33. Trend Jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045

Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan pertambahan penduduk per tahun dalam periode tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Hasil proyeksi penduduk 2020-2045 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buru Selatan mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buru Selatan mengalami perlambatan setiap tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru Selatan tahun *baseline* 2025 adalah 1,993%, dan tahun 2045 adalah 0,908% (Gambar 2.34). Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2020 hingga 2045 adalah 1,536%.



Gambar 2.34 Trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Buru Selatan 2020-2045

b. Distribusi Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Proyeksi penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025-2040 menghasilkan beberapa parameter penting terkait keadaan demografi Kabupaten Buru Selatan dalam 20 tahun ke depan. Parameter tersebut terkait dengan kelahiran dan kematian (mortalitas).

Tabel 2.28 Parameter demografi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Parameter	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Kelahiran (Jiwa)	2340	2262	2130	2038	2037
<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) (%)	3.3558	3.1465	2.9373	2.728	2.5188
Angka Harapan Hidup pada saat lahir (%)	66.22	66.53	66.81	67.07	67.31
Angka Kematian Bayi (%)	49.14	47.24	45.42	43.68	42.20
Jumlah Kematian (Jiwa)	636	711	795	898	1016

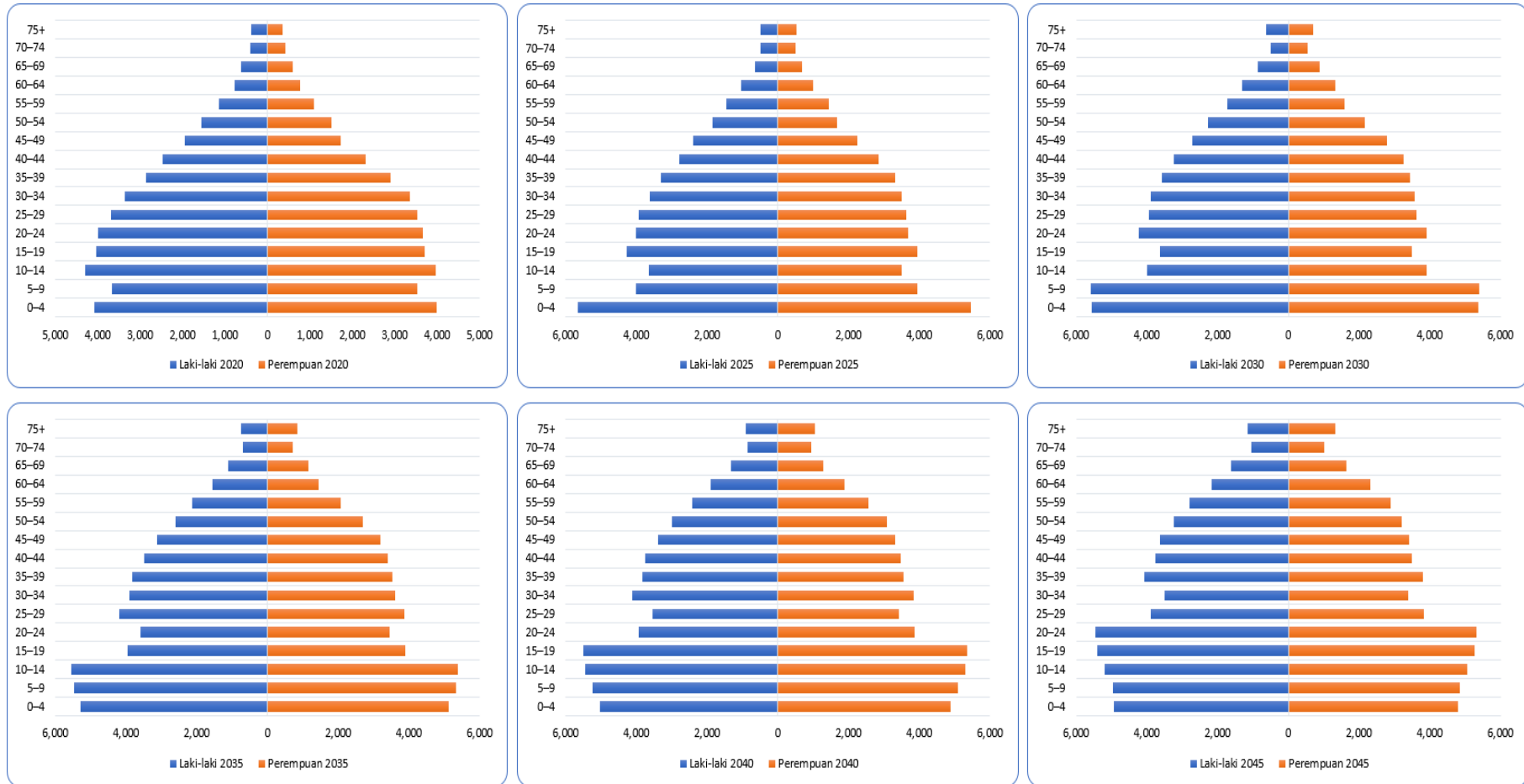


Tabel 2.28 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran pada periode 2025-2045 mengalami penurunan. Keadaan tersebut didukung oleh penurunan nilai TFR. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB) memberikan dampak, dimana TFR mengalami penurunan pada tahun 2045 menjadi 2.5188 anak per wanita. Angka Harapan Hidup saat lahir pada periode 2025- 2045 mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan Angka Kematian Bayi yang mengalami penurunan pada periode tersebut. Di sisi lain, jumlah kematian mengalami peningkatan pada periode 2025-2045. Distribusi penduduk Kabupaten Buru Selatan pada periode 2025-2045 diperlihatkan pada Tabel 2.29 dan Gambar 2.35, dan distribusi penduduk menurut kelompok umur diperlihatkan pada Tabel 2.30

Tabel 2.29 Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025 -2045

Umur	2025			2030			2035			2040			2045		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	5.660	5.459	11.119	5.552	5.364	10.916	5.298	5.127	10.425	5.031	4.874	9.905	4.936	4.787	9.723
5-9	4.020	3.936	7.956	5.580	5.404	10.984	5.478	5.317	10.795	5.230	5.088	10.318	4.970	4.840	9.810
10-14	3.654	3.501	7.155	3.995	3.917	7.912	5.547	5.379	10.926	5.447	5.296	10.743	5.200	5.070	10.270
15-19	4.276	3.941	8.217	3.629	3.484	7.113	3.968	3.899	7.867	5.508	5.353	10.861	5.412	5.273	10.685
20-24	4.000	3.670	7.670	4.231	3.908	8.139	3.591	3.457	7.048	3.929	3.870	7.799	5.452	5.315	10.767
25-29	3.939	3.624	7.563	3.949	3.634	7.583	4.179	3.872	8.051	3.546	3.427	6.973	3.881	3.840	7.721
30-34	3.627	3.498	7.125	3.884	3.584	7.468	3.894	3.597	7.491	4.125	3.836	7.961	3.502	3.397	6.899
35-39	3.299	3.314	6.613	3.566	3.452	7.018	3.822	3.540	7.362	3.833	3.556	7.389	4.062	3.794	7.856
40-44	2.795	2.855	5.650	3.227	3.256	6.483	3.489	3.395	6.884	3.741	3.484	7.225	3.755	3.504	7.259
45-49	2.385	2.248	4.633	2.711	2.788	5.499	3.131	3.181	6.312	3.387	3.319	6.706	3.632	3.406	7.038
50-54	1.858	1.670	3.528	2.276	2.171	4.447	2.590	2.691	5.281	2.993	3.071	6.064	3.240	3.204	6.444
55-59	1.450	1.438	2.888	1.732	1.585	3.317	2.122	2.060	4.182	2.418	2.548	4.966	2.795	2.905	5.700
60-64	1.030	1.007	2.037	1.302	1.327	2.629	1.559	1.456	3.015	1.910	1.890	3.800	2.179	2.332	4.511
65-69	654	683	1.337	875	888	1.763	1.107	1.166	2.273	1.326	1.273	2.599	1.629	1.644	3.273
70-74	489	488	977	509	555	1.064	683	720	1.403	865	940	1.805	1.035	1.021	2.056
75+	503	539	1.042	638	702	1.340	736	852	1.588	915	1.060	1.975	1.152	1.340	2.492
Total	43.639	41.871	85.510	47.656	46.019	93.675	51.194	49.709	100.903	54.204	52.885	107.089	56.832	55.672	112.504
Persentase	51,03	48,97	100	50,87	49,13	100	50,74	49,26	100	50,62	49,38	100	50,52	49,48	100

Sumber



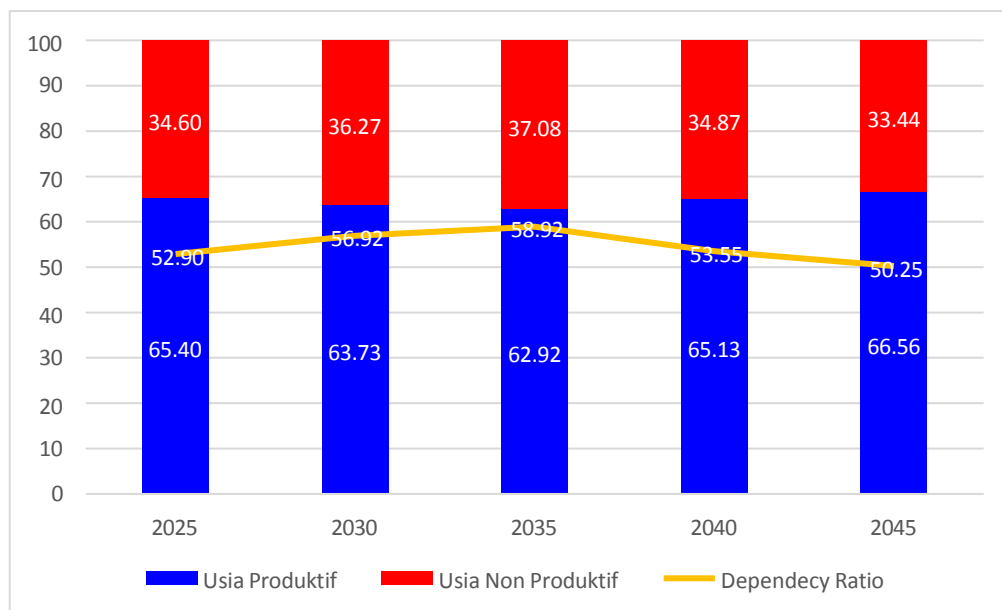
Gambar 2.35 Piramida penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Tabel 2.30 Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025 -2045 menurut klasifikasi kelompok umur

Umur	2025			2030			2035			2040			2045		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0	1.148	1.102	2.250	1.114	1.070	2.184	1.051	1.012	2.063	1.005	967	1.972	1.002	965	1.967
1-4	4.512	4.357	8.869	4.438	4.294	8.732	4.247	4.115	8.362	4.026	3.907	7.933	3.934	3.822	7.756
0-14	13.334	12.896	26.230	15.127	14.685	29.812	16.323	15.823	32.146	15.708	15.258	30.966	15.106	14.697	29.803
15-24	8.276	7.611	15.887	7.860	7.392	15.252	7.559	7.356	14.915	9.437	9.223	18.660	10.864	10.588	21.452
15-44	21.936	20.902	42.838	22.486	21.318	43.804	22.943	21.760	44.703	24.682	23.526	48.208	26.064	25.123	51.187
15-49	24.321	23.150	47.471	25.197	24.106	49.303	26.074	24.941	51.015	28.069	26.845	54.914	29.696	28.529	58.225
15-64	28.659	27.265	55.924	30.507	29.189	59.696	32.345	31.148	63.493	35.390	34.354	69.744	37.910	36.970	74.880
50-64	4.338	4.115	8.453	5.310	5.083	10.393	6.271	6.207	12.478	7.321	7.509	14.830	8.214	8.441	16.655
55+	4.126	4.155	8.281	5.056	5.057	10.113	6.207	6.254	12.461	7.434	7.711	15.145	8.790	9.242	18.032
65+	1.646	1.710	3.356	2.022	2.145	4.167	2.526	2.738	5.264	3.106	3.273	6.379	3.816	4.005	7.821
75+	503	539	1.042	638	702	1.340	736	852	1.588	915	1.060	1.975	1.152	1.340	2.492

c. Bonus Demografi dan Penduduk Usia Tua

Salah satu dampak perubahan struktur penduduk yang sangat penting untuk rencana pembangunan adalah bonus demografi. Bonus demografi adalah momentum dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia ketergantungan, yakni usia muda 0-14 tahun dan usia lanjut 65 tahun ke atas (dikenal sebagai rasio ketergantungan atau *dependency ratio*). Pada umumnya, bonus demografi ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang lebih dominan pada total jumlah penduduk yakni melebihi 60%. Bonus demografi menjadi momentum yang tepat bagi suatu wilayah untuk fokus pada investasi sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Penduduk usia produktif yang tumbuh lebih cepat daripada penduduk usia yang tidak produktif, menciptakan jendela kesempatan (*windows of opportunity*) untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Transisi demografi dapat menghasilkan standar hidup yang lebih baik bagi keluarga dan pendapatan per orang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transisi demografi pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.



Gambar 2.36 Transisi demografi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Pada tahun 2020, Kabupaten Buru Selatan dihadapkan pada puncak transisi demografi. Penduduk usia produktif di Kabupaten Buru Selatan lebih mendominasi pada struktur umur penduduk. Dengan kata lain, Kabupaten Buru Selatan mengalami bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif terhadap total penduduk mencapai 65,69%. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Buru Selatan yang diperlihatkan pada Gambar 2.37, menunjukkan bahwa periode 2025-2045 merupakan momentum bonus demografi bagi Kabupaten Buru Selatan. Hal tersebut diperlihatkan oleh rasio usia produktif lebih dari 60% dan dependency ratio yang tidak mencapai 100%.

Kabupaten Buru Selatan harus dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai jendela kesempatan bagi pembangunan wilayah tersebut. Untuk mengoptimalkan



bonus demografi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar diperlukan strategi yang tepat, seperti:

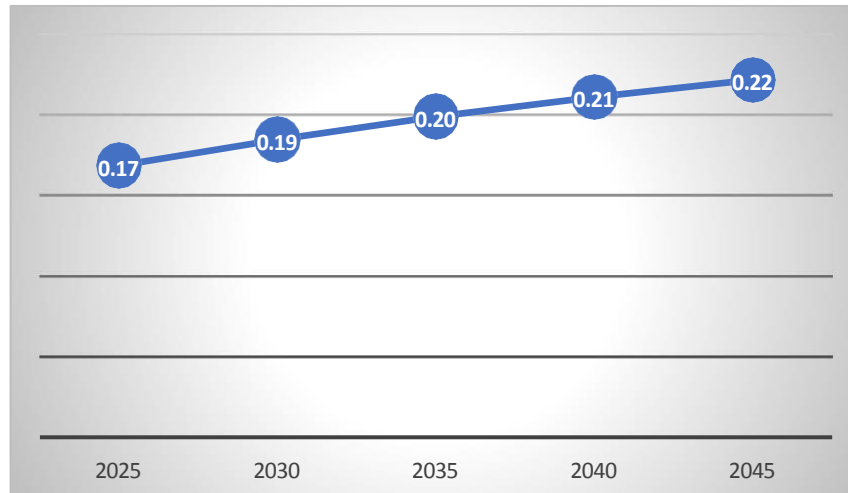
membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup; menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; meningkatkan produktivitas tenaga kerja; meningkatkan partisipasi kerja perempuan; serta menguatkan literasi keuangan dan investasi.

Menuju tahun 2045, Kabupaten Buru Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan penduduk lanjut usia (lansia). Peningkatan tersebut tidak menjadikan penduduk lansia menjadi penyumbang terbesar bagi peningkatan *dependency ratio*, karena proporsi terbesar disumbang oleh penduduk usia muda. Meskipun demikian, Kabupaten Buru Selatan harus mampu mempersiapkan penduduk lansia yang sehat dan produktif di masa depan. Hal ini mendorong produktivitas lansia dan peningkatan usia harapan hidup. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan harus mulai menerapkan kebijakan yang menunjang peningkatan jumlah lansia di masa depan, seperti perluasan jaminan sosial dan jaminan hari tua dan mengembangkan skema lapangan pekerjaan ramah lansia. Selain itu, kebutuhan pangan juga mengalami perubahan akibat dari perubahan struktur penduduk. Dengan meningkatnya lansia dan menurunnya penduduk usia muda, bahan pangan yang dibutuhkan akan berbeda, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan penduduk di masa yang akan datang.

Perubahan struktur penduduk juga berdampak pada faktor lain seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk perlu dilakukan penghitungan ulang terkait kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan. Sarana pendidikan tingkat awal seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) harus dapat mengakomodir penduduk usia muda. Demikian juga dengan sarana kesehatan, peningkatan jumlah lansia pada masa mendatang membutuhkan rumah sakit yang ramah lansia atau Rumah Sakit Geriatri. Selain itu, dibutuhkan juga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memiliki program pendampingan terhadap lansia.

2.6.2. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana adalah proses penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur atau fasilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tepat akan tersedia ketika dibutuhkan di masa depan. Proses ini melibatkan penelitian dan evaluasi tentang bagaimana kebutuhan akan berubah seiring waktu, serta bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan efisien dan efektif. Pembangunan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan pendekatan desain tata ruang dan aspek lingkungan. Hal ini terkait dengan bentuk bangunan yang sesuai dengan konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.



Gambar 2.37 Proyeksi kepadatan penduduk (jiwa/ha) 2025-2045

Di sisi lain, keadaan penduduk di suatu wilayah menjadi faktor penentu dalam pengembangan sarana dan prasarana. Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Hasil proyeksi hingga tahun 2045 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Buru Selatan belum mencapai 1 jiwa/ha (Gambar 2.37). Kepadatan penduduk di Kabupaten Buru Selatan cenderung pada wilayah-wilayah sentra pertumbuhan seperti Namrole dan Leksula.

A. Analisis pengembangan Perumahan di Kabupaten Buru Selatan

Pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Buru Selatan tergolong rendah, sehingga termasuk dalam standar pengembangan wilayah dan perencanaan kebutuhan lahan untuk sarana lingkungan, termasuk pengembangan perumahan layak. Salah satu faktor pendukung dalam perencanaan pengembangan lingkungan perumahan di Kabupaten Buru Selatan adalah ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga pembangunan lingkungan perumahan dapat diarahkan untuk terwujudnya lingkungan sehat, aman, serasi secara teratur, terarah serta berkelanjutan yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan dan kewilayahan pada tahun 2045, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara baik oleh semua pihak di Kabupaten Buru Selatan dalam merencanakan bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan, keamanan dan kenyamanan, yaitu:

- a) Data dan informasi tentang jumlah dan komposisi anggota keluarga;
- b) Data dan informasi tentang penghasilan keluarga;
- c) Karakteristik nilai sosial budaya yang membentuk kegiatan berkeluarga dan kemasyarakatan di Kabupaten Buru Selatan;
- d) Kondisi topografi dan geografi area rencana sarana hunian;
- e) Kondisi iklim; suhu, angin, kelembaban kawasan yang direncanakan;
- f) Pertimbangan gangguan bencana alam;



- g) Kondisi vegetasi eksisting dan sekitar; dan
- h) Peraturan dan dokumen perencanaan wilayah dan tata kota seperti rencana tata ruang yang meliputi GSB, KDB, KLB, dan sejenisnya, atau peraturan bangunan secara spesifik, seperti aturan khusus arsitektur, keselamatan dan bahan bangunan.

B. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana.

Kebutuhan Sarana Prasarana menjadi salah satu objek vital dalam pembangunan. Beberapa objek vital diantaranya termasuk dalam pelayanan dasar kebutuhan masyarakat seperti layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi, air bersih, Listrik, dan penanganan persampahan. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar di Kabupaten Buru Selatan hingga tahun 2045 diperlihatkan pada Tabel 2.31. Proyeksi tersebut didasarkan atas proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.

Tabel 2.31 Proyeksi Sarana Prasarana Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

No	Uraian	Proyeksi					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	79.017	85.510	93.675	100.903	107.089	112.504
2	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	20.485	29.472	44.378	56,325	68.272	80.219
3	Rumah Tangga Sanitasi Layak (%)	76,00	76,02	76,04	76,06	76,08	77,00
4	Rumah Berakses Listrik (%)	99.16	99.18	99.23	99.28	99.33	99.38
5	Rumah Akses Air Minum Layak (%)	43.97	45.03	50,03	55,05	60,01	65,00
6	Persentase Timbulan Sampah Tertangani (%)	30,88	35,00	45,01	50,03	55,65	60,05

Sumber : Dinas Dukcapil, Dok. RP3KP, Jakstrada Kab. Buru Selatan (diolah), 2024

C. Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sarana pendidikan dan pembelajaran harus dapat menyediakan ruang belajar yang memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu, dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan jumlah penduduk usia sekolah pada wilayah perencanaan; optimasi daya tampung dengan satu *shift*; efisiensi dan efektifitas pemakaian ruang belajar secara terpadu; pemakaian sarana dan prasarana pendukung; keserasian dan keselarasan dengan wilayah setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran di Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 diperlihatkan pada Tabel 2.32.



Tabel 2.32 Proyeksi sarana pendidikan dan pembelajaran berbasis jumlah penduduk Usia Sekolah

No	Uraian	Proyeksi					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk Usia 6-18 Thn (Jiwa)	22.256	23.328	26.009	29.588	31.922	30.765
2	Taman Kanak-Kanak/TK (Unit)	76	78	83	88	93	98
3	Sekolah Dasar/SD (Unit)	111	111	114	118	122	126
4	Sekolah Menengah Pertama /SMP (Unit)	53	54	57	60	63	66
5	Sekolah Menengah Atas/SMA (Unit)	31	31	33	35	37	39

Sumber : Dinas Pendidikan, BPS Kab. Buru Selatan (diolah), 2024

D. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk pada wilayah perencanaan. Beberapa jenis sarana kesehatan yang dibutuhkan adalah RSUD, RS Pratama dan Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya; Puskesmas Pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, sementara Posyandu berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita, melayani ibu sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun dan lansia (Posyandu siklus hidup), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Proyeksi dibawah ini.



Tabel 2.33 Proyeksi sarana kesehatan berbasis jumlah penduduk

No	Uraian	Proyeksi					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	79.017	85.510	93.675	100.903	107.089	112.504
2	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD (Unit)	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Rumah Sakit Pratama/RSP (Unit)	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Puskesmas (Unit)	13	13	13	13	13	13
5	Jumlah Puskesmas Pembantu/PUSTU (Unit)	37	37	38	39	40	41
6	Jumlah Posyandu (Unit)	126	126	138	150	162	174

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru Selatan (diolah), 2024

E. Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana penting yang terkait dengan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam menjalankan perintah agama. Sarana peribadatan berfungsi untuk mengisi kebutuhan rohani, sehingga perlu disediakan di lingkungan perumahan. Perencanaan pembangunan sarana peribadatan di suatu wilayah didasarkan atas peraturan yang ditetapkan. Pendekatan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu wilayah diatur dengan memperkirakan populasi, serta agama dan kepercayaan. Perencanaan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan disesuaikan dengan tuntutan planologis dan religius.

Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.34 Proyeksi sarana peribadatan berbasis jumlah penduduk

No	Uraian	Proyeksi					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	79.017	85.510	93.675	100.903	107.089	112.504
2	Jumlah Mesjid (Unit)	58	63	69	76	81	87
3	Jumlah Musholla (Unit)	23	25	27	29	31	33
4	Jumlah Gereja (Unit)	64	67	74	81	88	95
5	Jumlah Pura (Unit)	1	2	3	4	5	6

Sumber : BPS Kab. Buru Selatan (diolah), 2024

F. Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan niaga

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- Toko/warung (skala pelayanan unit RT $\approx$ 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
- Pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;
- Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan $\approx$ 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel, dan sebagainya;
- Pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan $\approx$ 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 diperlihatkan pada Tabel 2.35.



Tabel 2.35 Proyeksi sarana perdagangan dan niaga berbasis jumlah penduduk

No	Jenis Sarana	Proyeksi					Kebutuhan Minimal (SNI 03-1733-2004)	
		2025	2030	2035	2040	2045	Luas Lantai (m ²)	Luas Lahan (m ²)
1	Toko/Warung	342	375	404	428	450	50	100
2	Pertokoan	14	16	17	18	19	1200	1300
3	Pusat pertokoan dan Pasar Lingkungan	3	3	3	4	4	13500	10000
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko, pasar, bank, dan kantor)	1	1	1	1	1	36000	36000

G. Proyeksi kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagai bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktu yang berbeda. Proyeksi kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi di Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 diperlihatkan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36 Proyeksi sarana kebudayaan dan rekreasi berbasis jumlah penduduk

No	Jenis Sarana	Proyeksi					Kebutuhan Minimal (SNI 03-1733-2004)	
		2025	2030	2035	2040	2045	Luas Lantai (m ²)	Luas Lahan (m ²)
1	Balai Warga/Balai Pertemuan	34	37	40	43	45	150	300
2	Balai Serbaguna/Balai Karang Taruna	3	3	3	4	4	250	500
3	Gedung Serbaguna	1	1	1	1	1	1500	3000
4	Gedung Bioskop	1	1	1	1	1	1000	2000

H. Proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu *landscape*, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Proyeksi kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga di Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 diperlihatkan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Proyeksi sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga berbasis jumlah penduduk

No	Jenis Sarana	Proyeksi					Kebutuhan Minimal SNI 03- 1733-2004 [Luas Lahan (m ²)]
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	Taman/Tempat Main	342	375	404	428	450	250
2	Taman/Tempat Main (Pusat Kegiatan Lingkungan)	34	37	40	43	45	1250
3	Taman dan Lapangan Olah Raga	3	3	3	4	4	9000
4	Taman dan Lapangan Olah Raga (Pusat Kegiatan Lingkungan)	1	1	1	1	1	24000
5	Jalur Hijau	*	*	*	*	*	*
6	Kuburan/Pemakaman Umum	1	1	1	1	1	*

*: Tidak ada batasan standar, disesuaikan dengan kebutuhan dan menjadi prioritas

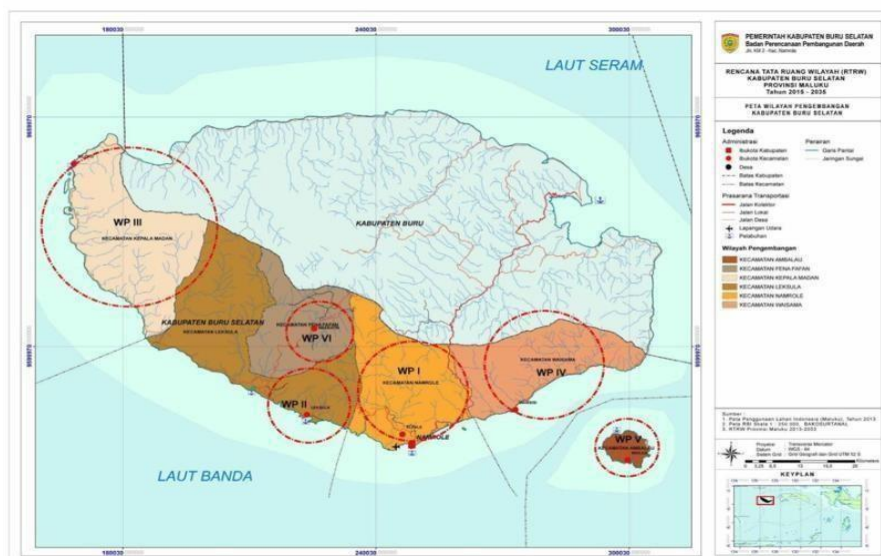
I. Pengembangan prasarana

Pengembangan prasarana di Kabupaten Buru Selatan meliputi:

1. Prasarana jaringan jalan
2. Prasarana jaringan drainase
3. Prasarana jaringan air bersih
4. Prasarana jaringan air limbah
5. Prasarana jaringan persampahan
6. Prasarana jaringan listrik
7. Prasarana jaringan telekomunikasi (telepon dan internet)
8. Prasarana jaringan transportasi lokal

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Buru Selatan merupakan suatu upaya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi disparitas antar wilayah di kabupaten tersebut. Langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Buru Selatan adalah menganalisis potensi lokal untuk mendapatkan dukungan terhadap sektor unggulan daerah.

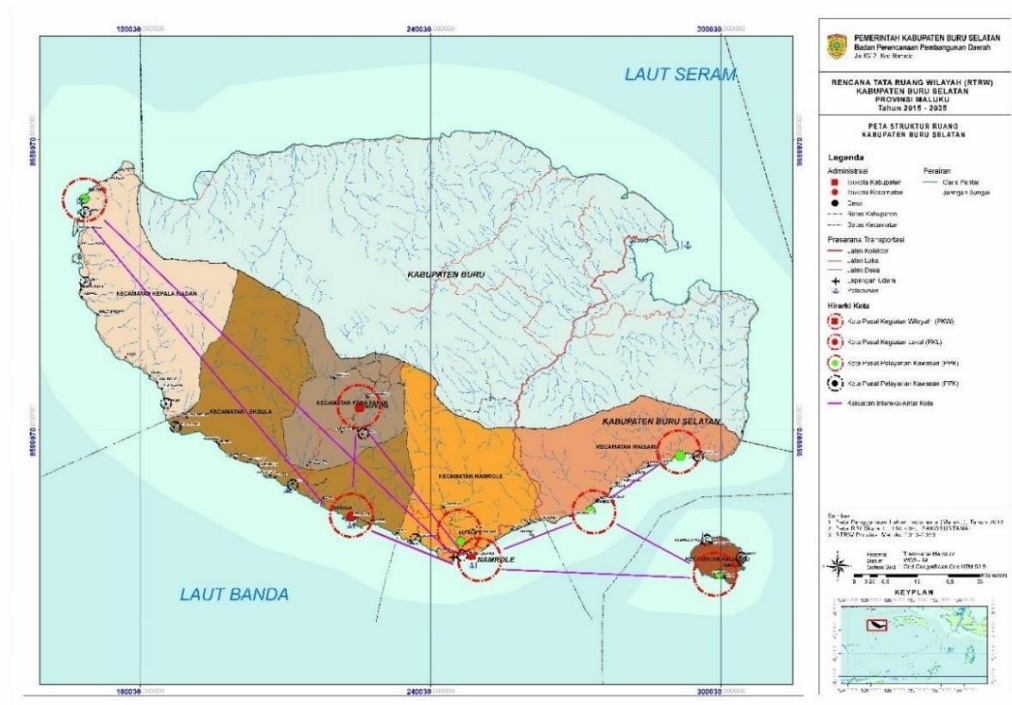


Gambar 2.38 Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Buru Selatan



Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru Selatan tahun 2015-2035, terdapat 6 (enam) Wilayah Pengembangan. Setiap wilayah pengembangan tersebut memiliki wilayah pelayanannya masing-masing sesuai dengan daya jangkau pusat pelayanan dari wilayah pengembangan tersebut. Keenam Wilayah Pengembangan tersebut adalah:

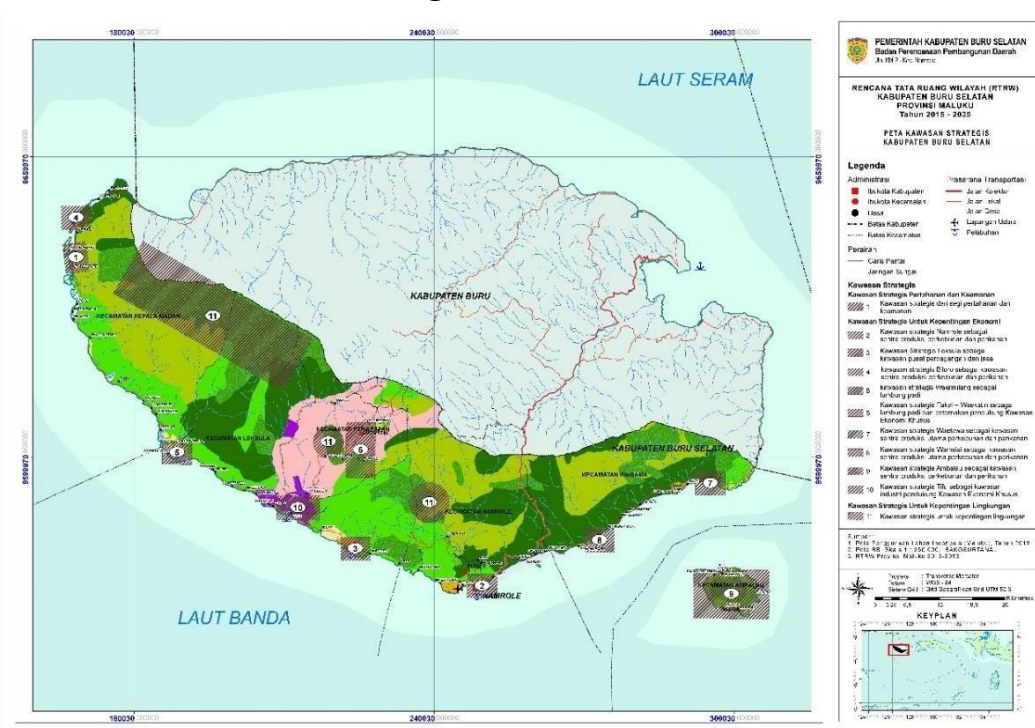
- (1) **Wilayah Pengembangan I yang meliputi Kecamatan Namrole dengan pusat pelayanan di Kota Namrole. Fungsi utama WP ini adalah:**
 - (a) Pusat pemerintahan dan pelayanan jasa
 - (b) Pusat transportasi regional
 - (c) Sentra produksi pertanian tanaman pangan
 - (d) Sentra produksi kehutanan
 - (e) Sentra produksi perikanan
 - (f) Wisata
- (2) **Wilayah Pengembangan II yang meliputi Kecamatan Leksula dengan pusat pelayanan di Kota Leksula. Fungsi utama WP II adalah:**
 - (a) Pusat perdagangan
 - (b) Pusat pelayanan jasa
 - (c) Kawasan ekonomi khusus
 - (d) Sentra produksi kehutanan
 - (e) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - (f) Sentra produksi Perkebunan
 - (g) Sentra produksi perikanan
 - (h) Wisata
- (3) **Wilayah Pengembangan III yang meliputi Kecamatan Fena Fafan dengan pusat pelayanan di Kota Waekatin. Fungsi utama WP III adalah:**
 - (a) Sentra produksi kehutanan
 - (b) Sentra produksi pertanian (hortikultura)
 - (c) Sentra produksi perkebunan
 - (d) Pendukung utama kawasan ekonomi khusus
- (4) **Wilayah Pengembangan IV yang meliputi Kecamatan Kepala Madan dengan pusat pelayanan di Kota Biloro. Fungsi utama WP IV adalah:**
 - (a) Sentra produksi pertanian
 - (b) Sentra produksi perkebunan
 - (c) Sentra produksi perikanan
 - (d) Pusat pelayanan jasa
 - (e) Wisata
- (5) **Wilayah Pengembangan V yang meliputi Kecamatan Waesama dengan pusat pelayanan di Kota Wamsisi. Fungsi utama WP V adalah:**
 - (a) Sentra produksi pertanian
 - (b) Sentra produksi perkebunan
 - (c) Pusat pelayanan jasa
- (6) **Wilayah Pengembangan VI yang meliputi Kecamatan Ambalau dengan pusat pelayanan di Kota Waelua. Fungsi utama WP VI adalah:**
 - (a) Sentra produksi perkebunan
 - (b) Sentra produksi perikanan
 - (c) Wisata



Gambar 2.39 Peta Struktur Ruang Kabupaten Buru Selatan 2015-2035

Berdasarkan RTRW 2015-2035, perencanaan kedepan untuk Kabupaten Buru Selatan adalah membangun beberapa wilayah di setiap kecamatan menjadi pusat pelayanan, yang diharapkan dapat menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kabupaten Buru Selatan (Gambar 2.39).

2.7.1 Rencana Kawasan Strategis



Gambar 2.40 Peta Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten Buru Selatan 2015-2035



Pengembangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Buru Selatan juga mendukung pembangunan kawasan strategis (Gambar 2.40). Rencana pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

A. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Buru Selatan berada pada Pos Angkatan Laut yang terdapat di Desa Pasir putih Kecamatan Kepala Madan.

B. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan antara lain:

- a. Kawasan strategis Namrole sebagai pintu gerbang utama Kabupaten sekaligus sebagai sentra produksi perkebunan dan perikanan;
- b. Kawasan Strategis Leksula sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- c. Kawasan strategis Biloro sebagai kawasan yang potensial berkembang karena kedekatannya dengan jalur ALKI III, sekaligus sebagai sentra produksi perkebunan dan perikanan;
- d. kawasan strategis Waemulang sebagai lumbung padi kabupaten sebagai bagian dari kawasan andalan nasional Pulau Buru;
- e. Kawasan strategis Fakal – Waekatin sebagai lumbung padi dan peternakan Kabupaten sebagai bagian dari kawasan andalan nasional Pulau Buru;
- f. Kawasan strategis Waetawa sebagai kawasan sentra produksi utama perkebunan dan perikanan;
- g. Kawasan strategis Wamsisi sebagai kawasan sentra produksi utama perkebunan dan perikanan;
- h. Kawasan strategis Ambalau sebagai kawasan sentra produksi perkebunan dan perikanan;
- i. Kawasan strategis Fena Fafan dan Waesama sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- j. Kawasan strategis Sekat, Walbene, Lena dan Simi sebagai kawasan transmigrasi.

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Leksula dilakukan dengan cara:

1) Pembudidayaan Kelautan

Dalam merencanakan sarana pembudidayaan kelautan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai jenis-jenis penangkapan ikan dan teknologi budi daya laut. Ini terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan disediakan terkait dengan teknologi yang dipakai dalam kegiatan pembudidayaan kelautan.

2) Pengolahan Ikan

Jenis-jenis fasilitas yang dibangun tergantung pada jenis bahan baku, jumlah bahan baku, pilihan produk yang dihasilkan, dan lokasi pabrik yang direncanakan. Beberapa fasilitas yang umumnya tersedia di lokasi industri pengolahan perikanan antara lain dermaga atau pelabuhan, gudang penyimpanan awal, bangunan pengolahan ikan, gudang penyimpanan produk, kantor, unit penyedia air bersih, unit penyedia listrik, unit



pengelola limbah, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya seperti asrama, tempat makan, balai pengobatan, dan gedung olahraga

3) **Industri Kelautan**

Dalam membangun industri kelautan, terdapat beberapa fasilitas yang dimiliki oleh industri tersebut seperti fasilitas pembuatan atau reparasi kapal laut, fasilitas rekayasa dan pembuatan sarana maritim selain kapal dan fasilitas logistik dan maritim. Selain itu industri kelautan ini dapat diintegrasikan dengan kompleks industri lainnya yang terkait.

4) **Pusat Logistik**

Arahan pengembangan dalam membangun pusat logistik bergantung pada jenis objek fasilitas pusat logistik yang akan dibangun. Dalam rencana KEK Buru Selatan ini, jenis objek fasilitas yang direncanakan adalah meliputi *seaport* dan *fishport* (pelabuhan khusus ikan).

5) **Perdagangan dan Bisnis**

Kawasan komersial pada umumnya terdapat bangunan-bangunan *mixed-use*. Bangunan- bangunan *mixed-use* merupakan gabungan tiga fungsi bangunan atau lebih yang dapat saling menguntungkan satu sama lain dan terencana dengan baik serta terintegrasi secara fungsi maupun fisik, dan dihubungkan oleh jalur pedestrian yang menerus. (ULI, Mixed Use Development Handbook).

6) **Fasilitas Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan sarana pendidikan yang ada di dalam kawasan KEK Buru Selatan yang meliputi *marine techno park* dan *edu techno park*

7) **Peternakan Sapi**

Dalam peternakan sapi diperlukan beberapa kelengkapan seperti berikut:

- Feedlot
- Stan-off pad
- Cattle Handling
- Yard
- Milking Platform

8) **Real Estate**

Dalam merencanakan real estate/ properti, terdapat beberapa ketentuan sebuah fasilitas dapat dibangun dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu. Ketentuan ini disebut dengan standar pelayanan minimum (SPM)

9) **Fasilitas Publik**

Sama halnya dengan real estate yang memiliki standar pelayanan minimal, perencanaan fasilitas publik juga memiliki standar-standar pelayanan tertentu.

C. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Lingkungan

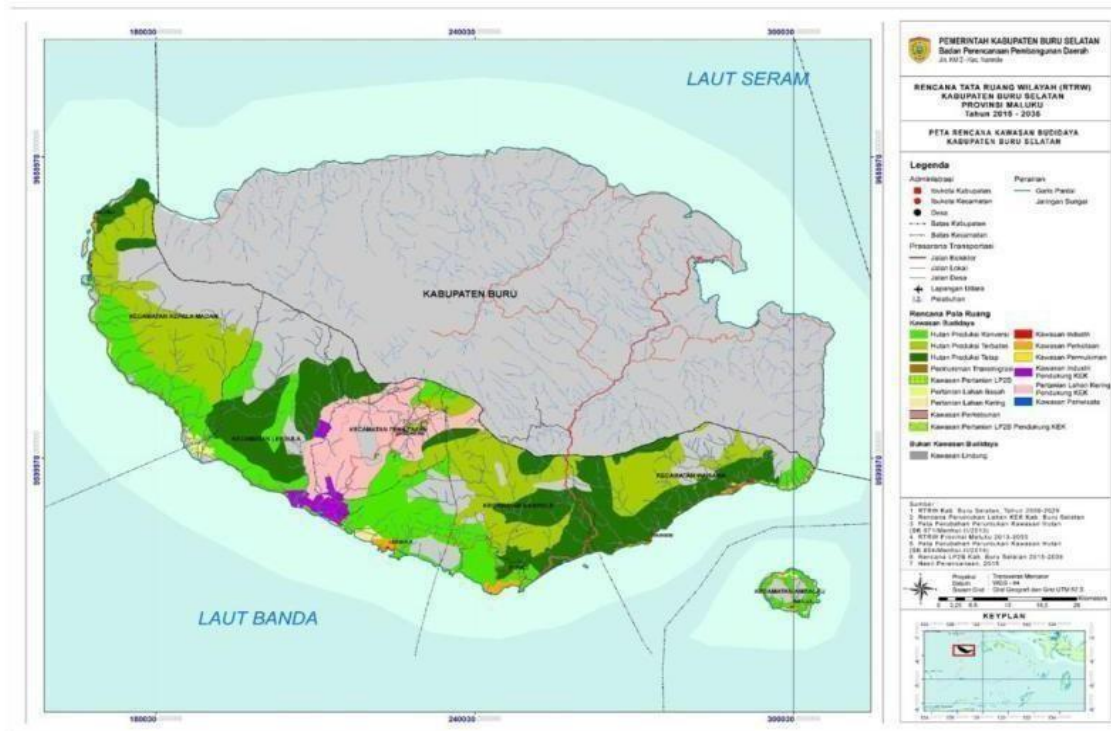
Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan di Kabupaten Buru Selatan antara lain:

1. Kawasan hutan produksi di sekitar DAS;
2. Kawasan hutan di bagian utara Namrole berfungsi sebagai daerah tangkapan air sehingga perlu dilestarikan untuk menjaga ketersediaan air yang digunakan untuk mendukung PLTMH dan juga sebagai paru-paru bagi Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru;

3. Kawasan hutan lindung di sekitar kawasan LP2B di Kecamatan Fenafafan dan Waesama sebagai kawasan pengembangan sentra tanaman pangan utama berupa hotong dan sagu.

2.7.2 Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Buru Selatan

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya pada Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.41. Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Buru Selatan

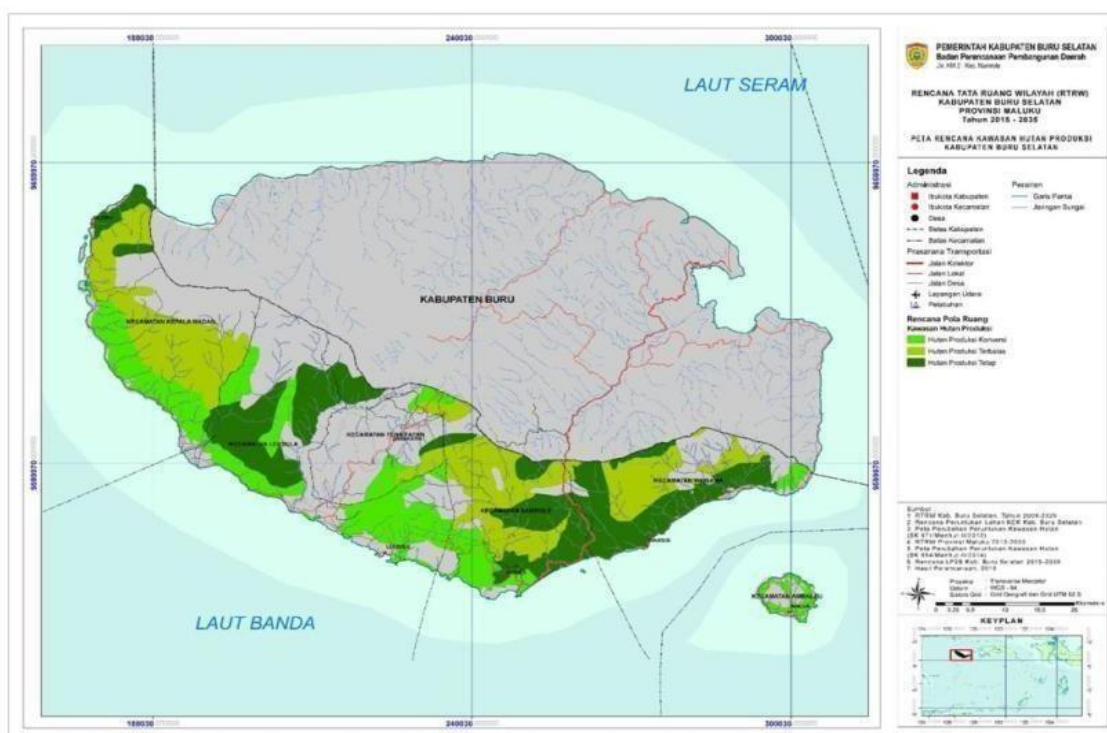
(A) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Alokasi lahan untuk kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Buru Selatan seluas 317,349.87 ha terdistribusi pada:

- 1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan metode tebang pilih dan tanam dialokasikan lahan seluas 102,576.91 ha, keberadaannya tersebar di hampir semua kecamatan kecuali di Kecamatan Ambalau.
- 2) Kawasan Hutan Produksi (HP), merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan metode tebang habis dan tanam, dialokasikan seluas 98,922.30 ha terdapat di hampir semua kecamatan kecuali di Kecamatan Ambalau.
- 3) Kawasan Hutan Produksi Konversi merupakan hutan yang bilamana perlu dapat dialihgunakan. Kawasan ini di Kabupaten Buru Selatan akan dialokasikan seluas 115,850.67 ha, yang tersebar di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Buru Selatan kecuali di Kecamatan Ambalau.

Tabel 2.38 Rencana Persebaran Hutan Produksi di Kabupaten Buru Selatan

No.	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Konversi	Total
1	Kepala Madan	8.934,68	53.450,32	25.245,49	87.630,50
2	Leksula	47.307,40	31,94	61.097,24	108.436,58
3	Fena Fafan	3.075,38	2.215,60	3.181,91	8.472,89
4	Namrole	20.771,98	28.717,59	10.121,54	59.611,10
5	Waesama	22.487,46	14.506,86	1.506,58	38.500,90
6	Ambalau	-	-	14.697,91	14.697,91
Total		98.922,30	102.576,91	115.850,67	317.349,87



Gambar 2.42. Peta Rencana Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Buru Selatan

Rencana alih fungsi hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi areal penggunaan lain seluas kurang lebih 40.700 ha yang terdapat di sepanjang pesisir dan alih fungsi hutan produksi dan produksi terbatas menjadi kawasan lindung seluas kurang lebih 10.000 ha yang terdapat di Kecamatan Namrole. Rencana pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- 1) Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat
- 2) Mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota agar mewujudkan hutan kota.

(B) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Pertanian akan terdiri dari alokasi lahan untuk kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah (TPLB), kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering (TPLK), kawasan tanaman tahunan/perkebunan, dan kawasan perikanan.

(1). Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB)

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan, kawasan pertanian yang sesuai untuk lahan basah dapat dialokasikan seluas 2,430.89 ha. Lahan pertanian pangan lahan basah hanya ada di kecamatan Kepala Madan, Kecamatan Leksula, dan Kecamatan Namrole. Kawasan ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan bahan pangan utama (beras) bagi masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Diperkirakan kebutuhan akan bahan pangan beras ini terus bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan. Rencana kawasan lahan basah di Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.39 Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah di Kabupaten Buru Selatan

No	Kecamatan	Pengembangan Pertanian Lahan Basah (ha)
1	Kepala Madan	842,32
2	Leksula	1.588,57
3	Fena fafan	-
4	Namrole	-
5	Waisama	-
6	Ambalau	-
Total		2.430,89

(2). Kawasan Pertanian Lahan Kering (TPLK)

Untuk kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering, berdasarkan kesesuaian lahannya di Kabupaten Buru Selatan dialokasikan seluas 30,785.18 ha. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman pangan yang lain seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan serta berbagai jenis tanaman sayuran masih dapat diproduksi di Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 2.40 Rencana Kawasan Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Buru Selatan

No	Kecamatan	Pengembangan Pertanian Lahan Kering (ha)
1	Kepala Madan	-
2	Leksula	8.017,18
3	Fena Fafan	18.613,63
4	Namrole	2.245,77
5	Waisama	-
6	Ambalau	1.908,60
Total		30.785,18

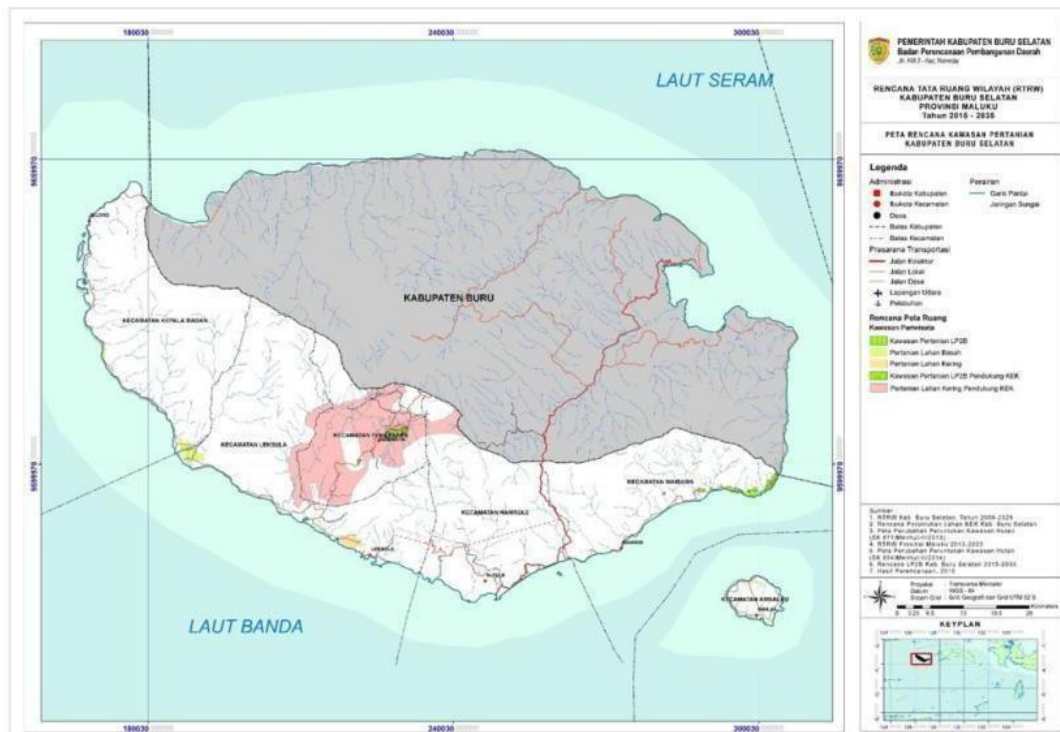
Rencana pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- 1) Pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung.
- 2) Perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang diperintahkan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian.

- 3) Pemanfaatan lahan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan budidaya pertanian dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian percontohan.
- 4) Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan.
- 5) Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat retribusi pakan ternak.
- 6) Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
- 7) Kawasan budidaya ternak yang berpotensi menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada pemukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standar teknis kawasan usaha peternakan dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah pemukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular.
- 8) Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya.

(3). Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Rencana pengembangan kawasan LP2B di Kabupaten Buru Selatan dialokasikan pada Kecamatan Fena Fafan, Desa Waekatin seluas 364,71 ha serta Kecamatan Waesama Desa Waniswa, Desa Watawa, Desa Waetebo, Desa Waemasing seluas 995,75 Ha.



Gambar 2.43 Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Buru Selatan

Jenis penggunaan lahan pada rencana kawasan LP2B berupa pertanian lahan kering dengan jenis budidaya pertanian hortikultura. Berikut jenis komoditas yang direncanakan akan dibudidayakan pada lahan LP2B:

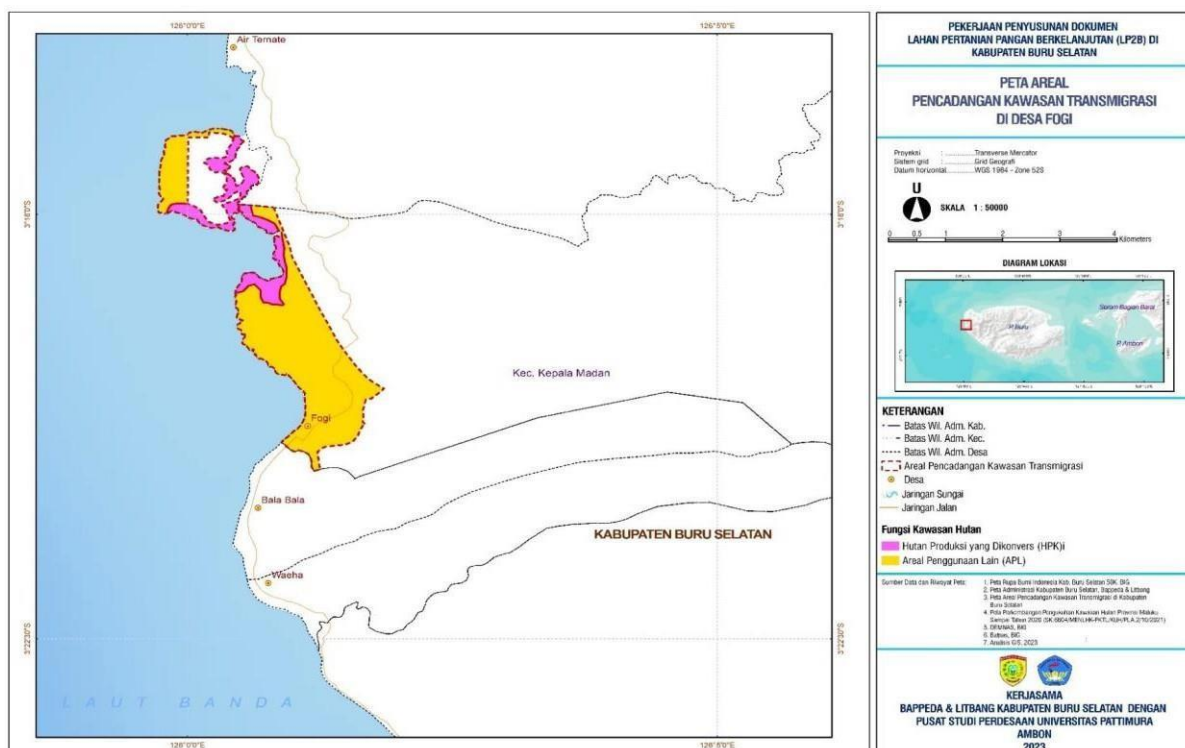
- Kecamatan Fena fagan berupa komoditas kentang.
- Kecamatan Waesama berupa komoditas terong, kacang panjang, buncis, sawi, kangkung, labu siam, tomat, kentang, bawang merah, kol, cabe rawit dan besar, ketimun, kacang merah, dan wortel.
- Jenis tanaman pangan yang diutamakan berupa sagu dan hotong.

Rencana pengelolaan kawasan LP2B di Kabupaten Buru Selatan meliputi:

- Rencana penambahan kekurangan lahan LP2B di Kecamatan Fena fagan dan Waesama seluas 454,172 ha.
- Intensifikasi pertanian.
 - Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi.
 - Fasilitasi dan sosialisasi peningkatan kualitas petani.
- Ekstensifikasi pertanian

Kajian pengembangan kawasan pangan berkelanjutan untuk penambahan luas lahan di 4 kecamatan lainnya (Ambalau, Kepala Madan, Leksula, dan Namrole).

Hasil kajian LP2B Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 memberikan usulan lahan LP2B di Kabupaten Buru Selatan pada wilayah pengembangan transmigrasi di kawasan Desa Fogi Kecamatan Kepala Madan. Hasil tersebut berdasarkan ketersebaran kesesuaian lahan pada lahan LP2B berada pada kelas S2, S3 dan N dengan jenis komoditi padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar talas, kacang tanah, kacang hijau. Selain itu, wilayah yang menjadi zona irigasi adalah DAS Waemulang, karena mampu memenuhi kebutuhan irigasi LP2B berdasarkan hasil analisis perkiraan kebutuhan air.



Gambar 2.44 Peta Areal Pencadangan Kawasan Transmigrasi di Desa Fogi

(4) Kawasan Peternakan

Peternakan yang ada di Kabupaten Buru Selatan meliputi:

- a. Peternakan sapi, kambing, dan ayam buras yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Buru Selatan.
- b. Peternakan babi yang terdapat di Kecamatan Leksula dan Namrole.

(5) Kawasan Perkebunan

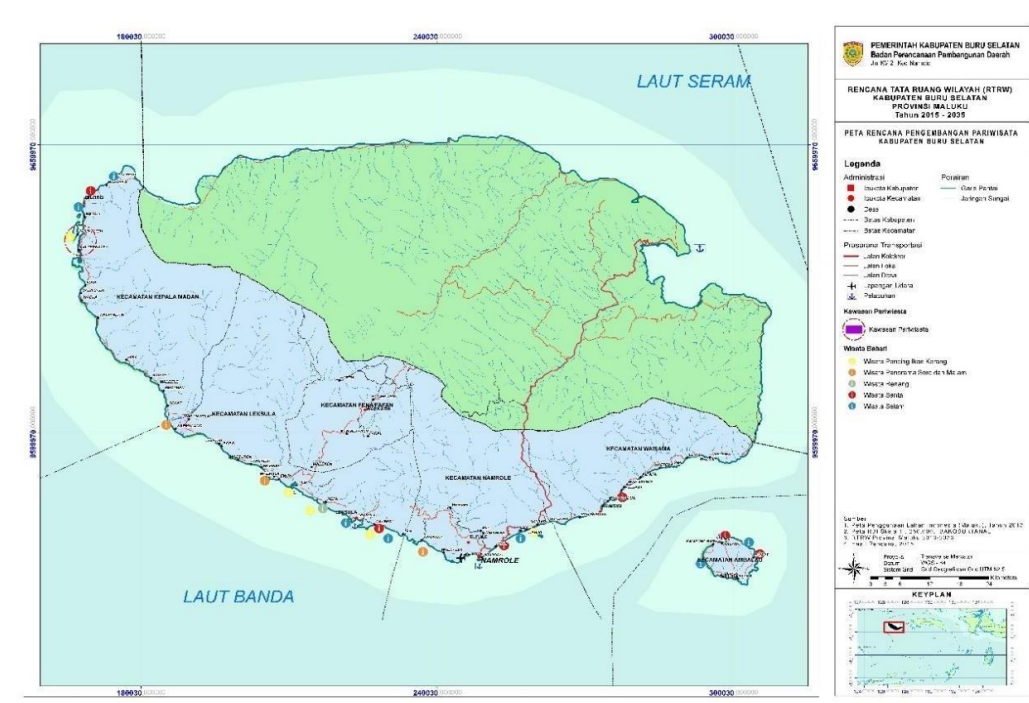
Kawasan peruntukan perkebunan terdiri dari perkebunan kelapa, cengkeh, kakao, jambu mete dan kopi terdapat di Kecamatan Ambalau seluas 347,09 ha. Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan di luar area rawan banjir serta longsor.
- 2) Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
- 3) Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan kebun masing-masing.

2.7.3 Rencana Kawasan Pariwisata

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan 2015-2035, terdapat beberapa tempat yang menjadi sasaran pengembangan pariwisata, yaitu wilayah Kota Namrole dan Desa Elfule di Kecamatan Namrole, Desa Waekatin di Kecamatan Leksula, Desa Biloro di Kecamatan Kepala Madan, Desa Wamsisi dan Desa Lena di Kecamatan Waesama, serta Desa Elara di Kecamatan Ambalau.

(Gambar 2.45)



Gambar 2.45. Peta Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buru Selatan 2015- 2035



Berdasarkan kekhasan dan potensi wilayah, kawasan peruntukkan pariwisata di Kabupaten Buru Selatan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- A. Kawasan peruntukkan pariwisata budaya berupa desa adat rakyat, di Desa Mangeswaen/Waeprapa, Desa Waelo, dan Desa Fakal dengan luasan 230,55 ha.
- B. Kawasan peruntukkan pariwisata alam meliputi:
 1. Objek wisata bahari:
 - (a) Saaru Mepa di Kecamatan Leksula;
 - (b) Saaru Kase di Kecamatan Leksula;
 - (c) Terumbu karang Tifu di Kecamatan Leksula;
 - (d) Pantai Wali di Kecamatan Namrole;
 - (e) Pantai Elfule di Kecamatan Namrole;
 - (f) Pantai Pasir Putih di Kecamatan Kepala Madan.
 2. Objek wisata agro di Waemulang, Waekatin, Fakal dan Mangeswain;
 3. Objek air terjun Air Babunyi di Kecamatan Leksula.
 4. Objek wisata buatan Wamsoba Resort di Desa Wamsoba Kecamatan Namrole.

Wilayah pengembangan utama Kawasan Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan dipusatkan pada Desa Biloro Kecamatan Kepala Madan. Pengelolaan kawasan pariwisata di wilayah tersebut dilakukan dengan cara:

- (a). Mengembangkan Kawasan Pariwisata dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
- (b). Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Dinas Dikbudpar);
- (c). Penentuan batas dan pemberian izin Kawasan Pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru (Dinas terkait);
- (d). Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Dinas Dikbudpar) memberikan arahan kepada masyarakat luas di tingkat Kecamatan tentang pengelolaan Kawasan Pariwisata;
- (e). Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Dinas Dikbudpar) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pariwisata dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

2.7.4 Rencana Kawasan Industri

Kawasan industri di Kabupaten Buru Selatan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri. Rencana pengembangan kawasan industri besar yang berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Buru Selatan bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam peternakan, perikanan, dan pertanian. Pengembangan KEK (*Special Economic Zone*) Kabupaten Buru Selatan sangat diperlukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Indonesia Bagian Timur.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buru Selatan yang mendukung pengembangan KEK adalah tersedianya lahan peternakan, perikanan (tangkap & budidaya) & pertanian yang masih sangat luas serta lokasinya. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Buru Selatan direncanakan berlokasi di sebagian Kecamatan Leksula sebagai kawasan industrinya dan Kecamatan Fena Fafan sebagai kawasan pengembangan peternakan, perikanan dan pertaniannya.



Dipilihnya lokasi KEK pada Kabupaten Buru Selatan tepatnya pada Kecamatan Leksula dan Fenaafan dikarenakan letaknya yang cukup strategis yaitu berada pada jalur ALKI III (internasional) dan terletak pada jalur tol laut (nasional).

Tabel 2. 41 Rencana Peruntukan Lahan KEK Kabupaten Buru Selatan

No.	Zone	Peruntukan
1	<i>Marine-Technological Park</i>	Diperuntukkan untuk mengembangkan teknologi pembudidayaan ikan dan produk kelautan
2	<i>Logistics Center</i>	Diperuntukkan bagi untuk pusat kegiatan logistik dan ekonomi, sekaligus penyimpanan berbagai barang logistik termasuk kegiatan NRI.
3	<i>Business & Commercial Center</i>	Diperuntukkan untuk aktivitas perdagangan dan bisnis, yang berupa diantaranya dan fasilitas transaksi, perdagangan-bisnis, perkantoran, <i>meeting room, convention, exhibition</i> , dsb
4	<i>Public Services</i>	Diperuntukkan untuk sarana publik baik pelayanan publik maupun utilitas seperti kantor pengelola, pendidikan, rumah sakit, halte, terminal, dsb.
5	<i>Beef and Dairy Cattle</i>	Diperuntukkan untuk membudidayakan ternak sapi serta kegiatan wisata peternakan sapi
6	<i>Beef and Dairy Milk Industrial Estate</i>	Diperuntukkan bagi kegiatan pengolahan hasil ternak (susu dan produk lainnya) baik untuk tujuan ekspor dalam negeri (luar kawasan) maupun luar negeri
7	<i>Marineculture</i> (seluruh bagian laut)	Diperuntukkan bagi pembudidayaan bahan baku industri perikanan dan kelautan, termasuk area di lepas pantai
	<i>Marineculture</i> (seluruh bagian darat)	
8	<i>Marine Industry</i>	Diperuntukkan bagi kegiatan perakitan alat-alat pendukung budidaya perikanan, seperti kapal, jaring, dan alat pendukung lainnya
9	<i>Fisheries Processing Industry</i>	Diperuntukkan bagi kegiatan hasil pengolahan ikan tangkap maupun hasil budidaya dan untuk pengemasan, serta pengolahan produk kelautan, seperti mutiara, rumput laut, dsb
10	<i>Agroindustries</i>	Diperuntukkan bagi kegiatan pengolahan produk pertanian terutama yang berasal dari hinterlandnya
11	<i>Agro-Technology Park</i>	Diperuntukkan bagi kegiatan percontohan budidaya pertanian lahan kering dan pembenihan dengan teknologi tinggi
12	<i>Edu-Technopark</i>	Diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan dan penelitian

Sumber: Laporan Akhir Rencana Pengembangan KEK Kab. Buru Selatan tahun 2015

Kawasan ini dialokasikan sebesar 9,033.20 Ha, dengan masing alokasi luas untuk industri pendukung KEK di Fena Fafan seluas 392.37 Ha dan di Leksula seluas 8,507.48 Ha. Sedangkan kawasan industri di Kecamatan Waesama dan leksula seluas 133.36 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Rencana Kawasan Pengembangan Industri dan Pengembangan Industri Rakyat di Kabupaten Buru Selatan

No.	Kecamatan	Pengembangan Industri pendukung KEK (Ha)	Pengembangan Industri Rakyat (Ha)
1.	Kepala Madan	-	-
2.	Leksula	8,507.48	76.30
3.	Fenaafan	392.37	-
4.	Namrole	-	-
5.	Waisama	-	57.06
6.	Ambalau	-	-
Total		8,899.84	133.36

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Buru Selatan



Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
- 2) Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- 3) Pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhitungan kemampuan daya dukung sungai;
- 4) Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- 5) Pengelolaan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi wilayah produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas sosial; dan Setiap kegiatan industri sebisa mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan terjadi bencana industri.

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



3.1. Permasalahan

1. Pembangunan Ekonomi, IPTEK & Inovasi

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif dari tahun 2019- 2023. Hal ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 4.58% pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2023 yaitu sebesar 5.21% dan Nasional sebesar 5,05%.

Berdasarkan statistik sebaran PDRB harga berlaku per lapangan usaha selama 5 tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan Buru Selatan, yaitu mencapai 38,54%. Gambaran ini menunjukkan bagaimana kendala pembangunan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan akan berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertanian mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Buru Selatan, baik melalui produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun jasa pertanian. Pertumbuhan ekonomi Buru Selatan rata-rata sekitar 2% selama lima tahun terakhir, dimana laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 4,58%; ke depan harus didorong mencapai 10%-15%.

Pembangunan ekonomi inklusif masih belum ideal untuk meningkatkan sektor perekonomian dan sektor penting lainnya karena tantangan aksesibilitas wilayah. Kurang optimalnya pengembangan sektor pertanian-kehutanan dan perikanan dikarenakan tingkat aksesibilitas yang rendah dengan kondisi topografi wilayah yang masih pegunungan, sehingga nilai tambah yang seharusnya diperoleh secara maksimal belum bisa terwujud. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga belum bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Buru Selatan karena belum dilakukan secara profesional. Akibat keterbelakangan sektor pariwisata, diversifikasi usaha ke sektor lain, seperti industri kreatif, hotel, restoran, transportasi, dan jasa lainnya, pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Ke depan, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor tersebut adalah melalui pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk menghubungkan akses ke wilayah yang ada di Buru Selatan yang akan sangat memperkuat perekonomian, serta pengembangan teknologi yang akan sangat memperkuat perekonomian Buru Selatan sehingga lebih kompetitif terhadap gempuran dan fluktuasi pasar global.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah persentase penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Buru Selatan mengalami penurunan secara fluktuatif dari tahun 2018-2023. Hasil evaluasi



tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk miskin di daerah ini mencapai angka 14.75% dan pada tahun 2023 mencapai angka 15.28%. Capaian pada tahun 2022, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Maluku yaitu sebesar 16,23%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional (9,57%), capaian ini lebih tinggi.

B. Pembangunan Sektor Pariwisata

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Buru Selatan memiliki sasaran untuk mendorong multisektor, kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong kreativitas masyarakat untuk mandiri, yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam wujud pengembangan yang berkelanjutan. Pembangunan Pariwisata secara berkelanjutan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ⊙ Prinsip *environmentally sustainable* yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
- ⊙ Prinsip *socially and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.
- ⊙ Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- ⊙ Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buru Selatan untuk tahun data 2022, Kabupaten Buru Selatan memiliki 25 objek wisata yang terdiri dari 6 objek wisata di Kecamatan Kepala Madan, 5 objek wisata di Kecamatan Leksula, 3 objek wisata di Kecamatan Fena Fafan, 3 objek wisata di Kecamatan Ambalau, 6 objek wisata di Kecamatan Namrole, dan 2 objek wisata di Kecamatan Waesama. Seluruh objek wisata yang ada tersebut belum dapat dikelola dengan baik untuk pengembangannya dari aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas kepariwisataan.

Selain objek wisata untuk menampilkan atraksi, dari sisi amenitas seperti penginapan dan rumah makan juga menjadi salah satu penunjang yang penting. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Buru Selatan juga hanya memiliki 4 kecamatan yang terdapat usaha rumah makannya yaitu Kecamatan Namrole, Leksula, Kepala Madan, dan Waesama. Di tahun 2022, Kecamatan Namrole memiliki

35 usaha rumah makan atau bertambah 8 usaha dari tahun 2019. Sementara Kecamatan Leksula memiliki 3 usaha rumah makan atau berkurang 5 usaha dari tahun 2019. Pada 2022, Kecamatan Kepala Madan dan Waesama masing-masing memiliki 2 dan 1 usaha rumah makan dari sebelumnya tidak ada usaha rumah makan. Namun bila dilihat dari tren peningkatan jumlah wisatawan dan prospek pengembangan pariwisata sebagai sebagai sektor unggulan maka jumlah penginapan dan rumah makan yang tersedia belum memadai.

Kabupaten Buru Selatan memiliki satu jenis kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Buru yang memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Namun, Kabupaten Buru Selatan perlu melakukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan alam sekitarnya.

Beberapa destinasi wisata alam di Buru Selatan yang sering menjadi perhatian wisatawan lokal maupun manca negara yaitu Tanjung Waeio, Pantai Wali, Pantai Masnana, Tanjung Merpati, Wisata Air Babunyi, Teluk Tifu, Pulau Tomahu dan Air jin. Namun sesuai hasil evaluasi destinasi-destinasi ini pengelolaannya belum optimal dan belum digarap secara profesional. Selain itu aksesibilitas ke kawasan wisata tersebut masih terbatas ditambah belum berkembangnya ekonomi kreatif sebagai penunjang pengembangan sektor pariwisata di daerah. Permasalahan Kepariwisata di Buru Selatan:

- ♦ Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas menuju kawasan-kawasan wisata
- ♦ Biaya perjalanan menjadi tinggi ke daerah wisata karena sulitnya aksesibilitas dan sarana transportasi yang tersedia
- ♦ Keterbatasan sarana prasarana dasar dan infrastruktur pendukung pariwisata, terbatasnya sumber air bersih, Terbatasnya kelistrikan daerah, Fasilitas kesehatan
- ♦ Sumberdaya pengelola kepariwisataan masih rendah
- ♦ Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal
- ♦ Masalah kesehatan, kebersihan dan pengelolaan sampah perlu mendapat perhatian serius
- ♦ Tidak semua bulan dapat dimanfaatkan untuk Travel karena terkendala dengan musim ombak dan gelombang.
- ♦ Koordinasi yang lemah dari berbagai stakeholder menyebabkan pengembangan pariwisata tidak berjalan dengan baik
- ♦ Keterbatasan lahan untuk pengembangan investasi di bidang Pariwisata
- ♦ Belum adanya *early warning system* dalam bidang kebencanaan
- ♦ Belum adanya *policy* dan klinik khusus terkait pariwisata
- ♦ Belum adanya keamanan dan kenyamanan untuk daerah-daerah tertentu

Permasalahan-permasalahan di atas berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan potensi pariwisata. Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenities, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung

komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

C. IPTEK dan Inovasi

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu wilayah di Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai permasalahan dalam penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEK). Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2020-2023, indeks inovasi daerah Kabupaten Buru Selatan berada pada kategori kurang inovatif secara berturut-turut kendati nilai indeksnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Terkait pembangunan IPTEK dan inovasi, beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah 1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Kurangnya akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet dan perangkat teknologi informasi, menghambat pengembangan dan penyebaran teknologi di berbagai sektor. 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Teknologi: Banyak penduduk lokal yang memiliki tingkat pendidikan rendah, khususnya dalam hal keterampilan teknologi, yang mengakibatkan rendahnya kemampuan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi baru. 3. Minimnya Dukungan Pemerintah: Program-program pemerintah yang mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi masih terbatas dan kurang merata. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta belum optimal. 4. Kurangnya Penelitian dan Pengembangan (R&D): Aktivitas penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buru Selatan masih sangat minim. Keterbatasan dana, fasilitas, dan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan di bidang ini. 5. Kendala Geografis: Kondisi geografis Kabupaten Buru Selatan yang berupa kepulauan dengan medan yang sulit diakses juga menjadi tantangan dalam pengembangan dan distribusi teknologi.

Permasalahan-permasalahan utama yang diuraikan di atas disebabkan oleh akar-akar masalah berikut; 1. Keterbatasan Akses Infrastruktur: Infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti ketersediaan jaringan internet yang terbatas, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi terbaru. Ini memperlambat adopsi teknologi di berbagai sektor. 2. Rendahnya Tingkat Literasi Teknologi: Pendidikan dan pelatihan terkait teknologi masih kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat dan tenaga kerja, sehingga kemampuan untuk mengimplementasikan inovasi teknologi masih terbatas. 3. Kurangnya Kebijakan yang Mendukung: Kebijakan pemerintah yang mendukung IPTEK dan inovasi masih kurang terfokus dan belum terintegrasi dengan baik. Dukungan finansial dan non-finansial dari pemerintah juga masih minim. 4. Minimnya Kerjasama Antarlembaga: Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengembangkan IPTEK dan inovasi belum terjalin dengan baik. Sinergi yang buruk ini menghambat pengembangan solusi yang inovatif dan berbasis IPTEK. 5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga ahli serta peneliti di bidang IPTEK menjadi hambatan utama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang teknologi dan inovasi. 6. Isolasi Geografis: Letak geografis wilayah-wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi teknologi dan inovasi menjadi tidak merata. Hal ini juga memperlambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung IPTEK.



Untuk mengatasi permasalahan dan akar masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kerjasama antarlembaga akan sangat penting dalam mendorong kemajuan IPTEK dan inovasi di Kabupaten Buru Selatan.

2. Pembangunan Sosial

A. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan memiliki korelasi dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, dimana salah satu penyumbang komponennya adalah angka harapan hidup yang berkorelasi positif terhadap capaian IPM suatu daerah, untuk Buru Selatan angka usia harapan hidup tahun 2023 mencapai 70,11 tahun. Pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Buru Selatan memiliki sejumlah tantangan yang menjadi catatan dalam program RPJPD 2025-2045 ke depan, diantaranya dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak secara optimal dan kesehatan lingkungan. Dari sisi kesehatan ibu dan anak masih dihadapi yaitu masih ada kelahiran yang tidak ditangani oleh tenaga medis, karena kurangnya tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan serta sosialisasi, terutama desa-desa terpencil lebih memilih kelahiran ditolong dukun beranak. Selain itu tantangan besar adalah tingginya angka stunting tahun 2023, Kabupaten Buru Selatan mencapai 35,50 persen. Hal ini disebabkan selain faktor ekonomi rendahnya pendapatan perkapita, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, juga kurangnya sosialisasi terutama desa-desa terpencil tentang pentingnya gizi bayi, menjadi penyebab utama. Kurang Tenaga kesehatan dalam hal ini kualitas tenaga kesehatan di Kabupaten Buru Selatan, selain itu rendahnya ketersediaan instalasi farmasi/apotik, Jumlah rumah tangga bersanitasi, rendahnya Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu, serta tingginya rentang kendali mengingat wilayah Kabupaten Buru Selatan masih belum dapat dijangkau dari sisi transportasi.

B. Pembangunan Pendidikan

Peningkatan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas, belum dapat dijadikan sebagai dasar kemajuan di Kabupaten Buru Selatan. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku, angka HLS Kabupaten Buru Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku. Kabupaten Buru Selatan juga diperhadapkan dengan tantangan pendidikan nasional yaitu mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan skor PISA dan peringkat Indonesia secara internasional. Dengan demikian, Kabupaten Buru Selatan harus dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa, yaitu membaca, matematika, dan sains.

Pembangunan pendidikan di wilayah Kabupaten Buru Selatan harus mampu memberikan kontribusi besar bagi Pendidikan Provinsi Maluku dan Pendidikan Nasional. Ke depan, sektor pendidikan di Kabupaten Buru Selatan dituntut lebih optimal dalam meningkatkan layanan dan tata kelola yang baik untuk menghindari percaloan atau penyimpangan secara administrasi. Selain itu Kabupaten Buru Selatan diperhadapkan dengan bonus demografi dan upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas agar berkontribusi dalam percepatan pembangunan di berbagai bidang.



Tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Buru Selatan adalah layanan pendidikan yang belum merata di wilayah Kabupaten Buru Selatan dan disparitas mutu pendidikan antarwilayah baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Permasalahan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Buru Selatan diperhadapkan dengan tantangan geografis, yaitu kondisi wilayah pedalaman di Pulau Buru. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya, dimana keterisolasian secara geografis dapat mempersulit siswa untuk mencapai sekolah, terutama di wilayah pedalaman Pulau Buru dan beberapa desa di Pulau Ambalau. Keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi masalah serius, seperti jalan raya, jembatan atau pelabuhan yang memadai. Keterbatasan tersebut dapat membuat perjalanan ke sekolah menjadi sulit dan mahal. Kemudian, keterbatasan fasilitas pendidikan, seperti keberadaan perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, maupun ruang-ruang kelas yang tidak memadai. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet, sehingga menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan akses siswa terhadap sumber daya pendidikan online.

Adanya disparitas mutu pendidikan antarwilayah baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kesenjangan mutu dan kualitas pendidikan masih terjadi di Kabupaten Buru Selatan, dimana sebagian besar sekolah di Buru Selatan masih terakreditasi “B”, yakni belum bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) terkait sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik/kependidikan. Dengan demikian, perlu usaha yang intensif dalam rangka percepatan peningkatan peringkat akreditasi. Kemudian, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah perubahan regulasi dan kebijakan terkait kurikulum dan sistem pendidikan secara nasional, dimana butuh penyesuaian untuk mengakomodir perubahan tersebut. Selain itu, keterkaitan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan dan realitas budaya lokal seringkali menjadi permasalahan. Kurikulum yang dibuat di pusat seringkali belum relevan atau sulit diaplikasikan di wilayah kepulauan dan pedalaman yang memiliki konteks budaya yang unik. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan khusus dalam pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keunikan wilayah Buru Selatan, termasuk pembelajaran tentang lingkungan laut dan keberlanjutannya, serta keterampilan nautika. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, sehingga terjadi kesenjangan mutu pendidikan di Kabupaten Buru Selatan dengan wilayah lain.

Tata kelola sumber daya pendidikan masih menjadi persoalan di Kabupaten Buru Selatan. Hal tersebut terkait dengan rekrutmen dan penempatan para tenaga pendidik dan kependidikan. Persoalan tenaga honorer guru atau tenaga kependidikan yang belum diangkat hingga saat ini, sangat berdampak pada pengembangan kompetensi diri. Kemudian, pengembangan kompetensi tenaga pendidik PNS/P3K yang terkait dengan guru bersertifikasi masih menjadi permasalahan di Kabupaten Buru Selatan. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi mutu pendidikan di Kabupaten Buru Selatan. Selain itu,



keterisolasian geografis yang terjadi Kabupaten Buru Selatan juga berdampak pada keberadaan guru-guru yang di wilayah-wilayah pedalaman, pesisir dan pulau terpencil. Hal tersebut menjadi permasalahan, karena sulit untuk mendapatkan dan mempertahankan guru yang berkualitas dan loyal untuk ditempatkan di wilayah- wilayah pedalaman, pesisir dan terpencil. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keberadaan guru di wilayah terpencil dan sekaligus menjadi tantangan Kabupaten Buru Selatan adalah pemberian insentif yang sesuai dengan kondisi kerja yang sulit, dan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dan layanan lainnya.

Persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus di Kabupaten Buru Selatan adalah masih rendahnya penyelenggaraan pendidikan berbasis potensi daerah dan kearifan lokal. Hal tersebut berakibat pada rendahnya sinkronisasi lulusan terhadap dunia kerja. Dengan kata lain, terjadi ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, yang mengakibatkan daya serap lulusan rendah dan kurangnya kreatifitas dalam menciptakan lapangan kerja baru. Hal yang perlu didorong adalah peranan SMK yang berbasis potensi daerah dan kearifan lokal.

Pada umumnya, persoalan yang sering terjadi di wilayah Buru Selatan adalah rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan badai tropis. Bencana semacam itu dapat mengganggu proses pendidikan, seperti merusak infrastruktur sekolah atau mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu, kondisi kemiskinan di beberapa wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil di Buru Selatan juga menjadi persoalan serius, karena pada wilayah tersebut pendidikan menjadi prioritas sekunder bukan prioritas utama, dimana masyarakat pada wilayah tersebut lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

C. Pembangunan Sosial (KAT)

Jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2023 adalah 79.017 jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat pada tahun 2045 menjadi 112.504 jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 0.908 persen. Peningkatan jumlah populasi penduduk menjadi tantangan bagi Kabupaten Buru Selatan menuju Buru Selatan Emas, karena saat ini Buru Selatan masih diperhadapkan dengan permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Buru Selatan mencapai 67,68. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Buru Selatan masih rendah dan berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu persoalan pengangguran di Kabupaten Buru Selatan masih perlu dibenahi. Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buru Selatan sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku, TPT di Kabupaten Buru Selatan turut memberikan kontribusi terhadap TPT Provinsi Maluku, dimana secara nasional, TPT Provinsi Maluku tergolong tinggi.

Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas pelayanan pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat yang belum optimal. Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan karena keterisolasian secara geografis. Hal ini turut mempengaruhi tingkat



partisipasi masyarakat Kabupaten Buru Selatan dalam memperoleh layanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, dimana APM SD/ MI/ Sederajat Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 sebesar 96,99%, SMP/ MTs/ Sederajat sebesar 82,31%, SMA/ SMK/ MA/ Sederajat sebesar 65,12%. Selain itu, terbatasnya fasilitas pendidikan, minimnya ketersediaan guru baik secara kuantitas maupun kualitas, dan keterbatasan akses teknologi dan internet turut mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Buru Selatan. Rendahnya kondisi kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh angka Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2022 adalah 67,03 tahun, dimana angka tersebut lebih kecil dari rata-rata UHH nasional yang sudah mencapai 71.37 tahun. Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan juga disebabkan oleh keterbatasan Rumah Sakit dan Puskesmas, dimana Rumah Sakit utama masih bertipe D. Hal ini turut mempengaruhi kualitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan. Distribusi tenaga kesehatan berkualitas di Kabupaten Buru Selatan masih menjadi permasalahan, karena belum merata dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, peningkatan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2022 mencapai 41,6 persen menunjukkan masih rendahnya kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Angka tersebut menjadikan Buru Selatan sebagai kabupaten dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Provinsi Maluku. Kondisi geografis juga turut mempengaruhi tingkat kesulitan akses pelayanan kesehatan di Buru Selatan. Hal tersebut berakibat pada sistem rujukan pelayanan kesehatan yang belum optimal karena pengaruh faktor cuaca dan gelombang laut.

Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah yang masih kental dengan adat istiadat terutama di wilayah pedalaman yang terpencil. Hal tersebut membentuk komunitas adat terpencil (KAT), dimana sebagian besar terisolasi akibat keterpencilan geografis. Hal tersebut dapat mengakibatkan isolasi sosial dan ekonomi, yang menyebabkan KAT terpinggirkan dari peluang ekonomi dan pembangunan yang tersedia di sentra-sentra pengembangan Kabupaten Buru Selatan. KAT cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya penting seperti air bersih, pangan, perumahan layak, layanan kesehatan, dan pendidikan, dimana jarak yang jauh dari pusat kota dan infrastruktur yang terbatas menjadi penyebab utama. Kondisi Buru Selatan yang rentan bencana, mengakibatkan KAT juga berada dalam kondisi rawan bencana. Hal tersebut menjadi permasalahan serius, karena keterisolasian KAT mengakibatkan respons terhadap bencana menjadi lebih lambat dan sulit. Keterpencilan geografis yang dialami KAT juga mengakibatkan keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, seperti internet dan telekomunikasi, sehingga menghambat akses dalam memperoleh pengetahuan baru, memperluas jaringan sosial, atau pasar ekonomi yang lebih luas. Di sisi lain, keterisolasian KAT dapat menjadi kekuatan dalam memelihara budaya dan tradisi unik. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan tradisi dan keberlanjutannya kepada generasi muda di tengah pengaruh globalisasi yang meningkat. Solusi permasalahan dalam KAT membutuhkan



pendekatan yang persuasif dan sensitif terhadap konteks lokal dan kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat sipil, bahkan organisasi internasional untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperkuat ketahanan terhadap bencana, mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan memperkuat kapasitas komunitas dalam melestarikan budaya dan tradisi mereka.

Dewan Jaminan Sosial Nasional, melalui Data Sistem Monitoring Terpadu pada tahun 2023, menyatakan bahwa cakupan peserta JKN-KIS di Kabupaten Buru Selatan belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan belum optimal penyelenggaraan jaminan sosial di Kabupaten Buru Selatan. Hal yang sama juga terjadi pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buru Selatan, dimana penyelenggaraannya belum optimal menyentuh semua kalangan terutama kalangan pekerja informal. Hal tersebut menjadi gambaran umum permasalahan jaminan perlindungan sosial di Kabupaten Buru Selatan, dimana tantangan terbesar adalah belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial, tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah, kurang optimalnya sistem rujukan karena terkendala dengan aksesibilitas dan konektivitas.

Penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Buru Selatan, karena masalah data yang belum terintegrasi dan termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Pelaksanaan bantuan sosial juga belum adaptif dan belum mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam, bencana non alam, dan perubahan iklim. Lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia masih menjadi permasalahan. Tata kelola yang baik diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini, tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Terkait masalah perlindungan sosial, pendekatan secara inklusif perlu ditingkatkan, terutama difokuskan pada kelompok masyarakat yang masih termarginalkan, penyandang disabilitas dan lanjut usia, GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*), perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi serta permasalahan diskriminasi.

Tantangan lain yang dihadapi dan perlu diselesaikan dalam bentuk kebijakan adalah peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk penguatan fokus penyelesaian masalah pembangunan sosial yang sinkron dan terintegrasi di tengah kondisi kapasitas fiskal yang terbatas. Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan PAD perlu dilakukan secara berkala dan tepat sehingga secara perlahan tetapi pasti dapat sangat membantu penguatan kemampuan APBD, sehingga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial. Selain itu, dukungan infrastruktur dan konektivitas yang belum memadai dan adanya ketimpangan perekonomian



wilayah (kota dan desa) menjadi permasalahan yang ke depan perlu diatasi secara bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun berbagai stakeholder lainnya.

3. Pembangunan Tata Kelola, Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat

A. Pembangunan Tata Kelola

Pembangunan Tata Kelola di Kabupaten Buru Selatan dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang mencakup berbagai aspek, seperti Reformasi Birokrasi, Kemitraan Pemerintah Daerah, Inovasi Daerah, Sejumlah permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan melibatkan pelaksanaan konsep reformasi birokrasi yang belum efektif dan efisien, terutama pada delapan area reformasi birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Dan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks tata kelola pengadaan selama tahun 2021-2023 berada pada kategori kurang. Selain itu indeks pelayanan publik juga menunjukkan capaian yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan capaian indeks ini pada tahun 2021-2023 berada pada kategori C-. Hal yang sama juga terjadi pada indeks inovasi daerah, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2023, capaian indeks ini secara berturut-turut berada pada kategori daerah yang kurang inovatif. Linear dengan capaian indeks inovasi daerah, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik juga berada pada kategori kurang pada tahun 2022-2023.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, diperlukan perbaikan secara komprehensif pada struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Harapannya, birokrasi dapat berperan sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih besar pada keberlanjutan pengembangan inovasi daerah, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemitraan atau kerjasama antar daerah dalam berbagai aspek pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, beberapa aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut adalah (i) Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal. Hal ini disebabkan oleh Implementasi konsep reformasi birokrasi belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam manajemen perubahan. Perubahan organisasi dan budaya birokrasi seringkali mengalami kendala, memperlambat peningkatan kinerja birokrat. Faktor lain yang mengemuka adalah Penegakan akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masih terkendala, sehingga hasil-hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. (ii). Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Aspek ini dipengaruhi oleh Proses pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat menimbulkan ketidakjelasan di kalangan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kebijakan daerah dapat menghambat efektivitas tata kelola yang demokratis dan inklusif. (iii). Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas SDM. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan kapasitas SDM yang terbatas dapat menjadi kendala dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang akurat. Lebih lanjut Program pelatihan dan pengembangan sumber daya



manusia masih perlu ditingkatkan agar para pegawai pemerintah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. (iv). Masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Faktor ini dipengaruhi oleh Keberlanjutan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di beberapa sektor pemerintahan dapat merusak integritas tata kelola, menghambat perkembangan ekonomi, dan merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu Sistem pengawasan dan hukuman terhadap praktik KKN perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel. (v). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur TIK yang belum memadai dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam pengelolaan data dan pelayanan administratif serta Rendahnya literasi digital di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat dapat memperlambat adopsi teknologi dan pemanfaatan informasi digital.

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka rekomendasi strategi yang dapat ditempuh adalah Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada manajemen perubahan, peningkatan akuntabilitas, dan keterlibatan aktif pegawai pemerintah, Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung keterlibatan warga dalam pembangunan, Menyediakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam pemerintahan daerah, Memperkuat sistem pengawasan dan hukuman untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua tingkatan pemerintahan dan Meningkatkan investasi dalam infrastruktur TIK, membangun Buru Selatan Satu Data yang mendukung Buru Selatan Digital dan implementasi SMART Office untuk memastikan kualitas layanan publik dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

B. Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat

Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk memberikan arah dan visi strategis bagi pembangunan Kabupaten Buru Selatan. Seorang pemimpin yang efektif mampu merumuskan visi jangka panjang yang jelas dan menginspirasi serta merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Ini membantu memastikan bahwa semua inisiatif pembangunan berjalan selaras dengan tujuan utama, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemimpin yang kompeten memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat, terutama dalam situasi yang memerlukan respons segera. Di Kabupaten Buru Selatan, dimana tantangan geografis dan sosial cukup kompleks, pengambilan keputusan yang efektif dapat membantu mengatasi masalah seperti penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang efisien.

Kepemimpinan yang baik mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan menerapkan praktik-praktik manajemen yang baik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Ini penting untuk memastikan bahwa program dan layanan pemerintah berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Seorang pemimpin yang inklusif dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui komunikasi yang efektif dan transparan, serta



penyediaan platform partisipasi seperti musyawarah desa dan konsultasi publik, pemimpin dapat mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pemerintah tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas lokal melalui program pelatihan dan pendidikan. Ini mencakup peningkatan keterampilan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan menjalankan program pembangunan secara mandiri.

Pemimpin yang fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial dapat memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, pemimpin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan sosial yang tepat dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kepemimpinan yang bersih dan berintegritas adalah kunci untuk pemberantasan korupsi dan penerapan prinsip-prinsip good governance. Di Kabupaten Buru Selatan, kepemimpinan yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata, dimana sumber daya publik dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Kabupaten Buru Selatan memiliki tantangan geografis yang signifikan, termasuk medan yang sulit diakses dan infrastruktur yang terbatas. Kepemimpinan yang efektif dapat merencanakan dan mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur yang strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Kepemimpinan yang efektif di Kabupaten Buru Selatan sangat penting untuk memastikan bahwa potensi daerah ini dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan arah yang jelas, keputusan yang tepat, dan komitmen terhadap transparansi dan inklusivitas, seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas merupakan langkah strategis untuk masa depan Kabupaten Buru Selatan.

4. Penegakan Hukum, Stabilitas Ekonomi & Keamanan

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas masyarakat, dan dinamika global, permasalahan dalam penegakan hukum pun semakin menjadi fokus perhatian. Menyelidiki dan menindak pelanggaran hukum menjadi tantangan yang tidak hanya melibatkan lembaga penegak hukum tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan penegakan hukum mencakup beragam aspek yang merentang dari kurangnya sumber daya hingga kompleksitas kasus hukum yang semakin meningkat.



Ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, etika penegak hukum, dan perubahan sosial yang cepat merupakan sebagian dari dinamika yang melibatkan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks pembangunan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Memahami dan mengatasi permasalahan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan ketertiban. Pembangunan daerah sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Jumlah petugas yang tidak memadai dan alokasi anggaran yang kurang dapat menghambat upaya penegakan hukum. Fasilitas penegakan hukum yang terbatas, dapat mempengaruhi respons cepat terhadap kasus-kasus hukum. Infrastruktur yang tidak memadai juga dapat menurunkan efektivitas lembaga penegak hukum. Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dapat menyulitkan penanganan kasus dan implementasi kebijakan. Koordinasi yang lemah dapat menciptakan celah bagi pelanggaran hukum. Beberapa kelompok masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem keadilan, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial. Ketidaksetaraan akses dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Praktik korupsi di kalangan penegak hukum dapat merusak integritas sistem hukum. Etika penegak hukum yang kurang baik juga dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Tidak adanya kejelasan atau perubahan yang sering dalam regulasi daerah dapat menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat keberlanjutan pembangunan daerah. Pemahaman yang rendah terhadap hukum di kalangan masyarakat dapat menjadi penyebab pelanggaran hukum. Sosialisasi dan edukasi hukum perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kasus-kasus khusus seperti korupsi, kejahatan transnasional, atau permasalahan lingkungan memerlukan sumber daya dan keahlian khusus, dan seringkali sulit diatasi oleh lembaga penegak hukum di daerah. Kurangnya pendidikan hukum dan kualifikasi yang memadai di kalangan penegak hukum dapat menghambat kemampuan mereka untuk menghadapi perkembangan hukum dan teknologi. Pendekatan penegakan hukum yang kurang proaktif dan lebih bersifat reaktif dapat menghambat upaya pencegahan kejahatan, menghasilkan dampak jangka panjang yang kurang optimal.

Dalam menghadapi permasalahan penegakan hukum dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya terkoordinasi dan holistik antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor terkait. Kehadiran sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan adil, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan, mewujudkan stabilitas dan keamanan, perlindungan Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum dan Investasi, pemberantasan korupsi dan kejahatan, Ketertiban Sosial dan Perdamaian, Keadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Keberlanjutan Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pemeliharaan Moral dan Etika. Lebih lanjut penguatan sumber daya manusia, peningkatan anggaran, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta reformasi kebijakan hukum dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Kabupaten Buru Selatan.

5. Pembangunan Demokrasi

Pembangunan demokrasi di Kabupaten Buru Selatan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif, adil, dan sejahtera. Demokrasi yang sehat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, memperkuat



penegakan hukum, mendukung kebijakan inklusif dan berkelanjutan, serta melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi menjadi fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Buru Selatan. Investasi dalam pembangunan demokrasi bukan hanya investasi dalam sistem politik, tetapi juga dalam masa depan yang lebih adil dan makmur bagi semua.

Pembangunan demokrasi di Kabupaten Buru Selatan diukur harus dilihat melalui berbagai kriteria yang mencerminkan kualitas proses pemilihan, fungsi pemerintah, partisipasi politik, kebudayaan politik, kebebasan sipil, kedaulatan hukum, dan infrastruktur demokratis. Dengan memahami dan meningkatkan kriteria-kriteria ini, Kabupaten Buru Selatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

6. Ketahanan Sosial Budaya

Permasalahan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Buru Selatan dilihat dari beberapa indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial budaya. Indikator-indikator dimaksud adalah indeks keluarga sehat, indeks kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan pemuda dan indeks pembangunan kebudayaan.

Data menunjukkan bahwa ketahanan sosial budaya yang diukur dengan indikator-indikator sebagaimana disebutkan di atas masih diperhadapkan dengan permasalahan, fakta mana ditunjukkan dengan capaian indeks-indeks tersebut pada tahun 2018-2022 yang berfluktuatif satu dengan yang lain.

Pembangunan budaya di Buru Selatan ke depan akan dititikberatkan pada peningkatan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat identitas masyarakat Maluku sebagai upaya proteksi ketahanan budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*) di tengah arus globalisasi.

Dinamika pembangunan kebudayaan Buru Selatan diarahkan pada program pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pembinaan sejarah, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Kendatipun demikian masih banyak permasalahan yang perlu difokuskan dalam pembangunan kebudayaan Buru Selatan, dimana saat ini laju perkembangan globalisasi dan modernisasi merupakan ancaman terhadap eksistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) kebudayaan tradisional Buru Selatan.

Masyarakat Buru Selatan yang berbudaya adalah masyarakat yang menghargai, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Buru Selatan merupakan salah satu sumber nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian masyarakat dan merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan hidup masyarakat Buru Selatan lintas agama, suku atau golongan dan ras demi peningkatan tatanan hidup masyarakat yang hidup bersama dalam perbedaan (plural).

Masyarakat Buru Selatan yang memiliki jati diri adalah memperkuat rasa persaudaraan sebagai orang basudara "*Kai Wait Ina Ama*". Masyarakat Buru Selatan akan hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal (*local wisdom*), disiplin, transparan, tanggung jawab, kerja keras dan penuh kejujuran.



Permasalahan pembangunan budaya di Kabupaten Buru Selatan juga diperhadapkan dengan masih minimnya upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan pembangunan terutama dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan untuk kelestarian budaya Buru Selatan, termasuk dalam memperkuat modal sosial (*social capital*) masyarakat guna terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman, serta peningkatan promosi pariwisata daerah dan menunjang pembangunan sektor lainnya.

Selain itu terdapat permasalahan lain seperti (i) kurangnya rapat dan koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat, (ii). Ketersediaan tempat-tempat ibadah masih terbatas, tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, merupakan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat, (iii). Kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta rendahnya toleransi antar umat beragama dapat menjadi pemicu konflik sosial dan mengganggu kerukunan hidup beragama, (iv). Kurangnya pemahaman tentang budaya lokal dan terbatasnya kegiatan-kegiatan pergelaran seni dan budaya untuk memelihara keberlanjutan adat dan budaya lokal, (v). Kurangnya pemeliharaan terhadap gedung seni dan budaya. Sebuah bangunan yang memiliki kombinasi dari unsur-unsur yang memungkinkan untuk mengklasifikasikan organisme arsitektur, tipologi bangunan yang memiliki kesamaan dari bentuk, sifat, fungsi bangunan, dan budaya, (vi). Belum tersedianya anggaran pembangunan stadion olahraga. Ketidakterediaan anggaran untuk pembangunan stadion olahraga adalah tantangan yang dihadapi banyak pemerintah dan organisasi olahraga. Pembangunan fasilitas olahraga membutuhkan investasi besar, dan seringkali, anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut (vii). Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan serta prestasinya di bidang olah raga, (viii). Masih kurang apresiasi terhadap terhadap prestasi olah raga yang dapat mempengaruhi motivasi atlet untuk berprestasi tetapi juga berdampak pada pengembangan olahraga secara keseluruhan, (ix). mulai terkikis rasa solidaritas dalam masyarakat yaitu perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas.

7. Lingkungan Hidup & Kebencanaan

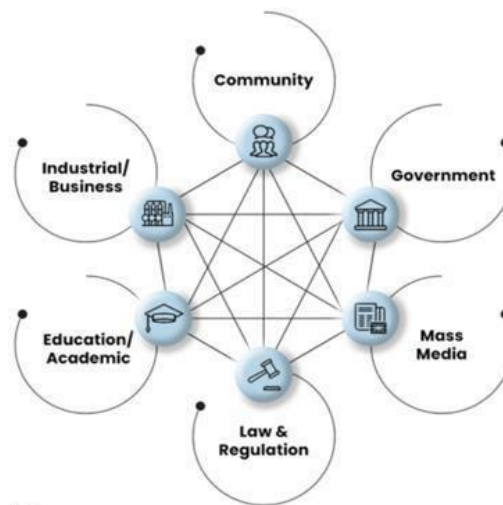
Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan jangka panjang yang akan dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Buru Selatan. Masalah keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menimbulkan penurunan daya dukung lingkungan dan pengurasan atau penipisan ketersediaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tidak tepat akan menimbulkan masalah jangka panjang berupa krisis pangan dan krisis air yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Hal ini akan lebih diperburuk oleh eksploitasi hutan secara illegal melalui pembalakan liar (*illegal logging*) dan kegiatan produksi yang tidak

terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan tanah dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidupnya lainnya.

Sebagai wilayah Kepulauan, permasalahan yang juga akan dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Masalah penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup adalah kondisi Kabupaten Buru Selatan yang relatif rentan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang sekarang tengah terjadi dan diperkirakan masih akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Beberapa bencana seperti banjir dan tanah longsor merupakan dampak nyata dari perubahan iklim dan pemanasan global. Berkenaan dengan itu, masalah perubahan iklim dan pemanasan global perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka panjang Buru Selatan.



Gambar. 3.1. Model Pendekatan Hexahelix dalam penanganan lingkungan hidup berkelanjutan di Buru Selatan

Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah Buru Selatan masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam. Ditinjau dari kebencanaan, wilayah kabupaten Buru Selatan rentan terhadap bencana dan memiliki indeks risiko bencana (IRBI) berada dalam kategori tinggi, yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan wilayah di Buru Selatan agar selaras dan perencanaan ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan. Ancaman dan kejadian bencana yang terjadi di Buru Selatan terdiri dari gempa bumi tinggi yang tersebar sebagian pesisir Kepala Madan (Fogi dan Waalatin), Fenafafan (Tifu dan Waemulang), dan kawasan pesisir Waesama. Kerawanan bencana gempa sedang meliputi Pulau Ambalau, Namrole, Leksula, dan Kepala Madan. Kerawanan bencana gempa rendah meliputi sebagian utara Namrole dan Waesama. Rawan tsunami mengelilingi pesisir pantai Pulau Buru dan Pulau Ambalau. Adapun kerawanan tsunami tinggi terkonsentrasi kawasan pesisir Kepala Madan, Waesama, dan Ambalau serta sebagian pesisir Fenafafan (Tifu), Namrole, dan Leksula. Kawasan rawan longsor, hampir 80% dari luas wilayah Kabupaten Buru Selatan berkategori kerawanan longsor sedang. Sedangkan kerawanan longsor tinggi terjadi di Kecamatan Namrole, Fenafafan,

dan Ambalau memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor paling tinggi. Kawasan rawan erosi terjadi pada area perbukitan karst dan denudasional. Sedimentasi terjadi di muara Sungai Waimala, Waihoka dan Waimulang. Abrasi pantai terjadi intensif sepanjang pesisir Kabupaten Buru Selatan. Pada Pulau Ambalau tingkat abrasi cukup tinggi, demikian juga pada pantai Namrole dan Wamsisi. Kawasan rawan banjir berskala tinggi terjadi di aliran sungai yang melewati Waimulang dan Wamsisi, serta Waetawa. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan, sistem peringatan dini serta mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah tersebut harus menjadi prioritas.

Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Tata kelola yang lemah merupakan salah satu pemicu risiko bencana, dan terkait dengan banyak pemicu risiko lainnya seperti kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan perkotaan yang tidak direncanakan dengan baik, dan pembangunan ekonomi global. Untuk mengatasi risiko bencana, tidak hanya penyebab mendasar dari risiko bencana yang perlu diatasi untuk menghindari timbulnya dan akumulasi risiko, namun tata kelola risiko bencana juga harus diperkuat agar dapat melakukan hal tersebut. Risiko bencana dan iklim dalam pembangunan perlu didekati tidak hanya melalui sektor yang terspesialisasi dan berdiri sendiri, namun melalui penguatan pengaturan tata kelola lintas sektor dan wilayah seperti pendelegasian tanggung jawab ke tingkat daerah.

8. Kemandirian Pangan Lokal

Permasalahan kemandirian pangan lokal di Kabupaten Buru Selatan diukur dengan indikator indeks ketahanan pangan dan indeks prevalensi ketidakcukupan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah atau negara mampu menyediakan pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh penduduknya. IKP mencakup beberapa indikator utama, antara lain ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan dan stabilitas pasokan pangan. Data evaluasi menunjukkan bahwa, indeks ketahanan pangan Buru Selatan pada tahun 2022 sebesar 57,79. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan Maluku dan Nasional yang berada pada angka 60,20.

Saat ini, Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi lahan sawah yang belum tergarap seluas lebih dari 1000 Ha dan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 6772,26 Ha. Potensi ini belum terkelola secara optimal untuk memberikan kontribusi guna menjamin ketersediaan stok pangan bagi Buru Selatan.

9. Pembangunan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur

Dalam berbagai penelitian ekonomi pembangunan, infrastruktur dianggap sebagai elemen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, keberadaan infrastruktur transportasi dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik, sehingga produk lokal dapat bersaing dengan barang impor. Sama halnya dengan pembangunan infrastruktur di sektor energi, listrik, telekomunikasi, dan sumber daya air, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah.

Kabupaten Buru Selatan menghadapi sejumlah tantangan terkait pembangunan infrastruktur. Geografi dan karakteristik wilayah menyebabkan penduduk Buru Selatan tersebar baik di kawasan pegunungan dan pesisir pantai maupun pulau kecil, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Laut yang luas memisahkan pulau-pulau ini, dan pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur



yang menghubungkan desa-desa pesisir, dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk kebutuhan layanan dasar maupun menghubungkan Buru Selatan dengan Buru. Data evaluasi menunjukkan bahwa persentase kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 berada pada angka 76,96% dan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Selain itu, daerah ini juga diperhadapkan pada akses jaringan internet yang diukur dengan persentase jangkauan 4G di kawasan pemukiman. Tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 39,25%. Angka ini sangatlah rendah jika dibandingkan dengan capaian Maluku dan Nasional yaitu sebesar 94,33% dan 96,97%.

Isu utama adalah ketersediaan infrastruktur transportasi yang belum optimal, yang berdampak pada aksesibilitas dan konektivitas antar dan dalam pulau. Jaringan jalan yang kurang memadai dan tingkat kemantapan jalan yang belum, serta keterbatasan akses terhadap transportasi laut, menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang. Dampaknya dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi yang terkendala dan kesulitan akses masyarakat ke pusat-pusat layanan wilayah seperti kesehatan dan pendidikan. Layanan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi juga minim dan tidak merata di seluruh wilayah Buru Selatan. Sumber air baku yang belum optimal dan penurunan konsumsi air bersih oleh masyarakat menambah kompleksitas masalah.

Kabupaten Buru Selatan juga menghadapi kekurangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) skala lokal, yang diperlukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (Bidang ke-PU-an) pada tingkat provinsi. Tantangan lainnya meliputi minimnya data dan informasi dalam dokumen perencanaan infrastruktur, kesulitan akses energi yang andal, rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan, dan ketidakoptimalan layanan telekomunikasi yang merata. Semua ini menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan cakupan layanan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan. Selain harus mengatasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar, sebagian besar wewenang pengadaan infrastruktur berada di tangan pemerintah pusat. Namun, fokus pemerintah pusat yang belum sepenuhnya terarah pada pemerataan layanan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur menyebabkan kesenjangan antar wilayah semakin melebar.

10. Pembangunan Berkesinambungan

Pembangunan berkesinambungan adalah pendekatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten Buru Selatan, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan bertahan lama.

Selain itu, dalam hal kaidah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengatasi tantangan yang ada melalui pendidikan, peningkatan infrastruktur, kebijakan yang mendukung, dan penguatan ekonomi lokal,



Kabupaten Buru Selatan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat ini tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam dan lingkungan yang sehat.

Lebih lanjut, permasalahan juga ditemukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang di Kabupaten Buru Selatan.

3.2. Isu Strategis

Konstruksi isu strategis pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dipengaruhi baik oleh isu global, nasional maupun daerah Maluku. Isu-isu global yang disebut sebagai megatren global 2045 adalah geopolitik dan geoekonomi, demografi global, perkembangan teknologi, konstelasi perdagangan global, urbanisasi dunia, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, tata kelola keuangan global dan luar angkasa. Selain isu global, isu dan tantangan pembangunan nasional ke depan sebagaimana diuraikan dalam RPJPN 2025-2045 adalah produktivitas rendah, IPTEKIN dan riset lemah, deindustrialisasi dini, pariwisata dibawah potensinya, ekonomi laut belum optimal, kontribusi UMKM dan koperasi kecil, infrastruktur dan literasi digital rendah, pembangunan belum berkelanjutan, integrasi domestik terbatas, kualitas SDM makin rendah, tata kelola pemerintahan belum optimal, kepastian dan penegakan hukum masih lemah, demokrasi belum optimal dan kesenjangan jawa dan luar jawa. Lebih lanjut, perumusan isu strategis Kabupaten Buru Selatan juga harus diselaraskan dengan isu KLHS RPJPD Buru Selatan, yaitu Mengakhiri Kemiskinan (Tanpa Kemiskinan); Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan; Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan; Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan (Tanpa Kelaparan); dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Berikut diuraikan isu strategis pembangunan Buru Selatan 2025-2045.

1. Pembangunan Ekonomi, IPTEK dan Inovasi Belum Optimal

Isu pembangunan ekonomi, IPTEK dan Inovasi merupakan isu krusial yang dibahas baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Maluku 2025-2045. Berikut diuraikan isu-isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi, IPTEK dan inovasi yang belum optimal di Kabupaten Buru Selatan.

a. Pengelolaan Potensi Pariwisata belum optimal

Isu-isu strategis dari sektor pariwisata di Kabupaten Buru Selatan yang perlu diangkat dalam perencanaan jangka panjang adalah:

- ♦ Kinerja pariwisata masih rendah di bawah potensinya yang disebabkan oleh terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan.
- ♦ Terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan.
- ♦ Pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata.
- ♦ Inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.
- ♦ Belum terintegrasinya sektor-sektor yang menyokong pariwisata sehingga bersifat saling mendukung atau tidak saling tumpang tindih.
- ♦ Belum ada kontribusi yang signifikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah,



memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- ♦ Pengembangan kawasan wisata belum terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan yang lain sehingga produktivitasnya lebih optimal bagi daerah dan masyarakat.

b. IPTEKIN dan Riset Masih Rendah

Iptekin dan riset di Kabupaten Buru Selatan melekat di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Buru Selatan. Kabupaten Buru Selatan hingga saat ini belum memiliki lembaga litbangda, dimana kegiatan iptekin dan riset masih berpusat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Buru Selatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mengintegrasikan institusi-institusi kelitbangan (termasuk kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah) ke dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan mensentralisasi penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tangan pemerintah pusat. Dengan terbitnya undang-undang tersebut memberikan peluang dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Kabupaten Buru Selatan untuk mengakomodir berbagai kegiatan inovasi di Kabupaten Buru Selatan.

Kabupaten Buru Selatan sejak dimekarkan tahun 2008 hingga tahun 2022 masih digolongkan sebagai daerah otonomi yang kurang inovatif. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022, tentang indeks inovasi daerah provinsi/Kab/kota di Indonesia tahun 2022, menggolongkan Kabupaten Buru Selatan termasuk ke dalam kabupaten kurang inovatif. Atas dasar tersebut maka berbagai upaya tengah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan antara lain dengan mendorong inovasi di daerah. Upaya tersebut antara lain diarahkan pada peningkatan kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) dan Riset. Iptekin dan riset di daerah dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Buru Selatan dalam jangka panjang. Iptekin dan riset di Kabupaten Buru Selatan penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. IPTEKIN dan riset akan menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Buru Selatan dalam jangka panjang.

Kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian (kelitbangan) di Kabupaten Buru Selatan selama ini masih melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Buru Selatan. Badan tersebut hingga saat ini dirasakan masih merefleksikan kelembagaan yang lemah. Aspek-aspek organisasi, peraturan, dan norma/ etika/budaya kurang merefleksikan ketahanan dan penegakan. Kelembagaan akan memandu interaksi ekonomi dan politik, menentukan bagaimana *send and delivery* terjadi, dan bagaimana anggaran dibelanjakan. Ketika kelembagaan ini tidak berketahanan dan tidak ditegakkan maka sumber daya terbuang sia-sia, layanan tidak disampaikan, dan orang-orang tidak menerima perlindungan yang diperlukan.

Pembangunan iptekin dan riset daerah Kabupaten Buru Selatan mensyaratkan tersedianya organisasi kelitbangan yang mampu tampil prima dalam membantu Bupati melaksanakan fungsi kelitbangan. Organisasi tersebut membutuhkan personalia yang memahami dan menginternalisasi penuh tugas-tugas dan kewenangannya serta



hubungan kerjanya dengan perangkat daerah yang lain maupun dengan lembaga kelitbangan di luar pemerintah daerah.

Kondisi iptekin dan riset di Kabupaten Buru Selatan dirasakan masih memiliki kesenjangan yang lebar dengan kondisi ideal yang diinginkan, dimana kesenjangan tersebut tergambar dari tiga unsur inovasi yakni kelembagaan, jaringan, dan sumber daya:

Kelembagaan Iptekin dan Riset. Kelembagaan tergambar dari berbagai bentuk organisasi, peraturan, dan norma/ etika/budaya yang telah berkembang dalam berbagai aktivitas inovasi dalam lingkup pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha di Kabupaten Buru Selatan. Kegiatan kelitbangan di Kabupaten Buru Selatan masih terintegrasi dan terpusat pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan. Lembaga tersebut belum memiliki rencana induk (Rinduk) kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian (kelitbangan). Termasuk dalam Rinduk kelitbangan adalah Rinduk pembangunan iptekin dan riset daerah. Dalam pembangunan iptekin dan riset daerah, Rinduk adalah suatu rencana untuk mencapai visi, suatu kontrak antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan suatu peta jalan untuk menyatukan potongan-potongan aktivitas pembangunan iptekin dan riset.

Kabupaten Buru Selatan belum memiliki kajian Rinduk pembangunan iptekin dan riset daerah sebagaimana dimaksud, padahal, pembangunan iptekin dan riset daerah masih memiliki sejumlah kelemahan. Pada ranah tata kelola, Kabupaten Buru Selatan belum menerapkan secara terintegrasi *e-planning* dan *e-budgeting* secara elektronik. Rencana elektronik merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan terpusat. Secara spesifik *e-planning* dan *e-budgeting* dapat mengontrol dan mempercepat proses penganggaran/penyusunan program dan kegiatan APBD yang diusulkan oleh setiap SKPD agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penganggaran yang mendukung iptekin dan riset juga belum optimal untuk mendukung terselenggaranya iptekin dan riset di Kabupaten Buru Selatan. Pada ranah pelayanan publik, kepatuhan penyelenggara terhadap standar pelayanan belum optimal. Selain itu daerah belum memiliki kesanggupan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajibannya. Pada ranah inovasi lainnya, Kabupaten Buru Selatan belum melaksanakan diversifikasi usaha dan inovasi secara optimal dalam menangkap peluang usaha.

Aktivitas iptekin dan inovasi di Kabupaten Buru Selatan diharapkan dapat dilakukan oleh berbagai organisasi dalam kerangka sistem meliputi lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di daerah. Aktivitas Iptekin dan riset di kabupaten Buru Selatan belum terlembaga secara formal dan terstruktur. Selama ini iptekin dan riset belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mensinergikan sistem inovasi di daerah. Untuk mensinergikan aktivitas inovasi di Kabupaten Buru Selatan, maka perlu perlu didorong melalui pembentukan wadah organisasi di Kabupaten Buru Selatan yang berperan sebagai koordinator dalam penguatan iptekin dan riset Kabupaten Buru Selatan. Program/aktivitas/kegiatan inovasi di Kabupaten Buru Selatan umumnya dilakukan melalui kerjasama pihak SKPD dengan perguruan tinggi serta lembaga-lembaga vertikal lainnya, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan perlu menyusun regulasi untuk mensinergikan program dan kegiatan pada semua SKPD dan lembaga yang dapat menunjang sistem iptekin dan riset di daerah. Kelembagaan iptekin dan riset saat ini dilakukan melalui pembentukan kelompok- kelompok masyarakat berbasis komoditas unggulan Kabupaten Buru Selatan. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat berbasis komoditas unggulan telah memperkuat jejaring kerjasama dalam transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani lokal sehingga komoditas tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berusaha untuk mengembangkan aktivitas

inovasi melalui integrasi penanganan hulu-hilir agar berdampak pada *backward effect* dan *forward effect*. Aktivitas inovasi juga didukung oleh Tim Inovasi Kabupaten Buru Selatan melalui pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) yang merupakan bagian dari keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Kemendes, PDT dan Transmigrasi. Program Inovasi Desa (PID) mencakup Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Program Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM).

Jaringan Iptekin dan Riset. Jaringan iptekin dan riset mengacu pada interaksi antar lembaga/organisasi dalam sistem inovasi di daerah. Interaksi dimaksudkan untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu kegiatan. Berbagai komunikasi antar lembaga telah dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dan koordinasi antar SKPD dalam upaya mendukung aktivitas inovasi daerah. Pada lingkup provinsi, saat ini dikembangkan beberapa aktivitas komunikasi guna meningkatkan kapasitas jejaring inovasi, antara lain: website informasi pembangunan, penghargaan kreativitas dan inovasi masyarakat (krenova) dan penyelenggaraan berbagai pameran dan promosi produk inovasi yang telah menjadi acara tahunan. Selain itu, aktivitas komunikasi juga telah dilakukan dengan pihak lembaga perguruan tinggi, BRIN, lembaga berbasis masyarakat dan swasta guna menghasilkan produk inovasi yang menjadi keunggulan daerah, akan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal.

Jaringan iptekin dan riset juga telah dilakukan melalui mobilisasi sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Mobilisasi sumber daya IPTEK terlihat dalam berbagai aktivitas inovasi yang dilakukan berbagai organisasi. Mobilisasi secara riil terlihat dari aktivitas kerjasama pendidikan dan pelatihan, kesepakatan, keahlian dan kompetensi, ketrampilan sumber daya manusia yang ditujukan pada penguatan inovasi antar daerah. Selain itu, kerjasama kesepakatan, keahlian, kompetensi, ketrampilan sumber daya manusia juga dilakukan untuk penguatan inovasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan kerjasama kesepakatan, keahlian, kompetensi, ketrampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.

Meskipun demikian, jaringan iptekin dan riset di Kabupaten Buru Selatan dirasakan masih belum optimal ditandai dengan: (i) komunikasi intensif lewat forum ilmiah formal belum optimal; (ii) mekanisme intermediasi yang dapat menautkan kapasitas inovasi di pemerintahan daerah dengan kebutuhan industri dan dunia usaha belum optimal; (iii) prakarsa inovasi belum terkoneksi ke dalam suatu sistem data yang dapat diakses untuk mendukung kinerja prima penyelenggaraan pemerintahan daerah; (iv) kerjasama kelitbangan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sudah terjalin, namun kerjasama pengusulan dan uji coba inovasi daerah belum terbangun; dan (v) hasil-hasil kelitbangan dan inovasi belum terkoneksi secara baik dengan pembelajaran iptekin di lembaga pendidikan guna menghasilkan kompetensi iptekin yang relevan.

Sumber Daya Iptekin dan Riset. Sumber daya mengacu pada komposisi kepakaran/keahlian dan kompetensi/keterampilan manusia, pengembangan kompetensi manusia, pemanfaatan data dan informasi, dan pengembangan sarana dan prasarana iptekin dan riset. Sumber daya iptekin Kabupaten Buru Selatan ditandai dengan kekurangan kepakaran/kompetensi, data dan informasi, serta prasarana dan sarana. Padahal, teori *Resources-Based* atau seringkali disebut *Resources-Based Views* (RBV) telah memprediksikan bagaimana sumber daya organisasi terkait dengan keunggulan kompetitif. Sumber daya yang dimiliki organisasi adalah sumber utama dari kinerja dan keunggulan kompetitif. Sumber daya organisasional dalam teori RBT/RBV mencakup *tangible resources* dan *intangible resources*. Kedua kategori sumber daya



tersebut di atas menentukan keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi. Meski demikian diakui secara luas bahwa masing-masing kategori sumber daya tersebut dapat mempunyai efek yang berbeda pada organisasi yang berbeda.

Sumber daya iptekin dan riset Kabupaten Buru Selatan belum memadai karena kurangnya komposisi kepakaran/keahlian dan kompetensi/keterampilan serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Inovasi daerah yang melekat pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan belum memiliki tenaga fungsional. Penyediaan kepakaran dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia relatif terbatas dan tidak memiliki *grand design*. Kondisi infrastruktur bidang kelitbangan masih belum mendukung kelancaran kegiatan kelitbangan. Fenomena ini dikarenakan belum terbentuknya lembaga litbangda dan hanya bagian dari struktur organisasi yang melekat di Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diupayakan pelembagaan inovasi ke depan dilakukan melalui pembentukan lembaga litbangda, peningkatan pendayagunaan informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai aktivitas inovasi tersebut diharapkan mampu mendorong berbagai aktivitas dan budaya inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk usaha masyarakat dan produk-produk unggulan daerah.

Pengelolaan sumber daya alam unggulan di Kabupaten Buru Selatan seperti sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata masih menunjukkan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dalam hal teknologi, inovasi, dan riset yang memadai, serta keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memiliki kualitas rendah. Kelemahan dalam ekosistem riset, IPTEK, dan inovasi mengakibatkan rendahnya hasil riset yang dapat diaplikasikan secara efektif. Walaupun Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, untuk menjadikannya sebagai komoditas utama yang mendorong ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja baru diperlukan peningkatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan riset yang up-to-date. Sementara IPTEKIN terus mengalami perkembangan pesat di tingkat nasional maupun global, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mencapai kemajuan dalam aspek IPTEK, inovasi, dan riset, dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi, sebagai solusi terhadap berbagai isu dan tantangan pembangunan. Pengembangan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dalam melakukan riset-riset yang mendukung hilirisasi komoditi unggulan Buru Selatan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan komoditi unggulan daerah. Kualitas SDM dan Literasi Digital Masih Rendah

Isu kualitas SDM dan Literasi digital masih rendah merupakan isu krusial yang sangat berpengaruh pada pembangunan Buru Selatan 20 Tahun ke depan. Isu ini juga selaras dengan isu Daya Saing SDM yang dibahas dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Maluku 2025-2045.

Isu strategis kualitas SDM masih rendah di wilayah Kabupaten Buru Selatan melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat di wilayah tersebut untuk bersaing dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Beberapa sub isu strategis terkait hal tersebut adalah:

- 1) Aksesibilitas pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Kondisi geografis dan topografi wilayah yang sulit dan infrastruktur pendidikan yang kurang mengakibatkan aksesibilitas terhadap pendidikan menjadi tantangan di beberapa



wilayah, terutama wilayah pedalaman terpencil dan wilayah yang mengalami keterisolasian. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pendidikan formal dan kesenjangan pendidikan di Wilayah Buru Selatan. Ketersediaan dan penempatan tenaga pendidik yang berkualitas menjadi tantangan di Kabupaten Buru Selatan, terutama pada wilayah pedalaman terpencil. Hal tersebut dikarenakan oleh kondisi wilayah kerja yang sulit akibat keterisolasian geografis, kurangnya fasilitas dan dukungan terkait kesejahteraan guru. Kurangnya pelatihan keterampilan terhadap masyarakat yang membatasi kesempatan penduduk untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi masyarakat (terutama petani dan nelayan) dalam pengelolaan sumber daya alam. Perlu investasi yang signifikan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini termasuk ketersediaan akses terhadap pendidikan berkualitas, program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, dan dukungan untuk pengembangan kewirausahaan lokal. Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan lanjutan dapat menjadi hambatan bagi pengembangan keterampilan dan peningkatan daya saing di pasar kerja global;

- 2) Akses layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat. Akses terbatas terhadap layanan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buru Selatan masih menjadi tantangan, dimana kondisi rumah sakit utama di wilayah tersebut masih bertipe D. selain itu, kondisi stunting masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius, akibat malnutrisi, penyakit menular, dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas masyarakat di Kabupaten Buru Selatan, karena membatasi SDM di wilayah tersebut;
- 3) Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas sumber daya teknologi. Akses terbatas terhadap teknologi dan sumber daya digital menjadi penghambat terbesar dalam pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing pada era digital saat ini. Kurangnya akses terhadap penggunaan perangkat teknologi yang memadai di Kabupaten Buru Selatan membatasi kesempatan belajar dan pengembangan kemampuan teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan komunikasi masih menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan di Kabupaten Buru Selatan. Isu utama yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan adalah akses *internet broadband* yang sangat rendah. Hal tersebut menghambat pengembangan SDM di Kabupaten Buru Selatan terutama di wilayah pedalaman terpencil untuk memperoleh informasi, pelatihan online, pendidikan jarak jauh, dan kesempatan kerja yang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan andal;
- 4) Keterbatasan peluang dan daya saing ekonomi. Di beberapa wilayah Kabupaten Buru Selatan, terutama wilayah yang terisolasi atau pedalaman terpencil, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu seperti pertanian tradisional atau perikanan sangat tinggi. Hal ini membatasi kesempatan untuk diversifikasi ekonomi dan pengembangan keterampilan yang lebih maju dan moderen. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja dan peluang ekonomi di wilayah Kabupaten Buru Selatan masih menjadi tantangan terbesar. Hal tersebut menyebabkan penduduk memiliki keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Angkatan kerja di Kabupaten Buru Selatan dengan kualifikasi pendidikan tinggi masih terbatas;
- 5) Migrasi dan *brain drain*. Kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tinggi atau



- keterampilan khusus, serta tawaran upah yang tinggi menjadi motivasi untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik dan berkembang untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan faktor utama perpindahan tenaga kerja di Kabupaten Buru Selatan ke wilayah lain. Hal ini dapat menyebabkan *brain drain* dan kekurangan SDM berdaya saing di wilayah Kabupaten Buru Selatan;
- 6) Kerjasama dengan pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan SDM di Kabupaten Buru Selatan agar dapat bersaing baik secara regional maupun global. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, mitra pembangunan daerah, nasional dan internasional, serta lembaga-lembaga lainnya terkait pengembangan SDM;
 - 7) Risiko terhadap perubahan. Perubahan secara regional dan global memberikan dampak pada keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Buru Selatan. Perubahan tersebut, seperti perubahan iklim dan lingkungan, perubahan kebijakan dan regulasi, perubahan struktur ekonomi makro akibat kondisi nasional dan global, dan sebagainya. Perubahan tersebut dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Buru Selatan terutama dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk setempat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah adaptasi terhadap berbagai perubahan baik secara regional maupun global terkait mempersiapkan SDM Kabupaten Buru Selatan yang handal;
 - 8) Alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran. Penetapan anggaran berbasis kebutuhan daerah harus menjadi prioritas terutama dalam mempersiapkan SDM Buru Selatan yang unggul. Alokasi anggaran yang diharapkan dapat mendukung program-program peningkatan SDM di Kabupaten Buru Selatan.

C. Literasi Digital Masih Rendah

Isu strategis ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut (i). Infrastruktur Fisik yang Terbatas. Banyak wilayah di Kabupaten Buru Selatan yang masih sulit dijangkau oleh jaringan internet, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital. Selain itu Infrastruktur transportasi yang kurang memadai dapat memperlambat distribusi perangkat digital, mempersulit akses ke pusat-pusat pelatihan literasi digital, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. (ii). Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Literasi Digital. Hal ini disebabkan oleh Kurangnya integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal menyebabkan kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan siswa dan Minimnya pusat pelatihan literasi digital di Kabupaten Buru Selatan membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan terkait teknologi digital. (iii). Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Manfaat Digital. Hal ini disebabkan oleh Beberapa lapisan masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat ekonomi, sosial, dan pendidikan dari penggunaan teknologi digital dan Adanya ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap teknologi digital dapat menjadi hambatan dalam adopsi perangkat dan layanan digital. (iv). Kurangnya Investasi dan Dukungan Pemerintah. Kurangnya investasi dari pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan pusat pelatihan literasi digital. Selain itu Diperlukan kebijakan dan insentif yang mendukung perkembangan ekosistem digital di tingkat lokal untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal. (v). Ketidaksetaraan



Akses dan Partisipasi. Ketidaksetaraan akses dan partisipasi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu Faktor-faktor seperti perbedaan gender dan usia juga dapat mempengaruhi akses dan partisipasi dalam literasi digital.

Solusi untuk mengatasi isu-isu di atas memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Peningkatan investasi dalam infrastruktur digital, pengembangan kurikulum pendidikan yang terintegrasi, pelatihan literasi digital, dan kampanye edukasi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan dan terhubung secara digital di Kabupaten Buru Selatan.

2. Tata Kelola Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat Belum Optimal dan Rendahnya Kapasitas Fiskal

Isu tata kelola pemerintahan berkorelasi juga dengan isu-isu yang dibahas dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Maluku 2025-2045. Isu global yang mengemuka membahas soal tata kelola adalah isu tata kelola keuangan global dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini akan memberikan dampak yang signifikan pada kualitas pelayanan publik yang smart. Berikut ini diuraikan tentang aspek-aspek pada isu tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat belum optimal dan rendahnya kapasitas fiskal.

a. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Isu strategis terkait dengan tata kelola pemerintahan yang belum optimal di Kabupaten Buru Selatan mencerminkan sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah tersebut. Fokus isu ini melibatkan beberapa aspek utama: Pertama, permasalahan dalam struktur birokrasi di Kabupaten Buru Selatan melibatkan kurangnya koordinasi antar unit kerja, kebijakan yang tidak terkoordinasi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Struktur yang tidak optimal dapat menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab dan hambatan dalam aliran informasi, mengurangi efektivitas penyelenggaraan layanan publik. Kedua, dari segi prosedur, tata kelola pemerintahan yang belum optimal di daerah ini sering disertai dengan proses birokrasi yang panjang, rumit, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada warganya. Aspek ketiga melibatkan etika dan integritas dalam birokrasi. Adanya praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kurangnya transparansi dapat memperburuk situasi ini dan menghambat upaya pemberantasan praktik-praktik yang tidak etis.

Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengambilan keputusan lokal juga menjadi permasalahan serius. Kurangnya partisipasi dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menciptakan ketidakpuasan, dan kurangnya dukungan terhadap pemerintahan setempat.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan upaya serius dalam melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, memperkuat etika dan integritas birokrasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan dan memperbaiki kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik.

Lebih lanjut, isu strategis ini menciptakan tantangan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan: (i). Korupsi dan Ketidaktransparanan. Faktor ini dipengaruhi oleh Adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam lingkungan pemerintahan dapat merugikan pelayanan publik dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah dapat menyulitkan pemantauan dan evaluasi masyarakat terhadap penggunaan dana publik. (ii). Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat dan Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi publik dan kebijakan pemerintah mengurangi kemampuan mereka untuk terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. (iii). Ketidakstabilan Kepemimpinan dan SDM Aparatur. Aspek ini dipengaruhi oleh Rotasi jabatan yang cepat dan kurangnya kontinuitas kepemimpinan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan jangka panjang dan Aparatur pemerintahan yang kurang memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (iv). Ketidakjelasan Perencanaan Pembangunan. Faktor ini dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan data yang valid dan reliabel yang menjadi problem yang belum terselesaikan sampai saat ini, selain itu SDM pengelola data yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang mumpuni, yang memahami sumber data dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang data belum tersedia secara memadai. Keterbatasan koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat menghambat pencapaian target pembangunan dan Kurangnya fokus pada aspek pembangunan berkelanjutan seperti lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. (v). Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi. Hal ini disebabkan oleh Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern.

Langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi isu-isu tersebut antara lain: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan sistem pelaporan publik dan mekanisme audit yang kuat, Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan, Memperkuat sistem manajemen SDM dan memberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas aparatur pemerintahan, Menetapkan kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan penerapan konsep Good Governance, Memperbaharui dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, diharapkan Kabupaten Buru Selatan dapat mencapai tingkat tata kelola pemerintahan yang lebih optimal, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat Belum Optimal

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Di Kabupaten Buru Selatan, partisipasi masyarakat memainkan peran vital dalam memastikan bahwa program



pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Optimalisasi partisipasi masyarakat khususnya para pemuda dalam kegiatan pembangunan di kabupaten Buru Selatan menjadi penting karena (1) Partisipasi masyarakat memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang lebih spesifik dan memprioritaskan proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. (2). Dengan terlibat dalam pembangunan, masyarakat merasa memiliki proyek-proyek yang dilaksanakan dan merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberhasilannya. Hal ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas implementasi dan pemeliharaan proyek-proyek tersebut. (3). Partisipasi masyarakat memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat tentang program-program yang dirancang. Dengan demikian, program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan menjadi lebih relevan serta efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. (4) Melibatkan masyarakat dalam pembangunan juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang unik yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk menciptakan solusi-solusi baru dan kreatif dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan. (5) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah harus bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat atas keputusan-keputusan yang mereka buat. (6) Melalui partisipasi dalam pembangunan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru yang dapat memperkuat kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah-masalah pembangunan secara mandiri. (7) Partisipasi masyarakat dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan saling percaya antara kedua belah pihak, pembangunan dapat menjadi lebih kolaboratif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, Kabupaten Buru Selatan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan relevan untuk tantangan yang dihadapi, serta memastikan bahwa hasil pembangunan lebih merata dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat.

c. Rendahnya Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansial secara efektif guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Rendahnya kapasitas fiskal di Kabupaten Buru Selatan memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan di tingkat lokal, membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, dan mendukung



pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Buru Selatan melalui diversifikasi pendapatan, peningkatan manajemen keuangan, dan peningkatan kapasitas institusi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

3. Penegakan Hukum & Demokrasi Belum Optimal

Penegakan hukum dan demokrasi belum optimal menjadi isu strategis yang krusial. Lemahnya kepastian hukum dan penegakan hukum dapat menghambat kemajuan pembangunan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan. Dan berimplikasi pada pembangunan demokrasi di Kabupaten Buru Selatan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait isu ini adalah (i) Ketidakpastian Hukum. Kepastian hukum menjadi dasar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian dalam regulasi daerah, seringkali akibat perubahan kebijakan yang tidak konsisten, dapat mengecilkan minat investor dan merugikan keberlanjutan pembangunan. (ii). Kurangnya Transparansi Hukum. Transparansi hukum yang kurang dapat menciptakan ambiguitas dalam interpretasi regulasi dan prosedur hukum. Hal ini dapat membuka peluang bagi ketidaksetaraan perlakuan dan memicu konflik hukum. (iii). Korupsi dan Etika. Praktik korupsi di dalam sistem hukum merusak integritas dan memicu kecurigaan terhadap lembaga penegak hukum. Etika yang merosot dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. (iv). Tantangan dalam Penegakan Hukum. Kelemahan sistem penegakan hukum, seperti kurangnya personel yang terlatih dan infrastruktur yang memadai, dapat menyulitkan lembaga penegak hukum dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus dengan cepat dan adil. (v). Ketidaksetaraan Akses Terhadap Keadilan. Masyarakat dengan sumber daya terbatas menghadapi kesulitan untuk mengakses sistem keadilan. Ini menciptakan ketidaksetaraan dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum. (vi). Pendidikan dan Kesadaran Hukum yang Rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-hak mereka dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum. Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum perlu menjadi fokus untuk mengatasi isu ini. (vii). Kurangnya Kolaborasi Antarinstansi. Kolaborasi yang kurang optimal antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dalam menanggapi permasalahan hukum yang kompleks. (viii). Perubahan Peraturan yang Cepat. Perubahan peraturan yang cepat dan seringkali tidak terduga dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam penerapan hukum, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat. (ix). Tantangan Teknologi dan Keamanan Informasi. Perkembangan teknologi memunculkan tantangan baru terkait keamanan informasi dan privasi. Sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika ini untuk melindungi hak-hak individu. (x). Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Kekurangan kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia di lembaga penegak hukum dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas-tugas dengan efektif dan mengikuti perkembangan hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat yang terbatas, transparansi dan akuntabilitas yang rendah, ketidaksetaraan akses terhadap proses demokratis, lemahnya infrastruktur demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia juga berpengaruh pada pembangunan demokrasi di Kabupaten Buru Selatan.

Mengatasi isu strategis ini memerlukan upaya terpadu dari pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan transparansi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum yang kuat dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perdamaian berlandaskan Pancasila, digitalisasi sistem penegakan hukum yang moderen serta peningkatan kualitas SDM penegakan hukum yang berintegritas dan paradigma aparat penegak hukum pada keadilan restoratif yang mengakomodir korban, masyarakat dan kepentingan bangsa, penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel, berkeadilan dan berkeadaban, Buru Selatan menuju *zero corruption* dan terselamatkannya asset dan keuangan daerah; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini dan membentuk lingkungan hukum yang kondusif bagi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan Menuju Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan.

4. Pelestarian dan Ketahanan Sosial Budaya Rendah

Isu pelestarian dan ketahanan sosial budaya merupakan isu krusial yang menjadi konsentrasi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama 20 tahun ke depan. Isu global yang sangat berdampak pada ketahanan sosial budaya daerah adalah perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, geopolitik dan geoekonomi dan persaingan sumber daya alam.

Pelestarian dan ketahanan sosial budaya adalah aspek penting dalam menjaga identitas, keberagaman, dan kearifan lokal suatu daerah. Di Kabupaten Buru Selatan, upaya pelestarian dan penguatan ketahanan sosial budaya menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Tantangan yang dihadapi adalah erosi budaya lokal akibat pengaruh globalisasi dan kurangnya penghargaan terhadap budaya lokal. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya untuk pelestarian budaya yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya infrastruktur budaya. Selain itu isu ketahanan sosial yang lemah disebabkan oleh rendahnya solidaritas sosial dan migrasi dan urbanisasi.

Pelestarian dan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Buru Selatan memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa warisan budaya lokal tetap terjaga dan masyarakat memiliki ketahanan sosial yang kuat. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran budaya, memperbaiki alokasi anggaran dan infrastruktur, mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan, serta memperkuat solidaritas sosial, Kabupaten Buru Selatan dapat menjaga identitas budayanya dan menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan berdaya tahan.

5. Infrastruktur Rendah dan Kesenjangan Wilayah

Isu infrastruktur dan kesenjangan wilayah merupakan isu krusial yang dibahas baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Maluku 2025-2045. Isu global yang berpengaruh terhadap isu ini adalah perkembangan teknologi dan persaingan sumber daya alam. Dalam RPJPN Nasional maupun RPJPD Maluku di tegaskan bahwa guna

mendukung percepatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Berikut ini diuraikan aspek-aspek yang terkait dengan isu infrastruktur dan kesenjangan wilayah yang rendah di Buru Selatan.

a. Infrastruktur Wilayah

Keadaan geografis yang melibatkan kepulauan di Kabupaten Buru Selatan menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam usahanya untuk meratakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten. Selama dekade terakhir, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar cenderung difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan dari APBD maupun APBN untuk proyek-proyek infrastruktur dasar. Keterbatasan dana dalam pembangunan juga memberikan dampak terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur digital, terutama di wilayah 3T di Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena itu, dalam fase pembangunan jangka panjang, pemerataan pembangunan infrastruktur layanan dasar, termasuk infrastruktur ketahanan bencana melalui perluasan akses telekomunikasi, menjadi bagian integral dari agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Isu strategis mengenai infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan pulau di Kabupaten Buru Selatan perlu dilakukan dalam bentuk terobosan yang monumental dan berdampak jangka panjang. Gagasan pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru, pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa pesisir, pembangunan jalan lingkar Pulau Ambalau serta pembangunan jalan tani yang membuka akses ke Fenafafan adalah gagasan-gagasan monumental yang memiliki *multiplier effect* jangka panjang pada semua aspek kehidupan. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana transportasi wilayah baik darat maupun laut dengan membuka jaringan transportasi akan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi wilayah. Lebih lanjut, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil merupakan langkah strategis pembangunan yang merata dan berkeadilan.

b. Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan antarwilayah menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka panjang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Di tingkat nasional menargetkan untuk mengatasi masalah kesenjangan antarwilayah dalam dua puluh tahun ke depan. Demikian juga, Kabupaten Buru Selatan menjadikan kesenjangan antar wilayah sebagai salah satu isu strategis dalam pembangunan jangka panjang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buru Selatan masih mengalami keterisolasian, dimana aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Buru Selatan karena kondisi geografi dan topografi wilayah yang sulit. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah pedalaman Buru Selatan masih didominasi oleh (Komunitas Adat Terpencil dan Tertinggal/KAT). Beberapa diantaranya masih hidup dengan budaya yang primitif dan nomaden. Hal tersebut menjadi isu strategis terkait pembangunan kewilayahan Buru Selatan yang inklusif. Hak-hak atas pelayanan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan utama pada wilayah-wilayah yang didomisili oleh KAT yang memperlebar kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Buru Selatan. Pada umumnya



KAT menghadapi persoalan terkait akses terhadap pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan infrastruktur, perlindungan hak asasi manusia (HAM). Beberapa isu strategis terkait kesenjangan tersebut adalah (i). Kondisi geografis wilayah pedalaman terpencil yang sulit diakses mengakibatkan keterisolasian. Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan sumber daya lainnya, (ii). Perbedaan dalam infrastruktur pendukung di wilayah pedalaman terpencil, seperti jalan raya, jembatan penghubung, pelabuhan, dan transportasi umum. Hal ini turut mempengaruhi aksesibilitas dan layanan sosial lainnya, (iii). Perbedaan dalam tingkat kemakmuran ekonomi di wilayah pedalaman terpencil juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Isu ini terkait tingkat kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi antarwilayah di Kabupaten Buru Selatan, (iv). Kesenjangan dalam ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan di wilayah pedalaman terpencil. Hal ini terkait dengan fasilitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal dan merata, (v). Perbedaan dalam akses dan penggunaan teknologi, terutama internet, juga dapat menyebabkan kesenjangan. Hal ini terkait dengan infrastruktur teknologi, akses terhadap sumber daya pendidikan digital dan kesempatan pembelajaran online, (vi). Budaya dan bahasa dalam KAT juga dapat mempengaruhi pembangunan di wilayah pedalaman terpencil di Kabupaten Buru Selatan.

Pembangunan Kabupaten Buru Selatan masih terpusat di Kota Namrole, yang mengakibatkan terpusatnya sumber daya penggerak ekonomi pada wilayah tersebut. Akses investasi dan kredit perbankan di Kabupaten Buru Selatan masih terbatas dan menjadi penyebab kesenjangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Buru Selatan terutama dalam memperoleh modal dengan pengembalian yang ringan untuk pengembangan usaha secara mandiri. Sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan perekonomian dan pelayanan sosial kemasyarakatan juga terbatas di beberapa wilayah. Selain itu, sebaran penduduk di Wilayah Kabupaten Buru Selatan belum merata, dimana migrasi penduduk yang lebih cenderung ke wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi masih menjadi tantangan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Buru Selatan. Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah pada Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena itu, pembangunan kewilayahan di Buru Selatan lebih diintensifkan mengingat besarnya potensi wilayah Kabupaten Buru Selatan yang belum dimanfaatkan atau dikelola secara optimal. Beberapa isu strategis terkait dengan kondisi antarwilayah di Kabupaten Buru Selatan menjadi tantangan utama dalam mendukung pembangunan kewilayahan adalah:

- 1) Pengawasan, keamanan, dan penegakkan hukum yang menjunjung tinggi HAM pada wilayah pedalaman terpencil. Hal tersebut bertujuan menghindari konflik horisontal antarwilayah demi stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Isu ini melibatkan klaim tapal batas, hak atas sumber daya alam, kebijakan dan regulasi daerah yang berbasis hierarki Peraturan Perundang-undangan tertinggi, serta aktivitas ilegal yang melanggar hukum seperti eksploitasi sumber daya alam;
- 2) Pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Hal ini menjadi isu strategis dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Buru Selatan, dimana aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar

kabupaten masih menjadi tantangan terbesar. Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan penggerak ekonomi dalam rangka peningkatan interaksi desa-kota yang sinergis, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan penguatan ekonomi lokal. Isu ini terkait dengan pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan proses digitalisasi;

Pembangunan dan pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan secara efektif. Hal ini didorong untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan kewilayahan. Isu ini juga terkait dengan optimalisasi integrasi konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi seperti Kota Namrole dan KEK Leksula;

- 3) Produktivitas perkotaan yang masih rendah akibat tata kelola yang belum optimal dan belum adanya desain pembangunan berbasis science-technopark. Meningkatkan pemberdayaan dan inovasi masyarakat melalui pengembangan ekonomi dengan hilirisasi sektor unggulan yang didukung oleh pengembangan riset, pelatihan dalam pemasaran dan promosi secara digital, fasilitasi akses permodalan, pembukaan peluang pasar ekspor, serta penguatan kolaborasi dengan mitra pembangunan;
- 4) Pembangunan wilayah perdesaan belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif serta memperkuat kerja sama antarwilayah dan integrasi sumber-sumber pembiayaan yang mendukung transformasi daerah yang lambat tumbuh menjadi daerah berkembang dan maju.
- 5) Desentralisasi dan otonomi daerah dengan tata kelola yang lemah. Hal ini terkait dengan akses dan mutu pelayanan dasar; pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, tenaga pendidik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik dengan dukungan teknologi; serta pendapatan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.
- 6) Meningkatkan ketangguhan dan kemandirian daerah. Hal ini didorong oleh pengembangan sosial dan ekonomi kawasan sesuai karakteristik wilayah dengan penguatan kemandirian pangan lokal.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam. Wilayah Buru Selatan memiliki keanekaragaman sumber daya alam baik di darat maupun di laut. Hal tersebut membutuhkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah tersebut.
- 8) Kerja sama antarwilayah. Hal ini mendukung investasi dan percepatan pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan berbasis kearifan lokal untuk memperkuat kapasitas dan resiliensi wilayah kepulauan di Kabupaten Buru Selatan terhadap tantangan yang dihadapi.
- 9) Perubahan iklim global. Kenaikan permukaan air laut merupakan isu global yang berdampak besar terhadap wilayah kepulauan, termasuk erosi pantai, kerusakan lingkungan, dan migrasi paksa penduduk. Selain itu, cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana alam dan gangguan transportasi menjadi isu penting untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang di wilayah Buru Selatan dengan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 10) Urbanisasi sebagai permasalahan demografi yang memicu kesenjangan sosial antarwilayah. Migrasi penduduk dari desa ke kota masih menjadi permasalahan dan



berdampak pada kesenjangan antarwilayah di Buru Selatan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ledakan populasi di wilayah perkotaan atau sentra-sentra pertumbuhan, sedangkan di wilayah perdesaan dan terpencil mengalami penurunan populasi penduduk, khususnya penduduk yang tergolong dalam usia angkatan kerja.

6. Risiko Bencana, Perubahan Iklim, Kerentanan Daya Dukung Wilayah dan Kemandirian Pangan Lokal

Isu risiko bencana, perubahan iklim, kerentanan daya dukung wilayah serta kemandirian pangan di Kabupaten Buru Selatan merupakan isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan. Isu ini selaras dengan isu yang dibahas baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Maluku 2025-2045. Isu global yang sangat berdampak pada isu ini adalah geopolitik dan geoekonomi, demografi global, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, maupun luar angkasa. Berikut ini dijelaskan tentang isu risiko bencana, perubahan iklim, kerentanan daya dukung wilayah serta kemandirian pangan di Kabupaten Buru Selatan.

a. Risiko Bencana, Perubahan Iklim, Kerentanan Daya Dukung Wilayah

Dalam mencapai terwujudnya pembangunan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana merupakan tantangan yang harus disinergikan. Kebijakan adaptasi perubahan iklim harus mempertimbangkan risiko bencana untuk meningkatkan kemampuan dan ketangguhan masyarakat untuk adaptif, mitigatif dan kesiapsiagaan.

Buru Selatan dengan karakteristik kepulauan dan ketersebaran pulau kecil memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pulau-pulau kecil yang nantinya dikembangkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas seperti ruang air, tanah, kawasan pantai, vegetasi maupun satwa yang rentan dan rapuh terhadap perubahan iklim dan berdampak pada keberlanjutan pembangunan. Perubahan iklim juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan sejumlah wilayah memiliki kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir yang mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk Buru Selatan.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan akan berdampak buruk pada keberlangsungan lingkungan hidup. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah satu dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar dimana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.

Perubahan iklim di Buru Selatan akan sangat terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah laut dan pesisir serta pertanian. Ketersediaan air dan Kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Peningkatan tinggi gelombang ekstrem, kenaikan



permukaan air laut, peningkatan suhu dan perubahan curah hujan merupakan risiko yang perlu diantisipasi.

b. Kemandirian Pangan Masih Rendah

Dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Kedepan, kemandiri pangan disetiap negara, termasuk Indonesia akan terus menjadi isu penting karena disamping lebih dari 73 % kebutuhan hidup manusia sangat tergantung dari pangan, juga tantangan yang dihadapi dalam penyiapan stok pangan akan terus meningkat dan sangat dinamis. Beberapa tantangan utama yang sudah pasti akan dihadapi adalah:

- 1) Adanya perubahan rantai suplai pangan dan energi dunia sebagai akibat dari gejolak politik global,
- 2) Terjadinya dinamika perubahan iklim yang ekstrim, yaitu kejadian *El nino* (kemarau ekstrim) dan *La Nina* (hujan ekstrim) yang saat ini telah dirasakan memberikan pengaruh buruk dalam kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, transportasi dan berbagai aspek lainnya.
- 3) Kondisi diatas akan memberikan tekanan yang besar dalam penyediaan stok pangan ditingkat nasional dan daerah, akan mengganggu aspek produksi maupun pengadaan pangan melalui mekanisme Kerjasama Antar Negara (KAN) dan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Kabupaten Buru Selatan yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku dan merupakan salah satu Provinsi Kepulauan di Indonesia, juga akan mendapat tekanan yang besar dalam penyediaan pangan. Luas daratan di Kabupaten Buru Selatan yang kurang lebih 70 % masih merupakan wilayah HPH, maka dalam jangka waktu 20 tahun kedepan akan menjadi tantangan yang besar dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Tantangan ini, kedepan tentu akan terus meningkat jika tidak dilakukan pengamanan lahan melalui dukungan regulasi, karena tekanan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian juga meningkat.

Saat ini, Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi lahan sawah yang belum tergarap seluas lebih dari 1000 Ha dan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 6772,26 Ha.

Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Gambaran kondisi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan Kabupaten Buru Selatan seperti tersaji pada data di Tabel berikut.

Tabel 3.1. Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal Kab. Buru Selatan Tahun 2022 dan Prediksi Tahun 2045

No	Uraian/Bahan Pangan Pokok	Potensi Luas Lahan(Ha)	Rataan Luas Lahan Panen (Ha)	2022 (Populasi 77.280 Jiwa)			2045 (Populasi 144.096 Jiwa*)		
				Produksi	Kebutuhan	Ketahanan Pangan (Bln)	Produksi	Kebutuhan	Ketahanan Pangan (Bln)
1	Beras (Ton/Thn)	1500	0	0	5.841	0	8667**)	10.891	9,55
2	Bawang merah (Ton/Thn) (Sumber Distan Provinsi 2023)			13,81	176	0,94	138	328,53	5,04
3	Cabe merah (Ton/Thn)			338.65	77.28	52.59	3386	144.11	282
4	Ikan segar/basah (Ton)			14.933***)	2.853	62.81	14.933***)	5.321	33.68
5	Telur ayam ras (Butir/Thn)			0	3.930.461	0	0	7.328.722	0
6	Minyak goreng (Liter/Thn)			0	3.617.114	0	0	4.834.634	0
7	Gula pasir(Ton/Thn)			0	3.314	0	0	4.429	0
8	Tepung terigu (Ton/Thn)			0	824	0	0	1.101	0

Ket: *) Pertumbuhan Penduduk: 3.93% (BPS, 2022); **) Luas tanam sawah 1.500 Ha; ***) Diasumsikan 70 % dijual ke cold storage

Data pada Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari 8 contoh bahan pangan yang disajikan, terdapat 5 jenis (62.50 %) komoditi pangan (Beras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu) yang umumnya tidak diproduksi di Kabupaten Buru Selatan, dan bahan pangan ini harus didatangkan dari luar daerah melalui mekanisme KAD. Tiga jenis komoditi lainnya (37.50 %), yaitu bawang merah, cabe merah dan ikan di produksi di Buru Selatan, dan ketahanan bahwa merah hanya 5 bulan, sedangkan cabe dan ikan diatas 1 tahun.

Atas uraian data 8 contoh bahan pangan pokok yang disajikan, tergambar bahwa Buru Selatan masih tergolong rentan dalam ketahanan pangan lokal. Dengan demikian kedepan hingga tahun 2045 Buru Selatan perlu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memperkuat kebutuhan, kemandiri dan ketahanan pangan daerah. Melalui arah kebijakan ini, maka lapangan kerja akan terbuka, terjadi penambahan perputaran uang di daerah diperkirakan lebih dari Rp. 400 Miliar per tahun. Selain itu, penanganan inflasi dapat dilakukan dengan baik, dan penurunan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pendapatan serta pendekatan pemberian bantuan sosial (bantuan bahan pangan murah) dan perlindungan sosial dapat direncanakan secara lebih tepat dan inklusif.

7. Kemitraan dan Kesenambungan Pembangunan Belum Optimal



Isu kemitraan dan kesinambungan pembangunan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah baik pusat, pemerintah provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Hal ini nyata dalam misi RPJPN 2025-2045 yang menekankan pada kesinambungan pembangunan maupun arah kebijakan dalam RPJPD Maluku 2025-2045.

Kemitraan dalam pembangunan dapat mendorong kesempatan baru untuk melakukan pembangunan dengan cara lebih baik dengan mengidentifikasi kualitas dan kompetensi masing-masing sektor dan menemukan mekanisme baru untuk kebaikan bersama. Pada banyak kasus, kegagalan program yang melibatkan kemitraan multi-pihak, baru terasa setelah program berjalan lama dan permasalahan yang timbul sudah cukup rumit untuk dapat dipulihkan karena dana dan waktu sudah terbatas, atau program itu sendiri harus berakhir. Mitra dalam pembangunan itu sendiri bisa antar sesama OPD dalam/antar daerah, legislatif, OKP/LSM Ormas maupun yang sifatnya global Ngo/CSR asing. Kegiatan terkait kemitraan dalam pembangunan Buru Selatan masih sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data masih rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif, belum tersedia perda yang mendukung kerjasama kelembagaan adat dan juga tata kelola pemerintahan yang belum terintegrasi antara pemerintah daerah. Isu strategis kemitraan dalam pembangunan yang belum optimal meliputi

- ♦ Pendekatan politik pusat terhadap wilayah kepulauan
- ♦ Integrasi kelembagaan adat dalam penyelesaian permasalahan pembangunan terkait tanah/wilayah adat.
- ♦ Kondisi topografi yang masih terbatas akses atas beberapa wilayah pegunungan/komunitas adat terpencil
- ♦ Tata kelola pemerintahan yang belum terintegrasi
- ♦ Digitalisasi layanan dan infrastruktur komunikasi yang terbatas.

3.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Kajian TPB Berdasarkan KLHS

Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis Kajian TPB berdasarkan KLHS di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Resiko bencana dan kerentanan perubahan iklim.;
- b. Belum optimalnya kemandirian pangan lokal;
- c. Tingginya tingkat kemiskinan;
- d. Akses pelayanan air bersih dan sanitasi layak belum merata;
- e. Keterbatasan aksesibilitas, sarana prasarana dan jaringan infrastruktur;
- f. Pertumbuhan ekonomi masih rendah;
- g. Belum optimalnya tata kelola dan penegakan hukum.

Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka Panjang di Kabupaten Buru Selatan tersebut dikaitkan dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kondisi, trend dan proyeksi isu pembangunan berkelanjutan paling strategis di kabupaten Buru Selatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Resiko Bencana dan Kerentanan Perubahan Iklim.



Isu risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Buru Selatan merupakan isu krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan. Isu ini selaras dengan isu yang dibahas baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJPD Maluku 2025-2045. Isu global yang sangat berdampak pada isu ini adalah geopolitik dan geoekonomi, demografi global, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, maupun luar angkasa. Berikut ini dijelaskan tentang isu risiko bencana, perubahan iklim, kerentanan daya dukung wilayah serta kemandirian pangan di Kabupaten Buru Selatan. Wilayah Buru Selatan masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam. Ditinjau dari kebencanaan, wilayah kabupaten Buru Selatan rentan terhadap bencana dan memiliki indeks risiko bencana (IRBI) berada dalam kategori tinggi, yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan wilayah di Buru Selatan agar selaras dan perencanaan ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan. Ancaman dan kejadian bencana yang terjadi di Buru Selatan terdiri dari gempa bumi tinggi yang tersebar sebagian pesisir Kepala Madan (Fogi dan Waalatin), Fena Fafan (Tifu dan Waemulang), dan kawasan pesisir Waesama. Kerawanan bencana gempa sedang meliputi Pulau Ambalau, Namrole, Leksula, dan Kepala Madan. Kerawanan bencana gempa rendah meliputi sebagian utara Namrole dan Waesama. Rawan tsunami mengelilingi pesisir pantai Pulau Buru dan Pulau Ambalau. Adapun kerawanan tsunami tinggi terkonsentrasi kawasan pesisir Kepala Madan, Waesama, dan Ambalau serta sebagian pesisir Fena Fafan (Tifu), Namrole, dan Leksula. Kawasan rawan longsor, hampir 80% dari luas wilayah Kabupaten Buru Selatan berkategori kerawanan longsor sedang. Sedangkan kerawanan longsor tinggi terjadi di Kecamatan Namrole, Fena Fafan, dan Ambalau memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor paling tinggi. Kawasan rawan erosi terjadi pada area perbukitan karst dan denudasional. Sedimentasi terjadi di muara Sungai Waemala, Waihoka dan Waemulang. Abrasi pantai terjadi intensif sepanjang pesisir Kabupaten Buru Selatan. Pada Pulau Ambalau tingkat abrasi cukup tinggi, demikian juga pada pantai Namrole dan Wamsisi. Kawasan rawan banjir berskala tinggi terjadi di aliran sungai yang melewati Waimulang dan Wamsisi, serta Waetawa. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan, sistem peringatan dini serta mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah tersebut harus menjadi prioritas. Tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Tata kelola yang lemah merupakan salah satu pemicu risiko bencana, dan terkait dengan banyak pemicu risiko lainnya seperti kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan perkotaan yang tidak direncanakan dengan baik, dan pembangunan ekonomi global. Untuk mengatasi risiko bencana, tidak hanya penyebab mendasar dari risiko bencana yang perlu diatasi untuk menghindari timbulnya



dan akumulasi risiko, namun tata kelola risiko bencana juga harus diperkuat agar dapat melakukan hal tersebut. Risiko bencana dan iklim dalam pembangunan perlu didekati tidak hanya melalui sektor yang terspesialisasi dan berdiri sendiri, namun melalui penguatan pengaturan tata kelola lintas sektor dan wilayah seperti pendelegasian tanggung jawab ke tingkat daerah.

2. **Belum Optimalnya Kemandirian Pangan Lokal**
- Dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kedepan, kemandiri pangan disetiap negara, termasuk Indonesia akan terus menjadi isu penting karena disamping lebih dari 73% kebutuhan hidup manusia sangat tergantung dari pangan, juga tantangan yang dihadapi dalam penyiapan stok pangan akan terus meningkat dan sangat dinamis. Beberapa tantangan utama yang sudah pasti akan dihadapi adalah:
- a. Adanya perubahan rantai suplai pangan dan energi dunia sebagai akibatn dari gejolak politik global,
 - b. Terjadinya dinamika perubahan iklim yang ekstrim, yaitu kejadian *El nino* (kemarau ekstrim) dan *La Nina* (hujan ekstrim) yang saat ini telah dirasakan memberikan pengaruh buruk dalam kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, transportasi dan berbagai aspek lainnya.
 - c. Kondisi diatas akan memberikan tekanan yang besar dalam penyediaan stok pangan ditingkat nasional dan daerah, akan mengganggu aspek produksi maupun pengadaan pangan melalui mekanisme Kerjasama Antarnegara (KAN) dan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Kabupaten Buru Selatan yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku dan merupakan salah satu Provinsi Kepulauan di Luas daratan di Kabupaten Buru Selatan yang kurang lebih 70 % masih merupakan wilayah HPH, maka dalam jangka waktu 20 tahun kedepan akan menjadi tantangan yang besar dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Tantangan ini, kedepan tentu akan terus meningkat jika tidak dilakukan pengamanan lahan melalui



dukungan regulasi, karena tekanan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian juga meningkat. Saat ini, Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi lahan sawah yang belum tergarap seluas lebih dari 1000 Ha dan Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 6772,26 Ha. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

- | 3. Tingginya | Tingkat | Kemiskinan |
|--|----------------|-------------------|
| <p>Penanggulangan kemiskinan telah menjadi satu prioritas pembangunan Nasional dan Daerah. Sejalan dengan prioritas tersebut, maka berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Kondisi sosial masyarakat Buru Selatan, khusus ditinjau dari angka kemiskinan masih tergolong tinggi dan masuk dalam urutan dibawah rata-rata Provinsi Maluku. Berdasarkan data yang ada, Kementerian Desa dan PDTT memasukan kabupaten ini sebagai salah satu kabupaten yang tergolong tertinggal. Data IDM tahun 2021 juga memperlihatkan bahwa jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal kabupaten ini mencapai 58.75 % dari total 80 desa. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2018 tercatat sebesar 16,31% menurun menjadi 14,75% di tahun 2022. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi merupakan aspek kelemahan yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Buru Selatan. Masalah ini dapat menghambat</p> | | |



pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengancam kesejahteraan sosial, dan menghalangi pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur, promosi kewirausahaan, pelatihan kerja, serta pemberian akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Dengan demikian, Kabupaten Buru Selatan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Akses Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi Layak Belum Merata

Kabupaten Buru Selatan juga menghadapi kekurangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) skala lokal, yang diperlukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (Bidang ke-PU-an) pada tingkat provinsi. Kabupaten Buru Selatan juga menghadapi kekurangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) skala lokal, yang diperlukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (Bidang ke-PU-an) pada tingkat provinsi. Beberapa permasalahan terkait dengan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Buru Selatan diantaranya:

- ✓ Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak baru mencapai 65,02% sehingga belum mencapai target nasional sebesar 100%;
- ✓ Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, tidak sebanding dengan tersedianya air minum;
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana air bersih, jaringan perpipaan sering rusak karena tanah longsor dan banjir.
- ✓ Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga dan lainnya
- ✓ Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak baru pada tahun 2023 baru mencapai 65,02%. Berdasarkan proyeksi menggunakan skenario BAU (*business as usual*) pada tahun 2030 baru mencapai 72,30% sehingga masih ada GAP sekitar 27,70% untuk mencapai target nasional sebesar 100%
- ✓ Masih terbatasnya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk; Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada tahun 2023 baru mencapai 34.695 jiwa atau sekitar 43,90% dari jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan proyeksi menggunakan skenario BAU (*business as usual*) pada tahun 2030 baru



mencapai 60,83 sehingga masih ada GAP sebesar 39,17% untuk mencapai target nasional 100%.

5. **Keterbatasan Aksesibilitas, Sarana, Prasarana Dan Jaringan Infrastruktur**
- Kabupaten Buru Selatan menghadapi sejumlah tantangan terkait pembangunan infrastruktur. Geografi dan karakteristik wilayah menyebabkan penduduk Kabupaten Buru Selatan tersebar di pulau-pulau, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Laut yang luas memisahkan pulau-pulau ini, dan pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur yang menghubungkan desa-desa pesisir, dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk kebutuhan layanan dasar maupun menghubungkan Buru Selatan dengan Buru. Isu utama adalah ketersediaan infrastruktur transportasi yang belum optimal, yang berdampak pada aksesibilitas dan konektivitas antar dan dalam pulau. Jaringan jalan yang kurang memadai dan tingkat kemantapan jalan yang belum, serta keterbatasan akses terhadap transportasi laut, menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang. Dampaknya dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi yang terkendala dan kesulitan akses masyarakat ke pusat-pusat layanan wilayah seperti kesehatan dan pendidikan. Layanan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi juga minim dan tidak merata di seluruh wilayah Buru Selatan. Sumber air baku yang belum optimal dan penurunan konsumsi air bersih oleh masyarakat menambah kompleksitas masalah. Tantangan lainnya meliputi minimnya data dan informasi dalam dokumen perencanaan infrastruktur, kesulitan akses energi yang andal, rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan, dan ketidakoptimalan layanan telekomunikasi yang merata. Semua ini menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan cakupan layanan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan. Selain harus mengatasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar, sebagian besar wewenang pengadaan infrastruktur berada di tangan pemerintah pusat. Namun, fokus pemerintah pusat yang belum sepenuhnya terarah pada pemerataan layanan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur menyebabkan kesenjangan antar wilayah semakin melebar.

6. **Pertumbuhan ekonomi masih rendah**
- Pembangunan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif dari tahun 2019-2023. Hal ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 4.58% pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan



laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada tahun 2023 yaitu sebesar 5.21% dan Nasional sebesar 5,05%. Berdasarkan statistik sebaran PDRB harga berlaku per lapangan usaha selama 5 tahun terakhir, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan Buru Selatan, yaitu mencapai 38,54%. Gambaran ini menunjukkan bagaimana kendala pembangunan sector pertanian, kehutanan, dan perikanan akan berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertanian mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Buru Selatan, baik melalui produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun jasa pertanian. Pertumbuhan ekonomi Buru Selatan rata-rata sekitar 2% selama lima tahun terakhir, dimana laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 4,58%; ke depan harus didorong mencapai 10%-15%. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan dengan provinsi dan nasional tahun 2019 sampai tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan terendah adalah di tahun 2020 yaitu -0,02 persen penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid 19. Kemudian mengalami pertumbuhan di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 Ekonomi Kabupaten Buru Selatan tumbuh 4.58 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5.53 persen. Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan yaitu berada di atas provinsi dan nasional pada tahun 2019 dan tahun 2022, sedangkan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan berada di bawah provinsi dan nasional. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 berdasarkan Kabupaten Kota, ekonomi Buru Selatan berada di bawah Provinsi Maluku di atas Kota Ambon. Pembangunan ekonomi inklusif masih belum ideal untuk meningkatkan sektor perekonomian dan sektor penting lainnya karena tantangan aksesibilitas wilayah. Kurang optimalnya pengembangan sector pertanian-kehutanan dan perikanan dikarenakan tingkat aksesibilitas yang rendah dengan kondisi topografi wilayah yang masih pegunungan, sehingga nilai tambah yang seharusnya diperoleh secara maksimal belum bisa terwujud. Selain itu, pengembangan sector pariwisata juga belum bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Buru Selatan karena belum dilakukan secara profesional. Akibat keterbelakangan sektor pariwisata, diversifikasi usaha ke sektor lain, seperti industri kreatif, hotel, restoran, transportasi, dan jasa lainnya, pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah.

7. **Belum optimalnya Tata Kelola dan Penegakan Hukum**
Pembangunan Tata Kelola di Kabupaten Buru Selatan dihadapkan pada sejumlah



permasalahan yang mencakup berbagai aspek, seperti Reformasi Birokrasi, Kemitraan Pemerintah Daerah, Inovasi Daerah, Tata Kelola Keuangan, dan sistem pengawasan, bersama dengan beberapa aspek lainnya. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah menjadikan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) sebagai tujuan utama selama sekitar dua dekade terakhir. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani. Namun, dalam upaya menerapkan tujuan pembangunan tata kelola, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan untuk memastikan pembangunan jangka panjang daerah pada tahap berikutnya. Sejumlah permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan melibatkan pelaksanaan konsep reformasi birokrasi yang belum efektif dan efisien, terutama pada delapan area reformasi birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Dan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, diperlukan perbaikan secara komprehensif pada struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Harapannya, birokrasi dapat berperan sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih besar pada keberlanjutan pengembangan inovasi daerah, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemitraan atau kerjasama antar daerah dalam berbagai aspek pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Meskipun Kabupaten Buru Selatan saat ini dinilai cukup baik dalam parameter dan indikator capaian terkait pengelolaan keuangan dan pengawasan, di mana pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan implementasi pengawasan sesuai dengan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah, namun demikian, perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah dan sistem pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Permasalahan pembangunan tata kelola di Kabupaten Buru Selatan mencakup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Aspek tersebut adalah :

➤ Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal.

Hal ini disebabkan oleh Implementasi konsep reformasi birokrasi belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam manajemen perubahan. Perubahan organisasi dan budaya birokrasi sering kali mengalami kendala, memperlambat peningkatan kinerja birokrat. Faktor lain yang mengemuka adalah Penegakan



akuntabilitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masih terkendala, sehingga hasil-hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Aspek ini dipengaruhi oleh Proses pengambilan keputusan yang kurang transparan dapat menimbulkan ketidakjelasan di kalangan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kebijakan daerah dapat menghambat efektivitas tata kelola yang demokratis dan inklusif.

➤ **Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas SDM.**

Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan kapasitas SDM yang terbatas dapat menjadi kendala dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang akurat. Lebih lanjut Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar para pegawai pemerintah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

➤ **Masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**

Faktor ini dipengaruhi oleh Keberlanjutan praktik korupsi, kolusi, dan Infrastruktur TIK yang belum memadai dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam pengelolaan data dan pelayanan administratif serta Rendahnya literasi digital di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat dapat memperlambat adopsi teknologi dan pemanfaatan informasi digital. Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka rekomendasi strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan implementasi reformasi birokrasi dengan fokus pada manajemen perubahan, peningkatan akuntabilitas, dan keterlibatan aktif pegawai pemerintah, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung keterlibatan warga dalam pembangunan, menyediakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam pemerintahan daerah, memperkuat sistem pengawasan dan hukuman untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua tingkatan pemerintahan dan Meningkatkan investasi dalam infrastruktur TIK, membangun Buru Selatan Satu Data yang mendukung Buru Selatan digital dan implementasi *SMART Office* untuk memastikan kualitas layanan publik dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu



3.2.2. Integrasi KLHS RPJPD

Rekomendasi penyusunan KLHS ini dapat dijadikan acuan dan diintegrasikan pada penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 – 2045. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam KLHS Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 – 2045 ini adalah :

1. Mengintegrasikan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan kajian 6 muatan KLHS ke dalam penyusunan RPJPD Provinsi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 – 2045 terutama pada Bab II berupa Gambaran Umum Kondisi Daerah. Hal tersebut untuk memenuhi amanah Pasal 16 dan Pasal 17 Permendagri No 07 Tahun 2018.
2. Mengintegrasikan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Isu Pembangunan Daerah dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 yaitu pada Bab III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Daerah. Hal tersebut untuk memenuhi amanah Pasal 16 dan Pasal 18 Permendagri No 07 Tahun 2018.
3. Untuk indikator yang sudah mencapai target nasional, rekomendasi terkait dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan dilaksanakan pada RPJPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 – 2045 dapat mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang sudah dilaksanakan pada RPJPD sebelumnya dengan menyesuaikan dengan aturan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.
4. Mengintegrasikan indikator TPB hasil perumusan skenario dengan upaya tambahan berupa rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis ke dalam Bab – 2 dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah ke dalam Bab-5 penyusunan RPJPD Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan ketentuan pasal 21 Permendagri 07 Tahun 2018.
5. Untuk Indikator TPB yang belum ada, terutama yang terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan strategis direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2029 sesuai dengan kondisi daerah.
6. Hasil rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2045 menjadi masukan dalam penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025-2045.

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH



Kabupaten Buru Selatan dibentuk pada tahun 2008, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buru. Cita-cita besar dari Masyarakat Buru Selatan dengan budaya Kai Wait Ina Ama adalah membangun untuk menggapai kemajuan, kesejahteraan yang adil dan makmur yang mendukung kemajuan Provinsi Maluku dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita besar ini tercermin di dalam dokumen RPJPD Buru Selatan 2025 – 2045.

Penyusunannya berpedoman pada dokumen RPJPN 2025 – 2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025 – 2045. Memperhatikan arahan pada kedua dokumen tersebut, maka dalam penyusunan juga dipertimbangkan kondisi internal dan eksternal Buru Selatan, yaitu modal dasar atau potensi yang dimiliki, tren perkembangan global, perubahan iklim, daya tampung, daya dukung dan pencapaian pembangunan serta tantangan yang dihadapi sebelumnya. Berpedoman pada semua kondisi tersebut dan dengan memperhatikan arah, landasan dan kerangka transformasi pembangunan, serta sasaran dari RPJPN 2025 – 2045 dan RPJPD Provinsi Maluku 2025 – 2045, maka dalam RPJPD Buru Selatan 2025 – 2045 dirumuskan 5 sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai sebagai acuan untuk penyusunan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMD pada setiap tahap pembangunan. Sasaran pencapaian tersebut adalah: (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) daya saing SDM dan perkembangan wilayah meningkat, (4) pemerintahan yang berintegritas dan adaptif, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

4.1. Visi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Perumusan Visi Buru Selatan 2045 dilakukan melalui pendalaman dan kajian kondisi saat ini, modal dasar pembangunan yang dimiliki, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi selama dua puluh (20) tahun ke depan, memperhatikan visi Indonesia 2045 dan visi Maluku 2045, visi RPJPD dan RPJMD Buru Selatan sebelumnya serta pelaksanaan diskusi kelompok yang terfokus. Atas pendalaman, kajian dan serangkaian diskusi yang dilakukan, maka dirumuskan visi Buru Selatan 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

VISI Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2045 ***“Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”***

Visi yang dirumuskan tersebut memberi pesan kepada seluruh pelaksana pembangunan dan masyarakat bahwa diperlukan partisipasi aktif dan komitmen yang kuat dari semua pihak agar apa yang direncanakan dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi dan transparan sehingga dapat dicapai hasil pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat melalui pengembangan sumber daya yang dimiliki termasuk keragaman budaya dan warisan sejarah serta memelihara ekosistem lingkungan. Penjelasan rinci mengenai Visi Buru Selatan 2025 – 2045, sebagai berikut:
Maju, mencerminkan capaian sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan kualitas hidup yang tinggi, ekonomi daerah berdaya saing yang didukung oleh kehidupan sosial dan budaya yang maju serta pada lingkungan alam yang lestari.

Mandiri, mencerminkan pencapaian pembangunan telah mampu secara internal dapat melayani dan memenuhi sejumlah kebutuhan penting masyarakat sehingga memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai perubahan situasi yang dihadapi.



Berkelanjutan, menggambarkan bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilaksanakan dan dicapai telah mempertimbangkan dan menerapkan kaidah pelestarian lingkungan, baik dari aspek keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

4.2. Sasaran Visi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Sasaran Visi Kabupaten Buru Selatan 2025 – 2045 dirumuskan selaras dengan sasaran visi Indonesia dan Maluku 2025 – 2045. Terwujudnya Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan akan tercermin dalam 5 sasaran visi yang telah diprediksi berdasarkan acuan data capaian pembangunan sebelumnya. Hasil prediksi sasaran tersebut yang kemudian disandingkan dengan sasaran Indonesia dan Maluku 2045 seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.1. Lima Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2045 Disandingkan dengan Visi Indonesia dan Maluku 2045

5 SASARAN VISI		
5 SASARAN VISI RPJPN 2045:	5 SASARAN VISI RPJPD MALUKU 2045:	5 SASARAN VISI RPJPD BURU SELATAN 2045:
Pendapatan per kapita setara negara maju. - GNI (Gross National Income) per kapita: USD 30.300, - Kontribusi PDB Maritim: 17.5 %, - PDB Nominal: USD 9.8 T, - PDB: 5 Besar Dunia, - Kontribusi PDB Industri Manufaktur: 28 %, - Kontribusi tenaga kerja Manufaktur: 25.2 %, - Middle Income Class: 80 %, - Rasio pertumbuhan investasi: 6.8 %, - ICOR: 4.6 - Pertumbuhan ekonomi rata-rata: sekitar 7 %. Kemiskinan Menuju 0% & Ketimpangan Berkurang - Tingkat kemiskinan: 0.5 – 4 %, - Rasio Gini: 0.290 - 0.320, - Kontribusi KTI terhadap PDB: 26.0 % Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat - Global Power Index (GPI): 15 Besar Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat - HCI: 0.73 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero - Penurunan 93.5 %	Pendapatan Per Kapita - PDRB per Kapita (Juta Rp) (2025: 32,85 -32.99): 146,98 – 219,94 (Upper Middle Income). - Indonesia Blue Economy Index (2025: 67,22): 69,55, - Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (2025: 4,79-4,82): 6,42 – 6,69, - Tingkat kemiskinan (2025: 15,12 – 15,58): 0,07 – 0,57%, Pengentasan Kemiskinan & Ketimpangan - Rasio Gini (indeks)(2025: 0,278 – 0,288): 0,220 – 0,234, - Kontribusi PDRB Provinsi (2025: 2,8): 2,8, Daya Saing Daerah di Tingkat Nasional - Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori) (2025: Sedang): Sangat Tinggi, - Indeks Daya Saing Daerah (2023: 20 Besar): 15 Besar Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat - Indeks Pembangunan Manusia (2025: 74,72): diatas 85,00 - Indeks Modal Manusia (2025: 0,58): 0,70 Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission - Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (2025: 42,88): 100	Pendapatan per kapita: - PDRB ADHB per kapita (Rp.Juta) (2025: 22,5/Lower Middle Income): 56,7 – 61,2/Upper Middle Income. - Kontribusi PDRB industri pengolahan: 11.56% - Pertumbuhan ekonomi berkisar (2025:6.0): 9 – 10 %. Kemiskinan dan ketimpangan berkurang. - Angkat kemiskinan rendah (2025: 13.65 %): 0 – 5 %. - Tingkat ketimpangan pendapatan rendah (Rasio Gini)(2025: 0.27), berkisar: 0.15 – 0.25. - Tingkat pengangguran rendah, berkisar: 2 – 3 %. Daya saing SDM dan perkembangan wilayah meningkat - Pembangunan manusia meningkat dengan nilai IPM diatas: 82.79 (baseline 2025: 67.2). - Indeks Daya Saing Daerah (Baseline 2025: 3,08) : 4,07 - Indeks Ketahanan Pangan (Baseline 2025: 60,04) : 62,08 Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif - Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (2025: 1.48/kurang baik): 3.03/baik - Indeks Pelayanan Publik (Baseline 2025: 2,25) : 2,94 - Indeks inovasi daerah masuk kategori inovatif sampai sangat inovatif. Intensitas emisi GRK: menurun menuju net zero emission. - Penurunan 100%

Sasaran pertama. Pendapatan per kapita diperkirakan meningkat dari Pendapatan Menengah Ke Bawah (*Lower Middle Income*) tahun 2025 sebesar Rp.22.5 Juta, menjadi Pendapatan Menengah ke Atas (*Upper Middle Income*) (tahun 2045 sebesar Rp.56.7 – 61.2 juta). Capaian tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya kontribusi PDRB industri pengolahan di Buru Selatan sebesar 11.56 % dengan dukungan pemanfaatan sumber daya kelautan yang meningkat. Bersama-sama dengan meningkatnya pertumbuhan sektor lainnya, terutama pariwisata, maka diperkirakan peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2045 mencapai 9 – 10 % (target RPJPN untuk pertumbuhan ekonomi Maluku adalah sebesar 10.4 – 12%). Bertumbuhnya industri pengolahan akan menciptakan pembukaan lapangan pekerjaan yang layak sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah penduduk yang berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income*).

Sasaran kedua, adalah usaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka ketimpangan. Baseline di tahun 2025 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Buru Selatan masih tinggi, yaitu diprediksikan berada pada angka 13.65% dan di tahun 2045 ditarget menurun mencapai 0 - 5%. Selain itu, Tingkat ketimpangan pada tahun 2025 sebesar 0.27 pada tahun 2045 ditarget menurun mencapai 0.15 – 0.25. Sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan masyarakat menuju ke pendapatan menengah ke atas (*upper middle income*), maka diprediksikan angka kemiskinan yang ditarget dapat dicapai, dan hal ini akan mendorong penurunan jumlah penduduk yang rentan miskin. Terbukanya lapangan kerja baru dan meningkatnya pemerataan pembangunan di 5 sub wilayah pengembangan (SWP) yang ada di Buru Selatan, yaitu SWP Kepala Madan, SWP Leksula, SWP Namrole, SWP Fena Fafan dan SWP Waesama-Amabalau akan semakin menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah dan angka pengangguran terbuka. Diperkirakan tahun 2045 angka ketimpangan pendapatan antara wilayah di Buru Selatan berkisar 0.15 – 0.25, sedangkan angka pengangguran terbuka berkisar 2 – 3%.

Sasaran ketiga, adalah usaha untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan perkembangan wilayah. Hasil prediksi menetapkan baseline 2025 untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67.20. Seirama dengan meningkatnya Pembangunan



pelayanan dasar di bidang Kesehatan dan Pendidikan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, maka diprediksi di tahun 2045 Indeks Pembangunan Manusia Buru Selatan akan mencapai angka 82.79, yaitu berada pada kategori tinggi. Tingkat kemajuan wilayah, yang dideteksi melalui indikator Indeks Daya Saing Daerah, diprediksi pada baseline di tahun 2025 adalah 3,08 dan pada tahun 2045 akan meningkat mencapai 4,07.

Selain itu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya pertanian yang tersedia seluas 1.603,68 Ha, akan ditingkatkan pembangunan ketahanan pangan Buru Selatan melalui pembukaan lahan sawah baru dengan pendekatan program transmigrasi pola campuran. Saat ini, sebagai salah satu contoh, untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat sebesar 5.841 ton per tahun (senilai kurang lebih Rp.81.78 Miliar) diperoleh dari luar daerah, ini menggambarkan ketahanan beras lokal Buru Selatan nol (0) bulan. Diprediksikan, dengan pembukaan sawah baru seluas 1.500 - 1.603,68 Ha, maka di tahun 2045 Buru Selatan akan mampu memproduksi beras minimal sebesar 8.677 ton per tahun atau akan memiliki ketahanan pangan beras lokal selama 9 - 10 bulan. Bila lahan sawah seluas tersebut dan bersama dengan potensi lahan LP2B seluas 6.128,7 Ha dimanfaatkan untuk produksi pangan lokal lainnya, maka ketahanan pangan lokal Buru Selatan akan mencapai lebih dari 12 bulan, sehingga dalam posisi demikian Buru Selatan telah menjadi salah satu sentra produksi pangan lokal yang kuat di Provinsi Maluku.

Sasaran keempat, adalah pemerintah yang berintegritas dan adaptif. Diharapkan ke depan pemerintah daerah akan lebih lincah dan transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan lebih lincah dalam merespons, meyakinkan melalui data serta bernegosiasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi. Untuk itu, dalam 20 tahun ke depan akan ditingkatkan daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta kesehatan. Capaian ini akan diukur melalui pendekatan sejumlah indikator utama dan proxy, yaitu:

- ♦ Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, baseline tahun 2025 kurang baik, di tahun 2045 masuk dalam kategori baik,
- ♦ Indeks Pelayanan Publik, baseline tahun 2025 2,25, di tahun 2045 2,94,
- ♦ Indeks inovasi daerah, baseline tahun 2025 belum inovatif, di tahun 2045 masuk dalam kategori inovatif sampai sangat inovatif.

Sasaran kelima, adalah menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission. Mewujudkan Buru Selatan menjadi daerah yang maju, perlu diwujudkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat dan semua stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Melalui pendekatan ini, maka usaha untuk menjamin terciptanya net zero emission di Buru Selatan pada tahun 2045 (GRK menurun 100 %) akan diperoleh dan menjadi sesuatu yang tidak sulit. Dengan demikian, Buru Selatan menjadi penyumbang positif untuk menaikkan tingkat pencapaian GRK, baik bagi provinsi maupun nasional.

4.3. Misi Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

Buru Selatan 20 tahun ke depan (2025-2045) memiliki 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut;

1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN

4. Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah
5. Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan

Uraian penjelasan untuk masing-masing Misi adalah sebagai berikut;

Misi 1. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2025-2045. Berikut penjelasan lebih detail mengenai komponen-komponen misi tersebut:

Peningkatan SDM Tenaga Pendidik. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan yang mencakup kompetensi pedagogik, penggunaan teknologi dalam pendidikan dan metode pengajaran terbaru. Selain itu pengembangan kebijakan Rekrutmen dan Retensi dilakukan dengan memperbaiki tahapan proses, menarik tenaga pendidik berkualitas dan mendukung retensi mereka dengan pengembangan insentif dengan memastikan bahwa. Memperbaiki proses rekrutmen untuk menarik tenaga pendidik berkualitas serta menerapkan kebijakan yang mendukung retensi mereka, seperti insentif dan peningkatan kesejahteraan.

Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan perluasan akses ke pendidikan lanjutan dan program sertifikasi bagi tenaga kependidikan seperti administrasi sekolah, pustakawan, dan konselor pendidikan, merumuskan kebijakan pengembangan karier yang jelas dan memberikan peluang peningkatan karier melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan.

Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan terkait penyediaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Fokus pada keterampilan klinis, pengetahuan medis terbaru, dan pengembangan kompetensi interpersonal. Selain itu peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif, tunjangan, dan kondisi kerja yang lebih baik untuk memastikan mereka tetap termotivasi dan berdedikasi.

Peningkatan Sarana dan Prasarana. Hal ini dilakukan melalui pembangunan dan pembaharuan fasilitas pendidikan seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi modern. Membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan. Ini termasuk penyediaan peralatan medis canggih dan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan. Lebih lanjut, secara komprehensif memastikan bahwa semua aspek sarana dan prasarana saling mendukung dan terintegrasi dengan baik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar mengajar serta pelayanan kesehatan yang optimal

Dengan misi ini, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan sehat melalui peningkatan kapabilitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan. Investasi dalam sarana dan prasarana yang komprehensif akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan daerah secara keseluruhan.

Misi 2: Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Buru Selatan dengan memanfaatkan potensi unggulan wilayah dalam sektor perikanan dan pertanian (*agromarine*). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen misi



tersebut:

Pengembangan Pusat (sentra) Produksi Perikanan. Hal ini dilakukan dengan kebijakan mengidentifikasi jenis ikan dan hasil laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan cocok dengan kondisi ekosistem lokal, membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, tempat penyimpanan ikan, dan pabrik pengolahan ikan serta memanfaatkan teknologi modern dalam penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil laut. Selain itu peningkatan kapasitas nelayan dilakukan secara berkelanjutan terkait teknik penangkapan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas produk perikanan serta membangun jaringan pemasaran dan distribusi yang efektif untuk memasarkan produk perikanan ke pasar lokal, nasional, dan internasional

Pengembangan Pusat (sentra) Produksi Pertanian. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pengidentifikasian komoditas pertanian yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan, seperti kelapa, pala, cengkeh, dll, membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian, mengadopsi teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani mengenai teknik budidaya yang efektif, manajemen usaha tani, dan akses ke sumber daya pertanian serta membangun jaringan pemasaran dan distribusi yang efisien untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Berbasis Potensi Unggulan Wilayah. Upaya ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam terhadap potensi dan karakteristik masing-masing wilayah di Kabupaten Buru Selatan untuk mengidentifikasi sektor perikanan dan pertanian yang paling menjanjikan, membangun klaster-klaster produksi berdasarkan potensi unggulan wilayah, yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal, membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, swasta, lembaga penelitian, dan komunitas lokal, untuk mendukung pengembangan pusat produksi perikanan dan pertanian dan mengimplementasikan pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan pusat produksi.

Dengan misi ini, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi unggulan wilayah dalam sektor perikanan dan pertanian (*agromarine*) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembentukan pusat pengembangan produksi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN

Misi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Buru Selatan selama periode 2025-2045. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen misi tersebut:

Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan yang terarah, realistis, dan berbasis data sehingga dapat menghasilkan program-program yang efektif dan tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, memanfaatkan teknologi informasi, dan menerapkan standar pelayanan minimum, dan meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah untuk memastikan pencapaian tujuan dan kinerja yang optimal.

Profesionalisme Aparatur Pemerintahan. Peningkatan dan penguatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dibijaki melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menerapkan sistem rekrutmen aparatur yang transparan dan berbasis



meritokrasi untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang kompeten dan berintegritas dan menyusun jalur pengembangan karier yang jelas dan adil bagi aparatur pemerintahan, serta memberikan kesempatan untuk peningkatan karier melalui pendidikan dan pelatihan.

Bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Upaya ini dilakukan melalui peningkatan dan perkuatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pelaporan, memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memperkuat fungsi audit internal, menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran KKN dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya, serta melindungi dan memberikan penghargaan kepada pelapor pelanggaran (whistleblower) dan menggalakkan pendidikan dan kampanye anti-korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat untuk membangun budaya integritas dan etika yang tinggi.

Teknologi Informasi dan Sistem Manajemen. Hal ini dilakukan melalui kebijakan pengembangan dan penerapan sistem e-government untuk mempermudah akses informasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir potensi terjadinya KKN, dan menerapkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

Dengan misi ini, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dan berintegritas. Tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan bebas dari KKN diharapkan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah

Misi ini berfokus pada penguatan budaya, adat, dan kearifan lokal sebagai modal sosial yang penting untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Buru Selatan. Berikut penjelasan rinci mengenai komponen-komponen misi tersebut:

Ketahanan Budaya. Memperkuat ketahanan budaya dilakukan melalui kebijakan melindungi dan melestarikan warisan budaya lokal, termasuk seni, musik, tarian, dan bahasa daerah dengan menghidupkan kembali dan mempromosikan budaya lokal, menyelenggarakan festival budaya dan kegiatan seni secara rutin untuk menampilkan kekayaan budaya lokal serta menarik wisatawan, dan mengintegrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum sekolah dan masyarakat untuk memastikan generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya mereka.

Ketahanan Adat. Hal ini dilakukan perkuat melalui kebijakan pendokumentasian dan mempraktikkan adat istiadat dan tradisi lokal secara konsisten agar tidak punah, termasuk upacara adat, ritus-ritus penting, dan hukum adat, mendukung dan memperkuat peran lembaga adat dalam masyarakat sebagai penjaga tradisi dan penyelesaian konflik berbasis adat dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata.

Nilai-nilai Kearifan Lokal. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung harmoni sosial dan lingkungan, seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam, mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam semua aspek pengembangan pariwisata, termasuk desain, operasional, dan pemasaran destinasi wisata dan mengedukasi masyarakat dan pelaku pariwisata tentang pentingnya kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologi.

Stabilitas Sosial-Ekonomi. Hal ini diupayakan melalui kebijakan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dan budaya untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat,



Memastikan bahwa pembangunan pariwisata melibatkan semua lapisan masyarakat dan memberikan manfaat yang merata, sehingga mengurangi potensi ketimpangan sosial, ekonomi dan konflik dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan melalui kolaborasi dengan aparat keamanan dan penerapan standar keselamatan di destinasi wisata.

Akselerasi Pembangunan Pariwisata. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung pariwisata, seperti akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum, meningkatkan upaya promosi dan pemasaran destinasi wisata dengan menonjolkan keunikan budaya dan kearifan lokal Kabupaten Buru Selatan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, komunitas lokal, dan lembaga internasional, untuk mendukung pengembangan pariwisata dan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku pariwisata lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing pariwisata daerah.

Dengan misi ini, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kekayaan budaya, adat, dan kearifan lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas sosial dan lingkungan di daerah tersebut.

Misi 5: Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi ini berfokus pada pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan infrastruktur layanan dasar, pengembangan wilayah, dan peningkatan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Berikut penjelasan rinci mengenai komponen-komponen misi tersebut:

Ketahanan Ekologis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi kebijakan konservasi alam untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Ini termasuk pelestarian hutan, mangrove, terumbu karang, dan lahan basah, menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memastikan penggunaan yang bijak dan berkelanjutan untuk generasi mendatang dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui kampanye, pelatihan, dan program pendidikan lingkungan.

Sarana dan Prasarana Infrastruktur Layanan Dasar. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang kompeten, meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas pendidikan, termasuk sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, dan memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai untuk semua masyarakat, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air dan toilet umum yang higienis.

Pengembangan Wilayah. Kebijakan pada aspek ini dilakukan dengan menyusun rencana tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, membangun kawasan permukiman yang layak huni dengan akses ke layanan dasar, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur yang memadai dan Mengembangkan kawasan ekonomi baru yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Konektivitas Perhubungan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. Kebijakan pada aspek ini dilakukan dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, merumuskan dan menerapkan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, termasuk pengembangan jalur sepeda, pejalan kaki, dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan.



Infrastruktur Berbasis Teknologi. Kebijakan pada aspek ini dilakukan dengan menerapkan konsep smart city untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan kota melalui teknologi informasi dan komunikasi, mendorong penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan infrastruktur, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan efisien, termasuk pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah menjadi energi.

Dengan misi ini, Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, menggabungkan aspek ekologis, peningkatan layanan dasar, pengembangan wilayah, dan konektivitas perhubungan yang ramah lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan 20 (dua puluh) tahun Kabupaten Buru Selatan (2025-2045) disusun dalam 4 (empat) tahapan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi *Buru Selatan Maju, Mandiri, Berkelanjutan Berbasis Agromarine*. Gambaran dan tahapan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut;

Tahap I (2025-2029). Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata pada angka 6,62 persen per tahun. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Hal ini diwujudkan melalui perluasan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK melalui peningkatan layanan rumah sakit daerah tipe B, peningkatan kualitas SDM unggul melalui penguasaan teknologi dan kecakapan hidup (*life skill*) serta penanggulangan kemiskinan. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan dititikberatkan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset, inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Hilirisasi SDA difokuskan pada terbangun dan beroperasinya kawasan pengembangan industri dan sentra perikanan tuna nasional, didukung beroperasinya pusat penelitian perikanan dan industri kapal (*marine science technopark*); hilirisasi komoditi perkebunan terpadu kelapa, cengkeh dan pala, hasil pertanian lokal dan perikanan (*agromarine*) yang memperkuat kegiatan KEK.

Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN diarahkan pada mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi, penataan regulasi, kualitas ASN merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI, penguatan kapasitas masyarakat sipil dan Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan

Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah difokuskan pada penguatan modal sosial, penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, mendorong penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh lapisan masyarakat, peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemanfaatan aset dan nilai-nilai budaya dalam pembangunan; peningkatan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal dengan memanfaatkan budaya Kai Wait Ina Ama untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berbasis kewilayahan dan akselerasi pembangunan pariwisata daerah.

Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Tahap ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang memadai termasuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas wilayah sebagai kerangka transformasi terlaksananya inklusivitas pemerataan pembangunan wilayah melalui penyiapan sarana dan prasarana ramah lingkungan yang Handal dan menjamin kesinambungan pembangunan. penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air; perencanaan tata ruang dengan



mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung lingkungan hidup serta risiko bencana; akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Tahap II (2030-2034). Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata pada angka 7,24 persen per tahun. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif difokuskan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas secara masif serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan hilirisasi produk komoditi perkebunan terpadu kelapa, cengkeh dan pala, hasil pertanian lokal dan perikanan (*agromarine*) yang memperkuat kegiatan KEK.

Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN diarahkan untuk mewujudkan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN Sejahtera, proporsional dan berkompeten, simplifikasi regulasi, berbasis TI, partai politik yang berintegritas serta Masyarakat sipil yang partisipatif serta kesinambungan pembangunan.

Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah difokuskan pada penguatan modal sosial, penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, mendorong penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh lapisan masyarakat, peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemanfaatan aset dan nilai-nilai budaya dalam pembangunan; peningkatan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berbasis kewilayahan dan akselerasi pembangunan pariwisata daerah.

Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Tahap ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang memadai termasuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas wilayah sebagai landasan transformasi terlaksananya inklusivitas pemerataan pembangunan wilayah melalui penyiapan sarana dan prasarana ramah lingkungan yang Handal, penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air; perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung lingkungan hidup serta risiko bencana; akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Tahap III (2035-2039). Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata berada pada angka 7,86 persen per tahun. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif difokuskan pada Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan dititikberatkan pada *Economic power house* (pusat kekuatan ekonomi) yang terintegrasi dengan jaringan rantai nilai di daerah, nasional & global serta ekspor yang kokoh, penguatan eksistensi ekosistem kreatif



dan inovatif pada sektor perikanan dan pertanian (agromarine). Penguasaan teknologi menengah dan tinggi serta menjadi Hub Maritim.

Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN diarahkan untuk mewujudkan Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, lembaga tunggal regulasi serta masyarakat sipil mandiri serta kesinambungan pembangunan.

Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah difokuskan pada pemantapan modal sosial, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh lapisan masyarakat, peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemanfaatan aset dan nilai-nilai budaya dalam pembangunan; peningkatan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berbasis kewilayahan dan akselerasi pembangunan pariwisata daerah.

Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Tahap ini difokuskan pada peningkatan infrastruktur termasuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital untuk mendorong ekspansi global pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas wilayah sebagai landasan transformasi terlaksananya inklusivitas pemerataan pembangunan wilayah melalui penyiapan sarana dan prasarana ramah lingkungan yang handal; penguatan dan kemantapan kecamatan/desa mandiri pangan dan berketahanan air; kemantapan tata ruang wilayah sesuai karakteristik kepulauan, daya dukung lingkungan hidup serta terwujudnya masyarakat tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; pemantapan *net zero emission*,

Tahap IV (2035-2039). Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata pada angka 9,59 persen per tahun. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif difokuskan pada SDM Buru Selatan yang unggul. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan dititikberatkan pada masyarakat Buru Selatan berpendapatan tinggi dan berkontribusi positif bagi peningkatan pendapatan negara.

Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN diarahkan untuk mewujudkan Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta kesinambungan pembangunan.

Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah difokuskan pada terwujudnya ketangguhan modal sosial, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, meningkatkan penghormatan dan perlindungan HAM di seluruh lapisan masyarakat, peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemanfaatan aset dan nilai-nilai budaya dalam pembangunan; penegakan hukum yang akuntabel berkeadilan dan berkeadaban dan terwujudnya masyarakat buru selatan yang damai dan taat hukum berbasis modal sosial dan kearifan lokal didukung aparat penegak hukum yang berintegritas; menguatnya pengelolaan fiskal yang adaptif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dan akselerasi pembangunan pariwisata daerah.



Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan pada tahap ini difokuskan pada menjaga ketersediaan infrastruktur termasuk kemantapan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana ramah lingkungan yang Handal dan berkualitas; penguatan dan kemantapan kecamatan/desa mandiri pangan dan berketahanan air; ketangguhan wilayah sesuai karakteristik kepulauan, daya dukung lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana didukung terwujudnya ketangguhan masyarakat dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; pemantapan *net zero emission*.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045 merupakan gambaran kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Berbasis Agromarine. Gambaran hubungan misi pembangunan dan sasaran pokok dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 5.1. Misi Pembangunan Buru Selatan 2025-2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan

No	Misi Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045	Sasaran Pokok
1	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif	SP1. Mantapnya layanan kesehatan yang profesional, inklusif, merata dan berkelanjutan
		SP2. SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif
		SP3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan mendekati nol (0) persen
2	Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (<i>agromarine</i>) yang berkelanjutan	SP4. Struktur ekonomi Buru Selatan berubah secara gradual dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier yang mendorong peningkatan pendapatan daerah menuju kelas menengah atas (<i>Upper Middle Income</i>) di Tahun 2045
		SP5. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tetap menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045
		SP6. Terwujudnya ekosistem digital di seluruh sektor di wilayah Buru Selatan tahun 2045
		SP7. Meningkatnya integrasi ekonomi di tingkat domestik dan global
		SP8. Berkembangnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah terwujudnya kota dan desa yang maju, inklusif dan



No	Misi Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045	Sasaran Pokok
		berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045
3	Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN	SP9. Regulasi adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, responsif, adaptif dan kolaboratif di Buru Selatan tahun 2045
4	Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah	SP10. Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkapasitas, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia di Buru Selatan tahun 2045
		SP11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah
		SP12. Ketangguhan Diplomasi Daerah dan Penyelesaian gangguan trantibun meningkat di Buru Selatan Tahun 2045
		SP13. Menguatnya peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan Buru Selatan tahun 2045
		SP14. Maju dan lestarnya kebudayaan untuk memperkuat karakter, jati diri masyarakat Buru Selatan, meningkatnya kesejahteraan rakyat
		SP15. Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender di Buru Selatan Tahun 2045
5	Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan	SP16. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045
		SP17. Terwujudnya Buru Selatan yang memiliki ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di tahun 2045
		SP18. Daerah yang berketahanan iklim dan bencana secara berkelanjutan di Buru Selatan pada tahun 2045
		SP19. Pemerataan pembangunan antar wilayah di Buru Selatan meningkat pada Tahun 2045
		SP20. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan
		SP21. Tersedianya sarana dan prasarana dasar yang bermutu Yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi maupun nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045 terdiri dari 17 arah pembangunan seperti terlihat pada berikut;

Tabel 5.2. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

No	Misi Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045	Arah Pembangunan Daerah
1	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif	AP1. Kesehatan berkualitas, merata dan adaptif
		AP2. Pendidikan berkualitas, merata dan mudah diakses
		AP3. Perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif
2	Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (<i>agromarine</i>) yang berkelanjutan	AP4. Pemanfaatan lptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi
		AP5. Melaksanakan pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau
		AP6. Transformasi digital
		AP7. Integrasi ekonomi domestik dan global
		AP8. Mengembangkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3	Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN	AP9. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas, responsive dan adaptif
4	Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah	AP10. Hukum berkeadilan, ketahanan dan keamanan daerah tangguh serta demokrasi substansial
		AP11. Menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah
		AP12. Ketangguhan diplomasi
		AP13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
		AP14. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
5	Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan	AP15. Lingkungan hidup berkualitas



No	Misi Pembangunan Daerah Buru Selatan 2025-2045	Arah Pembangunan Daerah
		AP16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
		AP17. Resiliensi (memiliki ketahanan) terhadap bencana dan perubahan iklim

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan Daerah Buru Selatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran-sasaran pokok pada masing-masing Misi Pembangunan

Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Buru Selatan 2025-2045

No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
1	Kesehatan berkualitas, merata dan adaptif	1.Perluasan upaya promotive-preventif & pembudayaan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya
		2.Peningkatan akses pelayanan Kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan mobile yang sinergi dengan moda transportasi lainnya, penguatan telemedicine serta system sister hospital dengan RS daerah atau di wilayah lain.
		3.Perluasan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM kesehatan yang profesional secara merata dan terjangkau, pengembangan rumah sakit daerah ke tipe B dan peningkatan kualitas layanan puskesmas.
		4.Pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.
		5.Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T.
		6.Pendampingan daerah kecamatan dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
		7.Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.
		8.Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.
		9.Penguatan layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau
		10.Penyelenggaraan layanan kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan
2	Pendidikan berkualitas, merata dan mudah diakses	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
		2. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.
		3.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, perkebunan/pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.
		4.Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, peningkatan proporsi guru bersertifikat dan berkualifikasi Strata-2 serta peningkatan kapasitas pemuda dan keikutsertaan dalam pembangunan Daerah
		5.Peningkatan akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi atau swasta (perusahaan).
		6.Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh desa terpencil.
		7.Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.
		8.Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah melalui pengkayaan kurikulum berbasis muatan lokal
		9.Penguatan layanan pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi
		10.Penyelenggaraan pendidikan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif
3	Perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif	1.Perlindungan sosial terintegrasi dan adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
		2.Pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penajaman sasaran implementasi pada berbagai jenjang pemerintahan (desa sampai ke pusat) didukung kegiatan pengupdetan yang rutin dalam penanggulangan kemiskinan
		3.Pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas; penguatan akses dan layanan legal identity bagi masyarakat miskin
		4.Penguatan komitmen pemerintah untuk pemenuhan SPM sosial melalui implementasi perencanaan dan penganggaran program dari APBD serta APBDes yang inklusif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, termasuk perubahan iklim.
		5.Penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
		6.Membangun dan mengembangkan kelembagaan layanan sosial satu pintu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten untuk memudahkan masyarakat miskin, disabilitas dan lansia mengakses multi layanan sosial yang disiapkan pemerintah dan stakeholder terkait.
		7.Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara berjenjang oleh kelembagaan TKPD
		8.Dukungan pembiayaan pendidikan sarjana untuk masyarakat miskin dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di wilayahnya.
		9.Pengembangan inovasi perlindungan sosial dan Pengembangan sosial entrepreneur di tingkat desa/kelurahan untuk mengelola SDA dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.
		10.Pembinaan dan pengembangan masyarakat KAT, meliputi pemukiman, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,
4	Pemanfaatan Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi	1.Hilirisasi melalui pengembangan sentra industri komoditi unggulan perkebunan terpadu (kelapa, cengkeh dan pala) hasil perikanan (ikan & rumput laut) dan komoditi pertanian lokal (umbian dan hotong) yang didukung hasil riset, inovasi dan teknologi (science and technopark) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdesaan.
		2.Pengembangan lahan sawah transmigrasi dengan pola campuran dan pemanfaatan lahan LP2B sebagai sentra untuk pengembangan komoditi padi, palawija (jagung dan lainnya), hortikultura dan ubi-ubian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.
		3.Penguatan investasi dari hilirisasi komoditi unggulan dengan dukungan teknologi dan penjaminan mutu yang berbasis AI dan IoT serta digitalisasi data (Data Twin) untuk memenuhi kebutuhan mutu produk dari negara tujuan pasar.
		4.Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana pendukung di wilayah destinasi/desa/kawasan pariwisata serta penguatan atraksi seni budaya untuk meningkatkan pesona pariwisata desa/Kawasan perdesaan.
		5.Pembangunan akses jalan lingkaran Buru Selatan yang terhubung dengan akses jalan lingkaran Kabupaten Buru.
		6.Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, pariwisata dan jasa dengan dukungan atmosfer yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.
		7.Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian antara lain pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan.
		8.Peningkatan kontribusi dan daya saing kualitas produk sektor-sektor unggulan dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>agromarine based sectors</i>), pengembangan SDM berdaya saing global menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global. Tumbuhnya industri bio farmasi berbahan baku potensi SDA lokal
		9.Pembangunan dan pengembangan sarana pelabuhan udara dan laut mendukung pengembangan produksi dan hasil produk hilirisasi komoditi perkebunan/pertanian, perikanan dan pembangunan sektor pariwisata serta sektor pertambangan.
		10. Kajian dan penyiapan data potensi pertambangan mineral logam, non logam dan batuan..
		11.Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		(sustainable tourism) melalui pengembangan kawasan pariwisata premium (premium tourism), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi peran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.
		12.Pengembangan kawasan wisata Tifu sebagai pintu masuk jalur laut dan darat yang terintegrasi serta terkoneksi dengan Kawasan wisata Negeri Diatas Awan Fena Fafan dan wisata Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (Geopark) dan Living Museum.
		13.Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi.
		14.Peningkatan produktivitas, mutu serta kesejahteraan petani dan nelayan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau; peningkatan produktivitas dan mutu produk IKM dan UMKM serta menjamin keterkaitannya dengan rantai nilai industri domestik dan global, melalui digitalisasi data dan peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan peran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		15.Penguatan hilirisasi usaha koperasi untuk komoditas unggulan daerah melalui penguatan proses bisnis, kelembagaan, permodalan dan adopsi teknologi; Membangun kerjasama lembaga ekonomi desa (BUMDes, Koperasi), kelompok usaha masyarakat (UMKM/IKM), perbankan dengan investor dalam bidang usaha komoditi unggulan daerah
		16.Pembentukan dan pengembangan BUMD untuk usaha produksi air mineral dan minuman fungsional drink dari bahan baku air kelapa, tanaman biofarka dan lainnya untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pariwisata.
		17.Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.
		18.Penguatan SDM Buru Selatan yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional & internasional
		19.Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi kegiatan dan hasil-hasil hilirisasi dari berbagai industri.
		20.Penguatan ekosistem pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi unggulan untuk mendukung percepatan dan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
5	Melaksanakan pembangunan ekonomi hijau	1.Pemanfaatan energi terbarukan yang terdapat di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik atau energi bagi masyarakat, baik melalui pemanfaat energi surya, angin, hidroelektrik dan lainnya,
		2.Penggunaan transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
		3.Pengelolaan limbah & daur ulang sampah menggunakan pendekatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle)
		4.Pengembangan pertanian dan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi dengan menggunakan pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu, diversifikasi tanaman, pengembangan pertanian organik dan Sistem



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		pangan lokal dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
		5.Penguatan kesadaran dan pendidikan lingkungan pada masyarakat dan berbagai stakeholder melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi pencegahan serta perbaikan kerusakan lingkungan.
6	Transformasi digital	6.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok daerah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (perkebunan, perikanan, pariwisata) melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
		7.Inklusi Digital, yaitu membuktikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil (KAT) dan meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan digital untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi.
7	Integrasi ekonomi domestik dan global	1.Fasilitasi dan melaksanakan kegiatan nasional berupa pembangunan kawasan industri dan sentra perikanan tuna didukung beroperasinya Pusat Penelitian Perikanan dan Industri Kapal (<i>Maritime Science Technopark</i>),
		2.Peningkatan konektivitas antarkawasan pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi.
		3.Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah dan keunggulan daerah Buru Selatan.
		4.Penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Leksula, Kawasan Strategis lainnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif.
		5.Penguatan logistik daerah melalui peran kelembagaan yang berbasis pemanfaatan teknologi digital.
		6.Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong konektivitas antarwilayah lebih terintegrasi penguatan keterkaitan nilai tambah.
		7.Peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antarwilayah dan daerah untuk meningkatkan peran dan partisipasi dalam rantai pasok nasional dan global.
		8.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
		9.Peningkatan perdagangan produk unggulan, baik volume dan nilai ekspor maupun didalam negeri



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
8	Mengembangkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	10. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan eksisting/ yang telah ada melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal; peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah;
		11. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dibangun dengan meningkatkan keterkaitan infrastruktur transportasi (lingkar Buru Selatan/ Ring Road). dan konektivitas digital antar kota dengan kabupaten sekitarnya, antar kota dengan desa maupun kota dengan hub regional lainnya, mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta mendorong pengembangan agro-marine yang inovatif dan kreatif berbasis digital
		12. Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal tanaman pangan (LP2B), perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pariwisata (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam sekaligus menopang rantai pasok industri dan ekonomi kreatif yang inovatif untuk meningkatkan nilai tambah produk.
9	Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas, responsive dan adaptif	1. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah
		2. Percepatan digitalisasi layanan publik (sistem layanan publik self service) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
		3. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		4. Pengembangan smart government; pembangunan smart branding; smart society; smart living serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
		5. Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.
		6. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
		7. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		8. Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.
		9. Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user; peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengendalian pembangunan
		10. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		11.Penguatan integritas partai politik.
		12.Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
		13.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		14.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		15.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		16.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
		17.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
		18.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
10	Hukum berkeadilan, ketahanan dan keamanan daerah tangguh serta demokrasi substansial	1.Penguatan peran Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan dan pendidikan
		2.Peningkatan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal
		3.Penguatan kelembagaan demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku
		4.Peningkatan peran dan respon partai politik, lembaga perwakilan, serta media dan pers agar lebih akuntabel dan berkualitas
		5.Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam Masyarakat
		6.Peningkatan pemahaman internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
		7.Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas
		8.Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat
		9.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, diantaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial
11	Menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah	1.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional yang transparan
		2.Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan peran TPID
12	Ketangguhan diplomasi	3.Penguatan Diplomasi Daerah melalui peningkatan kapasitas diplomatik daerah melalui pelatihan dan



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		pengembangan keterampilan diplomatik bagi pejabat pemerintahan setempat dan mendorong kerja sama dengan berbagai pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan daerah
		4. Pengelolaan Konflik dan Krisis Secara Efektif melalui pembangunan kapasitas untuk menangani konflik dan krisis di tingkat daerah dengan pendekatan dialog dan mediasi, menyusun rencana tanggap darurat yang terkoordinasi untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap trantibun.
		5. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal
13	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
		2. Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antar kelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah
		3. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
		4. Penguatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan
		5. Pengembangan dan penguatan kebudayaan, serta pengembangan bahasa daerah dan sastra;
		6. Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;
		7. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan; dan
		8. Penguatan budaya bahari dan kemaritiman antara lain dengan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.
14	Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	1. Penguatan pondasi tatanan keluarga berkualitas yang didukung peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang inklusif berkarakter wilayah pesisir, pegunungan, kepulauan, serta peningkatan kualitas lingkungan yang maju dan tangguh
		2. Peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ekonomi tangguh berbasis keluarga sesuai karakter wilayah pesisir, pegunungan kepulauan secara berkelanjutan
		3. Peningkatan SDM dalam mewujudkan sinkronisasi tata kelola terintegrasi dalam menciptakan keluarga maju, mandiri dan tangguh berbasis wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan
		4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III berbasis gender dalam mewujudkan kualitas keluarga yang tangguh dan mandiri
		5. Digitalisasi layanan keluarga dan Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga
		6. Peningkatan kerjasama lintas sektor/berbagai pihak (adat, perguruan tinggi, CSR) dalam mewujudkan keluarga maju dan berkualitas sesuai karakter budaya dan potensi



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		lokal wilayah
		7.Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan keluarga di tingkat desa/kecamatan yang terintegrasi, maju mandiri dan berkelanjutan
15	Lingkungan hidup berkualitas	1.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; serta pembangunan tempat dan sistem pengelolaan sampah terpadu 2.Penguatan pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping); 3.Pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air 4.peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi 5.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana. 6.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
16	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	1. Kajian dan penyiapan data potensi EBT di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama di desa terpencil. 2.Melaksanakan kegiatan konservasi sumber air yang dikelola secara integrasi dan perlu diperkuat pelaksanaannya dengan menerapkan system Smart Teknologi. 3.Penyediaan sumber air baku untuk meningkatkan dan menjamin penyediaan air minum bagi masyarakat dan kebutuhan kegiatan ekonomi lainnya. 4.Membangun tampungan air serba-guna pada wilayah yang sulit air yang memberikan manfaat secara cepat bagi Masyarakat dan kebutuhan komersil lainnya, seperti di tempat pariwisata. 5.Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan. 6.Meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui pencegahan alih fungsi lahan dan pengembangan kegiatan produksi di lahan LP2B, seperti jagung, palawija, umbi-umbian, sagu, pisang, sayuran dan ternak sekaligus mendukung pengembangan industri pangan lokal komposit yang fungsional. Selain itu mendorong dukungan regulasi dan kegiatan diversifikasi konsumsi pangan lokal.
17	Resiliensi (memiliki ketahanan) terhadap bencana dan perubahan iklim	1.Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (di antaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), dan tata kelola risiko; 2.Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		yang andal dan terintegrasi;
		3.Penerapan Climate Smart Agriculture, pertanian, konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
18		1.Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan;
		2.Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem;
		3.Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;
		4.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
		5.Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah Buru Selatan;
		6.Peningkatan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Buru Selatan;
		7.Memperkokoh ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Buru Selatan dengan dukungan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas;
		8.Pemantapan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Buru Selatan;
		9.Penguatan dan perluasan layanan pemerintah kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah melalui pemekaran dan pembentukan desa/negeri, kecamatan/kabupaten
19		1.Peningkatan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan, antarwilayah Buru Selatan, dan antarwilayah Buru Selatan dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestic, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, sesuai kondisi geografis mendukung pariwisata di Buru Selatan, serta layanan penerbangan dari dan ke Namrole sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		2.Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
		3.Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		4.Penyediaan koridor konektivitas lingkaran Buru Selatan yang menghubungkan desa-desa pesisir dan menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan



No	Arah Pembangunan Daerah Buru Selatan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
		Kabupaten Buru serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah (jalan lingkar Pulau Ambalau, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil)) sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		5.Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Namrole yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang
		6.Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
		7.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
		8.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah Buru Selatan
		9.Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan
		10.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan
		11.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.
		12.Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
		13.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan
		14.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
		15.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah
		16.Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
		17.Pengelolaan sampah terpadu di Buru Selatan untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan provinsi dan nasional jangka panjang. Berikut ini dijabarkan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk masing-masing arah pembangunan di Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.

1. Indikator Utama Pembangunan Kesehatan Berkualitas, Merata dan Adaptif

Tabel 5.4. Indikator Utama Pembangunan Kesehatan Berkualitas, Merata dan Adaptif

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Umur Harapan Hidup (UHH) (Thn)	70,52	70,76	71,00	71,24	71,48
2	Kesehatan ibu dan anak					
	a) Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	10	7	4	2	0
	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita (%))	20,31	12,63	7,86	4,89	3,04
3	Penanganan Tuberkulosis:					
	a) Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)	92,68	100	100	100	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate (%))	65,09	74,65	85,61	98,18	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100

2. Indikator Utama Pembangunan Pendidikan berkualitas, merata dan mudah diakses

Tabel 5.5. Indikator Utama Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Merata dan Mudah diakses

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Hasil Pembelajaran					
	1) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi pada asesmen Tingkat nasional untuk:					
	a. Literasi membaca	9,09 - 11,09	24,23 - 26,23	39,38 - 41,38	54,52 - 56,52	69,66 - 71,66
	b. Numerasi	0,00 - 2,00	15,38 - 17,38	30,75 - 32,75	46,13 - 48,13	61,50 - 63,50
	c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	8,38	9,00	9,61	10,23	10,85
	d. Harapan lama sekolah	12,90	13,04	13,19	13,34	13,48
	2) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen Tingkat nasional untuk:					
	a. Literasi membaca	16,30 - 18,30	27,26 - 29,26	38,23 - 40,23	49,19 - 51,19	60,15 - 62,15
	b. Numerasi	10,56 - 12,56	22,06 - 24,06	33,55 - 35,55	45,05 - 47,05	56,54 - 58,54
2	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	14,94	15,19	15,44	15,69	14,94 - 16,94
3	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	59,06	63,05	67,03	71,02	75,00



3. Indikator Utama Pembangunan Perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif

Tabel 5.6. Indikator Utama Pembangunan Perlindungan Sosial Yang Inklusif dan Adaptif

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Tingkat Kemiskinan (%)	13,65	11,94	9,98	8,19	6,45-5,00
2.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	25,36	39,59	53,81	68,04	82,26
3.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13	21	29	37	45

4. Indikator Utama Pembangunan Pemanfaatan Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi

Tabel 5.7. Indikator Utama Pembangunan Pemanfaatan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,51	5,45	6,89	8,72	11,56
	a. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%)					
2.	Pengembangan Pariwisata					
	a. Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)	0,52	0,61	0,75	0,92	1,18
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*					
	c. Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)					
	d. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	0,24	0,49	1,18	2,87	8,32
3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)					
4.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)					
	b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)					
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)					
	d. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)					
	e. Return on Asset (ROA) BUMD (%)					
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,53	4,68	3,73	3,08
	a. Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)					
	b. Kepesertaan JAMSOSTEK (Jiwa)	3.948	7.943	11.938	15.933	19.976
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan					
7.	Tingkat Penguasaan IPTEK					
	a. Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif (14.13)	Kurang Inovatif (16.44)	Kurang Inovatif (19.14)	Kurang Inovatif (22.27)	Inovatif (>40.85)
	b. Indeks Inovasi dan Riset Maritim	33,97	43,26	54,87	66,48	80,42



5. Indikator Utama Pembangunan Melaksanakan pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau

Tabel 5.8. Indikator Utama Pembangunan Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	65,96	70,75	75,54	80,33	85,12
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	0,17	36,15	45,00	53,84	62,69

6. Indikator Utama Pembangunan Transformasi digital

Tabel 5.9. Indikator Utama Pembangunan Transformasi Digital

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,08 (Rendah)	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi

7. Indikator Utama Pembangunan Integrasi ekonomi domestik dan global

Tabel 5.10. Indikator Utama Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	8,53	7,70	6,87	6,04	5,21
2.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi*)	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	48,32	51,22	51,98	52,74	53,52
4.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	10,26	13,78	14,83	15,97	17,19

8. Indikator Utama Pembangunan Mengembangkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Tabel 5.11. Indikator Utama Pembangunan Mengembangkan Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan					
	a. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi					
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)					
	b.1. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (Sumber IDM)	0,43	0,49	0,55	0,62	0,68
	b.2. Rumahtangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,67	98,82	100	100	100
	b.3. Persentase Desa Mandiri (%)	2,45	3,70	4,94	8,64	12,35



9. Indikator Utama Pembangunan Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas, responsive dan adaptif

Tabel 5.12. Indikator Utama Pembangunan Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas, Responsif dan Adaptif

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Indeks Reformasi Hukum	Buruk (C)/38,65	Buruk (C)/45,15	Cukup (CC)/51,65	Cukup (CC)/58,15	Cukup Baik (B)/64,65
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kurang (1,48)	Kurang (1,59)	Kurang (1,84)	Cukup (2,28)	Baik (3,03)
3.	Indeks Pelayanan Publik	Cukup (DC) (C)	Cukup (C)	Baik(DC) (B-)	Baik (B)	Sangat Baik (A-)
4.	Indeks Integritas Nasional	70,17	73,79	77,59	81,59	85,80

10. Indikator Utama Pembangunan Hukum berkeadilan, ketahanan dan keamanan daerah tangguh serta demokrasi substansial

Tabel 5.13. Indikator Utama Pembangunan Pembangunan Hukum Berkeadilan, Ketahanan dan Keamanan Daerah Tangguh Serta Demokrasi Substansial

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Indeks Pembangunan Hukum	38,65	45,15	51,65	58,15	64,65
2.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,93 (2020)	69,28	73,62	77,97	82,31
3.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

11. Indikator Utama Pembangunan Menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah

Tabel 5.14. Indikator Utama Pembangunan Menciptakan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)					
2.	Tingkat Inflasi	3,00	2,09	1,33	0,84	0,53
3.	Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan					
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	0,06	0,07	0,09	0,13	0,16
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)					
	c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan					
	d. Total Kredit/PDRB (%)	0,07	0,76	1,01	1,34	1,77
4.	Inklusi Keuangan (%)		27,04	35,75	47,27	62,50

12. Indikator Utama Pembangunan Ketangguhan diplomasi

Tabel 5.15. Indikator Utama Pembangunan Ketangguhan Diplomasi

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi (%)*)	50	52,55	58,05	67,39	82,23
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)*)	100	100	100	100	100
	2.1. Indeks Pembangunan Hukum	38,65	45,15	51,65	58,15	64,65
	2.2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,7	69,05	73,39	77,74	82,08

**13. Indikator Utama Pembangunan Beragama maslahat dan berkebudayaan maju****Tabel 5.16. Indikator Utama Pembangunan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,94	69,39	77,83	86,28	94,73
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,13	77,93	79,38	81,73	83,93

14. Indikator Utama Pembangunan Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender**Tabel 5.17. Indikator Utama Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender**

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	59,98	70,24	80,51	90,77	100
	1.1. Indeks Ketimpangan Gender	0,58	0,55	0,52	0,49	0,46
		0,47*	0,3*	0,2*	0,13*	0,08*
	1.2. Indeks Pembangunan Gender	87,63	88,68	89,73	90,78	91,83

15. Indikator Utama Pembangunan Lingkungan hidup berkualitas**Tabel 5.18. Indikator Utama Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas**

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah					
	a. Persentase Kawasan Konservasi Laut terhadap Wilayah Kelola Laut (%)	0	2,5	5	7,5	10
2.	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah					
	b. Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman					
	c. Pengelolaan Sampah					
	▪ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)					
	▪ Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah di kab/kota (%)					
	▪ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)					
	2.1 Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Sumber IDM)	0,84	1	1	1	1

16. Indikator Utama Pembangunan Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan**Tabel 5.19. Indikator Utama Pembangunan Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
	a. Ketahanan Energi					
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1477	2078	2456	2876	3225



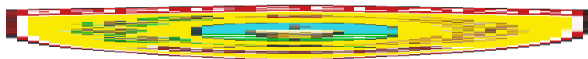
	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	233	212,25	191,50	170,75	150
	b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	22,94	22,05	22,05	22,05	22,05
	c. Ketahanan Air					
	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)					
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	87,64	90,73	93,82	96,91	100

17. Indikator Utama Pembangunan Resiliensi (memiliki ketahanan) terhadap bencana dan perubahan iklim

Tabel 5.20. Indikator Utama Pembangunan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Indeks Risiko Bencana	155,2	144,48	133,75	123,03	112,305
2.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
	a. Kumulatif	100	100	100	100	100
	b. Tahunan	100	100	100	100	100

BAB 6. PENUTUP



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025-2045 memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan *Buru Selatan Maju, Mandiri, Berkelanjutan Berbasis Agromarine* di Tahun 2045. Dokumen ini dapat menjadi acuan seluruh elemen masyarakat Buru Selatan untuk bergotong royong mewujudkan Visi Buru Selatan tersebut.

Perwujudan Visi Kabupaten Buru Selatan 2045 sebagaimana disebutkan diatas yang tercermin dari pencapaian 5(lima) sasaran visi, maka dibutuhkan 7 (tujuh) prasyarat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu (1). Pembangunan SDM yang terarah dan sesuai dengan keunggulan wilayah; (2). Sentra-sentra industri perlu dikembangkan, dilengkapi dukungan pusat riset, inovasi dan teknologi (*maritime science technopark, coconut and spices science technopark*) dengan keterkaitan desa-kota, kawasan pariwisata kelas premium dan mass tourism dan optimalisasi Kawasan pertumbuhan sesuai daya dukung wilayah; (3). Meningkatkan ketahanan sejumlah pangan lokal agar mencapai 80 – 100 %; (4). Pembangunan pelabuhan dan pusat logistik; (5). Peningkatan infrastruktur konektivitas, energi dan digital yang menjangkau seluruh wilayah; (6). Penguatan tata Kelola untuk mewujudkan pemerintah yang lincah (*agile governance*), pemanfaatan fiskal yang fokus, stabilitas keamanan dan pemanfaatan ruang yang baik; dan (7). Budaya Masyarakat yang Tangguh dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya Pembangunan.

Implementasi rencana jangka panjang selama 20 tahun ini memerlukan pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Buru Selatan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu pengendalian dan evaluasi juga harus mempertimbangkan manajemen risiko sebagai pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Buru Selatan, manajemen risiko pembangunan daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. **Identifikasi Risiko:** Mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, seperti risiko finansial, risiko teknis, risiko lingkungan, dan risiko sosial.
- b. **Analisis Risiko:** Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek pembangunan.
- c. **Mitigasi Risiko:** Menyusun strategi dan tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak risiko jika terjadi. Ini termasuk penyusunan rencana kontingensi.
- d. **Monitoring Risiko:** Memantau risiko secara terus-menerus selama pelaksanaan pembangunan dan melakukan penyesuaian terhadap strategi mitigasi sesuai dengan perkembangan.

Dengan menerapkan pengendalian dan evaluasi yang efektif, serta mengelola risiko dengan baik, Kabupaten Buru Selatan dapat lebih memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.



Lampiran

Lampiran 1. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Untuk Masing-Masing Tahapan Pembangunan Buru Selatan 2025-2045

Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
M1.Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif	1.Umur Harapan Hidup (UHH) (Thn)	1.Penyiapan kelengkapan perangkat dalam upaya promotive-preventif & pembudayaan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya	1.Peningkatan kualitas layanan dan penguatan upaya perilaku hidup sehat, pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya	1.Penguatan kualitas layanan dan Perluasan perilaku hidup sehat, bebas penularan HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya	1.Perwujudan dan keberlanjutan budaya perilaku hidup sehat, Bursel bebas HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya
	2.Kesehatan ibu dan anak	2.Penyiapan perangkat akses pelayanan Kesehatan, berupa perangkat pelayanan kesehatan mobile yang sinergi dengan moda transportasi lainnya.	2.Peningkatan kualitas akses pelayanan Kesehatan, berupa penyediaan pelayanan kesehatan mobile yang sinergi dengan moda transportasi lainnya, telemedicine serta system sister hospital dengan RS daerah atau di wilayah lain.	2.Penguatan kualitas dan perluasan akses pelayanan Kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan mobile yang sinergi dengan moda transportasi lainnya, penguatan telemedicine serta system sister hospital dengan RS daerah atau di wilayah lain.	2.Perwujudan dan keberlanjutan akses pelayanan Kesehatan, pelayanan kesehatan mobile yang sinergi dengan moda transportasi lainnya, telemedicine serta system sister hospital dengan RS daerah atau di wilayah lain.



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
	a) Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	3.Penyiapan perangkat akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau	3.Peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM kesehatan yang profesional secara merata dan terjangkau, pengembangan rumah sakit daerah ke tipe B dan peningkatan kualitas layanan puskesmas.	3.Penguatan dan Perluasan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM kesehatan yang profesional secara merata dan terjangkau, penguatan rumah sakit daerah tipe B dan penguatan kualitas layanan puskesmas.	3.Perwujudan dan keberlanjutan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM kesehatan yang profesional secara merata dan terjangkau, infrastruktur RS dan Puskesmas yang berkualitas di Bursel,
	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita (%))	4.Penyiapan perangkat dan instrumen Pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting terutama perangkat kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta upaya eliminasi malaria.	4.Percepatan penanganan gizi buruk dan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.	4.Penguatan dan perluasan penanganan gizi buruk dan stunting terutama dengan penguatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta perluasan eliminasi malaria.	4.Perwujudan Bursel Bebas Gizi buruk dan stunting serta malaria
	3.Penanganan Tuberkulosis:	5.Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T.	5.Peningkatan jumlah tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T.	5.Perkuatan jumlah tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T.	5.Perwujudan ketersediaan tenaga medis dan kesehatan yang berkualitas, sejahtera dan berkelanjutan di Bursel
	a) Cakupan penemuan & pengobatan kasus	6.Penyiapan Perangkat Pendampingan daerah kecamatan dengan kapasitas	6.Peningkatan kualitas Pendampingan daerah kecamatan dengan kapasitas	6.Penguatan kualitas Pendampingan daerah kecamatan dengan kapasitas	6.Perwujudan dan keberlanjutan Pendampingan daerah



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
	Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)	sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	sistem kesehatan yang rendah untuk penguatan kualitas pelayanan kesehatan.	kecamatan secara luas untuk mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan.
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate (%))	7.Penyiapan perangkat dan instrumen sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.	7.Peningkatan kualitas sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.	7.Penguatan kualitas sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis berkelanjutan	7.Perwujudan dan keberlanjutan ketersediaan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di Bursel termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis berkelanjutan
	4.Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	8.Penyediaan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.	8.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.	8.Penguatan kualitas sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum secara merata pada semua wilayah untuk menunjang layanan Kesehatan.	8.Perwujudan dan keberlanjutan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada semua wilayah guna mewujudkan layanan kesehatan berkualitas dan berkelanjutan
		9.Penyiapan perangkat dan instrumen Layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau	9.Peningkatan kualitas layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau	9.Penguatan kualitas layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau pada semua wilayah	9.Perwujudan dan Keberlanjutan layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau di Bursel
		10.Penyiapan perangkat dan instrumen Penyelenggaraan	10.Peningkatan kualitas layanan kesehatan prima dan inklusif	10.Penguatan kualitas layanan kesehatan prima dan inklusif di semua wilayah	10.Perwujudan layanan kesehatan prima dan inklusif



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		layanan kesehatan prima dan inklusif			secara berkelanjutan di Bursel
	5.Hasil Pembelajaran	11.Penyiapan perangkat dan instrumen Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	11.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	11.Penguatan kualitas penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) di semua kecamatan	11.Perwujudan dan keberlanjutan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) di Bursel
	1) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi pada asesmen Tingkat nasional untuk:	12.Penyediaan perangkat dan instrumen afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk penyiapan perangkat dan instrumen sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	12.Peningkatan afirmasi akses pendidikan, pada semua wilayah kecamatan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka di semua kecamatan	12.Penguatan kebijakan afirmasi akses pendidikan, pada semua wilayah kabupaten termasuk perluasan akses sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas	12.Perwujudan dan keberlanjutan kebijakan afirmasi akses pendidikan, yang merata di seluruh Bursel.
	a. Literasi membaca	13.Penyediaan perangkat dan instrumen akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, perkebunan/pertanian, perikanan, pertambangan,	13.Peningkatan kualitas akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, perkebunan/pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.	13.Penguatan kualitas akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, perkebunan/pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.	13.Perwujudan dan keberlanjutan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, perkebunan/pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.			keterkaitan dengan DUDI di Bursel
	b. Numerasi	14.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, peningkatan proporsi guru bersertifikat dan berkualifikasi Strata-2 serta peningkatan kapasitas pemuda dan keikutsertaan dalam pembangunan daerah	14.Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, peningkatan proporsi guru bersertifikat dan berkualifikasi Strata-2 serta peningkatan kapasitas pemuda dan keikutsertaan dalam pembangunan daerah	14.Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, penguatan proporsi guru bersertifikat dan berkualifikasi Strata-2 serta penguatan kapasitas pemuda dan keikutsertaan dalam pembangunan daerah	14.Perwujudan dan keberlanjutan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas di seluruh wilayah Bursel
	c. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	15.Penyediaan perangkat dan instrumen akses sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi atau swasta (perusahaan).	15.Peningkatan kualitas akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui peningkatan kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi atau swasta (perusahaan).	15.Perkuatan kualitas akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui penguatan kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi atau swasta (perusahaan).	15.Perwujudan dan keberlanjutan akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan di Bursel
	d. Harapan lama sekolah	16.Penyiapan perangkat dan instrumen teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh desa terpencil.	16.Peningkatan kualitas Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh desa terpencil.	16.Perkuatan kualitas Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh desa terpencil.	16.Perwujudan dan keberlanjutan Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh wilayah Bursel
	2) Persentase satuan Pendidikan yang				



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
	mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen Tingkat Nasional untuk:				
	a. Literasi membaca	17.Penyediaan perangkat dan instrumen akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.	17.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.	17.Perkuatan kualitas sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan jalur yang tidak memiliki angkutan umum pada semua wilayah kecamatan	17.Perwujudan dan keberlanjutan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau pada semua wilayah Bursel
	b. Numerasi	18.Penyediaan perangkat dan instrumen Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah melalui pengkayaan kurikulum berbasis muatan lokal	18.Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah melalui pengkayaan kurikulum berbasis muatan lokal	18.Perkuatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah melalui penguatan kurikulum berbasis muatan lokal	18.Perwujudan dan keberlanjutan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah di Bursel
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	19.Penyediaan perangkat dan instrumen layanan pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi	19.Peningkatan kualitas layanan pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi	19.Penguatan kualitas layanan pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi di Bursel	19.Perwujudan dan keberlanjutan layanan pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi di Bursel



	7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	20.Penyiapan perangkat dan instrumen pendidikan inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif	20.Percepatan pendidikan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif	20.Perkuatan pendidikan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif di semua kecamatan	20.Perwujudan dan keberlanjutan pendidikan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Buru Selatan melek teknologi,
--	---	--	--	--	---



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
					kompetitif, inovatif dan produktif di Bursel
	8.Tingkat Kemiskinan (%)	21.Penyiapan perangkat dan instrumen Perlindungan sosial terintegrasi dan adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.	21.Percepatan Perlindungan sosial terintegrasi dan adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di semua wilayah Kecamatan	21.Perkuatan Perlindungan sosial terintegrasi dan adaptif untuk penguatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.	21.Perwujudan dan keberlanjutan Perlindungan sosial terintegrasi dan adaptif di seluruh wilayah Bursel
	9.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	22.Penyiapan perangkat dan instrumen data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penajaman sasaran implementasi pada berbagai jenjang pemerintahan (desa sampai ke pusat) didukung kegiatan pengupdetan yang rutin dalam penanggulangan kemiskinan	22.Peningkatan kualitas Pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan kualitas implementasi pada berbagai jenjang pemerintahan (desa sampai ke pusat) didukung kegiatan pengupdetan yang rutin dalam penanggulangan kemiskinan	22.Perkuatan kualitas Pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penguatan sasaran implementasi pada semua jenjang pemerintahan (desa sampai ke pusat) didukung kegiatan pengupdetan yang rutin dalam penanggulangan kemiskinan	22. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) secara berkelanjutan telah dimanfaatkan untuk implementasikan pada berbagai jenjang pemerintahan (desa sampai ke pusat) didukung kegiatan pengupdetan yang rutin dalam penanggulangan kemiskinan
	10.Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	23.Penyiapan perangkat dan instrumen perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat	23.Peningkatan kualitas perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas; penguatan akses dan layanan	23.Perkuatan kualitas perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat melalui penguatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas; penguatan akses dan layanan	23.Perwujudan dan keberlanjutan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat melalui keberlanjutan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas; keberlanjutan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			legal identity bagi masyarakat miskin	legal identity bagi masyarakat miskin	akses dan layanan legal identity bagi masyarakat miskin di Bursel
		24. Penyiapan Perangkat dan Instrumen untuk pemenuhan SPM sosial melalui penyiapan perangkat dan instrumen perencanaan dan penganggaran program dari APBD serta APBDes yang inklusif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, termasuk perubahan iklim.	24.Peningkatan Kualitas pemenuhan SPM sosial melalui implementasi perencanaan dan penganggaran program dari APBD serta APBDes yang inklusif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, termasuk perubahan iklim.	24.Penguatan kualitas pemenuhan SPM sosial melalui penguatan perencanaan dan penganggaran program dari APBD serta APBDes yang inklusif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, termasuk perubahan iklim.	24.Perwujudan dan keberlanjutan komitmen pemerintah untuk pemenuhan SPM sosial di Bursel
		25.Penyiapan perangkat dan instrumen, koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.	25.Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka peningkatan pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.	25.Penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan perluasan pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.	25.Perwujudan dan keberlanjutan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka keberlanjutan pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
		26.Penyiapan perangkat dan instrumen kelembagaan layanan sosial satu pintu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten untuk memudahkan masyarakat miskin, disabilitas dan lansia mengakses multi layanan sosial yang disiapkan	26.Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan layanan sosial satu pintu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten untuk memudahkan masyarakat miskin, disabilitas dan lansia mengakses multi layanan sosial yang disiapkan	26.Perkuatan kualitas tata kelola kelembagaan layanan sosial satu pintu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten untuk memudahkan masyarakat miskin, disabilitas dan lansia mengakses multi layanan sosial yang disiapkan	26.Perwujudan dan keberlanjutan tata kelola kelembagaan layanan sosial satu pintu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		pemerintah dan stakeholder terkait.	pemerintah dan stakeholder terkait.	pemerintah dan stakeholder terkait.	
		27.Penyiapan perangkat, instrumen dan koordinasi, monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara berjenjang oleh kelembagaan TKPD	27.Peningkatan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara berjenjang oleh kelembagaan TKPD	27.Perkuatan kualitas dan perluasan koordinasi, monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara berjenjang oleh kelembagaan TKPD	27.Perwujudan dan keberlanjutan koordinasi, monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Bursel
		28.Penyiapan perangkat dan instrumen pembiayaan pendidikan sarjana untuk masyarakat miskin dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di wilayahnya.	28.Peningkatan Dukungan pembiayaan pendidikan sarjana untuk masyarakat miskin dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di wilayahnya.	28.Perkuatan dan perluasan Dukungan pembiayaan pendidikan sarjana untuk masyarakat miskin dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di wilayahnya.	28.Perwujudan dan keberlanjutan Dukungan pembiayaan pendidikan sarjana untuk masyarakat miskin dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di wilayahnya.
		29.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan inovasi perlindungan sosial dan Pengembangan sosial entrepreneur di tingkat desa/kelurahan untuk mengelola SDA dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.	29.Peningkatan kualitas inovasi perlindungan sosial dan Pengembangan sosial entrepreneur di tingkat desa/kelurahan untuk mengelola SDA dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.	29.Perkuatan kualitas inovasi dan perluasan perlindungan sosial dan Pengembangan sosial entrepreneur di tingkat desa/kelurahan untuk mengelola SDA secara berkelanjutan.	29.Perwujudan dan keberlanjutan inovasi perlindungan sosial dan sosial entrepreneur di semua desa/kelurahan dan kecamatan.
		30.Penyiapan perangkat dan instrumen Pembinaan dan pengembangan masyarakat KAT, meliputi pemukiman, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,	30.Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat KAT, meliputi pemukiman, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,	30.Perkuatan kualitas pemberdayaan masyarakat KAT, meliputi pemukiman, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di semua kecamatan	30.Perwujudan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat KAT di Bursel,



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
M2. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (<i>agromarine</i>) yang berkelanjutan	11. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	31. Penyiapan Perangkat dan instrumen Hilirisasi melalui pengembangan sentra industri komoditi unggulan perkebunan terpadu (kelapa, cengkeh dan pala) hasil perikanan (ikan & rumput laut) dan komoditi pertanian lokal (umbian dan hotong) yang didukung hasil riset, inovasi dan teknologi (science and technopark) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdesaan.	31. Percepatan Hilirisasi melalui pengembangan sentra industri komoditi unggulan perkebunan terpadu (kelapa, cengkeh dan pala) hasil perikanan (ikan & rumput laut) dan komoditi pertanian lokal (umbian dan hotong) yang didukung hasil riset, inovasi dan teknologi (science and technopark) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdesaan.	31. Perkuatan Hilirisasi pada sentra industri komoditi unggulan perkebunan terpadu (kelapa, cengkeh dan pala) hasil perikanan (ikan & rumput laut) dan komoditi pertanian lokal (umbian dan hotong) yang didukung hasil riset, inovasi dan teknologi (science and technopark) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdesaan berkelanjutan	31. Perwujudan dan keberlanjutan Hilirisasi pada semua sentra industri komoditi unggulan di Bursel
	a. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%)	32. Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan lahan sawah transmigrasi dengan pola campuran dan pemanfaatan lahan LP2B sebagai sentra untuk pengembangan komoditi padi, palawija (jagung dan lainnya), hortikultura dan umbi-umbian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.	32. Peningkatan kualitas pengelolaan lahan sawah transmigrasi dengan pola campuran dan pemanfaatan lahan LP2B sebagai sentra untuk pengembangan komoditi padi, palawija (jagung dan lainnya), hortikultura dan umbi-umbian untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal.	32. Perkuatan kualitas dan perluasan pengelolaan lahan sawah transmigrasi dengan pola campuran dan pemanfaatan lahan LP2B sebagai sentra untuk penguatan komoditi padi, palawija (jagung dan lainnya), hortikultura dan umbi-umbian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.	32. Perwujudan dan keberlanjutan pengelolaan lahan sawah transmigrasi untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal di Bursel
	12. Pengembangan Pariwisata	33. Penyiapan perangkat dan instrumen investasi dari hilirisasi komoditi unggulan	33. Peningkatan investasi dari hilirisasi komoditi unggulan dengan dukungan	33. Penguatan investasi dari hilirisasi komoditi unggulan dengan teknologi dan	33. Perwujudan dan keberlanjutan investasi dari hilirisasi komoditi unggulan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			infrastruktur teknologi dan penjaminan mutu yang berbasis AI dan IoT serta digitalisasi data (Data Twin) untuk memenuhi kebutuhan mutu produk dari negara tujuan pasar.	penjaminan mutu yang berbasis AI dan IoT serta digitalisasi data (Data Twin) secara berkelanjutan	dengan teknologi IoT yang stabil di Bursel
	a. Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)	34.Penyiapan perangkat dan instrumen Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana pendukung di wilayah destinasi/desa/kawasan pariwisata	34.Peningkatan kualitas dan percepatan akses jalan dan sarana prasarana pendukung di wilayah destinasi/desa/kawasan pariwisata serta peningkatan atraksi seni budaya untuk meningkatkan pesona pariwisata desa/Kawasan perdesaan.	34.Perkuatan kualitas akses jalan dan sarana prasarana pendukung di wilayah destinasi/desa/kawasan pariwisata serta penguatan atraksi seni budaya untuk meningkatkan pesona pariwisata desa/Kawasan perdesaan.	34.Perwujudan dan keberlanjutan akses jalan dan sarana prasarana pendukung di wilayah destinasi/desa/kawasan pariwisata serta keberlanjutan atraksi seni budaya dan pesona pariwisata desa/Kawasan perdesaan di Bursel
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	35.Penyiapan perangkat dan instrumen Pembangunan akses jalan lingkar Buru Selatan yang terhubung dengan akses jalan lingkar Kabupaten Buru.	35.Percepatan akses jalan lingkar Buru Selatan yang terhubung dengan akses jalan lingkar Kabupaten Buru.	35.Perkuatan kualitas akses jalan lingkar Buru Selatan yang terhubung dengan akses jalan lingkar Kabupaten Buru.	35.Perwujudan dan keberlanjutan akses jalan lingkar Buru Selatan yang terhubung dengan akses jalan lingkar Kabupaten Buru.
	c. Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)	36.Penyiapan perangkat dan instrumen guna Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, pariwisata dan jasa	36.Percepatan pertumbuhan sektor-sektor baru yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, pariwisata dan jasa dengan dukungan atmosfer yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja,	36.Perkuatan pertumbuhan sektor-sektor baru yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, pariwisata dan jasa dengan dukungan atmosfer yang lebih baik melalui penguatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja,	36.Perwujudan dan keberlanjutan sektor-sektor yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, pariwisata dan jasa di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.	penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.	
	d. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	37.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian	37.Percepatan pertumbuhan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian melalui pengembangan kawasan utama produsen perikanan	37.Perkuatan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian melalui penguatan dan perluasan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan.	37.Perwujudan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi biru dan bioekonomi di Bursel
	13.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	38.Penyiapan perangkat dan instrumen guna mendorong Kontribusi dan daya saing kualitas produk sektor-sektor unggulan dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>agromarine based sectors</i>),	38.Peningkatan kontribusi dan daya saing kualitas produk sektor-sektor unggulan dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>agromarine based sectors</i>) melalui pengembangan SDM berdaya saing global menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global.	38.Perkuatan kualitas kontribusi dan daya saing kualitas produk sektor-sektor unggulan dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>agromarine based sectors</i>), melalui peningkatan kapasitas SDM berdaya saing global menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global.	38.Perwujudan daya saing kualitas produk sektor-sektor unggulan dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>agromarine based sectors</i>), menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global. Tumbuhnya industri bio farmasi berbahan baku potensi SDA lokal
	14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	39.Penyiapan perangkat dan instrumen Pembangunan dan pengembangan sarana pelabuhan udara dan laut mendukung pengembangan produksi dan hasil produk hilirisasi komoditi perkebunan/pertanian, perikanan dan pembangunan	39.Percepatan Pembangunan dan pengembangan sarana pelabuhan udara dan laut guna mendukung peningkatan produksi dan hasil produk hilirisasi komoditi perkebunan/pertanian, perikanan dan pembangunan	39.Perkuatan dan perluasan sarana pelabuhan udara dan laut guna perkuatan kapasitas produksi dan hasil produk hilirisasi komoditi perkebunan/pertanian, perikanan dan pembangunan sektor pariwisata serta sektor pertambangan.	39.Perwujudan dan keberlanjutan pengelolaan sarana pelabuhan udara dan laut mendukung keberlanjutan produksi dan hasil produk hilirisasi komoditi perkebunan/pertanian, perikanan dan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		sektor pariwisata serta sektor pertambangan.	sektor pariwisata serta sektor pertambangan.		pembangunan sektor pariwisata serta sektor pertambangan di Bursel
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	40.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)	40.Percepatan Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) melalui pengembangan kawasan pariwisata premium (premium tourism), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.	40.Perkuatan dan perluasan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) melalui perluasan kawasan pariwisata premium (premium tourism), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.	40.Perwujudan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) di Bursel
	b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	41.Penyiapan perangkat dan instrumen pembangunan kawasan wisata Tifu sebagai pintu masuk jalur laut dan darat yang terintegrasi serta terkoneksi dengan Kawasan wisata Negeri Diatas Awan Fena Fafan dan wisata Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (Geopark) dan Living Museum.	41.Percepatan Pengembangan kawasan wisata Tifu sebagai pintu masuk jalur laut dan darat yang terintegrasi serta terkoneksi dengan Kawasan wisata Negeri Diatas Awan Fena Fafan dan wisata Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (Geopark) dan Living Museum.	41.Perkuatan dan perluasan kawasan wisata Tifu sebagai pintu masuk jalur laut dan darat yang terintegrasi serta terkoneksi dengan Kawasan wisata Negeri Diatas Awan Fena Fafan dan wisata Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (Geopark) dan Living Museum.	41.Perwujudan dan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata Tifu sebagai pintu masuk jalur laut dan darat yang terintegrasi serta terkoneksi dengan Kawasan wisata Negeri Diatas Awan Fena Fafan dan wisata Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (Geopark) dan Living Museum.
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	42.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, dan inklusif	42.Pengembangan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung	42.Penguatan dan perluasan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	42.Perwujudan dan keberlanjutan rantai pasok industri pariwisata yang



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi.	yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi.	adaptif, inklusif dan berkelanjutan di Bursel
	d. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	43.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan produktivitas, mutu serta kesejahteraan petani dan nelayan	43.Peningkatan produktivitas, mutu serta kesejahteraan petani dan nelayan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau; peningkatan produktivitas dan mutu produk IKM dan UMKM serta menjamin keterkaitannya dengan rantai nilai industri domestik dan global, melalui digitalisasi data dan peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan paran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	43.Perkuatan dan daya saing produktivitas, mutu serta kesejahteraan petani dan nelayan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau; penguatan produktivitas dan mutu produk IKM dan UMKM serta menjamin keterkaitannya dengan rantai nilai industri domestik dan global, melalui digitalisasi data dan peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan paran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	43.Perwujudan dan keberlanjutan produktivitas, mutu serta kesejahteraan petani dan nelayan di Bursel
	e. Return on Asset (ROA) BUMD (%)				
	15.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	44. Penyiapan perangkat dan instrumen hilirisasi usaha koperasi untuk komoditas unggulan daerah	44.Percepatan hilirisasi usaha koperasi untuk komoditas unggulan daerah melalui pengembangan proses bisnis, kelembagaan, permodalan dan adopsi teknologi; Membangun kerjasama lembaga ekonomi desa (BUMDes, Koperasi),	44.Penguatan hilirisasi usaha koperasi untuk komoditas unggulan daerah melalui penguatan proses bisnis, kelembagaan, permodalan dan adopsi teknologi; Perluasan kerjasama lembaga ekonomi desa (BUMDes, Koperasi), kelompok usaha	44.Perwujudan dan keberlanjutan hilirisasi usaha koperasi untuk komoditas unggulan daerah di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			kelompok usaha masyarakat (UMKM/IKM), perbankan dengan investor dalam bidang usaha komoditi unggulan daerah	masyarakat (UMKM/IKM), perbankan dengan investor dalam bidang usaha komoditi unggulan daerah	
	a. Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)	45.Penyiapan perangkat dan instrumen Pembentukan dan pengembangan BUMD untuk usaha produksi air mineral dan minuman fungsional drink dari bahan baku air kelapa, tanaman biofarka dan lainnya untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pariwisata.	45.Peningkatan kualitas pengelolaan BUMD untuk usaha produksi air mineral dan minuman fungsional drink dari bahan baku air kelapa, tanaman biofarka dan lainnya untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pariwisata.	45.Perkuatan kualitas dan perluasan pengelolaan BUMD untuk diversifikasi usaha berbasis potensi unggulan daerah.	45.Perwujudan dan keberlanjutan BUMD berbasis potensi unggulan daerah di Bursel.
	16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	46.Penyiapan perangkat dan instrumen Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	46.Percepatan dan peningkatan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	46.Perkuatan dan perluasan kebijakan kebijakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	46.Perwujudan dan keberlanjutan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industry di Bursel
	17.Tingkat Penguasaan IPTEK	47.Penyiapan perangkat dan instrumen pengembangan SDM Buru Selatan yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional & internasional	47.Percepatan dan peningkatan kualitas SDM Buru Selatan yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional & internasional	47.Penguatan Kualitas SDM Buru Selatan yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional & internasional	47.Perwujudan dan keberlanjutan SDM Buru Selatan yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional & internasional
	a. Indeks Inovasi Daerah	48.Penyediaan perangkat, instrumen dan anggaran IPTEKIN daerah guna mendukung komersialisasi	48.Peningkatan kualitas dan kuantitas anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi	48.Perkuatan kualitas dan kuantitas anggaran IPTEKIN daerah guna memantapkan komersialisasi kegiatan dan	48.Perwujudan dan keberlanjutan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi kegiatan dan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		kegiatan dan hasil-hasil hilirisasi dari berbagai industri.	kegiatan dan hasil-hasil hilirisasi dari berbagai industri.	hasil-hasil hilirisasi dari berbagai industri.	hasil-hasil hilirisasi dari berbagai industri.
	b. Indeks Inovasi dan Riset Maritim	49.Penyiapan perangkat dan instrumen untuk Membangun ekosistem pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi unggulan	49.Percepatan dan peningkatan ekosistem pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi unggulan untuk mendukung peningkatan pembangunan di berbagai sektor.	49.Penguatan dan perluasan ekosistem pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi unggulan untuk mendukung percepatan dan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.	49.Perwujudan dan keberlanjutan ekosistem pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi unggulan di Bursel
	18.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	50.Penyiapan perangkat dan instrumen Pemanfaatan energi terbarukan yang terdapat di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik atau energi bagi masyarakat, baik melalui pemanfaat energi surya, angin, hidroelektrik dan lainnya,	50.Percepatan Pemanfaatan energi terbarukan yang terdapat di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik atau energi bagi masyarakat, baik melalui pemanfaat energi surya, angin, hidroelektrik dan lainnya,	50.Perluasan Pemanfaatan energi terbarukan yang terdapat di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik atau energi bagi masyarakat, baik melalui pemanfaat energi surya, angin, hidroelektrik dan lainnya,	50.Keberklanjutan Pemanfaatan energi terbarukan yang terdapat di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik atau energi bagi masyarakat, di Bursel
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51.Penyiapan perangkat dan instrumen Penggunaan transportasi yang mendukung kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca.	51.Percepatan Penggunaan transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.	51.Perkuatan dan perluasan Penggunaan transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di semua kecamatan	51.Perwujudan dan keberlanjutan Penggunaan transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Bursel
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	52.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan limbah & daur ulang sampah menggunakan pendekatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle)	52.Percepatan dan peningkatan kualitas Pengelolaan limbah & daur ulang sampah menggunakan pendekatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle)	52.Perkuatan kualitas dan perluasan Pengelolaan limbah & daur ulang sampah menggunakan pendekatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle)	52.Perwujudan dan keberlanjutan Pengelolaan limbah & daur ulang sampah menggunakan pendekatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle) di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		53.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan pertanian dan pangan berkelanjutan melalui penyiapan perangkat dan instrumen produksi dengan menggunakan pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu, diversifikasi tanaman, pengembangan pertanian organik dan Sistem pangan lokal dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.	53.Peningkatan kualitas pertanian dan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi dengan menggunakan pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu, diversifikasi tanaman, pengembangan pertanian organik dan Sistem pangan lokal dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.	53.Perkuatan kualitas pertanian dan pangan berkelanjutan melalui perluasan produksi dengan menggunakan pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu, diversifikasi tanaman, perkuatan pertanian organik dan Sistem pangan lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan bebas impor pangan.	53.Perwujudan pertanian dan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi dengan menggunakan pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu, diversifikasi tanaman, keberlanjutan pertanian organik dan Sistem pangan lokal serta Buru Bebas Impor pangan
		54.Penyiapan perangkat dan instrumen guna Mendorong kesadaran dan pendidikan lingkungan pada masyarakat dan berbagai stakeholder melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi pencegahan serta perbaikan kerusakan lingkungan.	54.Peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan pada masyarakat dan berbagai stakeholder melalui peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pelatihan serta perbaikan kerusakan lingkungan.	54.Penguatan kesadaran dan pendidikan lingkungan pada masyarakat dan berbagai stakeholder melalui perluasan kegiatan pendidikan, pelatihan serta perbaikan kerusakan lingkungan.	54.Perwujudan kesadaran dan pendidikan lingkungan pada masyarakat dan berbagai stakeholder di Bursel
	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	55.Penyiapan perangkat dan instrumen ekosistem digital dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) Penyiapan infrastruktur teknologi	55.Percepatan Pembangunan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) peningkatan dan penuntasan infrastruktur	55.Perkuatan dan perluasan ekosistem digital dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur	55. Perwujudan dan keberlanjutan ekosistem digital yang berkualitas pada semua sektor di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya penyiapan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok daerah.	teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya peningkatan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok daerah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (perkebunan, perikanan, pariwisata) melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok daerah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (perkebunan, perikanan, pariwisata) melalui upaya percepatan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya percepatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
		56.Penyiapan perangkat dan instrumen Inklusi Digital, yang	56.Percepatan Inklusi Digital, yang memberikan manfaat	56.Perkuatan dan perluasan Inklusi Digital, yang	56.Perwujudan dan keberlanjutan Inklusi Digital,



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil (KAT) dan penyiapan perangkat dan instrumen aksesibilitas layanan digital untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi.	kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil (KAT) dan meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan digital untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi.	memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil (KAT) dan perluasan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan digital untuk mewujudkan inklusi sosial dan ekonomi.	kepada semua lapisan masyarakat, di Bursel
	20.Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	57.Penyiapan perangkat Fasilitas dan melaksanakan kegiatan nasional berupa pembangunan kawasan industri dan sentra perikanan tuna didukung beroperasinya Pusat Penelitian Perikanan dan Industri Kapal (<i>Maritime Science Technopark</i>),	57.Pengelolaan kawasan industri dan sentra perikanan tuna dengan beroperasinya Pusat Penelitian Perikanan dan Industri Kapal (<i>Maritime Science Technopark</i>),	57.Perluasan kawasan industri dan sentra perikanan tuna melalui penguatan Pusat Penelitian Perikanan dan Industri Kapal (<i>Maritime Science Technopark</i>),	57.Keberkelanjutan pengelolaan kawasan industri dan sentra perikanan tuna yang didukung keberlanjutan pengelolaan Pusat Penelitian Perikanan dan Industri Kapal (<i>Maritime Science Technopark</i>),
	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi*)	58.Penyiapan perangkat dan instrumen konektivitas antarkawasan pertumbuhan ekonomi.	58.Peningkatan konektivitas antarkawasan pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi.	58.Perkuatan dan perluasan konektivitas antarkawasan pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi.	58.Keberkelanjutan konektivitas antarkawasan pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi.
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	59.Penyiapan perangkat dan instrumen pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai	59.Percepatan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah dan	59.Perkuatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah	59.Perwujudan dan keberlanjutan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		dengan potensi wilayah dan keunggulan daerah Buru Selatan.	keunggulan daerah Buru Selatan.	dan keunggulan daerah Buru Selatan.	sesuai dengan potensi wilayah dan keunggulan daerah Buru Selatan.
	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	60.Penyiapan perangkat dan instrumen pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Leksula, Kawasan Strategis lainnya	60.Peningkatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Leksula, Kawasan Strategis lainnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif.	60.Penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Leksula, Kawasan Strategis lainnya untuk penguatan keunggulan kompetitif.	60.Kebijakan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Leksula, Kawasan Strategis lainnya untuk keberlanjutan keunggulan kompetitif.
		61.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan logistik daerah melalui penyiapan perangkat dan instrumen teknologi digital.	61.Percepatan pengelolaan logistik daerah melalui peran kelembagaan yang berbasis pemanfaatan teknologi digital.	61.Penguatan logistik daerah melalui penguatan kelembagaan dan perluasan pemanfaatan teknologi digital.	61.Kebijakan pengelolaan logistik daerah dan kelembagaan yang berbasis pemanfaatan teknologi digital di Bursel
		62.Penyiapan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara.	62.Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong konektivitas antarwilayah lebih terintegrasi serta peningkatan keterkaitan nilai tambah.	62.Perkuatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara dan perluasan konektivitas antarwilayah lebih terintegrasi dan penguatan keterkaitan nilai tambah.	62.Kebijakan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara serta konektivitas antarwilayah yang terintegrasi serta keterkaitan nilai tambah di Bursel
		63.Penyiapan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antarwilayah dan daerah	63.Peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antarwilayah dan daerah untuk meningkatkan peran dan partisipasi dalam rantai pasok nasional dan global.	63.Perkuatan dan perluasan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antarwilayah dan daerah untuk perluasan peran dan partisipasi dalam rantai pasok nasional dan global.	63.Kebijakan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antarwilayah dan daerah untuk mewujudkan peran dan partisipasi dalam rantai pasok nasional dan global.



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		64. Penyiapan perangkat dan instrumen Perdagangan produk unggulan, baik volume dan nilai ekspor maupun didalam negeri	64.Peningkatan perdagangan produk unggulan, baik volume dan nilai ekspor maupun didalam negeri	64.Perluasan perdagangan produk unggulan, baik volume dan nilai ekspor maupun didalam negeri	64.Keberlanjutan perdagangan produk unggulan, baik volume dan nilai ekspor maupun didalam negeri
	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan	65.Penyiapan perangkat dan instrumen kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan eksisting/yang telah ada	65.Percepatan Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan eksisting/yang telah ada melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal; peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi	65.Perkuatan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan eksisting/yang telah ada melalui penguatan potensi sumberdaya lokal; perkuatan investasi dan kota-kota pesisir yang terintegrasi	65.Perwujudan dan keberlanjutan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan eksisting/yang telah ada secara terintegrasi di Bursel
	a. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi	66.Penyediaan perangkat dan instrumen konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dengan penyiapan perangkat dan infrastruktur transportasi (lingkar Buru Selatan/Ring Road). dan konektivitas digital antar kota dengan kabupaten sekitarnya, antar kota dengan desa maupun kota dengan hub regional lainnya,	66.Peningkatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dengan meningkatkan keterkaitan infrastruktur transportasi (lingkar Buru Selatan/Ring Road). dan konektivitas digital antar kota dengan kabupaten sekitarnya, antar kota dengan desa maupun kota dengan hub regional lainnya, mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta mendorong pengembangan agro-marine	66.Penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dibangun dengan penguatan keterkaitan infrastruktur transportasi (lingkar Buru Selatan/Ring Road). dan konektivitas digital antar kota dengan kabupaten sekitarnya, antar kota dengan desa maupun kota dengan hub regional lainnya, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta penguatan pembangunan	66.Perwujudan dan keberlanjutan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan, keberlanjutan pembangunan agro-marine yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis digital



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			yang inovatif dan kreatif berbasis digital	agro-marine yang inovatif dan kreatif berbasis digital	
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal tanaman pangan (LP2B), perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pariwisata (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan)	67.Percepatan Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal tanaman pangan (LP2B), perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pariwisata (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan)	67.Perkuatan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal tanaman pangan (LP2B), perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pariwisata (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) untuk mendukung penguatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam sekaligus menopang rantai pasok industri dan ekonomi kreatif yang inovatif untuk penguatan nilai tambah produk.	67.Perwujudan dan Keberlanjutan pengelolaan potensi perdesaan untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam sekaligus menopang rantai pasok industri dan ekonomi kreatif yang inovatif untuk penguatan nilai tambah produk secara berkelanjutan
	23.1. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (Sumber IDM)				
	23.2. Rumahtangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				



	(%)				
	23.3. Persentase Desa Mandiri (%)				



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
M3.Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN	24. Indeks Reformasi Hukum	68. Penyiapan perangkat dan instrumen Harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	68.Optimasi dan harmonisasi regulasi yang memadai di daerah	68.Perkuatan harmonisasi regulasi, di daerah	68.Perwujudan dan keberlanjutan harmonisasi regulasi di daerah
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	69.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan digitalisasi layanan publik (sistem layanan publik self service)	69.Percepatan digitalisasi layanan publik (sistem layanan publik self service) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	69.Perkuatan digitalisasi layanan publik (sistem layanan publik self service) untuk penguatan efektivitas dan efisiensi dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	69.Perwujudan dan keberlanjutan digitalisasi layanan publik (sistem layanan publik self service) pada semua jenjang di Bursel
	26.Indeks Pelayanan Publik	70.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	70. Peningkatan kualitas Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	70.Perkuatan kualitas dan pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi secara merata	70.Perwujudan dan Keberlanjutan manajemen talenta/karier pada semua level di Bursel
	27. Indeks Integritas Nasional	71.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan smart government; pembangunan smart branding; smart society; smart living.	71.Percepatan Pengembangan smart government; pembangunan smart branding; smart society; smart living serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	71.Perkuatan dan perluasan smart government; pembangunan smart branding; smart society; smart living serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	71.Perwujudan dan keberlanjutan smart government; pembangunan smart branding; smart society; smart living di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		72.Penyiapan perangkat dan instrumen Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.	72.Percepatan implementasi kebijakan afirmatif yang mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk meningkatkan kualitas pembangunan wilayah.	72.Perkuatan dan perluasan implementasi kebijakan afirmatif yang mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk penguatan kualitas pembangunan wilayah.	72.Perwujudan dan Keberlanjutan implementasi kebijakan afirmatif yang merata di semua wilayah Bursel
		73. Penyiapan perangkat dan instrumen guna merespons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	73.Peningkatan Kualitas respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	73.Perkuatan kualitas respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	73.Keberlanjutan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
		74.Penyiapan perangkat dan instrumen partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	74.Peningkatan dan percepatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	74.Perkuatan dan Perluasan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	74.Perwujudan dan keberlanjutan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Bursel
		75.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.	75.Percepatan implementasi manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.	75.Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.	75.Keberlanjutan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.
		76. Penyiapan perangkat dan instrumen Monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user;	76.Peningkatan kualitas monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user;	76.Penguatan kualitas monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user;	76.Keberlanjutan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user; perwujudan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengendalian pembangunan	penguatan akuntabilitas kinerja dan pengendalian pembangunan	akuntabilitas kinerja dan pengendalian pembangunan
		77.Penyiapan perangkat dan instrumen Pencegahan dan pemberantasan korupsi di semua level organisasi melalui perangkat dan instrumen transparansi perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa	77.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	77.Perkuatan dan perluasan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	77.Perwujudan dan keberlanjutan Buru Selatan Bebas KKN
		78. Penyiapan perangkat dan instrumen Integritas partai politik.	78.Peningkatan integritas partai politik.	78.Penguatan integritas partai politik.	78.Perwujudan integritas partai politik di Bursel
		79.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.	79.Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.	79.Perkuatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.	79.Perwujudan dan keberlanjutan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
		80.Penyiapan perangkat dan instrumen Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	80.Peningkatan Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	80.Perkuatan Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	80.Perwujudan dan keberlanjutan Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		81.Penyiapan perangkat dan instrumen Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	81.Peningkatan Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	81.Perkuatan Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	81.Perwujudan dan keberlanjutan Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		82.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	82.Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	82.Penguatan kualitas akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	82.Perwujudan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional di Bursel
		83. Penyiapan perangkat dan instrumen Pengendalian pembangunan, melalui penyiapan perangkat dan instrumen manajemen risiko.	83.Peningkatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	83.Perkuatan dan perluasan pengendalian pembangunan, dan penerapan manajemen risiko.	83.Perwujudan dan keberlanjutan pembangunan, berbasis manajemen risiko di Bursel
		84.Penyiapan perangkat dan instrumen sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.	84.Peningkatan kualitas dan implementasi sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.	84.Perkuatan kualitas sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.	84.Perwujudan dan keberlanjutan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan di Bursel
		85.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	85.Pengembangan dan implementasi kebijakan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	85.Perkuatan kebijakan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	85.Perwujudan dan keberlanjutan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
M4. Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai	28. Indeks Pembangunan Hukum	86. Penyiapan perangkat dan instrumen guna mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui	86.Peningkatan peran Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan,	86.Penguatan peran Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan,	86.Perwujudan dan keberlanjutan peran Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah		penyiapan kelembagaan dan pendidikan	dan pemenuhan HAM melalui implementasi kelembagaan dan pendidikan	dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan dan pendidikan	penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui keberlanjutan kelembagaan dan pendidikan
	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	87.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal	87.Peningkatan kualitas keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal	87.Perkuatan kualitas keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal secara luas	87.Perwujudan dan keberlanjutan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal di Bursel
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	88.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan kelembagaan demokrasi melalui penyiapan perangkat dan instrumen penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku	88.Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku	88.Penguatan kualitas tata kelola kelembagaan demokrasi melalui penguatan kualitas penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku	88.Perwujudan dan keberlanjutan kualitas tata kelola kelembagaan demokrasi di Bursel
		89.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan peran dan respon partai politik, lembaga perwakilan, serta media dan pers	89.Peningkatan kualitas peran dan respon partai politik, lembaga perwakilan, serta media dan pers agar lebih akuntabel dan berkualitas	89.Perkuatan peran dan respon partai politik, lembaga perwakilan, serta media dan pers yang akuntabel dan berkualitas	89.Perwujudan dan keberlanjutan kualitas peran dan respon partai politik, lembaga perwakilan, serta media dan pers di Bursel
		90.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam Masyarakat	90.Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam Masyarakat	90.Perkuatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam Masyarakat	90.Perwujudan dan keberlanjutan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam Masyarakat



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		91.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan pemahaman internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	91.Peningkatan kualitas pemahaman internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	91.Perkuatan kualitas pemahaman internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	91.Perwujudan dan keberlanjutan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Bursel
		92.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas	92.Peningkatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas	92.Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas	92.Perwujudan dan keberlanjutan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas
		93.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel	93.Peningkatan kualitas komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat	93.Perkuatan dan perluasan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel guna penguatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat	93.perwujudan dan keberlanjutan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel di Bursel
		94.Penyiapan perngkat dan instrumen Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	94.Peningkatan kualitas partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, melalui perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial	94.Perkuatan kualitas dan perluasan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial	94.Perwujudan dan keberlanjutan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	95.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penyiapan perangkat dan instrumen Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru,	95.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional yang transparan	95.Perkuatan kapasitas fiskal daerah melalui pernguatan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, penguatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional yang transparan	95.Perwujudan dan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan Keberlanjutan sumber pembiayaan alternative dan kualitas belanja daerah di Bursel
	32. Tingkat Inflasi	96.Penyiapan perangkat dan istrumen Pengendalian inflasi daerah	96.Peningkatan kualitas pengendalian inflasi daerah melalui pengingkatan kualitas peran TPID	96.Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan peran TPID	96.Perwujudan dan Keberlanjutan pengendalian inflasi daerah di Bursel
	33. Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan				
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)				
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)				



	c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa				
--	--	--	--	--	--



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
	Nilai Rata-rata Tahunan				
	d. Total Kredit/PDRB (%)				
	34. Inklusi Keuangan (%)				
	35. Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi (%)*)	97.Penyiapan perangkat dan instrumen Diplomasi Daerah melalui penyiapan perangkat dan instrumen peningkatan kapasitas diplomatik daerah berbasis pelatihan dan pengembangan keterampilan diplomatik bagi pejabat pemerintahan setempat dan penyiapan perangkat dan instrumen kerja sama dengan berbagai pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan daerah	97.Peningkatan Kualitas Diplomasi Daerah melalui peningkatan kapasitas diplomatik daerah berbasis pelatihan dan pengembangan keterampilan diplomatik bagi pejabat pemerintahan setempat dan peningkatan kualitas kerja sama dengan berbagai pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan daerah	97.Penguatan Kualitas Diplomasi Daerah melalui penguatan kapasitas diplomatik daerah berbasis pelatihan dan pengembangan keterampilan diplomatik bagi pejabat pemerintahan setempat dan penguatan kerja sama dengan berbagai pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan daerah	97.Perwujudan dan keberlanjutan kualitas Diplomasi Daerah yang berdaya dan berhasil guna bagi pembangunan Bursel



	36. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) *	98.Penyiapan pernagkat dan instrumen Pengelolaan Konflik dan Krisis Secara Efektif	98.Peningkatan kualitas Pengelolaan Konflik dan Krisis Secara Efektif melalui pembangunan kapasitas untuk menangani konflik dan krisis di tingkat daerah dengan pendekatan dialog dan mediasi, menyusun rencana tanggap darurat yang terkoordinasi untuk	98.Perkuatan kualitas Pengelolaan Konflik dan Krisis Secara Efektif melalui penguatan kapasitas Sumber Daya untuk menangani konflik dan krisis di tingkat daerah serta berbagai ancaman terhadap trantibun.	98.Perwujudan dan keberlanjutan Pengelolaan Konflik dan Krisis Secara Efektif di Bursel
--	--	---	---	--	--



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			menghadapi berbagai ancaman terhadap trantibun.		
	36.1. Indeks Pembangunan Hukum	99.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan keamanan wilayah untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal	99.Peningkatan kualitas keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal	99.Perkuatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal	99.Perwujudan dan keberlanjutan keamanan menuju zorro criminal di Bursel
	36.2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)				
	36.3. Indeks Demokrasi Indonesia				
	37. Indeks Kerukunan Umat Beragama	100.Penyiapan perangkat dan instrumen Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	100.Peningkatan kualitas karakter dan jati diri bangsa.	100.Penguatan kualitas karakter dan jati diri bangsa.	100.Perwujudan karakter dan jati diri bangsa di Bursel
		101.Penyiapan perangkat dan instrumen Pelestarian dan peningkatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat	101.Pelestarian dan peningkatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui peningkatan kualitas ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah	101.Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah	101.Kebeklanjutan Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat di Bursel



		102.Penyiapan perangkat dan instrumen Penguatan	102.Penguatan kualitas pendidikan yang berbasis	102.Penguatan dan perluasan pendidikan yang berbasis	102.Perwujudan dan keberlanjutan pendidikan
--	--	---	---	--	---



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	kerukunan antar etnis dan agama.	kerukunan antar etnis dan agama.	yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama di Bursel
		103.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keterlibatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan	103.Percepatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan	103.Penguatan dan perluasan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil guna percepatan pembangunan yang berorientasi pada penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan	103.Perwujudan dan keberlanjutan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil serta keberlanjutan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan di Bursel
	38. Indeks Pembangunan Kebudayaan	104.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan kebudayaan, serta pengembangan bahasa daerah dan sastra;	104.Peningkatan dan penguatan kebudayaan, serta peningkatan bahasa daerah dan sastra;	104.Perluasan dan penguatan kebudayaan, serta penguatan bahasa daerah dan sastra;	104.Perwujudan dan penguatan kebudayaan, serta bahasa daerah dan sastra di Bursel
		105.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;	105.Peningkatan dan perkuatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;	105.Perkuatan dan perluasan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;	105.Perwujudan dan keberlanjutan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;
		106.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan	106.Peningkatan kualitas pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan	106.Perkuatan kualitas dan perluasan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk penguatan produktivitas dan kesejahteraan	106.Keblanjutan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan di Bursel
		107.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan budaya bahari dan	107.Peningkatan kualitas budaya bahari dan kemaritiman antara lain	107.Penguatan kualitas budaya bahari dan kemaritiman melalui	107.Perwujudan dan keberlanjutan implementasi budaya bahari dan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		kemaritiman antara lain dengan menyiapkan perangkat dan instrumen pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut.	dengan peningkatan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan peningkatan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.	perluasan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan perluasan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.	kemaritiman melalui keberlanjutan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan keberlanjutan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan di Bursel
	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	108.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan tatanan keluarga berkualitas melalui penyiapan perangkat dan instrumen peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang inklusif berkarakter wilayah pesisir, pegunungan, kepulauan.	108.Penguatan pondasi tatanan keluarga berkualitas yang didukung peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang inklusif berkarakter wilayah pesisir, pegunungan, kepulauan, serta peningkatan kualitas lingkungan yang maju dan tangguh	108.Penguatan pondasi tatanan keluarga berkualitas yang didukung dengan penguatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang inklusif berkarakter wilayah pesisir, pegunungan, kepulauan, serta penguatan kualitas lingkungan yang maju dan tangguh	108.Perwujudan tatanan keluarga berkualitas yang didukung kualitas kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang inklusif berkarakter wilayah pesisir, pegunungan, kepulauan, serta perwujudan kualitas lingkungan yang maju dan tangguh dan berkelanjutan di Bursel
	40.1. Indeks Ketimpangan Gender	109.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga	109.Peningkatan kualitas peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan ekonomi berbasis keluarga sesuai karakter wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan	109.Penguatan kualitas peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dalam penguatan ekonomi berbasis keluarga sesuai karakter wilayah pesisir, pegunungan kepulauan secara berkelanjutan	109.Perwujudan dan keberlanjutan peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ekonomi tangguh berbasis keluarga sesuai karakter wilayah pesisir, pegunungan kepulauan secara berkelanjutan di Bursel
	40.2. Indeks Pembangunan Gender	110.Penyiapan perangkatan , instrumen dan SDM dalam sinkronisasi tata kelola guna	110.Peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkkan kualitas sinkronisasi tata	110.Perkuatan kualitas SDM dalam penguatan sinkronisasi tata kelola terintegrasi dalam	110. Perwujudan dan Keberlanjutan kualitas SDM, sinkronisasi tata kelola



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		menciptakan keluarga maju, mandiri dan tangguh berbasis wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan	kelola terintegrasi dalam menciptakan keluarga maju, mandiri dan tangguh berbasis wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan	menciptakan keluarga maju, mandiri dan tangguh berbasis wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan	terintegrasi dalam mewujudkan keluarga maju, mandiri dan tangguh berbasis wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan di Bursel
		111. Penyiapan perangkat dan instrumen akses layanan keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III berbasis gender	111. Peningkatan dan percepatan akses dan kualitas layanan keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III berbasis gender dalam mewujudkan kualitas keluarga yang tangguh dan mandiri	111. Perkuatan dan perluasan akses dan kualitas layanan keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III berbasis gender dalam mewujudkan kualitas keluarga yang tangguh dan mandiri	111. Perwujudan dan keberlanjutan akses dan kualitas layanan keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III berbasis gender dalam mewujudkan kualitas keluarga yang tangguh dan mandiri di Bursel
		112. Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan Digitalisasi layanan keluarga dan perangkat dan instrumen kerjasama lintas sektor dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga	112. Peningkatan dan percepatan Digitalisasi layanan keluarga dan Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga	112. Perkuatan dan perluasan Digitalisasi layanan keluarga dan penguatan kerjasama lintas sektor guna mewujudkan Buru Selatan Bebas KDRT	112. Perwujudan dan keberlanjutan Buru Selatan Bebas KDRT
		113. Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan kerjasama lintas sektor/berbagai pihak (adat, perguruan tinggi, CSR) dalam mewujudkan keluarga maju dan berkualitas sesuai karakter budaya dan potensi lokal wilayah	113. Peningkatan kualitas kerjasama lintas sektor/berbagai pihak (adat, perguruan tinggi, CSR) dalam mewujudkan keluarga maju dan berkualitas sesuai karakter budaya dan potensi lokal wilayah	113. Perkuatan dan perluasan kerjasama lintas sektor/berbagai pihak (adat, perguruan tinggi, CSR) dalam mewujudkan keluarga maju dan berkualitas sesuai karakter budaya dan potensi lokal wilayah	113. Perwujudan dan keberlanjutan keluarga maju dan berkualitas sesuai karakter budaya dan potensi lokal wilayah Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		114.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan keluarga di tingkat desa/kecamatan	114.Peningkatan dan percepatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan keluarga di tingkat desa/kecamatan yang terintegrasi, maju dan mandiri	114.Perkuatan dan perluasan pemenuhan sarana prasarana pelayanan keluarga di tingkat desa/kecamatan yang terintegrasi, maju mandiri dan berkelanjutan	114.Perwujudan pemenuhan sarana prasarana pelayanan keluarga di tingkat desa/kecamatan yang terintegrasi, maju mandiri dan berkelanjutan
M5. Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	115.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	115.Peningkatan kualitas pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; serta pembangunan tempat sampah	115.Perkuatan Reformasi dan kualitas pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; serta pembangunan tempat dan sistem pengelolaan sampah terpadu	115.Perwujudan dan keberlanjutan Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; serta pembangunan tempat dan sistem pengelolaan sampah terpadu serta berkelanjutan
	a. Persentase Kawasan Konservasi Laut terhadap Wilayah Kelola Laut (%)	116.Penyiapan perangkat dan instrumen pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping);	116.Peningkatan kualitas pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping);	116.Penguatan kualitas pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping);	116.Perluasan pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping) berkelanjutan di Bursel
	42. Kualitas Lingkungan Hidup	117.Penyiapan perangkat dan instrumen akses air minum yang dikelola secara aman	117.Peningkatan kualitas akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi	117.Perkuatan dan perluasan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi	117.Keblanjutan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			terkini terutama pada wilayah yang sulit air	terkini terutama pada wilayah yang sulit air	wilayah yang sulit air secara merata di Bursel
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	118.Penyiapan perangkat dan instrumen peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi	118.peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi	118.Penguatan kualitas pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi	118.Perwujudan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi secara berkelanjutan di Bursel
	b. Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman	119.Penyiapan perangkat dan instrumen Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.	119.Peningkatan kualitas Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.	119.Perkuatan kualitas Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.	119.Perwujudan kualitas Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana secara berkelanjutan di Bursel
	c. Pengelolaan Sampah	120.Penyiapan perangkat dan instrumen guna mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.	120.Peningkatan dan percepatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.	120.Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.	120.Perwujudan dan keberlanjutan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di Bursel
	▪ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)				



	▪ Timbulan Sampah Terolah di fasilitas				
--	--	--	--	--	--



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
	Pengolahan Sampah di kab/kota (%)				
	▪ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)				
	42.1 Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Sumber IDM)				
	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan	121.Penyiapan perangkat dan instrumen Kajian dan penyiapan data potensi EBT di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama di desa terpencil	121.Kajian dan penyiapan data potensi EBT di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama di desa terpencil	121.Kajian dan penyiapan serta pemanfaatan data potensi EBT di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama di desa terpencil	121.Kajian dan penyiapan serta keberlanjutan pemanfaatan data potensi EBT di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik di semua desa terpencil di Bursel
	a. Ketahanan Energi				



	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	122.Penyiapan perangkat dan instrumen kegiatan konservasi sumber air yang dikelola secara terintegrasi	122.Peningkatan kualitas konservasi sumber air yang dikelola secara terintegrasi peningkatan kualitas pelaksanaannya dengan menerapkan system Smart Teknologi.	122.Perkuatan dan perluasan konservasi sumber air yang dikelola secara terintegrasi dan penguatan pelaksanaannya dengan menerapkan system Smart Teknologi.	122.Perwujudan dan keberlanjutan konservasi sumber air yang dikelola secara terintegrasi dengan menerapkan system Smart Teknologi di Bursel
	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	123.Penyediaan perangkat dan instrumen sumber air baku untuk menjamin penyediaan air minum bagi	123.Peningkatan kualitas sumber air baku untuk meningkatkan dan menjamin penyediaan air minum bagi	123.Perkuatan kualitas sumber air baku guna menjamin penyediaan air minum bagi masyarakat	123.Keberlanjutan sumber air baku dan menjamin penyediaan air minum bagi masyarakat secara luas dan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		masyarakat dan kebutuhan kegiatan ekonomi lainnya.	masyarakat dan kebutuhan kegiatan ekonomi lainnya.	secara luas dan kebutuhan kegiatan ekonomi lainnya	kebutuhan kegiatan ekonomi lainnya di Bursel
	b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	124.Penyiapan perangkat dan instrumen untuk membangun tampungan air serba-guna pada wilayah yang sulit air yang memberikan manfaat secara cepat bagi Masyarakat dan kebutuhan komersil lainnya	124.Percepatan penyediaan tampungan air serba-guna pada wilayah yang sulit air yang memberikan manfaat bagi Masyarakat dan kebutuhan komersil lainnya,	124.Perluasan penyediaan tampungan air serba-guna pada semua wilayah yang sulit air yang memberikan manfaat secara cepat bagi Masyarakat dan kebutuhan komersil lainnya, secara berkelanjutan	124.Kebijakan penyediaan tampungan air serba-guna pada semua wilayah yang sulit air yang memberikan manfaat secara cepat bagi Masyarakat dan kebutuhan komersil lainnya,
	c. Ketahanan Air	125.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui penyiapan perangkat dan instrumen perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan.	125.Peningkatan dan percepatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta percepatan kawasan sentra produksi pangan.	125.Perkuatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui keberlanjutan perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta perluasan kawasan sentra produksi pangan.	125.Perwujudan dan keberlanjutan kemandirian pangan dan ketahanan air di Bursel
	- Kapasitas Air ³ Baku (m /detik)	126.Penyiapan perangkat dan instrumen peningkatan ketahanan pangan lokal melalui penyiapan perangkat dan instrumen pencegahan alih fungsi lahan dan pengembangan kegiatan produksi di lahan LP2B, seperti jagung, palawija, umbi-umbian, sagu, pisang, sayuran dan ternak sekaligus	126.Peningkatan kualitas ketahanan pangan lokal melalui percepatan pencegahan alih fungsi lahan dan pengembangan kegiatan produksi di lahan LP2B, seperti jagung, palawija, umbi-umbian, sagu, pisang, sayuran dan ternak sekaligus	126.Penguatan kualitas ketahanan pangan lokal melalui perluasan pencegahan alih fungsi lahan dan percepatan pengembangan kegiatan produksi di lahan LP2B, seperti jagung, palawija, umbi-umbian, sagu, pisang, sayuran dan ternak sekaligus	126.Perwujudan ketahanan pangan lokal melalui keberlanjutan industri pangan lokal komposit yang fungsional di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		umbian, sagu, pisang, sayuran dan ternak sekaligus mendukung pengembangan industri pangan lokal komposit yang fungsional. Selain itu penyiapan perangkat dan instrumen regulasi dan kegiatan diversifikasi konsumsi pangan lokal.	mendukung pengembangan industri pangan lokal komposit yang fungsional. Selain itu implementasi regulasi dan kegiatan diversifikasi konsumsi pangan lokal.	mendukung percepatan pengembangan industri pangan lokal komposit yang fungsional.	
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)				
	44. Indeks Risiko Bencana	127.Penyiapan perangkat dan instrumen Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi)	127.Percepatan implementasi Strategi adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) melalui peningkatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), dan tata kelola risiko;	127. Perkuatan dan perluasan implementasi adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) melalui penguatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), dan tata kelola risiko secara berkelanjutan	127.Perwujudan dan keberlanjutan adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) berbasis tata kelola risiko di Bursel



	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	128. Penyiapan perangkat dan instrumen sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif	128. Peningkatan kualitas pengelolaan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui	128. Perkuatan pengelolaan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui percepatan penerapan	128. Perwujudan dan keberlanjutan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu
--	---	---	--	--	---



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
			penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;	teknologi yang andal dan terintegrasi;	dan inklusif serta terintegrasi di IT
	a. Kumulatif	129.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan Climate Smart Agriculture, pertanian, konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	129.Implementasi kebijakan Climate Smart Agriculture, pertanian, konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	129.Perkuatan dan perluasan implementasi Climate Smart Agriculture, pertanian, konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	129.Perwujudan dan keberlanjutan penerapan Climate Smart Agriculture, pertanian, konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
	b. Tahunan				
		130.Penyiapan perangkat dan instrumen pengembangan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah	130.Peningkatan kualitas dan Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan;	130.Perluasan dan perkuatan kualitas jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk penguatan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan;	130.Keberkelanjutan kualitas jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh Bursel untuk penguatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan
		131.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem;	131.Peningkatan kualitas kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem;	131.Penguatan kualitas dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem;	131.Perwujudan dan keberlanjutan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Bursel
		132.Penyiapan perangkat dan instrumen Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;	132.Peningkatan kualitas RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;	132.Perkuatan kualitas RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;	132.Keberkelanjutan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		133.Penyiapan perangkat dan instrumen pelaksanaan reforma agraria;	133.Peningkatan kualitas dan percepatan pelaksanaan reforma agraria;	133.Percepatan dan penguatan kualitas pelaksanaan reforma agraria;	133.Perwujudan dan keberlanjutan pelaksanaan reforma agraria di Bursel
		134.Penyiapan perangkat dan instrumen pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui penyiapan perangkat dan instrumen pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk perangkat dan instrumen pemanfaatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah Buru Selatan;	134.Peningkatan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah Buru Selatan;	134.Perluasan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui penguatan infrastruktur yang ada, termasuk penguatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah Buru Selatan;	134.Perwujudan dan keberlanjutan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi di Bursel
		135. Penyiapan perangkat dan instrumen Konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global,	135.Peningkatan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung peningkatan daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Buru Selatan;	135.Perluasan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Buru Selatan;	135.Perwujudan dan keberlanjutan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, di Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		136.Penyiapan perangkat infrastruktur dan energi yang terintegrasi, dan berkualitas	136.Peningkatan kualitas infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas di wilayah Buru Selatan dengan dukungan kualitas tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas;	136.Penguatan kualitas dan perluasan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Buru Selatan dengan penguatan kualitas tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas;	136.Mewujudkan dan keberlanjutan ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Buru Selatan
		137.Penyiapan perangkat dan instrumen pemenuhan akses pelayanan dasar di seluruh wilayah Buru Selatan;	137.Peningkatan dan percepatan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Buru Selatan;	137.Perkuatan dan perluasan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Buru Selatan;	137.Perwujudan dan keberlanjutan pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Buru Selatan;
		138.Penyiapan perangkat dan instrumen Peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat serta pembangunan wilayah melalui persiapan pemekaran dan pembentukan desa/negeri, kecamatan/kabupaten	138.Percepatan layanan pemerintah kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah melalui pemekaran dan pembentukan desa/negeri, kecamatan/kabupaten	138.Penguatan dan perluasan layanan pemerintah kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah melalui pemekaran dan pembentukan desa/negeri, kecamatan/kabupaten	138.Perwujudan dan keberlanjutan layanan pemerintah kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah melalui pemekaran dan pembentukan desa/negeri, kecamatan/kabupaten
		139.Penyiapan perangkat dan instrumen konektivitas intrapulau dan	139.Peningkatan dan percepatan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan,	139.Perkuatan dan perluasan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan, antarwilayah	139.Perwujudan dan keberlanjutan konektivitas intrapulau dan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		intrakepulauan, antarwilayah Buru Selatan, dan antarwilayah Buru Selatan dengan wilayah lain melalui penyiapan perangkat dan instrumen pembangunan pelabuhan transit hub domestic,	antarwilayah Buru Selatan, dan antarwilayah Buru Selatan dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestic, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, sesuai kondisi geografis mendukung pariwisata di Buru Selatan, serta layanan penerbangan dari dan ke Namrole sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	Buru Selatan, dan antarwilayah Buru Selatan dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestic, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, sesuai kondisi geografis mendukung pariwisata di Buru Selatan, serta layanan penerbangan dari dan ke Namrole sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	intrakepulauan, antarwilayah Buru Selatan, dan antarwilayah Buru Selatan dengan wilayah lain
		140.Penyiapan perangkat dan instrumen Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	140.Peningkatan dan percepatan Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	140.Perkuatan dan perluasan pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	140.Kebertahanan Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
		141.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui penyiapan perangkat dan instrumen pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda	141.Percepatan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	141.Perluasan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	141.Perwujudan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah Bursel



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		untuk menjangkau seluruh daerah.			
		142.Penyediaan perangkat dan instrumen koridor konektivitas lingkaran Buru Selatan yang menghubungkan desa-desa pesisir dan menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah (jalan lingkaran Pulau Ambalau, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil)) sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	142.Peningkatan dan peningkatan kualitas Penyediaan koridor konektivitas lingkaran Buru Selatan yang menghubungkan desa-desa pesisir dan menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah (jalan lingkaran Pulau Ambalau, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil)) sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	142.Perkuatan dan perluasan koridor konektivitas lingkaran Buru Selatan yang menghubungkan desa-desa pesisir dan menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah (jalan lingkaran Pulau Ambalau, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil)) sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	142.Perwujudan koridor konektivitas lingkaran Buru Selatan yang menghubungkan desa-desa pesisir dan menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah (jalan lingkaran Pulau Ambalau, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil)) sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.
		143.Penyediaan perangkat dan instrumen Kebijakan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Namrole dalam melayani mobilitas penumpang	143.Implementasi dan peningkatan transportasi perkotaan termasuk peningkatan kualitas sistem angkutan umum massal perkotaan di Namrole yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang	143.Perluasan transportasi perkotaan termasuk penguatan sistem angkutan umum massal perkotaan di Namrole yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang	143.Perwujudan dan keberlanjutan transportasi perkotaan berbasis sistem angkutan umum massal perkotaan di Namrole yang andal dan modern serta berkelanjutan dalam melayani mobilitas penumpang



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		144.Penyiapan perangkat dan instrumen Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim	144.Percepatan Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim	144.Perkuatan Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim	144.Perwujudan Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
		145.Penyiapan perangkat dan instrumen kebijakan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, dan terjangkau,	145. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, dan terjangkau,	145.Perluasan Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan	145.Keberkelanjutan Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan
		146.Penyiapan perangkat dan instrumen akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, Buru Selatan	146.Peningkatan dan percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, Buru Selatan	146.Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, Buru Selatan	146.Keberkelanjutan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, Buru Selatan
		147.Penyiapan perangkat dan instrumen kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan	147.Peningkatan dan percepatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan	147.Penguatan dan perluasan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan	147.Mewujudkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan
		148.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka	148.Peningkatan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan	148.Perkuatan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan	148.Perwujudan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		penegakan standar keandalan bangunan			
		149.Penyediaan perangkat dan instrumen perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis,	149.Peningkatan kualitas perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis,	149.Perkuatan dan perluasan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis,	149.Perwujudan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, di Bursel.
		150.Penyiapan perangkat dan instrumen Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.	150.Peningkatan kualitas dan percepatan akses air minum serta sanitasi aman, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.	150.Perkuatan kualitas dan perluasan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.	150.Perwujudan dan keberlanjutan akses air minum serta sanitasi aman, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan di Bursel
		151.Penyediaan perangkat dan instrumen air siap minum melalui penyiapan perangkat dan instrumen jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	151.Peningkatan kualitas dan percepatan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	151.Perluasan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan penguatan kualitas akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan	151.Perwujudan dan keberlanjutan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan di Bursel
		152.Penyiapan perangkat dan instrumen pengawasan kualitas air minum	152.Peningkatan kualitas pengawasan kualitas air minum	152.Perkuatan kualitas pengawasan kualitas air minum	152.Kebijakan berkelanjutan pengawasan kualitas air minum di Bursel
		153.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah	153.Peningkatan pengetahuan dan implementasi teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah	153.Perluasan implementasi teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah	153.Kebijakan berkelanjutan pemanfaatan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah



Misi	Indikator Utama Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah			
		Tahap I 2025-2029 Penguatan Prioritas Dan Fokus Pondasi Transformasi	Tahap II 2030-2034 Percepatan Dan Peningkatan Kualitas Transformasi	Tahap III 2035-2039 Penguatan Dan Perluasan Daya Saing Di Daerah, Nasional Dan Global	Tahap IV 2040-2045 Perwujudan Buru Selatan Maju, Mandiri dan Berkelanjutan
		154.Persiapan perangkat dan instrumen lembaga pelaksana penyelenggara SPAM	154.Peningkatan kualitas tata kelola lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	154.Perkuatan kualitas tata kelola lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal serta berkelanjutan	154.Perwujudan dan Keberlanjutan tata kelola lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal di Bursel
		155.Penyiapan perangkat dan instrumen Pengelolaan sampah terpadu di Buru Selatan	155.Peningkatan kualitas dan percepatan Pengelolaan sampah terpadu di Buru Selatan untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).	155.Perkuatan kualitas dan perluasan Pengelolaan sampah terpadu di Buru Selatan untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).	155.Perwujudan dan keberlanjutan Pengelolaan sampah terpadu di Buru Selatan untuk mencapai minimasi residu di Bursel



Lampiran 2. Keterkaitan Misi, Arah Pembangunan Daerah, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan Indikator Utama Pembangunan Buru Selatan 2025-2045

Misi 1: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, melalui peningkatan SDM tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan serta sarana prasarana secara komprehensif

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP1. Kesehatan berkualitas, merata dan adaptif	1.Perluasan upaya promotive-preventif & pembudayaan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit menular lainnya	SP1.Mantapnya layanan kesehatan yang profesional, inklusif, merata dan berkelanjutan	1.Umur Harapan Hidup (UHH) (Thn)	67,84	68,59	69,34	70,09
	2.Peningkatan akses pelayanan Kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan mobile yang sinergi dengan moda transportasi lainnya, penguatan telemedicine serta system sister hospital dengan RS daerah atau di wilayah lain.		2.Kesehatan ibu dan anak				
	3.Perluasan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM kesehatan yang profesional secara merata dan terjangkau, pengembangan rumah sakit daerah ke tipe B dan peningkatan kualitas layanan puskesmas.		d) Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)	7	4	2	0



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	4.Pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.		e) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita (%))	12,63	7,86	4,89	3,04
	5.Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan afirmasi 3T.		3.Penanganan Tuberkulosis:				
	6.Pendampingan daerah kecamatan dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.		g) Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)	100	100	100	100
	7.Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.		h) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate (%))	74,65	85,61	98,18	100



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	8.Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan Kesehatan.		4.Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100	100	100	100
	9.Penguatan layanan kesehatan berciri kepulauan yang berkualitas, inklusif dan terjangkau						
	10.Penyelenggaraan layanan kesehatan prima dan inklusif secara berkelanjutan						
AP2. Pendidikan berkualitas, merata dan mudah diakses	11.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	SP2. SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif	5.Hasil Pembelajaran				
	12.Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru,		2) Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi pada asesmen Tingkat nasional untuk:				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	dan penguatan sekolah terbuka.						
	13.Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri, perkebunan/pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI.		e. Literasi membaca	24,23 - 26,23	39,38 - 41,38	54,52 - 56,52	69,66 - 71,66
	14.Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, peningkatan proporsi guru bersertifikat dan berkualifikasi Strata-2 serta peningkatan kapasitas pemuda dan keikutsertaan dalam pembangunan daerah		f. Numerasi	15,38 -17,38	30,75 - 32,75	46,13 - 48,13	61,50 - 63,50
	15.Peningkatan akses dan kualitas sekolah kejuruan/pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam unggulan melalui kemitraan kolaboratif dengan perguruan tinggi atau swasta (perusahaan).		g. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	9,00	9,61	10,23	10,85
	16.Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh desa terpencil.		h. Harapan lama sekolah	13,04	13,19	13,34	13,48



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			4) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen Tingkat nasional untuk:				
	17.Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antar pulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan pendidikan.		a. Literasi membaca	27,26 - 29,26	38,23 - 40,23	49,19 - 51,19	60,15 - 62,15
	18.Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis SDA unggulan Daerah melalui pengkayaan kurikulum berbasis muatan lokal		b. Numerasi	22,06 - 24,06	33,55 - 35,55	45,05 - 47,05	56,54 - 58,54
	19.Penguatan layanan pendidikan kepulauan berkualitas dan berdaya saing yang adaptif dan terintegrasi		6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	15,19	15,44	15,69	14,94 - 16,94
	20.Penyelenggaraan pendidikan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yang menghasilkan SDM Buru Selatan melek teknologi, kompetitif, inovatif dan produktif		7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	63,05	67,03	71,02	75,00



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP3. Perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif	21. Perlindungan sosial terintegrasi dan adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.	SP3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buru Selatan mendekati nol (0) persen	8. Tingkat Kemiskinan (%)	11,94	9,98	8,19	6,45-5,00
	22. Pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penajaman sasaran implementasi pada berbagai jenjang pemerintahan (desa sampai ke pusat) didukung kegiatan pengupdetan yang rutin dalam penanggulangan kemiskinan		9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,59	53,81	68,04	82,26
	23. Pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas; penguatan akses dan layanan legal identity bagi masyarakat miskin		10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	21	29	37	45
	24. Penguatan komitmen pemerintah untuk pemenuhan SPM sosial melalui implementasi perencanaan dan penganggaran program dari						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	APBD serta APBDes yang inklusif untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, termasuk perubahan iklim.						
	25.Penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.						
	26.Membangun dan mengembangkan kelembagaan layanan sosial satu pintu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten untuk memudahkan masyarakat miskin, disabilitas dan lansia mengakses multi layanan sosial yang disiapkan pemerintah dan stakeholder terkait.						
	27.Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara berjenjang oleh kelembagaan TKPD						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	28.Dukungan pembiayaan pendidikan sarjana untuk masyarakat miskin dalam rangka mengelola dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di wilayahnya.						
	29.Pengembangan inovasi perlindungan sosial dan Pengembangan sosial entrepreneur di tingkat desa/kelurahan untuk mengelola SDA dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.						
	30.Pembinaan dan pengembangan masyarakat KAT, meliputi pemukiman, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi,						



M2.Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah melalui pembentukan pusat pengembangan produksi yang memanfaatkan potensi unggulan perikanan dan pertanian (*agromarine*) yang berkelanjutan

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP4. Pemanfaatan Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi	31.Hilirisasi melalui pengembangan sentra industri komoditi unggulan perkebunan terpadu (kelapa, cengkeh dan pala) hasil perikanan (ikan & rumput laut) dan komoditi pertanian lokal (umbian dan hotong) yang didukung hasil riset, inovasi dan teknologi (science and technopark) di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdesaan.	SP4. Struktur ekonomi Buru Selatan berubah secara gradual dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier yang mendorong peningkatan pendapatan daerah menuju kelas menengah atas (<i>Upper Middle Income</i>) di Tahun 2045	11.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,45	6,89	8,72	11,56
	32.Pengembangan lahan sawah transmigrasi dengan pola campuran dan pemanfaatan lahan LP2B sebagai sentra untuk pengembangan komoditi padi, palawija (jagung dan lainnya), hortikultura dan umbi-umbian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%)				
	33.Penguatan investasi dari hilirisasi komoditi unggulan dengan dukungan teknologi dan penjaminan mutu yang berbasis AI dan IoT serta digitalisasi data (Data Twin)		12.Pengembangan Pariwisata				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	untuk memenuhi kebutuhan mutu produk dari negara tujuan pasar.						
	34.Pembangunan akses jalan dan sarana prasarana pendukung di wilayah destinasi/desa/kawasan pariwisata serta penguatan atraksi seni budaya untuk meningkatkan pesona pariwisata desa/Kawasan perdesaan.		e. Kontribusi PDRB Penyediaan Makan dan Minum (%)	0,61	0,75	0,92	1,18
	35.Pembangunan akses jalan lingkar Buru Selatan yang terhubung dengan akses jalan lingkar Kabupaten Buru.		f. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*				
	36.Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, pariwisata dan jasa dengan dukungan atmosfir yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas riset dan inovasi, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau dan digitalisasi.		g. Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)				
	37.Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian antara lain pengembangan kawasan		h. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	0,49	1,18	2,87	8,32



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	utama produsen perikanan secara berkelanjutan.						
	38.Peningkatan kontribusi dan daya saing kualitas produk sektor-sektor unggulan dan rantai pasok serta komersialisasi produk di sektor-sektor baru (<i>agromarine based sectors</i>), pengembangan SDM berdaya saing global menuju ekonomi kompetitif yang terhubung dengan rantai nilai global. Tumbuhnya industri bio farmasi berbahan baku potensi SDA lokal		13.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)				
	39.Pembangunan dan pengembangan sarana pelabuhan udara dan laut mendukung pengembangan produksi dan hasil produk hilirisasi komoditi perkebunan/pertanian, perikanan dan pembangunan sektor pariwisata serta sektor pertambangan.		14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
	40.Kajian dan penyiapan data potensi pertambangan mineral logam, non logam dan batuan.		f. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	41.Pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) melalui pengembangan kawasan pariwisata premium (premium tourism), pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), serta seni pahat dan ukir kayu melalui penguatan strategi paran serta peningkatan kapasitas pengelola dan masyarakat pelaku usaha.		g. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)				
	42.Pengembangan kawasan wisata Tifu sebagai pintu masuk jalur laut dan darat yang terintegrasi serta terkoneksi dengan Kawasan wisata Negeri Diatas Awan Fena Fafan dan wisata Kepulauan Banda sebagai Taman Bumi (Geopark) dan Living Museum.		h. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)				
	43.Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan blue dan green economy, digitalisasi dan kemajuan teknologi.		i. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	44.Peningkatan produktivitas, mutu serta kesejahteraan petani dan nelayan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau; peningkatan produktivitas dan mutu produk IKM dan UMKM serta menjamin keterkaitannya dengan rantai nilai industri domestik dan global, melalui digitalisasi data dan peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan paran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		j. Return on Asset (ROA) BUMD (%)				
	45.Penguatan hilirisasi usaha koperasi untuk komoditas unggulan daerah melalui penguatan proses bisnis, kelembagaan, permodalan dan adopsi teknologi; Membangun kerjasama lembaga ekonomi desa (BUMDes, Koperasi), kelompok usaha masyarakat (UMKM/IKM), perbankan dengan investor dalam bidang usaha komoditi unggulan daerah		15.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,53	4,68	3,73	3,08



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	46.Pembentukan dan pengembangan BUMD untuk usaha produksi air mineral dan minuman fungsional drink dari bahan baku air kelapa, tanaman biofarka dan lainnya untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pariwisata.		b. Persentase Tenaga Kerja sektor Kelautan dan Perikanan (%)				
	47.Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.		16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				
	48.Penguatan SDM Buru Selatan yang profesional dan adaptif sesuai permintaan pasar kerja nasional & internasional		17.Tingkat Penguasaan IPTEK				
	49.Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi kegiatan dan hasil-hasil hilirisasi dari berbagai industri.		c. Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif (16.44)	Kurang Inovatif (19.14)	Kurang Inovatif (22.27)	Inovatif (>40.85)
	50.Penguatan ekosistem pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi unggulan untuk mendukung percepatan dan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.		d. Indeks Inovasi dan Riset Maritim	43,26	54,87	66,48	80,42



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP5. Melaksanakan pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau	51.Pemanfaatan energi terbarukan yang terdapat di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik atau energi bagi masyarakat, baik melalui pemanfaat energi surya, angin, hidroelektrik dan lainnya,	SP5. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tetap menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045	18.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
	52.Penggunaan transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,75	75,54	80,33	85,12
	53.Pengelolaan limbah & daur ulang sampah menggunakan pendekatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle)		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,15	45,00	53,84	62,69
	54.Pengembangan pertanian dan pangan berkelanjutan melalui peningkatan produksi dengan menggunakan pupuk organik, pengendalian hama secara terpadu, diversifikasi tanaman, pengembangan pertanian organik dan Sistem pangan lokal dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan mengurangi						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	ketergantungan pada impor pangan.						
	55.Penguatan kesadaran dan pendidikan lingkungan pada masyarakat dan berbagai stakeholder melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi pencegahan serta perbaikan kerusakan lingkungan.						
AP6. Transformasi digital	56.Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok daerah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (perkebunan, perikanan, pariwisata) melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan	SP6. Terwujudnya ekosistem digital di seluruh sektor di wilayah Buru Selatan tahun 2045	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).						
	57.Inklusi Digital, yaitu membuktikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil (KAT) dan meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan digital untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi.						
AP7. Integrasi ekonomi domestik dan global	58.Fasilitasi dan melaksanakan kegiatan nasional berupa pembangunan kawasan industri dan sentra perikanan tuna didukung beroperasinya Pusat	SP7. Meningkatnya integrasi ekonomi di tingkat domestik dan global	20.Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	7,70	6,87	6,04	5,21



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penelitian Perikanan dan Industri Kapal (<i>Maritime Science Technopark</i>),						
	59.Peningkatan konektivitas antarkawasan pertumbuhan ekonomi secara terintegrasi.		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi*)	0,13	0,12	0,10	0,09
	60.Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sesuai dengan potensi wilayah dan keunggulan daerah Buru Selatan.		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	51,22	51,98	52,74	53,52
	61.Penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Leksula, Kawasan Strategis lainnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif.		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,78	14,83	15,97	17,19
	62.Penguatan logistik daerah melalui peran kelembagaan yang berbasis pemanfaatan teknologi digital.						
	63.Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	konektivitas antarwilayah lebih terintegrasi penguatan keterkaitan nilai tambah.						
	64.Peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antarwilayah dan daerah untuk meningkatkan peran dan partisipasi dalam rantai pasok nasional dan global.						
	65.Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional dengan Asia Timur, Pasifik, dan Australia.						
	66.Peningkatan perdagangan produk unggulan, baik volume dan nilai ekspor maupun didalam negeri						
AP8. Mengembangkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	67.Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan eksisting/yang telah ada melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal; peningkatan investasi dan pengembangan kota-kota pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya	SP8. Berkembangnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah terwujudnya kota dan desa yang maju, inklusif dan berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	dukong dan daya tampung sebagai pusat pertumbuhan wilayah;						
	68.Penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan dibangun dengan meningkatkan keterkaitan infrastruktur transportasi (lingkar Buru Selatan/Ring Road). dan konektivitas digital antar kota dengan kabupaten sekitarnya, antar kota dengan desa maupun kota dengan hub regional lainnya, mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta mendorong pengembangan agro-marine yang inovatif dan kreatif berbasis digital		f. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi				
	69.Pengembangan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal tanaman pangan (LP2B), perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pariwisata (keanekaragaman hayati dan kearifan lokal serta norma adat yang potensial dalam pembangunan berkelanjutan) untuk mendukung pemanfaatan		g. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	potensi sumberdaya alam sekaligus menopang rantai pasok industri dan ekonomi kreatif yang inovatif untuk meningkatkan nilai tambah produk.						
			23.1. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) (Sumber IDM)	0,49	0,55	0,62	0,68
			23.2. Rumahtangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98,82	100	100	100
			23.3. Persentase Desa Mandiri (%)	3,70	4,94	8,64	12,35



M3.Mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP9. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas, responsive dan adaptif	70.Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	SP9. Regulasi adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, responsif, adaptif dan kolaboratif di Buru Selatan tahun 2045	24. Indeks Reformasi Hukum	Buruk (C)/45,15	Cukup (CC)/51,65	Cukup (CC)/58,15	Cukup Baik (B)/64,65
	71.Percepatan digitalisasi layanan publik (sistem layanan publik self service) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kurang (1,59)	Kurang (1,84)	Cukup (2,28)	Baik (3,03)
	72.Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.		26.Indeks Pelayanan Publik	Cukup (C)	Baik(DC) (B-)	Baik (B)	Sangat Baik (A-)
	73.Pengembangan smart government; pembangunan smart branding; smart society; smart living serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN,		27. Indeks Integritas Nasional	73,79	77,59	81,59	85,80



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	dan pengelolaan aset daerah.						
	74.Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah.						
	75.Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.						
	76.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.						
	77.Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya.						
	78.Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user; peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengendalian pembangunan						
	79.Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.						
	80.Penguatan integritas partai politik.						
	81.Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan masyarakat, pembangunan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.						
	82.Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	SP10. Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang inovatif di Buru Selatan di Tahun 2045					
	83.Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.						
	84.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.						
	85.Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	86.Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.						
	87.Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.						



M4. Membangun ketahanan budaya, adat dan nilai-nilai kearifan lokal serta stabilitas sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP10. Hukum berkeadilan, ketahanan dan keamanan daerah tangguh serta demokrasi substansial	88.Penguatan peran Kabupaten Buru Selatan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan dan pendidikan	SP11. Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkapasitas, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia di Buru Selatan tahun 2045	28. Indeks Pembangunan Hukum	45,15	51,65	58,15	64,65
	89.Peningkatan keamanan wilayah berbasis modal sosial dan kearifan lokal		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69,28	73,62	77,97	82,31
	90.Penguatan kelembagaan demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan yang berlaku		30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	91.Peningkatan peran dan respon partai politik, lembaga perwakilan, serta media dan pers agar lebih akuntabel dan berkualitas						
	92.Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam Masyarakat						
	93.Peningkatan pemahaman internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	94.Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas						
	95.Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat						
	96.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, diantaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil serta kebijakan fasilitasi dana abadi untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial						
AP11. Menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah	97.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru, peningkatan kualitas	SP12. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan, dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional yang transparan						
	98.Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan peran TPID		32. Tingkat Inflasi	2,09	1,33	0,84	0,53
			33. Pendalaman / Intermediasi Sektor Keuangan				
			e. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	0,07	0,09	0,13	0,16
			f. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)				
			g. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan				
			h. Total Kredit/PDRB (%)	0,76	1,01	1,34	1,77
			34. Inklusi Keuangan (%)	27,04	35,75	47,27	62,50



AP12. Ketangguhan diplomasi	99.Penguatan Diplomasi Daerah melalui peningkatan kapasitas diplomatik daerah melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan diplomatik bagi pejabat pemerintahan setempat dan mendorong	SP13. Ketangguhan Diplomasi Daerah dan Penyelesaian gangguan trantibun meningkat di Buru Selatan Tahun 2045	35. Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi (%)*)	52.55	58.05	67.39	82.23
------------------------------------	--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	kerja sama dengan berbagai pelaku usaha dalam mempercepat pembangunan daerah						
	100. Pengelolaan Konflik dan Krisis Secara Efektif melalui pembangunan kapasitas untuk menangani konflik dan krisis di tingkat daerah dengan pendekatan dialog dan mediasi, menyusun rencana tanggap darurat yang terkoordinasi untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap trantibun.		36. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%) ^{*)}	100	100	100	100
	101. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal		36.1. Indeks Pembangunan Hukum	45,15	51,65	58,15	64,65
			36.2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69,05	73,39	77,74	82,08
			36.3. Indeks Demokrasi Indonesia	80,67	85,58	90,49	95,4



AP13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	102.Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	SP14. Menguatnya peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan Buru Selatan tahun 2045	37. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,93	79,38	81,73	83,93
--	--	--	------------------------------------	-------	-------	-------	-------



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	103. Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah						
	104. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.						
	105. Penguatan kemitraan kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan						
	106. Pengembangan dan penguatan kebudayaan, serta pengembangan bahasa daerah dan sastra;	SP15. Maju dan lestari nya kebudayaan untuk memperkuat karakter, jati diri masyarakat Buru Selatan, meningkat nya kesejahteraan rakyat	38. Indeks Pembangunan Kebudayaan	69,39	77,83	86,28	94,73
	107. Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;						
	108. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	mendorong produktivitas dan kesejahteraan; dan						
	109.Penguatan budaya bahari dan kemaritiman antara lain dengan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.						
AP14. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	110.Penguatan pondasi tatanan keluarga berkualitas yang didukung peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang inklusif berkarakter wilayah pesisir, pegunungan, kepulauan, serta peningkatan kualitas lingkungan yang maju dan tangguh	SP16. Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender di Buru Selatan Tahun 2045	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,24	80,51	90,77	100
	111.Peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ekonomi tangguh berbasis keluarga sesuai karakter wilayah pesisir, pegunungan kepulauan secara berkelanjutan		40.1. Indeks Ketimpangan Gender	0,55 0,3*	0,52 0,2*	0,49 0,13*	0,46 0,08*
	112.Peningkatan SDM dalam mewujudkan sinkronisasi tata kelola terintegrasi dalam		40.2. Indeks Pembangunan Gender	0,957	0,977	1	1



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	menciptakan keluarga maju, mandiri dan tangguh berbasis wilayah pesisir, pegunungan dan kepulauan						
	113.Meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III berbasis gender dalam mewujudkan kualitas keluarga yang tangguh dan mandiri						
	114.Digitalisasi layanan keluarga dan Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga						
	115.Peningkatan kerjasama lintas sektor/berbagai pihak (adat, perguruan tinggi, CSR) dalam mewujudkan keluarga maju dan berkualitas sesuai karakter budaya dan potensi lokal wilayah						
	116.Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan keluarga di tingkat desa/kecamatan yang terintegrasi, maju mandiri dan berkelanjutan						





M5.Membangun ketahanan ekologis, sarana prasarana infrastruktur layanan dasar, wilayah dan konektivitas perhubungan yang berkualitas dan ramah lingkungan

Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AP15. Lingkungan hidup berkualitas	117.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha; serta pembangunan tempat dan sistem pengelolaan sampah terpadu	SP17. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Buru Selatan tahun 2045	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
	118.Penguatan pencegahan kegiatan ilegal dari penggunaan sumber daya alam (logging, fishing, wildlife trade, mining, dumping);		a. Persentase Kawasan Konservasi Laut terhadap Wilayah Kelola Laut (%)	2,5	5	7,5	10
	119.Pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air		42. Kualitas Lingkungan Hidup				
	120.peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi		d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah				
	121.Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana.		e. Rumah Tangga dengan Akses sanitasi Aman				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	122. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi.		f. Pengelolaan Sampah				
			▪ Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)				
			▪ Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah di kab/kota (%)				
			▪ Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)				
			42.1 Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Sumber IDM)	1	1	1	1
AP16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	123. Kajian dan penyiapan data potensi EBT di daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama di desa terpencil.	SP18. Terwujudnya Buru Selatan yang memiliki ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di tahun 2045	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan				
			f. Ketahanan Energi				



	124.Melaksanakan kegiatan konservasi sumber air yang dikelola secara terintegrasi dan		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	2078	2456	2876	3225
--	---	--	-------------------------------------	------	------	------	------



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	perlu diperkuat pelaksanaannya dengan menerapkan system Smart Teknologi.						
	125.Penyediaan sumber air baku untuk meningkatkan dan menjamin penyediaan air minum bagi masyarakat dan kebutuhan kegiatan ekonomi lainnya.		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	212,25	191,50	170,75	150
	126.Membangun tampungan air serba-guna pada wilayah yang sulit air yang memberikan manfaat secara cepat bagi Masyarakat dan kebutuhan komersil lainnya, seperti di tempat pariwisata.		d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	22,05	22,05	22,05	22,05
	127.Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air, riset dan inovasi sistem, dan teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan.		e. Ketahanan Air				
	128.Meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui pencegahan alih fungsi lahan dan pengembangan kegiatan		- Kapasitas Air Baku ₃ (m ³ /detik)				



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	produksi di lahan LP2B, seperti jagung, palawija, umbi-umbian, sagu, pisang, sayuran dan ternak sekaligus mendukung pengembangan industri pangan lokal komposit yang fungsional. Selain itu mendorong dukungan regulasi dan kegiatan diversifikasi konsumsi pangan lokal.						
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	90,73	93,82	96,91	100
AP17. Resiliensi (memiliki ketahanan) terhadap bencana dan perubahan iklim	129.Strategi khusus untuk adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), dan tata kelola risiko;	SP19. Daerah yang berketahanan iklim dan bencana secara berkelanjutan di Buru Selatan pada tahun 2045	44. Indeks Risiko Bencana	144,48	133,75	123,03	112,305
	130.Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;		45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	100	100	100	100



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	131.Penerapan Climate Smart Agriculture, pertanian, konservasi, dan pertanian regeneratif di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		a. Kumulatif	100	100	100	100
			b. Tahunan	100	100	100	100
	132.Perluasan jaringan internet dan komunikasi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor unggulan;	SP20. Pemerataan pembangunan antar wilayah di Buru Selatan meningkat pada Tahun 2045					
	133.Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem;						
	134.Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut;						
	135.Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;						
	136.Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui pemanfaatan infrastruktur						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	yang ada, termasuk pemanfaatan ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah Buru Selatan;						
	137.Peningkatan konektivitas berkualitas internasional untuk mendukung daya saing daerah yang terhubung dengan rantai nilai nasional dan global, terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Buru Selatan;						
	138.Memperkokoh ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Buru Selatan dengan dukungan tata Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas;						
	139.Pemantapan pemenuhan akses dan						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	kualitas pelayanan dasar secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Buru Selatan;						
	140.Penguatan dan perluasan layanan pemerintah kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah melalui pemekaran dan pembentukan desa/negeri, kecamatan/kabupaten						
	141.Peningkatan konektivitas intrapulau dan intrakepulauan, antarwilayah Buru Selatan, dan antarwilayah Buru Selatan dengan wilayah lain melalui pembangunan pelabuhan transit hub domestic, pengembangan konektivitas feeder angkutan laut, sesuai kondisi geografis mendukung pariwisata di Buru Selatan, serta layanan penerbangan dari dan ke Namrole sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.	SP21. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan					



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	142.Pemanfaatan ALKI III, III B, dan III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.						
	143.Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh daerah.						
	144.Penyediaan koridor konektivitas lingkaran Buru Selatan yang menghubungkan desa-desa pesisir dan menghubungkan Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan daerah (jalan lingkaran Pulau Ambalau, pembukaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah kawasan adat terpencil) sebagai bagian transportasi multimoda						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	untuk menjangkau seluruh daerah.						
	145.Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Namrole yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang						
	146.Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim						
	147.Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan						
	148.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah Buru Selatan						
	149.Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	150.Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan						
	151.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.						
	152.Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.						
	153.Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan						
	154.Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum						
	155.Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah						



Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	156.Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.						
	157.Pengelolaan sampah terpadu di Buru Selatan untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang) 10 persen residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan 100 persen sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal 35 persen melalui daur ulang).						